

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016	I-3
1.3. Hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya	I-5
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I-7
1.5. Maksud dan Tujuan	I-9
BAB II Evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.....	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-11
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II-13
2.1.1.4. Demografi.....	II-16
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-20
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-20
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-33
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-40
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II-40
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-73
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-90
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-90
2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi	II-91
2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-93
2.1.5. Ekonomi dan Keuangan Daerah	II-101
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD	II-102
2.2.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2014.....	II-102
2.2.2. Review Capaian Kinerja terhadap RPJMD.....	II-108
2.2.3. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi	II-119
2.2.4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	II-121
2.3. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah	II-334
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Capaian Tahun 2015	III-3
3.1.2. Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	III-15
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-21

3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-22
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-25
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-31
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.	Sasaran Pokok Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara	IV-1
4.2.	Prinsip Dasar Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016	IV-2
4.3.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-3
4.4.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-11
4.5.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	IV-19
4.6.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	IV-21
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....	V-1
5.1.	Sasaran dan Target Kinerja Pembangunan	V-1
5.2.	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	V-15
5.3.	Pagu Indikatif untuk Tiap SKPD	V-15
5.4.	Kaidah Pelaksanaan	V-18
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	II-1
Tabel 2.2. Potensi Minyak Bumi Tahun 2014	II-5
Tabel 2.3. Potensi Gas Bumi Tahun 2014	II-5
Tabel 2.4. Potensi Bahan Galian Unggulan di Provinsi Sumatera Utara.....	II-6
Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan Penduduk per Provinsi di Indonesia 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025.....	II-18
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013.....	II-19
Tabel 2.7. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional.....	II-20
Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara per sektoral ADHK dan Sisi produksi Tahun 2010-2014	II-22
Tabel 2.9. Struktur PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014	II-23
Tabel 2.10. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010-2014 ADHK Tahun 2000..	II-24
Tabel 2.11. Nilai PDRB se Inonesia Tahun 2012-2013 Atas Dasar Harga Berlaku	II-25
Tabel 2.12. Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku	II-25
Tabel 2.13. Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku	II-26
Tabel 2.14. Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2010-2014 ADHK.....	II-27
Tabel 2.15. Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2010-2014 ADHK.....	II-27
Tabel 2.16. Nilai inflasi rata-rata Tahun 2010-2014 Provsu	II-28
Tabel 2.17. PDRB Perkapita Tahun 2010-2014 Provinsi Sumatera Utara.....	II-28
Tabel 2.18. Tipologi Klassen 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013	II-29
Tabel 2.19. Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.....	II-30
Tabel 2.20. Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2009-2013 menurut Indeks Ketimpangan Williamson	II-32
Tabel 2.21. Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012	II-40
Tabel 2.22. Capaian Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014.....	II-41
Tabel 2.23. Ratio ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas pada berbagai jenjang Pendidikan Tahun 2010-2014.....	II-42
Tabel 2.24. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010-2014 Provinsi Sumatera Utara.....	II-43
Tabel 2.25. Ratio Jenjang Pendidikan/Ratio Pendidikan Tahun 2010-2014.....	II-43
Tabel 2.26. Perkembangan Angka Kelulusan pada berbagai jenjang pendidikan dasar	II-45
Tabel 2.27. Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi.....	II-45
Tabel 2.28. Proporsi Jalan Nasional Dalam Kondisi Mantap Provsu Tahun 2010-2014	II-52
Tabel 2.29. Proporsi Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Provsu Tahun 2010-2014	II-52
Tabel 2.30. Kondisi Jalan Mantap di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 (Status Jalan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota.....	II-52
Tabel 2.31. Luas Irigasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	II-53
Tabel 2.32. Status Legalisasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota	II-54
Tabel 2.33. PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	II-57
Tabel 2.34. Data Koperasi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2014 .	II-60
Tabel 2.35. Data Keragaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berdasarkan Kabupaten/Kota-di Sumatera Utara Tahun 2014	II-61
Tabel 2.36. Data Keragaan Unit Simpan Pinjam (USP) berdasarkan Kabupaten/Kota - Di Sumatera Utara Tahun 2014	II-62
Tabel 2.37. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Sumatera Utara	II-63
Tabel 2.38. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2010-2014	II-63
Tabel 2.39. Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2010 - 2014	II-64
Tabel 2.40. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA) Tahun 2010 - 2014	II-65
Tabel 2.41. Aspek Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014	II-67

Tabel 2.42. Jumlah Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara	II-68
Tabel 2.43. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	II-69
Tabel 2.44. Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara	II-69
Tabel 2.45. Jumlah Arsip Statis yang dikelola Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	II-70
Tabel 2.46. Produksi dan Produktivitas Padi, Jagung dan Kedelai Provinsi Sumut	II-73
Tabel 2.47. Luas Areal Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara menurut jenis komoditi dan Pengusaha Tahun 2014	II-74
Tabel 2.48. Produksi Komoditas perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2014.....	II-74
Tabel 2.49. Luas Areal Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2010-2014.....	II-75
Tabel 2.50. Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Karet di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2010-2014.....	II-76
Tabel 2.51. Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Kakao di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2010-2014.....	II-77
Tabel 2.52. Luas Areal Perkebunan Rakyat tahun 2014	II-78
Tabel 2.53. Kondisi Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2010-2014	II-79
Tabel 2.54. Kondisi Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2010-2014	II-79
Tabel 2.55. Kondisi Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2010-2014	II-80
Tabel 2.56. Produktivitas Bahan Pangan Utama, Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHK	II-80
Tabel 2.57. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Tahun 2006 - 2014 (Ha)	II-81
Tabel 2.58. Produksi Hasil Hutan Sumatera Utara Menurut Jenis Produksi Tahun 2010-2014	II-81
Tabel 2.59. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Atas Harga Konstan (Hk) Tahun 2008-2012	II-82
Tabel 2.60. Inventarisasi pembangkit listrik terpasang yang memasok energi listrik Ke sistem sumbagut sampai dengan Tahun 2014	II-84
Tabel 2.61. Inventarisasi pembangkit listrik tenaga air Yang dikelola PLN Persero Wilayah Sumut Status Tahun 2014.....	II-85
Tabel 2.62. Wisatawan Mancanegara yang datang Ke Sumatera Utara menurut Pintu Masuk Tahun 2010-2014	II-86
Tabel 2.63. Jumlah Hotel Menurut Kelas di Sumatera Utara dari Tahun 2010 - 2014	II-87
Tabel 2.64. Kondisi Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2010-2014	II-87
Tabel 2.65. Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Tahun 2010-2014	II-88
Tabel 2.66. Produksi Ekspor, Konsumsi Ikan/Kapita Tahun 2010-2014	II-88
Tabel 2.67. Potensi Perikanan Provinsi Sumatera Utara	II-88
Tabel 2.68. Kontribusi kategori Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010-2014	II-89
Tabel 2.69. Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2010-2014 Provsu	II-80
Tabel 2.70. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Berdasarkan ADHK 2010 dan ADHB Provinsi Sumatera Utara 2010-2014	II-90
Tabel 2.71. Angka Konsumsi RT perkapitaTahun 2009 - 2013.....	II-90
Tabel 2.72. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2010 - 2014.....	II-91
Tabel 2.73. Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2009-2013 Provinsi Sumatera Utara	II-91
Tabel 2.74. Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara 2009-2013.....	II-92
Tabel 2.75. Jumlah Demo Provinsi Sumatera Utara 2009-2012	II-92
Tabel 2.76. Jumlah penduduk dan Rasio Ketergantungan Provinsi Sumatera Utara.....	II-93
Tabel 2.77. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	II-93
Tabel 2.78. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	II-101
Tabel 2.79. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun	

2014 Provinsi Sumatera Utara	II-103
Tabel 2.80. Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2009-2013`	II-109
Tabel 2.81. Identifikasi Kebijakan Nasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	II-119
Tabel 2.82. Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi Provinsi Sumatera Utara	II-122
Tabel 2.83. Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara.....	II-227
Tabel 3.1. Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumut ADHK 2000 Menuru Lapangan Usaha/Sektor Tahun 2011 - 2013 (persen)	III-7
Tabel 3.2. PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Sektor.....	III-8
Tabel 3.3. Struktur PDRB Sumatera Utara ADHK Menurut Lapangan Usaha/Sektor	III-9
Tabel 3.4. Provinsi Penyumbang PDB Terbesar di Indonesia (2013-2014)	III-10
Tabel 3.5. Provinsi Penyumbang PDB Terbesar di Indonesia (2013-2014)	III-10
Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan PDRB Sumut dengan Metode Baru (SNA 2008) Dan Tahun dasar 2010	III-11
Tabel 3.7. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Tahun 2011-2013 dengan Metode Lama (Tahun Dasar 2000) dan Tahun Baru SNA 2008 - dengan Tahun Dasar 2010	III-11
Tabel 3.8. PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 dengan Metode Baru (SNA 2008) dengan Tahun Dasar 2010	III-12
Tabel 3.9. Struktur PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 Dengan Metode Baru (SNA2008) dengan Tahun dasar 2010	III-12
Tabel 3.10. Kondisi Realisasi Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN Provinsi - Sumatera Utara Tahun 2012-2014	III-13
Tabel 3.11. Proyeksi Besaran PDRB Sumatera Utara ADHB Tahun 2015 dan 2016 - dengan Motode Baru SNA 2010 dan Tahun Dasar 2010.....	III-15
Tabel 3.12. Proyeksi Besaran PDRB Sumatera Utara ADHK Tahun 2015 dan 2016 dengan Motode Baru SNA 2010 dan Tahun Dasar 2010	III-16
Tabel 3.13. Proyeksi Laju Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Sumatera Utara Tahun 2015 dan 2016 Atas Dasar Harga Berlaku Maupun Atas dasar Harga Konstan 2010	III-16
Tabel 3.14. Proyeksi Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2015 dan 2016 Menurut Sudut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Maupun Atas dasar Harga Konstan 2010	III-17
Tabel 3.15. Proyeksi Laju pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Sumatera Utara Tahun 2015 dan 2016 Menurut Sudut Penggunaan ADHB maupun ADHK 2010	III-18
Tabel 3.16. Nilai Ekspor dan Impor Sumatera Utara Tahun 2013 dan 2014 Serta Proyeksi Tahun 2015 dan 2016	III-20
Tabel 3.17. Perkiraan Neraca Pembayaran	III-21
Tabel 3.18. Tabel Proyeksi/Target Pendapatan Provsu Tahun 2015 dan 2016	III-24
Tabel 3.19. Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 s.d tahun 2016.....	III-31
Tabel 3.20. Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2016.....	III-33
Tabel 4.2. Isu Strategis Provinsi	IV-11
Tabel 4.3. Identifikasi Permasalahan.....	IV-12
Tabel 4.5. Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2012-2014 dan Estimasi Tahun 2015-2016	IV-20
Tabel 5.1. Pagu Indikatif Menurut Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.....	V-16

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. 1. Bagan Alir tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Provinsi	I-2
Gambar 1. 2. Poses penyusunan dan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.....	I-5
Gambar 1. 3. Bagan keterkaitan RKPD Provinsi dengan dokumen perencanaan tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.	I-6

DAFTAR GRAFIK

	Hal	
Grafik 2.1.	II-16	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara .
Grafik 2.2	II-17	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Rasio Jenis Kelamin - se Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014
Grafik 2.3.	II-21	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014 Dengan pertumbuhan ekonomi nasional
	II-16	Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2008-2012
	II-17	Struktur Sektor Pembentuk PDRB Sumatera Utara Tahun 2009-2013..
Grafik 2. 4.	II-19	Struktur Sektor Pembentuk PDRB Sumatera Utara 2008-2012
Grafik 2. 5.	II-25	Persentase penduduk miskin Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2008-2013.....
Grafik 2. 6.	II-26	Perkembangan Angka Melek Huruf Sumatera Utara
Grafik 2. 7.	II-26	Perkembangan rata-rata sekolah Provinsi Sumatera Utara
Grafik 2. 8.	II-27	Angka Partisipasi Kasar Provinsi Sumatera Utara
Grafik 2. 9.	II-28	Jumlah Angka Kematian Bayi
Grafik 2. 10.	II-28	Jumlah Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Grafik 2. 11.	II-29	Grafik Angka Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita per Provinsi Indonesia
Grafik 2. 12.	II-30	Persentase Penduduk miskin Sumatera Utara 2010-2013
Grafik 2. 13.	II-31	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2012.....
Grafik 2. 14.	II-31	Perkembangan Kondisi Ketenaga Kerjaan Sumut 2009-2013
Grafik 2. 15.	II-32	Perkembangan Jumlah Pengangguran di Sumatera Utara Tahun 2009-2013
Grafik 2. 16.	II-32	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab/Kota di Provsu
Grafik 2. 17.	II-33	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota di Provsu
Grafik 2. 18.	II-35	Persentasi Partisipasi Sekolah Provinsi Sumatera Utara
Grafik 2. 19.	II-38	Persentase Perkembangan Putus Sekolah Pada berbagai Jenjang Pendidikan Tahun 2009-2013
Grafik 2. 20.	II-40	Persentase Persalinan yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2009-2013
Grafik 2. 21.	II-40	Persentase Antenatal Care (K4), Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Kunjungan Bayi Tahun 2009 - 2013.....
Grafik 2. 22.	II-41	Sarana dan Prasarana Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012
Grafik 2. 23.	II-42	Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012
Grafik 2. 24.	II-42	Persentasi Gizi Kurang dan Buruk Balita Provinsi Sumatera Utara
Grafik 2. 25.	II-43	Persentase Desa UCI di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.....
Grafik 2. 26.	II-44	Persentase Angka Kematian (CFR) akibat Diare pada KLB Tahun 2009-2013
Grafik 2. 27.	II-44	Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2013
Grafik 2. 28.	II-45	Angka CDR (Cakupan Penemuan Penderita TB Paru BTA+) dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.....
Grafik 2. 29.	II-46	Jumlah Kasus HIV/AIDS Tahun 1992-2013
Grafik 2. 30.	II-52	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2009-2013

Grafik 2. 31. Grafik Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2009 – 2013 Provinsi Sumatera Utara	II-56
Grafik 2. 32. Grafik Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2009 – 2013 Provinsi Sumatera Utara	II-57
Grafik 2. 33. Grafik Jumlah Investasi Proyek PMDN/PMA Tahun 2009 – 2013 Provinsi Sumatera Utara	II-58
Grafik 2. 34. Grafik Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA selama 2009-2013	II-58
Grafik 2. 35. Jumlah pengunjung perpustakaan per-tahun.....	II-62
Grafik 2. 36. Grafik perkembangan jumlah dan judul buku	II-63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
- Lampiran 2. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan dan Pagu Indikatif RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
- Lampiran 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016

LAMPIRAN - I

DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2015



**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2016**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2015**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tataruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas : perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun berkenaan.

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum (KUA) APBD, serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 ini merupakan RKPD tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Dokumen ini memuat tentang Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 yang merupakan bagian dari rangkaian penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan.

Tahapan penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tahapan sebagai berikut :

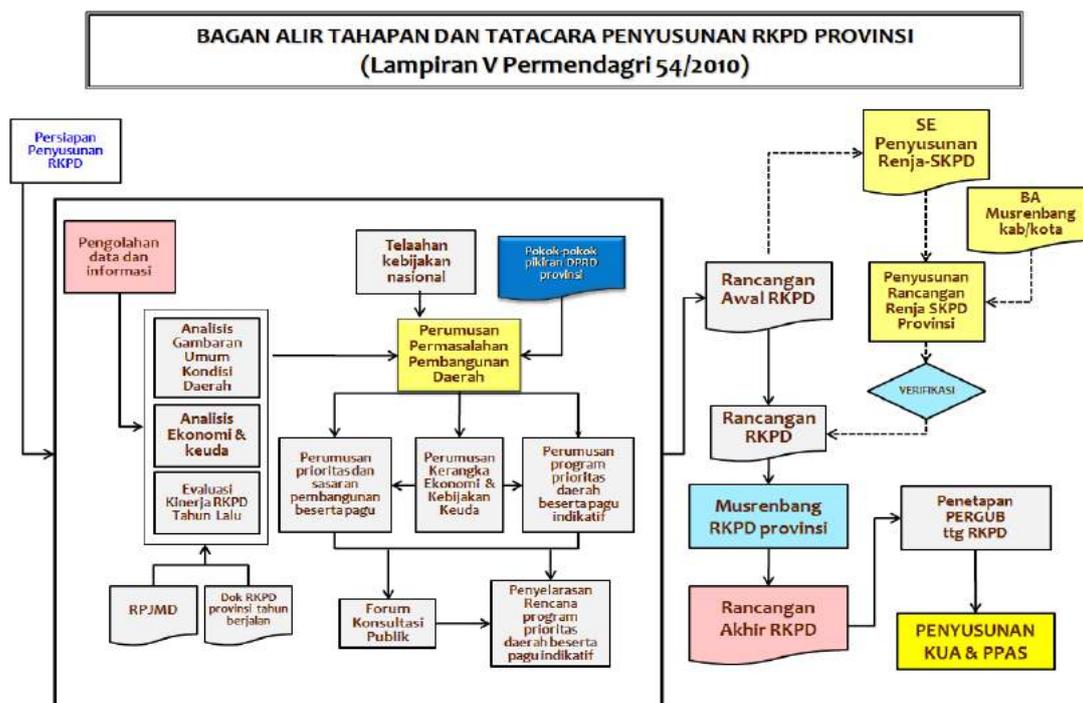
- 1) Persiapan penyusunan RKPD;
- 2) Penyusunan rancangan awal RKPD;
- 3) Penyusunan rancangan RKPD;
- 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- 5) Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- 6) Penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKP meliputi, pembentukan Tim Penyusun RKP, orientasi mengenai RKP, penyusunan agenda kerja, serta persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Adapun perumusan rancangan awal RKP Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut :

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu (n-2);
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah;
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi;
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah Provinsi;
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;

Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan RKP Provinsi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1. Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan RKP Provinsi

Pasal 5 Ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka keberadaan RKP Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 ini merupakan bagian dari rencana pembangunan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018. Oleh karenanya, RKP Tahun 2016 ini menjadi sangat penting karena sekaligus sebagai evaluasi

atas kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun pertama RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018, disamping pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22).

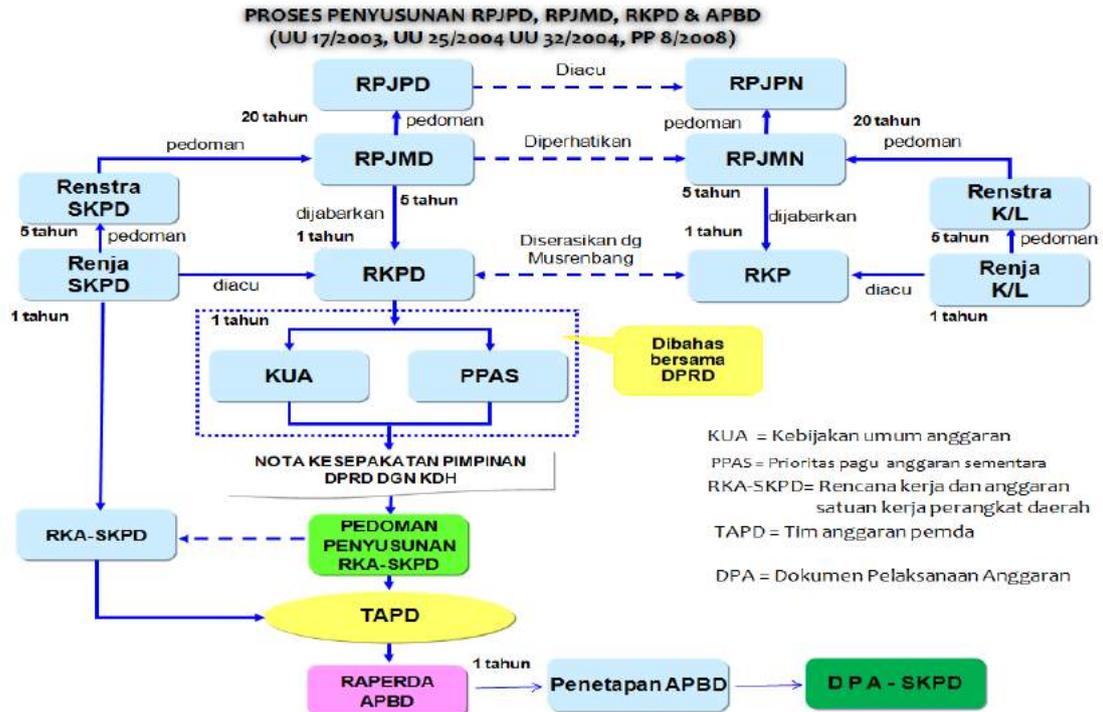
1.3. Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah dan kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan (RKPD) dan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD); (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2. Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKP dengan dokumen perencanaan lainnya

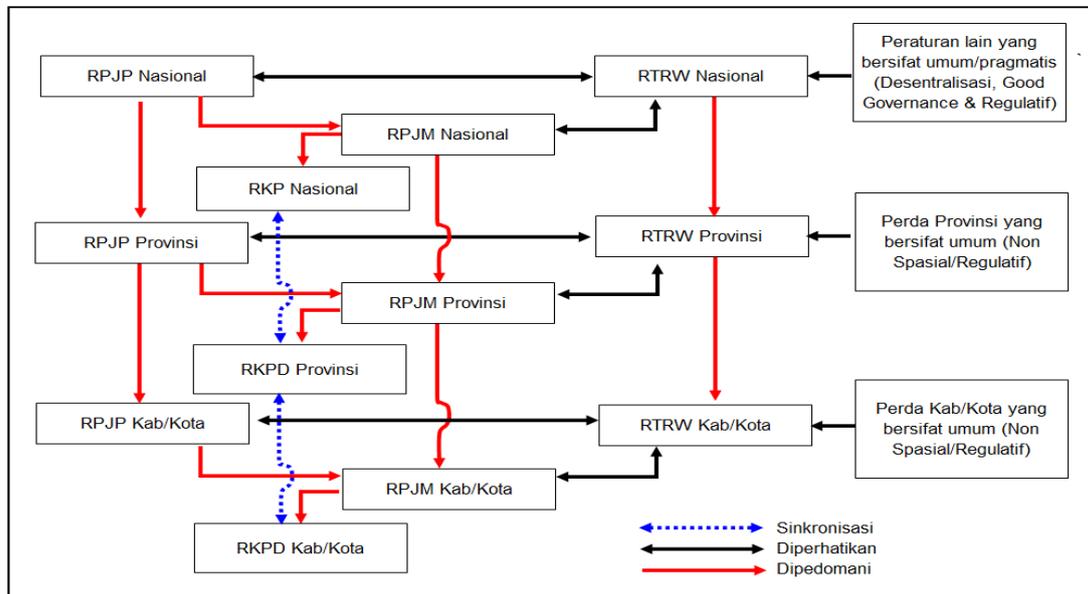
Mengacu pada Gambar. 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKP dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut : RKP disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJ Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. RKP disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. Selanjutnya RKP ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD. RKP ini nantinya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan R.APBD.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKP menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun R.APBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKP dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara,
2. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKP, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan,
3. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD,
4. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKP menjadi pedoman penyusunan R.APBD.

Selanjutnya, dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas,

maka RKPd Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ini juga harus diselaraskan dengan dokumen RKP Nasional dan Renja K/L dan juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Bagan keterkaitan RKPd Provinsi dengan dokumen perencanaan tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.4. Sistematika Dokumen RKPd Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Susunan Dokumen RKPd Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang, terdiri dari pengertian ringkas tentang RKPd, proses penyusunan RKPd, kedudukan RKPd tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPd dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan, terdiri dari uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPd, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran.
- 1.3. Hubungan antar Dokumen, menjelaskan tentang hubungan RKPd dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti : RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota.

- 1.4. Sistematika Dokumen RKPd, mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPd terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.
- 1.5. Maksud dan Tujuan, memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPd Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPd TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisikan uraian gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, demografi dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPd sampai dengan tahun berjalan (2014) dan Realisasi RPJMD Tahun 2009-2013, mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPd tahun lalu (2014) dan realisasi RPJMD 2013-2018 mencakup telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan permasalahan pembangunan sesuai urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Berisikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai dasar perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Berisi rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPd tahun 2014 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016

Berisikan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2016 yang menggambarkan prioritas pembangunan tahun 2016 yang berkaitan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2013-2018.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berisikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD Tahun 2016) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahap-III, yaitu RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antarsektor, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB - II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, adalah sebagai berikut :

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah:

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Sumatera Utara memiliki luas total sebesar 181.860,65 km² yang terdiri dari daratan seluas 71.680,68 km² atau 3.73 % dari luas wilayah Republik Indonesia dan luas perairan sebesar 110.000,65 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera.

Perkembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2009, secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 421 Kecamatan dan 5828 Desa/Kelurahan. Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten dengan wilayah terluas yaitu 6.620,70 Km² (9,24%). Sedangkan luas terkecil adalah Kota Sibolga yaitu 10,77km² (0,02%). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Kota Medan	Medan	21	265,10
2	Kota Binjai	Binjai	5	90,24
3	Kota Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	5	38,44
4	Kota Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	79,97
5	Kota Tanjung Balai	Tanjung Balai	6	61,52
6	Kota Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	6	114,65
7	Kota Sibolga	Sibolga	4	10,77
8	Kota Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	6	469,36
9	Kab. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	2.486,14
10	Kab. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	1.913,33
11	Kab. Langkat	Stabat	23	6.263,29
12	Kab. Asahan	Kisaran	25	3.675,79
13	Kab. Dairi	Sidikalang	15	1.927,80

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
14	Kab. Karo	Kabanjahe	17	2.127,25
15	Kab. Labuhan Batu	Rantau Prapat	9	2.561,38
16	Kab. Labuhan Batu Utara	Aek Kanopan	8	3.545,80
17	Kab. Labuhan Batu Selatan	Kota Pinang	5	3.116,00
18	Kab. Simalungun	Pamatang Raya	31	4.368,60
19	Kab. Tapanuli Utara	Tarutung	15	3.764,65
20	Kab. Tapanuli Tengah	Pandan	20	2.158,00
21	Kab. Tapanuli Selatan	Sipirok	14	4.352,86
22	Kab. Toba Samosir	Balige	16	2.352,35
23	Kab. Mandailing Natal	Panyabungan	23	6.620,70
24	Kab. Pakpak Bharat	Salak	8	1.218,30
25	Kab. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	2.297,20
26	Kab. Samosir	Pangururan	9	2.433,50
27	Kab. Nias	Gido	10	980,32
28	Kab. Nias Utara	Lotu	11	1.501,63
29	Kab. Nias Selatan	Teluk Dalam	31	1.625,91
30	Kab. Nias Barat	Lahomi	8	544,09
31	Kab. Batu Bara	Limapuluh	7	904,96
32	Kab. Padang Lawas	Sibuhuan	12	3.892,74
33	Kab. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	9	3.918,05
	Provinsi Sumatera Utara	Medan	436	71.680,68*

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan : *) Keadaan Juni 2013

b. Letak dan kondisi geografis

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 0° - 4°33' Lintang Utara dan 96°50' - 100°52' Bujur Timur, merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara berbatasan sebelah utara dengan Provinsi Aceh, sebelah barat dengan Samudera Hindia, sebelah selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta sebelah timur dengan Selat Malaka. Secara regional Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Provinsi Sumatera Utara memiliki garis pantai sepanjang 1.300 Km. Panjang Garis Pantai Timur 545 Km, Panjang Garis Pantai Barat 375 Km dan Panjang Garis Pantai Pulau Nias 380 Km. Terdapat 419 pulau, dengan 237 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka dan sisanya 182 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat.

Pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat hutan mangrove seluas 63.467,4 Ha dalam kondisi baik seluas : 27.019,57 Ha dan 36.447,83 Ha dalam

kondisi rusak yang tersebar di 6 Kabupaten (belum termasuk Nias). Selain hasil laut dan perikanan lainnya, kawasan ini memiliki potensi pariwisata bahari yang belum teridentifikasi seluruhnya.

Daerah pantai di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara sangat bervariasi yaitu daerah yang curam, berbatu dan di beberapa daerah terdapat pantai yang didominasi rawa. Kondisi pantai semacam ini banyak ditemukan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga dan Mandailing Natal. Sedangkan Pantai Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh pantai berbatu dan berpasir, khususnya yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.

Banyak terdapat pulau-pulau kecil merupakan ciri yang dimiliki oleh kawasan pesisir barat Sumatera Utara. Pantai barat ini juga memiliki hamparan mangrove sekitar 14.270 Ha yang membujur dari pantai selatan Kabupaten Mandailing Natal sampai ke pantai selatan Kabupaten Tapanuli Tengah serta di daerah pulau-pulau di Kabupaten Nias dengan ketebalan antara 50-150 meter. Terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara terdapat di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang tumbuh pada kedalaman 3-10 meter.

c. Topografi

1) Kemiringan lahan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0% - 2% seluas 17,8% dari luas wilayah, 2%-15 % seluas 49,2% dari luas wilayah, 15% - 25% seluas 8,8%, 25% - 40% seluas 10,8% dan diatas 40% seluas 11,3% dari luas wilayah, sedangkan luas wilayah perairan Danau Toba sekitar 112.986 Ha atau 1,6% dari luas wilayah.

2) Ketinggian lahan

Ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 - 2200 m dpl. Terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 Km² atau 34,77 persen dari luas wilayah Sumatera Utara adalah Daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis.

Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 Km² atau 65,23 persen dari luas wilayah Sumatera Utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

d. Geologi

1) Struktur dan karakteristik

Secara geologis, wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah timur dan lempeng Australia di sebelah barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur patahan tersebut melewati jalur Sumatera Utara mulai dari segmen Alas-Karo dan sepanjang kurang lebih 390 km merupakan sumber bencana alam geologi berupa pusat-pusat gempa di darat, tsunami dan pemicu terjadinya letusan gunung berapi dan tanah longsor. Jalur patahan (subduction) di Pantai Barat sepanjang kurang lebih 250 km merupakan pusat-pusat gempa di dasar laut.

Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patahan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40-50 % dari luas daerah Provinsi Sumatera Utara yang mencakup 18 wilayah kabupaten dan 1 kota (menurut keadaan tahun 2005) merupakan kawasan yang rentan gerakan tanah longsor.

2) Potensi

- Sumber energi

Berbagai kebijakan energi yang diterapkan dalam rangka pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, rasional, optimal dan terpadu adalah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi saat ini energi telah berubah menjadi suatu hal yang sangat urgen dan mendesak kondisi ini telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Energi (khususnya fosil) masih diperlakukan sebagai komoditi dagang yang memberikan nilai tambah yang rendah.
- b) Tidak mencukupinya pasokan energi untuk kebutuhan energi domestik, namun produksi energi diekspor dalam jumlah yang besar.
- c) Pemanfaatan energi tidak efisien.
- d) Harga energi belum memenuhi harga keekonomian.
- e) Iklim investasi energi masih rendah.
- f) Kapasitas industri energi nasional masih rendah.
- g) Terbatasnya akses masyarakat terhadap energi.

Potensi energi berupa panas bumi sebagai energi alternatif yang tersebar pada beberapa tempat di Sumatera Utara, diantaranya di Kabupaten Karo, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik Sumatera Utara.

Terdapat 4 (empat) Kabupaten / kota penghasil minyak dan gas yang ada di Sumatera Utara, yaitu : Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Padang Lawas, dan Kota Binjai dengan realisasi Lifting Minyak Bumi pada tahun 2013 sebesar 339.120 barel dan pada tahun 2014 sebesar 509.077 barel. Dengan potensi/cadangan minyak bumi Sumatera Utara sampai dengan akhir 2014 sebesar 46.431,88 MSTB.

Tabel 2.2.
POTENSI MINYAK BUMI TAHUN 2014

KABUPATEN	CADANGAN (MSTB)* MINYAK BUMI		
	TERBUKTI	MUNGKIN	HARAPAN
LANGKAT	19.466	6.884	3.310
DELI SERDANG	7.551	31	27
BINJAI	5.207	0	0
MEDAN	674	686	594
PADANG LAWAS	2.000	0	0
TOTAL	34.898	7.602	3.931

*MSTB = Thousand stock tank barrel / ribu barrel tanki pengumpul

Potensi / cadangan Gas Bumi Sumatera Utara yang terdata sampai dengan akhir 2014 adalah sebesar 556.219 MMSCF (536.2 BCF) yang terdiri dari Potensi / cadangan terbukti sebesar 472.399 MMSCF , potensi / cadangan mungkin sebesar 56.478 MMSCF dan Potensi / cadangan harapan sebesar 27.342 MMSCF. Sedangkan untuk realisasi Lifting Gas Bumi pada tahun 2013 sebesar 3.888,1 ribu MMBTU dan pada tahun 2014 sebesar 4.822,4 MMBTU

Tabel 2.3.
POTENSI GAS BUMI TAHUN 2014

KABUPATEN	CADANGAN (MMSCF)* GAS		
	TERBUKTI	MUNGKIN	HARAPAN
LANGKAT	233.591	54.797	25.893
DELI SERDANG	143.065	0	0
BINJAI	37.810	0	0
MEDAN	3.933	1.681	1.449
OFFSHORE MEDAN – LANGKAT	54.000	0	0
TOTAL	472.399	56.478	27.342

*MMSCF = Million Standart Cubic Feet / Juta kaki kubik

Cadangan batubara terdapat di 15 (lima belas) titik dan gambut yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Timah putih merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi. Di Provinsi Sumatera Utara sebaran lokasi potensinya berada pada Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah pada 1°45'03,3" LU 99°08'11,2" BT dengan jumlah cadangan sebesar 470 BSCF dan Desa Hatapang Kecamatan Na-IX-X Kabupaten Labuhanbatu. Serta beberapa wilayah lain yaitu di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan,

Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan) dimana hingga saat ini dalam tahap Penyelidikan Umum.

Terdapat juga indikasi potensi energi nuklir (radioaktif) yang terdapat di Kelurahan Aekhabil Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

Bahan tambang mineral logam dan bukan logam

Provinsi Sumatera Utara mempunyai berbagai jenis bahan galian mineral yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, yaitu : mineral logam, emas, timah hitam (galena), seng, tembaga, besi dan mineral non logam : batugamping, dolomit, bentonit, zeolit, kaolin, feldspar, marmer, granit, belerang, andesit, serpentinit, pasir kwarsa, perlit serta bahan galian energi : gambut, batubara, panas bumi (geothermal) serta minyak dan gas bumi. Secara umum telah diketahui besarnya cadangan geologi (perkiraan) dan mutu sumber daya mineral, namun untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan masih memerlukan penyelidikan eksplorasi secara detail, guna mengetahui cadangan terukur (pasti).

Tabel. 2.4.
Potensi Bahan Galian Unggulan di Provinsi Sumatera Utara

NO	Bahan Galian	Lokasi			Keterangan
		Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	Batu Apung	Sitilupu	Pahae Jae	1	Batu Apung
		Huta Tinggi	Parmonangan		
		Tiga juhar	STM Hilir		
2	Belerang	Sibanggor Tonga	Kotanopan	2	Belerang
		Namora Ilangit	P. Julu		
		Gn. Pusuk Buhit	Pangururan		
		Banuaji	Adian Koting		
		Gn. Sibayak	Sp. Empat		
		Gn. Sinabung	Payung		
3	Bentonit	Pt. Padang	Sosopan	3	Bentonit
		Hasahatan	Sipirok		
		S. Tapus	Saipar Dolok Hole		
		Pangkalan Brandan	Babalan		
		Wonosari	Besitang		
4	Dolomit	Lau Buluh	Kuta Buluh	4	Dolomit
		Kempawa	Tanah Pinem		
		Kutakepar	Payung		
		Simasom	Pahae Julu		
5	Granit	Parombuana n	Sibolga	5	Granit
		Raut Bosi	Pangaribuan		
		Muara Sipongi	M. sipongi		
		Aek Banir	Panyabungan		
		Hatapang	IX Na X		

6	Kaolin	S. Tonga	Kotanopan	6	Kaolin
		Purbatua	Sipirok		
		Bulu Payung	Sipirok		
			Barus		
		Pantis	Pahae Jae		
		Pearaja	Tarutung		
7	Marmer	Aek Banir	Panyabungan	7	Marmer
		Muara pungkut	Kotanopan		
		Ranjo batu	Muara sipongi		
		Sibaganding	GSP Bolon		
		Mardinding	Mardinding		
		Mbal petarum	Lau baleng		
		Lau buluh	Kutabuluh		
		Kuta buluh	Tanah pinem		
8	Toseki	Hutatinggi	Parmonangan	8	Toseki

e. Hidrologi

1) Daerah aliran sungai

Kondisi hidrologi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 71 DAS dan 3 (tiga) DAS lintas provinsi. Jumlah induk sungai di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 99 buah, Anak Sungai sebanyak 783 buah, Ranting Sungai 659 buah, anak Ranting Sungai 342 buah.

2) Sungai, danau dan rawa

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) Satuan Wilayah Sungai berdasarkan lintas wilayahnya yaitu WS Strategis Nasional adalah WS Belawan – Ular – Padang dan WS Toba – Asahan. WS Lintas Provinsi yaitu WS Alas Singkil lintas provinsi dengan Provinsi Aceh, WS Batang Natal – Batang Batahan lintas provinsi dengan Sumatera Barat dan WS Rokan lintas Provinsi dengan Riau. Sementara WS Batang Angkola – Batang Gadis, WS Wampu – Besitang, WS Bah Bolon, WS Barumon – Kualuh adalah, WS Pulau Nias, dan WS Sibundong – Batang Toru merupakan WS lintas Kab/Kota.

Kawasan rawa merupakan sumber daya alam yang petensinya belum dimanfaatkan dengan optimal bagi lahan pertanian dan pertambakan. Di Provinsi Sumatera Utara luas baku daerah rawa adalah sebesar 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat.

3) Debit Air

Beberapa sungai utama di Propinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan

bahan baku air bersih dan air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri. Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu.

Selain itu terdapat badan air yaitu danau dengan debit air cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Badan air berupa danau kecil yaitu [Danau Siais dan Danau Marsabut di Kabupaten Tapanuli Selatan](#), [Danau Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah](#), [Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo](#) dan yang terbesar yaitu [Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 \(tujuh\) kabupaten dengan luas sekitar 110.260 ha.](#)

f. *Klimatologi*

1) Tipe

Iklm di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Sebagaimana Provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

2) Curah hujan

Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 1.431 - 2.265 mm per tahun atau rata-rata 2.100 mm per-tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 - 230 hari per tahun. Pada wilayah kering, curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 1.500 mm yang tercatat di beberapa bagian wilayah Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, sedang curah hujan tinggi berkisar antara 2.000 sampai 4.500 mm berlangsung sepanjang tahun di daerah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Nias, Tapanuli Tengah, dan sebagian besar Tapanuli Selatan. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada Juni sampai September dan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Maret.

3) Suhu

Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 35,80°C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 13,40° C.

4) Kelembaban

Kelembaban udara rata-rata 78%-91%.

g. *Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:*

1) Kawasan lindung

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan

Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.055.795,00 ha atau 42,63 % dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.168.068,00 ha).

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dimaksud terdiri dari :

- Fungsi hutan dalam kawasan lindung (1.633.889,00 ha)

- a. Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/Taman Buru (TB) : 427.008,00 Ha
- b. Hutan Lindung (HL) : 1.206.881,00 Ha

- Fungsi hutan dalam kawasan budidaya (1.421.905,00 ha)

- a. Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 641.769,00 Ha
- b. Hutan Produksi Tetap (HP) : 704.452,00 Ha
- c. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) : 75.684,00 Ha

Di Provinsi Sumatera utara yang termasuk dalam kawasan hutan lindung adalah kawasan berada pada ketinggian 2.000 meter d.p.l. dengan kelerengannya lebih besar dari sekitar 45 %, mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980, mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan rezina) dan kelas lereng lebih besar dari 15 %, memiliki curah hujan tinggi dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan tanah gambut dengan ketebalan 3 m yang terdapat dibagian hulu sungai/rawa dan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Kawasan ini mencakup juga lahan gambut di Kabupaten Langkat, Humbang Hasundutan, Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Nias).

2) Kawasan budidaya

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian yang teridentifikasi hingga Tahun 2012 seluas 380.201 Ha. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas lebih kurang 57% dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas ± 69% dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan secara relatif berimbang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 26.360 km² atau 36,8% dari luas wilayah Sumatera Utara merupakan wilayah yang subur, suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi, dan curah hujan juga relatif tinggi, meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Binjai, Medan, dan Tebing Tinggi. Wilayah Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Selatan dan Kota Sibolga. Kegiatan di wilayah Pantai Timur umumnya heterogen, dengan kawasan perkotaan yang relatif besar dan prasarana wilayah yang memadai. Wilayah ini sesuai

untuk pengembangan berbagai jenis kegiatan budidaya, terutama perkebunan dan tanaman pangan.

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi Pertanian Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain. Komoditi bidang pertanian pada dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, ikan mas, sapi, bawang merah sangat berpotensi untuk dikembangkan. Untuk perkebunan, luas areal perkebunan rakyat sampai tahun 2013 adalah sekitar 1,1 juta Ha, dengan total produksi sebesar ± 5,9 juta ton dengan komoditi kelapa sawit, karet, kopi, kakao, tembakau, kelapa dan komoditi lainnya.

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi kelautan dan perikanan, dengan luas laut 110.000 Km² dan panjang pantai 1.300 Km meliputi Pantai Timur (WPP 571) sepanjang 545 Km dan Pantai Barat, Nias, Pulau-Pulau Batu (WPP572) sepanjang 755 Km. Potensi perikanan tangkap sebesar 841.200 ton/tahun terdiri dari potensi perikanan tangkap di WPP 571 Selat Malaka (Pantai Timur) sebanyak 276.00 ton/tahun dan WPP 572 Samudera Hindia (Pantai Barat) sebanyak 565.200 ton/tahun serta penangkapan di perairan umum sebesar 155.797 hektar. Potensi perikanan budidaya terdiri dari Budidaya laut seluas 100.000 hektar, budidaya air tawar seluas 18.647,5 hektar dan air payau seluas 20.000 ha

Potensi pariwisata di Provinsi Sumatera Utara meliputi pariwisata alam (kawasan Danau Toba, Berastagi, Kawasan Ekosistem Gunung Leuser dan Bukit Lawang Bahorok, Sibolangit, pantai di Kepulauan Nias, dan lain-lain), pariwisata budaya (Istana Maimun, Kediaman Chong A Fie, Makam Sisingamangaraja XII, Peninggalan Megalit di Pulau Nias, dan lain-lain) dan pariwisata minat khusus (Arung Jeram Sei Asahan, Taman Iman, Paralayang di Sitopsi, dan lain-lain).

2.1.1.2. Potensi pengembangan wilayah

Wilayah Sumatera Utara berpotensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik geografis dan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah. Pengembangan potensi kewilayahan tersebut dilakukan berbasiskan kawasan sesuai dengan regulasi perencanaan, yaitu melalui penetapan kawasan-kawasan strategis provinsi serta mendorong perwujudan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis kabupaten/kota.

Koridor pembangunan kewilayahan dikembangkan dengan mengacu pada sistem wilayah atau sistem kota-kota di Sumatera Utara yang diwujudkan dalam penetapan pusat-pusat kegiatan wilayah dan mendorong terwujudnya pusat-pusat kegiatan nasional dan pusat-pusat kegiatan lokal saling terkoneksi.

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis provinsi berfungsi: (a) untuk memwadahi penataan ruang

kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; (b) sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan (c) sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi di Provinsi Sumatera ditetapkan berdasarkan kepentingan: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) sosial dan budaya; dan (c) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi;
 1. Merek, Kabupaten Karo;
 2. Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 3. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 4. Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
 5. Harian, Kabupaten Samosir;
 6. Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
 7. Sitinjo, Kabupaten Dairi;
 8. Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 9. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar
- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan meliputi:
 1. Kawasan Tanjungbalai – Asahan;
 2. Kawasan Simalungun – Batubara; dengan fokus Kawasan Pengembangan Industri Berbasis Aluminium dan Diversifikasi Aluminium yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan didukung oleh Global Hubungan Internasional Kuala Tanjung yang telah dilakukan Groundbreaking pada tanggal 27 Januari 2015.
 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke yang telah beroperasi sejak 27 Januari 2015;
- c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya.
- d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya meliputi :
 1. Kawasan Labuan Angin – Sibolga;
 2. Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan; dan
 3. Kawasan Perkotaan Padangsidempuan dan sekitarnya.
- e. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias.

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:

- a. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, meliputi:

1. Situs dan peninggalan bersejarah Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang;
 2. Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
 3. Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
- b. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
 - c. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
 - d. Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit Kabupaten Samosir

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
- b. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru; dan
- c. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Di tingkat nasional, beberapa wilayah/kawasan di Sumatera Utara juga ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, yaitu:

- a. Dari sudut kepentingan pertahanan keamanan, yaitu Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai di Kawasan Perbatasan laut RI dengan Malaysia;
- b. Dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro);
- c. Dari sudut kepentingan lingkungan, yaitu Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Pada tahun 2011, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Dan Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro. Serta Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera. Pada Tahun 2014 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun

2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya sesuai ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. [Pada prosesnya hingga saat ini, telah mulai inisiasi untuk pengembangan koridor antar kawasan, yaitu Belawan-Kuala Namu- Kuala Tanjung serta pengembangan konsep aerotropolis di kawasan Bandara Kuala Namu yang terintegrasi dengan sektor ekonomi pertanian unggulan serta pengembangan kawasan *Agrotechnopark* dan kawasan sosial religi terpadu di sekitar bandara Kuala Namu.](#)

2.1.1.3. Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

1. Kawasan rawan massa gerakan tanah/tanah longsor

Bencana longsor disertai dengan banjir bandang sudah sering terjadi di Sumatera Utara antara lain longsor dan banjir bandang Sibolangit (Deli Serdang, 22 November 1994), Dolok - Saipar Dolok Hole di DAS Bilah (Tapanuli Selatan - Labuhan Batu, Mei 1995), Perbaungan - Lubuk Pakam (Deli Serdang, Januari 2002), Nias (31 Juli 2001 dan 2 Januari 2003), Bahorok (Langkat, 2 Nopember 2003). Berbagai longsor dan banjir bandang dalam ukuran kecil juga telah sering terjadi di berbagai lokasi di Sumatera Utara sebagai contoh Berastagi yang berada di pegunungan di Karo beberapa waktu yang lalu dilanda banjir bandang.

Kawasan ini terletak pada sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah Utara - Selatan pada dasarnya potensial terhadap gerakan tanah, rayapan, longsor, gelombang pasang dan banjir bandang.

Termasuk dalam kawasan ini Kabupaten Tapanuli Utara pada Kecamatan Muara, Sipoholon, Dolok Sanggul, Lintong Nihuta, Baki, Raja, Siborong-borong, Pagaran, Onan Ganjang, Tarutung, Adian Koting, Pahae Julu, Pahae Jae; Kabupaten Samosir pada Kecamatan Simanindo, Pangururan, Sianjur Mula-Mula, Harian Boho, Palipi, Onan Runggu, Kabupaten Toba Samosir pada Kecamatan Laguboti, Porsea, Habinsaran; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Barus, Kolang, Tapan Nauli, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Siabu, Panyabungan, Batang Natal, Kotanopan; Kabupaten Pakpak Bharat pada Kecamatan Sitelu Taliutang Jahe, Sitelu Taliutang Julu, Taliutang Salak, Taliutang PGGS, Kerajaan; Kabupaten Dairi pada Kecamatan Tigalingga, Siempat Nempu, Silima Pungga-Pungga, Pegagan, Sumbul, Sidikalang, Parbuluan; Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Dolok Silau, Silimakuta, Dolok Pardamean, Sidamanik, Dolok Panribuan, Girsang Sipangan Bolon; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Namorambe, STM Hilir, Biru-biru, Sibolangit, STM Hulu, Bangun Purba, Kabupaten Karo pada Kecamatan Mardinding, Kutabuluh, Lau Baleng, Tiga Binanga, Simpang Empat, Kabanjahe, Barusjahe, Merek; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Padang Tualang, Bahorok, Salapian, Kwala, Sei Bingai; Termasuk Pulau Nias bagian Selatan dan bagian Tengah yaitu: Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias pada Kecamatan Hiliduho; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe serta Kota Gunung Sitoli pada Kecamatan Gunung Sitoli.

2. Kawasan rawan zona patahan aktif;

Posisi wilayah Sumatera Utara terhadap Pulau Sumatera yang terletak diantara Lempeng Asia dan Lempeng Australia mengakibatkan terdapatnya kawasan rawan pada zona tumbukan lempeng di wilayah pantai barat, wilayah daratan Sumatera Utara, dan wilayah pantai Kepulauan Nias.

3. Kawasan rawan gelombang pasang air laut, abrasi dan tsunami; gelombang pasang; rawan abrasi

Tsunami adalah gelombang pasang yang disebabkan oleh gempa bumi atau longsoran di lereng dasar laut. Gelombang pasang semacam ini bisa melanda daerah pantai sampai puluhan meter tingginya dan ratusan meter jauhnya dari pantai, sehingga menyapu dan merusak segala apa yang ada di pantai dan di daratan, seperti yang terjadi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004. Tsunami yang menerjang pantai barat Aceh dan Sumatera Utara terjadi 20 menit sampai 5 jam setelah gempa tektonik. Kecepatan gelombang tsunaminya rata-rata 50-100 kilometer per jam. Di pusat gempa, kecepatan tsunami Aceh secara teoretis dapat dihitung, yaitu antara 400 - 800 kilometer per jam. Daerah rawan tsunami tersebar di Pantai Barat pada elevasi kurang dari 5 meter, meliputi wilayah pantai timur, pantai barat dan wilayah pantai Kepulauan Nias

4. Kawasan rawan banjir/ banjir bandang

Peristiwa banjir merupakan bencana alam yang juga sering terjadi di wilayah Sumatera Utara yang beriklim tropis, terutama pada wilayah dengan kemiringan lereng landai atau dataran. Beberapa peristiwa banjir yang terjadi di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Peristiwa banjir (dan juga tanah longsor) yang terbesar selama 3 tahun terakhir di Indonesia terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.
- Di daerah Bohorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada November 2003 terjadi banjir bandang yang berasal dari bagian hulu DAS Bohorok yang menyebabkan 92 orang tewas dan 154 orang hilang.
- Bencana banjir di beberapa wilayah pada Bulan Desember 2012, meliputi Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Kepulauan Nias.

Termasuk dalam kawasan ini yaitu Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Silau Kahean, Raya Kahean, Bandar, Pematang Bandar, Dolok Batunanggar, Tapian Dolok, Siantar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja, Tanah Jawa; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Manduamas, Barus, Sorkam, Kolang, Tapian Nauli, Sibolga, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Natal, Muara Batang Gadis, Batahan; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat, Babalan, Besitang, Tanjungpura, Gebang, Secanggih, Hinai, Stabat, Padangtualang, Bahorok.; Kabupaten Labuhan Batu pada Kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, Pangkatan, Bilah Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Kecamatan Kualuh Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Kecamatan Kampung Rakyat dan Kota Pinang; Kabupaten Deli Serdang pada

Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Tua, Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, Biru-biru, Pantai Labu, Batang Kuis, Beringin, Lubuk Pakam; Kabupaten Serdang Bedagai pada Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Sei Bambi dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Termasuk juga pada Kabupaten Nias pada Kecamatan Idano Gawo, Gido; Kabupaten Nias Utara pada Kecamatan Tuhemberua, Lahewa, Alasa; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe, Sirombu, Kabupaten Nias Selatan pada Kecamatan Lolowau, Amandraya, Teluk Dalam, Lahusa; Kota GunungSitoli pada Kecamatan Gunungsitoli.

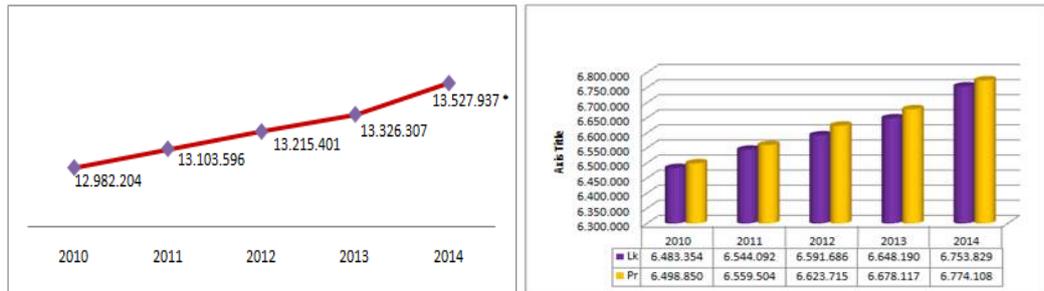
5. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung berada di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Mandailing Natal.
6. Kawasan Rawan Kebakaran hutan meliputi kawasan sepanjang kawasan Danau Toba.
7. Kawasan rawan letusan gunung berapi yang terdapat pada :
 - a. **Tipe A**, yaitu Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang pernah tercatat meledak paling tidak sekali sejak tahun 1600 yaitu pada Tahun 2010.
 - b. **Tipe B**, yaitu gunung api aktif yang tercatat tidak pernah meletus sejak tahun 1600. Sumatera Utara memiliki empat gunung api jenis ini, yaitu Gunung Sibayak di Kabupaten Karo; Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Toba Samosir; dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - c. **Tipe C**, yaitu gunung yang tidak pernah tercatat meletus. Namun melihat tanda-tanda di sekitar gunung itu, diyakini gunung itu adalah gunung api, yaitu Gunung Dolok Martimbang/Namoralangit/Hela toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

2.1.1.4. Demografi

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2013, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara mencapai 13.326.307 orang, yang terdiri atas 6.548.190 laki-laki dan 6.678.117 perempuan, dengan kepadatan rata-rata 186 Jiwa/Km². Sekitar 51,83 % penduduk bertempat tinggal di pedesaan dan 49,17 % bertempat tinggal di daerah perkotaan, angka ini jauh berbeda dengan kondisi tahun 2012 dimana penduduk yang tinggal di Desa mencapai 50,48% dan di perkotaan sebesar 49,52%, dan diperkirakan bahwa pada tahun 2016 jumlah penduduk perkotaan akan lebih banyak dari pedesaan.

Jumlah penduduk Sumatera Utara merupakan terbesar keempat di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah atau terbesar di luar Pulau Jawa. Terdiri dari berbagai suku, yaitu suku asli yang terdiri dari 8 suku yakni Suku Melayu Deli di Pesisir Timur, terutama di kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat, Suku Batak Karo berada di Kabupaten Karo, Suku Batak Toba di wilayah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Suku Batak Pesisir berada di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Suku Batak Mandailing/Angkola di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Mandailing Natal, Suku

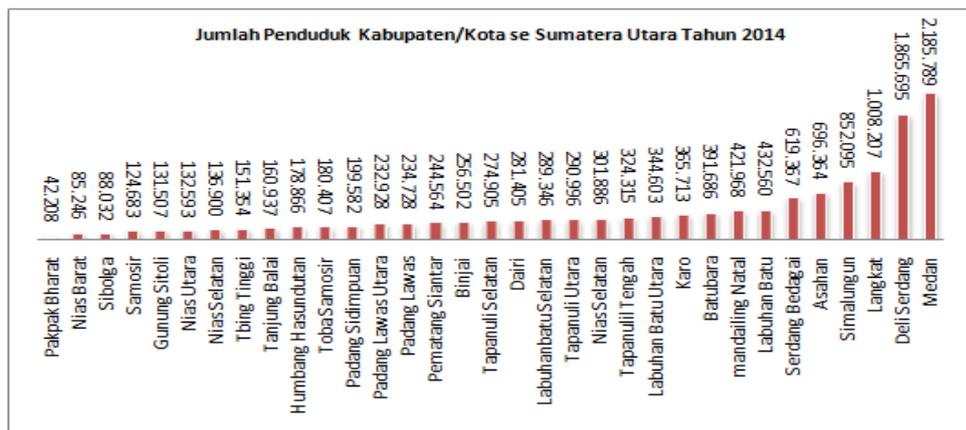
Batak Simalungun umumnya di Kabupaten Simalungun, Suku Batak Pakpak berada di Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat dan Suku Nias di Kepulauan Nias. Selain itu terdapat suku pendatang yakni Suku Minangkabau : Kota Medan, Pesisir barat, Suku Aceh umumnya di Kota Medan, Suku Jawa di Pesisir Timur & Barat dan etnis Tionghoa umumnya di wilayah perkotaan pesisir Timur & Barat.



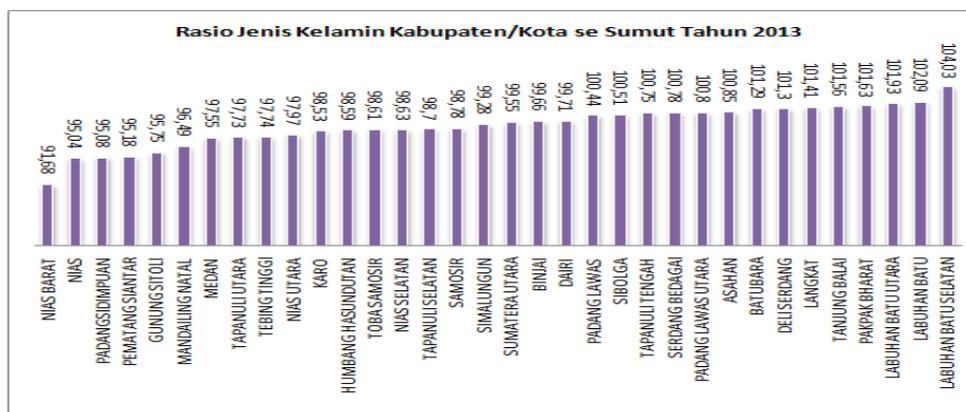
Sumber : Pusdatin 2014
* Angka estimasi

Grafik 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2014



Sumber : PUSDATIN, 2014



Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, 2013

Grafik 2.2

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Rasio Jenis Kelamin se Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

Rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 99,55, yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni sebesar 104,03 dan yang terkecil terdapat di Kabupaten Nias Barat yakni sebesar 91,86.

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dari data Proyeksi Penduduk Tahun 2025, laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara tahun 2015 sebesar 1,20 persen dan pada periode 2000-2010 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,22%, merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah di Sumatera, atau posisi ke-5 laju pertumbuhan penduduk terendah secara nasional (dibawah laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah (0,37%), Jawa Timur (0,76%), Kalimantan Barat (0,91%), dan D.I Yogyakarta (1,02%))

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Provinsi di Indonesia
2000, 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2025

Propinsi (1)	2000 (2)	2005 (3)	2010 (4)	2015 (5)	2020 (6)	2025 (7)
NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3.929,3	4.037,9	4.112,2	4.166,3	4.196,5	4.196,3
SUMATERA UTARA	11.642,6	12.452,8	13.217,6	13.923,6	14.549,6	15.059,3
SUMATERA BARAT	4.248,5	4.402,1	4.535,3	4.693,4	4.785,4	4.846,0
RIAU	4.948,0	6.108,4	7.469,4	8.997,7	10.692,8	12.571,3
JAMBI	2.407,2	2.657,3	2.911,7	3.164,8	3.409,0	3.636,8
SUMATERA SELATAN	6.210,8	6.756,9	7.306,3	7.840,1	8.369,6	8.875,8
BENGKULU	1.455,5	1.617,4	1.784,5	1.955,4	2.125,8	2.291,6
LAMPUNG	6.730,8	7.291,3	7.843,0	8.377,4	8.881,0	9.330,0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	900,0	971,5	1.044,7	1.116,4	1.183,0	1.240,0
DKI JAKARTA	8.361,0	8.699,6	8.981,2	9.168,5	9.262,6	9.259,9
JAWA BARAT	35.724,0	39.066,7	42.555,3	46.073,8	49.512,1	52.740,8
JAWA TENGAH	31.223,0	31.887,2	32.451,6	32.882,7	33.138,9	33.152,8
D I YOGYAKARTA	3.121,1	3.280,2	3.439,0	3.580,3	3.694,7	3.776,5
JAWA TIMUR	34.766,0	35.550,4	36.269,5	36.840,4	37.183,0	37.194,5
BANTEN	8.098,1	9.309,0	10.661,1	12.140,0	13.717,6	15.343,5
B A L I	3.150,0	3.378,5	3.596,7	3.792,6	3.967,7	4.122,1
NUSA TENGGARA BARAT	4.006,6	4.355,5	4.701,1	5.040,8	5.367,7	5.671,6
NUSA TENGGARA TIMUR	3.823,1	4.127,3	4.417,6	4.694,9	4.957,6	5.194,8
KALIMANTAN BARAT	4.016,2	4.394,3	4.771,5	5.142,5	5.493,6	5.809,1
KALIMANTAN TENGAH	1.855,6	2.137,9	2.439,9	2.757,2	3.095,6	3.414,4
KALIMANTAN SELATAN	2.984,0	3.240,1	3.503,3	3.767,8	4.023,9	4.258,0
KALIMANTAN TIMUR	2.451,9	2.810,9	3.191,0	3.587,9	3.995,6	4.400,4
SULAWESI UTARA	2.000,9	2.141,9	2.277,2	2.402,8	2.517,2	2.615,5
SULAWESI TENGAH	2.176,0	2.404,0	2.640,5	2.884,2	3.131,2	3.372,2
SULAWESI SELATAN	8.050,8	8.493,7	8.926,6	9.339,9	9.715,1	10.023,6
SULAWESI TENGGARA	1.820,3	2.086,9	2.363,9	2.653,0	2.949,6	3.246,5
GORONTALO	833,5	872,2	906,9	937,5	962,4	979,4
M A L U K U	1.166,3	1.266,2	1.369,4	1.478,3	1.589,7	1.698,8
MALUKU UTARA	815,1	890,2	969,5	1.052,7	1.135,5	1.215,2
PAPUA	2.213,8	2.518,4	2.819,9	3.119,5	3.410,8	3.682,5

Sumber : Data Statistik, BPS

b. Sebaran Penduduk

Secara geografis, penyebaran penduduk terbesar masih terkonsentrasi pada wilayah Pantai Timur, yaitu dimana pada wilayah tersebut terdapat sejumlah kabupaten yang berpenghuni terbesar (di atas 5 % dari seluruh penduduk provinsi) dan berkepadatan tertinggi (di atas 200 jiwa/km²), seperti : Labuhan Batu, Asahan, Deli Serdang, Langkat dan Serdang Bedagai. Pada wilayah timur ini juga terdapat sejumlah besar kota besar dengan distribusi dan kepadatan penduduk terbesar yaitu Kota Medan, Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Padang Sidempuan.

Dari hasil Sensus Penduduk 2010 terlihat bahwa penyebaran penduduk Sumatera Utara menurut kabupaten/kota rata-rata dibawah 5 persen, dan hanya lima kabupaten/kota yang persebarannya diatas 5 persen.

Secara umum kepadatan bruto di Provinsi Sumatera Utara masih rendah karena sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan yang tidak terbangun, yaitu kawasan hutan dan perkebunan. Kecuali pada kota-kota yang ada di Sumatera Utara, kepadatannya relatif sedang sebagai kawasan perkotaan. Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat adalah tiga kabupaten/kota dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 2,122,804 orang (16,06%), 1,845,615 orang (13,97%), dan 976,885 orang (7,39%). Sedangkan Kabupaten Pakpak Bharat merupakan

kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit yang berjumlah 41,492 orang (0,31 persen). Dengan luas wilayah Provinsi Sumatera Utara sekitar 71.680,68 kilometer persegi yang didiami oleh 13,215,401 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 184 orang per kilo meter persegi.

Menurut sensus penduduk terakhir tahun 2012, Kabupaten/kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Medan yakni sebanyak 8.008 orang per kilo meter persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat yakni sebanyak 34 orang per kilo meter persegi. Kota kedua dengan kepadatan tertinggi adalah Kota Sibolga sebesar 7971 per kilometer persegi. Dengan kemampuan daya dukung lahan Kota Sibolga yang terbatas sementara penduduk terus bertambah, Kota Sibolga perlu mengendalikan pertumbuhan penduduknya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel. 2.6
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk Sumatera Utara
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	JUMLAH PENDUDUK		Distribusi Penduduk	
		Jumlah	Kepadatan	Laki-Laki	Perempuan
1	NIAS	135.319	138	65.933	69.386
2	MANDAILING NATAL	426.382	64	209.401	216.981
3	TAPANULI SELATAN	273.132	63	135.707	137.425
4	TAPANULI TENGAH	342.902	159	172.037	170.865
5	TAPANULI UTARA	290.864	77	143.794	147.070
6	TOBA SAMOSIR	178.568	76	88.680	89.888
7	LABUHAN BATU	453.630	177	229.110	224.520
8	ASAHAN	699.720	190	351.415	348.305
9	SIMALUNGUN	844.033	193	420.591	423.442
10	DAIRI	277.575	144	138.608	138.967
11	KARO	382.622	180	189.815	192.807
12	DELI SERDANG	1.984.598	798	998.669	985.929
13	LANGKAT	1.005.965	161	506.513	499.452
14	NIAS SELATAN	305.010	188	151.380	153.630
15	HUMBANG HASUNDUTAN	181.026	79	89.906	91.120
16	PAKPAK BHARAT	44.520	37	22.435	22.085
17	SAMOSIR	123.065	51	61.080	61.985
18	SERDANG BEDAGAI	606.367	317	304.403	301.964
19	BATUBARA	396.479	438	199.508	196.971
20	PADANG LAWAS UTARA	247.286	63	124.229	123.057
21	PADANG LAWAS	251.927	65	126.313	125.614
22	LABUHAN BATU SELATAN	307.171	99	156.578	150.593
23	LABUHAN BATU UTARA	347.465	98	175.405	172.060
24	NIAS UTARA	132.735	88	65.705	67.030
25	NIAS BARAT	84.419	155	40.375	44.044
26	SIBOLGA	86.166	8.001	43.280	42.886
27	TANJUNG BALAI	164.675	2.677	83.006	81.669
28	PEMATANG SIANTAR	245.104	3.065	119.582	125.522
29	TEBING TINGGI	154.804	4.027	76.488	78.316

30	MEDAN	2.191.140	8.265	1.081.797	1.109.343
31	BINJAI	261.490	2.898	130.551	130.939
32	PADANGSIDIMPUAN	206.496	1.801	100.642	105.854
33	GUNUNG SITOLI	134.196	286	65.651	68.545
SUMATERA UTARA		13.766.851	188.636	6.868.587	6.898.264

Sumber : BPS Sum Sumber : BPS Proyeksi Penduduk Sumut Tahun 20 Sumber : BPS Tahun 2014, (data diolah)

Kedekatan terhadap Kota Medan dan berkedudukan di wilayah timur menjadikan suatu kabupaten memiliki penduduk perkotaan yang semakin besar, seperti kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai berpenduduk perkotaan yang dominan, diikuti Kabupaten Asahan, Batu Bara, Simalungun, Karo dan Langkat. Sebaliknya kabupaten-kabupaten yang jauh dari Medan memiliki penduduk yang sangat didominasi penduduk perdesaan, seperti Kabupaten Nias Selatan, Nias, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Selatan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari angka nilai PDRB, kontribusi PDRB, pertumbuhan PDRB, Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase penduduk yang berada diatas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan sebagai berikut :

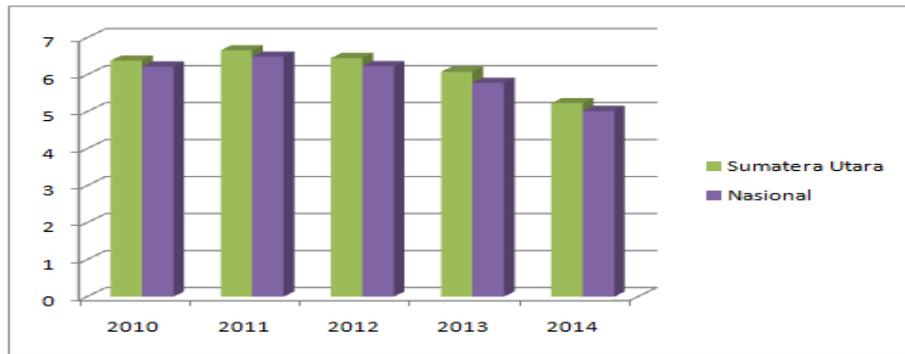
a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir, terlihat semakin mengalami fluktuatif dengan trend penurunan, pertumbuhan ekonomi tertinggi yang dicapai Sumatera Utara terjadi pada tahun 2011 dimana laju pertumbuhannya mencapai 6,63 persen, akan tetapi setelah tahun 2011 terjadi trend penurunan dan puncaknya di tahun 2014 dengan laju pertumbuhan dibawah angka psikologis 6 persen tepatnya di angka 5,23 persen, adapun penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 ini, sebagai dampak pelemahan perekonomian dunia dimana Nasional juga turun dan di bawah capaian Sumatera Utara pada angka 5,02 persen, selain pengaruh global juga sebagai dampak dari berbagai persoalan internal yang masih belum teratasi seperti kondisi infrastruktur baik darat, laut maupun udara dan juga proses perizinan dan ketersediaan ketenagalistrikan dan gas yang menjadi salah satu faktor pendorong tumbuhnya minat investor untuk menanamkan modalnya.

Tabel.2.7
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2010-2014

wilayah	Pertumbuhan Ekonomi					rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	
Sumatera Utara	6.38	6.66	6.45	6.08	5.23	6.16
Nasional	6.22	6.49	6.23	5.78	5.02	5.95

Sumber : BPS (Data Diolah)



Sumber : BPS Sumatera Utara (Data Diolah)

Grafik. 2.3

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014 Dibandingkan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, secara rata-rata per lima tahunan juga lebih baik dimana Sumatera Utara dalam kurun waktu lima tahun rata-rata tumbuh 6,16 persen dan nasional hanya 5,95 persen. Secara umum kondisi lima tahunan Sumatera Utara tahun 2010-2014 Sumatera Utara masih dapat mencapai angka pertumbuhan psikologis 6 persen, sementara nasional hanya bertengger di angka 5 persen.

Jika melihat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara lima tahun terakhir berdasarkan ADHK Tahun 2010-2014 dari sisi produksi dengan tahun dasar dan metode perhitungan baru, terlihat kondisi sebagai berikut :

Tabel.2.8

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara per sektoral ADHK 2010 dari Sisi produksi Tahun 2010-2014 (persen)

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)			(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	5.88	5.3	4.71	4.37
2	B	Pertambangan dan Penggalian	-	10.72	11.9	26.03	5.33
3	C	Industri Pengolahan	-	3.22	5.6	4.84	2.97
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	-	13.87	-3.0	-3.88	3.71
5	E	Pengadaan Air	-	6.30	5.1	5.68	6.04
6	F	Konstruksi	-	8.46	6.7	7.66	6.79
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	7.13	7.9	5.57	6.94
8	H	Transportasi dan Pergudangan	-	10.24	8.2	7.41	5.71
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	8.52	6.8	7.81	6.48
10	J	Informasi dan Komunikasi	-	9.96	8.8	7.78	7.23
11	K	Jasa Keuangan	-	8.71	10.1	9.99	2.84
12	L	Real Estate	-	9.66	7.0	6.94	6.59
13	M,N	Jasa Perusahaan	-	10.68	6.0	6.68	6.76
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	8.93	2.5	3.34	6.92
15	P	Jasa Pendidikan	-	4.79	4.9	8.34	6.37
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	16.00	10.6	10.82	7.00
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	-	9.00	7.8	7.45	7.04
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			-	6.66	6.45	6.08	5.23

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi kategorial di Sumatera Utara telah mempergunakan metode perhitungan baru dengan SNA 2008 dan tahun dasar 2010. Pada tahun 2010 data tidak tersedia sebab data perhitungan mempergunakan tahun dasar 2010, sehingga tidak ada perbandingan perhitungannya. Pada tahun 2011 pertumbuhan kategorial tertinggi dialami oleh kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai pertumbuhan 16 persen, disusul oleh kategorial pengadaan listrik dan gas sebesar 13,87 persen. Adapun pertumbuhan terendah dialami oleh kategori industry pengolahan sebesar 3,22 persen disusul oleh kategori jasa pendidikan sebesar 4,79 persen.

Sementara pada tahun 2014 pertumbuhan kategorial tertinggi dialami oleh kategori informasi dan komunikasi dengan laju pertumbuhan sebesar 7,23 persen, disusul oleh kategori jasa lainnya sebesar 7,04 persen, adapun kategori terendah pertumbuhannya adalah kategori industry pengolahan sebesar 2,97 persen disusul oleh kategori jasa keuangan dengan laju pertumbuhan sebesar 2,84 persen. Dari kondisi di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kategori industry pengolahan selama kurun waktu terakhir mengalami pertumbuhan yang semakin menurun, ada indikasi awal bahwa penurunan ini dapat berimbas dari pasokan energy yang belum optimal terpenuhi di Sumatera Utara seperti pasokan listrik dan gas.

b. Struktur PDRB

Dengan berlakunya metode perhitungan PDRB dengan mempergunakan metode SNA 2008 dan tahun dasar 2010, maka format table untuk konversi data PDRB Sumatera Utara pada kurun waktu 2010-2014 disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel. 2.9
Struktur PDRB Sumatera Utara
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)			(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26.79	25.42	24.9	24.5	23.2
2	B	Pertambangan dan Penggalian	1.06	1.07	1.2	1.4	1.3
3	C	Industri Pengolahan	21.3	21.2	20.7	19.8	19.9
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
5	E	Pengadaan Air	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6	F	Konstruksi	11.7	11.8	12.3	13.0	13.6
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.1	17.1	17.0	16.7	17.1
8	H	Transportasi dan Pergudangan	4.3	4.4	4.6	4.9	4.9
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3
10	J	Informasi dan Komunikasi	2.3	2.1	2.1	2.0	2.0
11	K	Jasa Keuangan	2.9	3.0	3.2	3.3	3.3
12	L	Real Estate	3.9	4.1	3.9	4.3	4.4
13	M,N	Jasa Perusahaan	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6
15	P	Jasa Pendidikan	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Dari data tabel 2.4 memperlihatkan bahwa dengan mempergunakan tahun dasar 2010 dan metode SNA 2008 terjadi pergeseran struktur dengan metode perhitungan PDRB sebelumnya dan tahun dasar 2000, dimana pada metode dan tahun dasar sebelumnya pertanian dan kehutanan dan perikanan dengan industry pengolahan saling bertukar posisi pada peringkat pertama penyumbang PDRB Sumatera Utara, akan tetapi dengan metode SNA 2008 dan tahun dasar 2010 maka penyumbang terbesar PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku di tempati oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dengan sumbangan pada tahun 2010 sebesar 25,79 persen, terus menurun hingga pada tahun 2015 hanya bertengger diangka sumbangan 23,20 persen. Tentunya penurunan ini masih berjalan dengan benar (on the track), sebab nilai tambah yang dihasilkan oleh pertanian akan diolah lebih besar lagi di kategori lainnya.

Hal kontradiksi terjadi di kategori industry pengolahan, dimana berdasarkan table diatas, sumbangan industry pengolahan semakin menurun, jika merujuk data maka pada tahun 2010 kontribusi industry pengolahan adalah sebesar 21,30 persen, terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 sumbangan dari kategori industry pengolahan hanya sebesar 19,90 persen, tentunya hal ini mengindikasikan bahwa kategori ini mengalami pertumbuhan yang semakin kecil, dengan berbagai factor penyebab diantaranya ketersediaan pasokan listrik dan gas yang terganggu serta fasilitas logistic baik jalur dan sistemnya yang masih belum mampu mengimbangi kebutuhan para investor.

Tabel. 2.10
Struktur PDRB Sumatera Utara
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2014

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.84	25.65	25.38	25.06	24.85
2	B	Pertambangan dan Penggalian	1.01	1.05	1.10	1.31	1.31
3	C	Industri Pengolahan	21.31	20.62	20.46	20.22	19.79
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	0.15	0.16	0.15	0.13	0.13
5	E	Pengadaan Air	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
6	F	Konstruksi	11.67	11.87	11.90	12.07	12.25
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.08	17.16	17.39	17.31	17.59
8	H	Transportasi dan Pergudangan	4.26	4.40	4.48	4.53	4.55
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.10	2.13	2.14	2.17	2.20
10	J	Informasi dan Komunikasi	2.25	2.32	2.38	2.41	2.46
11	K	Jasa Keuangan	2.92	2.98	3.08	3.19	3.12
12	L	Real Estate	3.87	3.98	4.00	4.03	4.08
13	M,N	Jasa Perusahaan	0.82	0.85	0.85	0.85	0.86
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.39	3.46	3.33	3.25	3.30
15	P	Jasa Pendidikan	2.02	1.99	1.96	2.00	2.02
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.76	0.82	0.85	0.89	0.91
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	0.46	0.47	0.47	0.48	0.49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Dari Tabel di atas terlihat bahwa berbeda dengan PDRB ADHB yang telah disajikan di atas, kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan relative stabil walaupun penurunannya tetap terjadi tetapi kontribusinya hamper

¼ dari seluruh total PDRB, dimana penurunan kontribusi dari tahun 2010 ke tahun 2014 hanya sebesar 1,01 persen, sementara jika dinilai dari ADHB maka penurunan kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,59 persen atau penurunannya dua kali dari penurunan atas dasar harga konstan. Sementara itu kategori Industri pengolahan juga sama seperti PDRB ADHB mengalami penurunan kontribusi dari tahun 2010 sebesar 21,31 persen menjadi hanya sebesar 19,79 persen atau mengalami penurunan kontribusi sebesar 1,51 persen. Adapun untuk 2 kategori penyumbang PDRB ADHK 2010 terbesar lainnya yakni peringkat ketiga Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan kontribusi dari 2010 17,08 persen menjadi 17,59 persen, demikian juga dengan kategori konstruksi juga mengalami kontribusi dari 2010 pada angka 11,67 persen meningkat menjadi sebesar 12,25 persen.

c. Nilai PDRB

Sebagai Provinsi terbesar di luar pulau Jawa, ditilik dari besaran jumlah penduduk dan jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota, maka secara umum besaran PDRB Sumatera Utara belumlah menunjukkan angka yang terbesar di Indonesia, masih merupakan peringkat 7, sebagaimana tergambar dalam table berikut ini :

Tabel 2.11
Nilai PDRB Provinsi se Indonesia Tahun 2012-2013
Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. miliar)

Provinsi	2012	2013
11. Aceh	95,074.22	103,045.56
12. Sumatera Utara	351,090.36	403,933.05
13. Sumatera Barat	110,179.65	127,099.95
14. Riau	469,073.02	522,241.43
15. Jambi	72,634.07	85,558.31
16. Sumatera Selatan	206,297.63	231,683.04
17. Bengkulu	24,119.36	27,388.25
18. Lampung	144,639.48	164,393.43
19. Kep. Bangka Belitung	34,458.59	38,934.84
21. Kepulauan Riau	90,568.21	100,310.42
31. DKI Jakarta	1,103,692.66	1,255,925.78
32. Jawa Barat	949,761.26	1,070,177.14
33. Jawa Tengah	556,483.73	623,749.62
34. DI Yogyakarta	57,031.75	63,690.32
35. Jawa Timur	1,001,200.74	1,136,326.87
36. Banten	213,197.79	244,548.14
51. Bali	83,943.33	94,555.77
52. Nusa Tenggara Barat	49,679.69	56,277.97
53. Nusa Tenggara Timur	35,248.49	40,465.30
61. Kalimantan Barat	74,969.66	84,956.23
62. Kalimantan Tengah	55,885.58	63,515.47
63. Kalimantan Selatan	75,893.97	83,361.79
64. Kalimantan Timur	419,507.23	425,429.38
71. Sulawesi Utara	47,198.30	53,401.10
72. Sulawesi Tengah	51,106.07	58,641.18
73. Sulawesi Selatan	159,859.93	184,783.06
74. Sulawesi Tenggara	36,600.75	40,773.20
75. Gorontalo	10,368.80	11,752.20
76. Sulawesi Barat	14,407.64	16,184.01
81. Maluku	11,468.77	13,245.35
82. Maluku Utara	6,918.43	7,725.42
91. Papua Barat	43,204.82	50,908.73
94. Papua	77,396.09	93,136.60
Jumlah 33 Provinsi	6,733,160.11	7,578,118.87

Sumber : BPS RI

Dari tabel di atas diperoleh hasil bahwa kedudukan Provinsi Sumatera Utara dalam konstelasi sumbangan PDB adalah pada peringkat 7, sementara untuk tingkat regional Pulau Sumatera menduduki peringkat dua, sementara untuk Provinsi di luar Pulau Jawa menduduki peringkat ketiga setelah Riau dan Kalimantan Timur.

Adapun untuk kondisi Provinsi Sumatera Utara Nilai Nominal PDRB Sumatera Utara dengan metode perhitungan SNA 2008 dan tahun dasar 2010 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.12
Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2010-2014
Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. miliar)

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	85,561,143.96	95,856,863.79	103,933,114.9	115,194,745.9	121,435,442.7
2	B	Pertambangan dan Penggalian	3,336,340.26	4,048,821.63	4,848,020.0	6,581,443.7	6,944,808.7
3	C	Industri Pengolahan	70,540,953.80	79,947,917.24	86,171,929.7	93,241,472.5	104,224,003.8
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	501,178.84	643,052.37	641,934.1	586,207.1	514,666.3
5	E	Pengadaan Air	316,551.82	355,925.07	399,026.0	441,816.0	501,060.0
6	F	Konstruksi	38,650,891.30	44,527,253.68	51,426,256.0	60,997,621.4	71,225,774.0
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	56,555,799.54	64,308,761.08	70,891,922.7	78,324,823.4	89,596,998.2
8	H	Transportasi dan Pergudangan	14,101,567.03	16,580,077.93	19,056,202.1	22,990,245.2	25,923,438.0
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,936,756.77	7,874,972.12	9,100,935.8	10,598,775.3	12,283,315.7
10	J	Informasi dan Komunikasi	7,465,664.08	8,103,346.98	8,957,698.9	9,594,390.2	10,287,350.9
11	K	Jasa Keuangan	9,676,981.62	11,195,195.18	13,479,426.2	15,738,019.0	17,155,250.9
12	L	Real Estate	12,814,477.23	15,290,923.39	16,358,719.3	20,078,791.2	22,786,418.7
13	M,N	Jasa Perusahaan	2,711,690.37	3,181,125.34	3,646,330.4	4,224,044.0	4,836,417.7
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,212,993.02	12,990,356.75	14,786,938.0	16,427,959.7	18,832,080.3
15	P	Jasa Pendidikan	6,690,893.89	7,318,570.99	7,938,014.6	8,848,513.7	9,930,056.9
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,500,421.51	3,044,544.66	3,519,331.3	4,020,161.9	4,604,434.0
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	1,510,932.41	1,769,392.83	1,964,638.7	2,332,953.3	2,690,048.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			331,085,237.47	377,037,101.03	417,120,438.66	470,221,983.57	523,771,565.54

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa pertumbuhan PDRB ADHB Sumatera Utara dari tahun 2010 ke tahun 2014 meningkat sebesar 58,20 persen. Sementara jika dikonversi ke dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, maka nominal PDRB Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13
Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2010-2014
Atas Dasar Harga Berlaku

TAHUN	NILAI PDRB (Rp.juta)	KURS US \$	Nilai Nominal (000 US\$)
2010	331,085,237.47	9,078	36,463,132
2011	377,037,101.03	8,773	42,991,688
2012	417,120,438.66	9,384	44,469,130
2013	470,221,983.57	13,590	34,600,587
2014	523,771,565.54	11,867	44,125,658

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)

Berdasarkan hasil penyajian data di atas, dapat diperoleh bahwa jika dikonversi ke dollar Amerika Serikat, maka angka Nominal PDRB Sumatera Utara diketahui pada tahun 2010 bernilai US\$ 36,46 Milyar US\$ dengan kurs rata-rata sebesar Rp. 9.078 per 1 dollar Amerika Serikat, terus meningkat hingga tahun 2012 PDRB Sumatera Utara hingga mencapai US\$ 44,47 milyar dan merupakan yang tertinggi selama kurun waktu terakhir, kembali menurun pada tahun 2013 yang hanya berada di angka US\$ 34,60 milyar dengan kurs rata-rata sebesar Rp. 13.590 per Dollar Amerika Serikat, akan tetapi angka PDRB ini kembali rebound dengan angka yang hampir menyamai kondisi tahun 2012 yakni di angka US\$ 44,13 milyar dengan kurs rata-rata Rp. 11.867 per 1 Dollar Amerika Serikat.

Tabel 2.14
 Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2010-2014
 Atas Dasar Harga Konstan 2010
 (Rp. miliar)

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)			(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	85,561,143.96	90,592,547.11	95,405,416.9	99,899,566.3	104,269,613.6
2	B	Pertambangan dan Penggalian	3,336,340.26	3,693,990.92	4,135,255.2	5,211,647.4	5,489,373.7
3	C	Industri Pengolahan	70,540,953.80	72,815,223.08	76,922,410.6	80,648,618.0	83,042,087.5
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	501,178.84	570,711.45	553,396.3	531,920.5	551,651.4
5	E	Pengadaan Air	316,551.82	336,491.28	353,745.8	373,844.3	396,428.6
6	F	Konstruksi	38,650,891.30	41,921,896.14	44,718,287.8	48,144,381.8	51,411,361.1
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	56,555,799.54	60,589,055.04	65,384,605.2	69,025,207.6	73,817,641.8
8	H	Transportasi dan Pergudangan	14,101,567.03	15,545,798.35	16,827,857.6	18,075,247.2	19,107,060.7
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,936,756.77	7,527,496.52	8,035,635.9	8,663,609.6	9,225,423.5
10	J	Informasi dan Komunikasi	7,465,664.08	8,209,201.22	8,930,584.2	9,625,107.2	10,321,291.6
11	K	Jasa Keuangan	9,676,981.62	10,519,432.08	11,581,048.1	12,738,470.2	13,100,349.1
12	L	Real Estate	12,814,477.23	14,052,157.26	15,030,054.5	16,072,860.1	17,132,221.2
13	M,N	Jasa Perusahaan	2,711,690.37	3,001,220.15	3,182,589.6	3,395,102.0	3,624,699.3
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,212,993.02	12,213,771.28	12,522,710.2	12,940,560.2	13,835,996.7
15	P	Jasa Pendidikan	6,690,893.89	7,011,171.08	7,357,221.3	7,970,451.3	8,478,260.6
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,500,421.51	2,900,539.72	3,207,547.3	3,554,516.8	3,803,268.7
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	1,510,932.41	1,646,888.55	1,775,772.9	1,908,139.7	2,042,552.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			331,085,237.47	353,147,591.20	375,924,139.5	398,779,250.4	419,649,281.7

Dari tabel di atas diperoleh hasil analisa bahwa pertumbuhan PDRB ADHK dengan Tahun Dasar 2010 dari periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebesar 26,75 persen, dan apabila di konversi kembali ke dalam US Dollar, maka komposisi nominal PDRB ADHK 2010 dalam mata uang Dollar Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
 Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2010-2014
 Atas Dasar Harga Konstan 2010

TAHUN	NILAI PDRB (Rp.juta)	KURS US \$	Nilai Nominal (000 US\$)
2010	331,085,237.47	9,078	36,463,132
2011	353,147,591.20	8,773	40,267,684
2012	375,924,139.45	9,384	40,077,200
2013	398,779,250.37	13,590	29,343,580
2014	419,649,281.71	11,867	35,353,773

Berdasarkan data di atas, diperoleh hasil bahwa berbeda dengan hasil konversi Nilai PDRB ADHB ke Dollar Amerika Serikat, yang mana pada tahun 2012 lah nilai konversi PDRB yang paling besar nilai, akan tetapi dalam konversi PDRB berdasarkan ADHK 2010, maka PDRB Sumatera Utara terbesar setelah hasil konversi ada pada tahun 2011 dengan nilai US\$ 40,27 milyar, masih stabil di tahun 2012, akan tetapi pada tahun 2013 anjlok dengan nilai hanya US\$ 29,34 milyar, dan kembali meningkat menjadi US\$ 35,35 milyar pada tahun 2014.

d. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Sumatera Utara secara umum juga kondisinya lebih baik dari nasional, akan tetapi pada tahun 2014 kondisi inflasi Sumatera Utara lebih baik dari capaian nasional, dimana inflasi di Sumatera Utara mencapai 8,17%,

Secara Makro Rata-Rata Inflasi Sumatera Utara selama periode 2010-2014 sebesar 6,78% berada diatas rata-rata Inflasi Nasional pada periode yang sama sebesar 6,37% (nasional lbih baik). Ada pun perkembangan nilai inflasi Sumatera Utara dibandingkan dengan tingkat nasional disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.16
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2010-2014 Provinsi Sumatera Utara

INFLASI	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
INDONESIA	6,96	3,79	4,36	8,38	8,36
SUMATERA UTARA	8	3,67	3,86	10,18	8,17

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

c. PDRB per Kapita

Tabel. 2.17
PDRB Perkapita Tahun 2009-2013 Provinsi Sumatera Utara

Uraian		2010	2011	2012	2013*)
Nilai PDRB (triliun Rp)	239.03	275.70	314.37	351.12	403.93
Jumlah Penduduk (Jiwa)	13,248,386.00	12,985,075	13,103,596	13,215,401	13.326.307
PDRB perkapita (Rp.juta/jiwa)	17.84	21.23	23.99	26.40	30.00
Konversi PDRB/Kapita (US\$)	17,22.67	2,338.62	2,734.53	2,802.85	2,522.07

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Kondisi pendapatan per kapita masyarakat Sumatera Utara tahun ke tahun menunjukkan perbaikan, hal ini tentunya merupakan pertanda terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada tahun 2010 PDRB Perkapita penduduk Sumatera Utara dengan mempergunakan metode SNA 2008 dan tahun dasar 2010 sebesar Rp. 25,5 juta atau jika dikonversi ke dollar Amerika Serikat telah mencapai US\$ 2.809,00; terus meningkat hingga tahun 2014 PDRB/Kapita telah mencapai Rp. 38,83 juta, akan tetapi jika secara

internasional dikonversi ke Dollar Amerika Serikat, maka PDRB/kapita terbesar Sumatera Utara terjadi di Tahun 2012 dengan nilai US\$ 3.663, dan terendah dalam kurun lima tahun terakhir adalah di tahun 2013 dengan nilai hanya US\$ 2.596, hal ini sebagai akibat nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi hingga mencapai Tiga Belas Ribuan secara rata-rata.

d. Disparitas Pendapatan Masyarakat

Ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah suatu proses alamiah yang terjadi dalam tahapan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat terjadi karena perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja, terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu sehingga mengurangi pemerataan modal, serta alokasi dana pembangunan antar wilayah.

1) Tipologi Klassen

Berdasarkan hasil pemetaan Tipologi Klassen yang mengklasifikasikan daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita ke dalam 4 kuadran, diketahui bahwa selama periode tahun 2009-2013 pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan adanya perpindahan antar kuadran.

Posisi 33 Kabupaten/Kota selama periode tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.18
Tipologi Klassen 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Sibolga	1	4	4	4	4
2	Tapanuli Tengah	1	4	4	1	1
3	Tapanuli Utara	4	4	4	4	1
4	Toba Samosir	1	4	4	4	4
5	Samosir	4	4	4	4	1
6	Humbang Hasundutan	1	4	4	4	1
7	Nias	1	1	1	1	1
8	Nias Selatan	4	4	4	4	4
9	Gunung Sitoli		1	4	1	1
10	Nias Utara		1	1	4	1
11	Nias Barat		4	1	4	4
12	Padangsidempuan	1	4	4	1	1
13	Mandaling Natal	1	4	4	1	1
14	Tapanuli Selatan	4	4	4	4	4
15	Padang Lawas	1	4	4	1	1
16	Padang Lawas utara	1	1	1	1	1
17	Labuhan Batu	4	4	4	4	4
18	Asahan	4	4	4	4	4
19	Simalungun	4	4	4	4	4
20	Dairi	4	4	4	4	4
21	Karo	1	4	4	1	4
22	Deli Serdang	2	3	3	3	2
23	Langkat	4	4	4	4	4
24	Pakpak Barat	1	1	4	4	4
25	Serdang Bedagai	1	4	4	4	4
26	Batu Bara	3	3	3	3	3
27	Labuhan Batu Utara		3	3	2	2
28	Labuhan Batu Selatan		3	3	2	2
29	Tanjung Balai	4	4	4	4	4
30	Pematang Siantar	1	4	4	4	4
31	Tebing Tinggi	1	4	1	1	1
32	Medan	2	2	2	2	3
33	Binjai	1	4	4	1	1

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Posisi suatu Kabupaten/Kota dalam Tipologi Klassen ini, selain bergantung dari kinerja pembangunan Kabupaten/Kota itu sendiri juga bergantung dari kinerja pembangunan Kabupaten/Kota lainnya. Suatu kabupaten/kota bisa saja memiliki pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum tentu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita keseluruhan Kabupaten/Kota di wilayah yang menjadi acuan.

2) Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Tingkat ketimpangan pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara berdasarkan Indeks Gini (Gini Ratio) selama kurun waktu lima tahun terakhir disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.19
Tabel Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013

TAHUN	INDEKS
2009	0.32
2010	0.35
2011	0.35
2012	0.33
2013	0.354

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas diketahui bahwa kesenjangan pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara secara umum semakin timpang, ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 hanya 0,32, akan tetapi trendnya terus melebar hingga pada tahun 2012 kembali turun menjadi 0,33 dari dua tahun sebelumnya (2010 dan 2011) mencapai 0,35, dan terus melebar disparitasnya sedikit di tahun 2013 menjadi 0,354.

1) Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

Indikator jumlah dan persentase penduduk miskin merupakan indikator makro yang menggambarkan perkembangan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi penduduk secara umum. Jumlah desa tertinggal dapat memberikan indikasi mengenai daerah-daerah dimana penduduk miskin banyak ditemui. Kedua indikator tersebut saling melengkapi. Perlu diketahui, bahwa tidak semua penduduk di desa tertinggal adalah miskin, sebaliknya tidak semua penduduk di Kota adalah tidak miskin.

Pembangunan yang telah berjalan di Sumatera Utara berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 10,63 persen pada tahun 2011 turun menjadi 10,39 persen pada tahun 2013.

Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut Kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh : kurang dari 12 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan dikatakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi); antara 12 persen sampai dengan 17 persen dikatakan berketimpangan sedang; lebih dari 17 persen berketimpangan rendah.

Menurut versi bank Dunia yang menstandarkan pendapatan perkapita yang ideal sekitar 2 US\$/hari/kapita, maka jumlah penduduk yang memenuhi standar tersebut dengan kurs rupiah Rp. 9.500/ 1 US\$ pada tahun 2010 adalah 40 persen penduduk lapisan sedang/menengah dan 20 persen penduduk lapisan atas/tinggi masih menerima pembagian pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan 40 persen penduduk terendah, yaitu berkisar antara 35,29 persen sampai dengan 40,35 persen dari total pendapatan, sementara 40% penduduk berpenghasilan terendah hanya menerima 24,36%, berartisecara umum ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia adalah rendah.

4) Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2009-2013 yang dihitung menggunakan Williamson Index menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2013, Williamson Index untuk Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 0,058 dan jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 0,058. Kondisi disparitas pendapatan ini cukup stabil mengingat angka indeks yang semakin mendekati 1 menunjukkan disparitas yang semakin lebar.

Tabel 2.20
Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara 2009-2013 menurut Indeks Ketimpangan Williamson

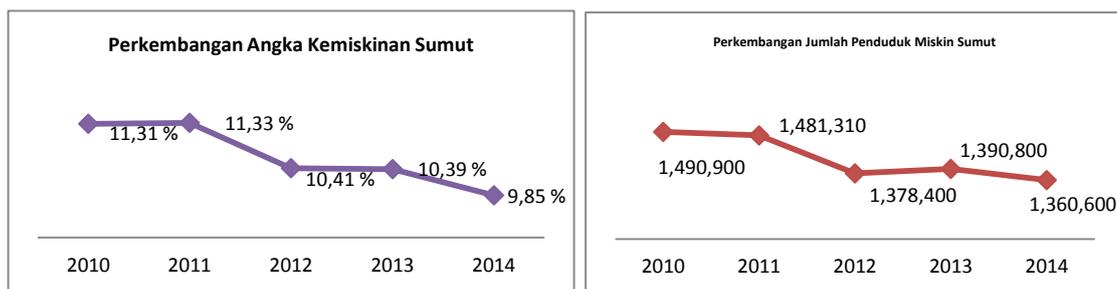
No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
1	Sibolga	0,004	0,011	0,013	0,013	0,013	0,011
2	Tapanuli Tengah	0,096	0,101	0,103	0,104	0,104	0,101
3	Tapanuli Utara	0,039	0,052	0,056	0,057	0,059	0,052
4	Toba Samosir	0,006	0,008	0,008	0,006	0,006	0,007
5	Samosir	0,025	0,033	0,035	0,035	0,037	0,033
6	Humbang Hasundutan	0,026	0,037	0,038	0,028	0,037	0,033
7	Nias	0,102	0,059	0,059	0,059	0,059	0,073
8	Nias Selatan	0,084	0,095	0,097	0,093	0,1	0,093
9	Gunung Sitoli	-	0,027	0,024	0,025	0,025	0,025
10	Nias Utara	-	0,057	0,057	0,058	0,058	0,058
11	Nias Barat	-	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
12	Padangsidempuan	0,047	0,059	0,061	0,063	0,065	0,058
13	Mandailing Natal	0,091	0,1	0,099	0,098	0,098	0,098
14	Tapanuli Selatan	0,054	0,062	0,052	0,062	0,063	0,059
15	Padang Lawas	0,076	0,088	0,087	0,089	0,091	0,085
16	Padang Lawas utara	0,075	0,083	0,084	0,085	0,086	0,082
17	Labuhan Batu	0,005	0,024	0,088	0,028	0,032	0,030
18	Asahan	0,015	0,036	0,035	0,033	0,034	0,031
19	Simalungun	0,084	0,101	0,102	0,101	0,103	0,099
20	Dairi	0,037	0,049	0,05	0,049	0,05	0,047
21	Karo	0,005	0,017	0,018	0,019	0,024	0,017
22	Deli Serdang	0,061	0,018	0,011	0,008	0,014	0,022
23	Langkat	0,025	0,044	0,044	0,039	0,041	0,041
24	Pakpak Barat	0,032	0,034	0,035	0,035	0,035	0,034
25	Serdang Bedagai	0,034	0,049	0,05	0,047	0,046	0,047
26	Batu Bara	0,227	0,184	0,185	0,181	0,157	0,188
27	Labuhan Batu Utara	0,023	0,004	0,002	0,005	0,004	0,008
28	Labuhan Batu Selatan	0,029	0,01	0,006	0,007	0,004	0,011
29	Tanjung Balai	0,009	0,004	0,011	0,013	0,018	0,010
30	Pematang Siantar	0,007	0,022	0,027	0,03	0,036	0,023
31	Tebing Tinggi	0,017	0,027	0,027	0,026	0,025	0,025
32	Medan	0,432	0,352	0,341	0,349	0,341	0,361
33	Binjai	0,007	0,007	0,006	0,001	0,004	0,006
	Sumatera Utara	0,059	0,058	0,059	0,058	0,058	0,058

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Bila dilihat dari disparitas pendapatan dengan metode indeks williamson terlihat bahwa Kota Medan merupakan Kab/kota yang memiliki disparitas pendapatan paling tinggi yakni 0,361 disusul oleh Kabupaten Batu Bara sebesar 0,188. Adapun Kab/Kota yang memiliki disparitas pendapatan rendah yakni Kota Binjai sebesar 0,006 dan disusul oleh Kabupaten Toba Samosir sebesar 0,007.

e. Perkembangan kemiskinan

Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara mengalami trend positif. Pada tahun 2010 angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara mencapai 11,31 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.490.900 jiwa, 10,41 persen pada tahun 2012 dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 mencapai 9,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.360.600 jiwa.



Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara

Grafik. 2.4
Perkembangan Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara 2010 – 2015

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Bidang pendidikan

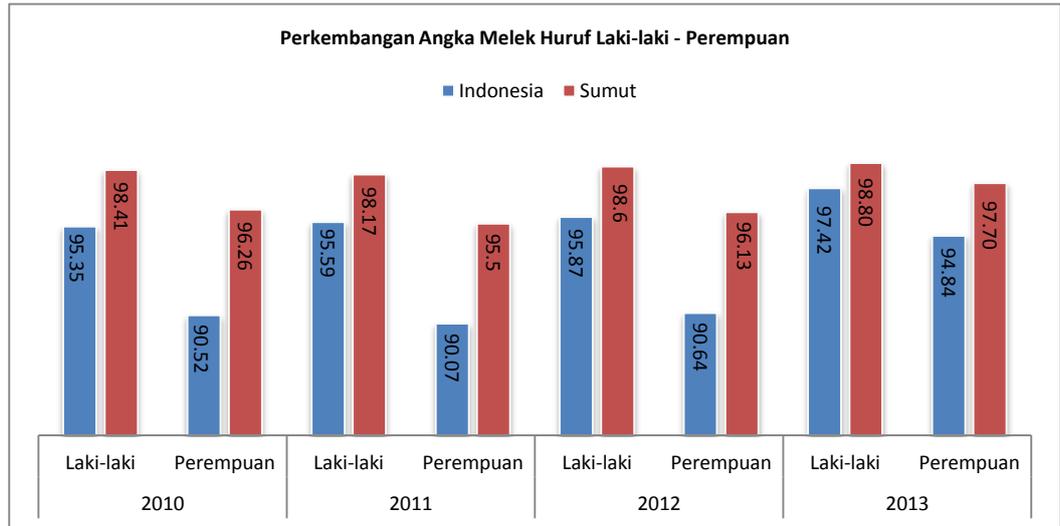
a. Angka melek huruf

Perkembangan antar waktu Angka Melek Huruf (AMH) Sumatera Utara dibandingkan capaian Nasional selama periode 4 (empat) tahun terakhir sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 secara umum mengalami tren positif (efektif). Capaian Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010 yang mencapai 97,32 persen, berada di atas capaian Nasional pada tahun yang sama mencapai 92,91 persen. Kondisi ini terus berlangsung hingga tahun 2013, dimana capaian Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Utara mencapai 98,24 persen tetap berada di atas capaian Nasional yang mencapai 96,14 persen.

Perkembangan Angka Melek Huruf di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 – 2013 bila dilihat dari komposisi laki-laki dan perempuan, berada di atas capaian nasional dan didominasi oleh laki-laki dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 98,80 persen sedangkan perempuan mencapai 97,70 persen, sebagaimana grafik berikut :

Grafik
Perkembangan Angka Melek Huruf Sumatera Utara

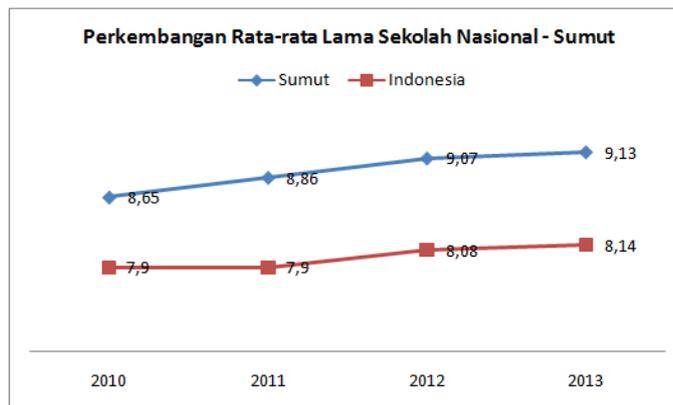




Sumber : <http://www.bkkbn.go.id/kependudukan/Pages/DataSurvey/Susenas/Pendidikan/AMH/Nasional.aspx>

b. Angka rata-rata lama sekolah

Capaian Angka Lama Sekolah rata-rata Provinsi Sumatera Utara, mengalami trend positif dengan peningkatan sejak tahun 2008 (8,5 tahun), 2009 (8,6 tahun), 2010 (8,8 tahun), 2011 (8,8 tahun) hingga tahun 2012 telah mencapai 9,1 tahun.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

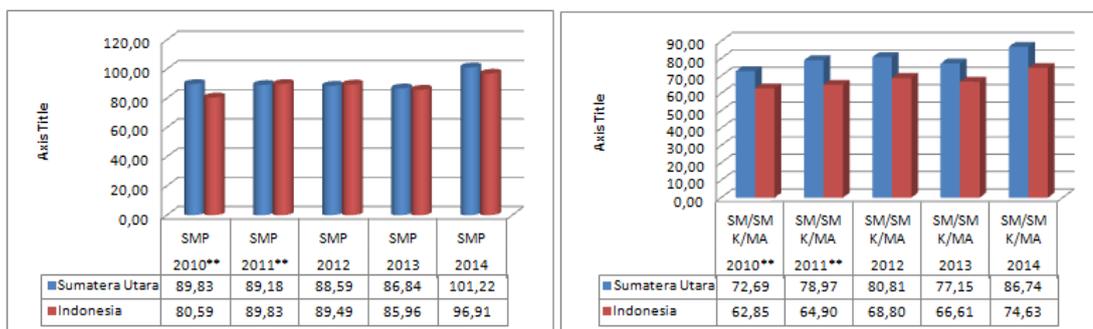
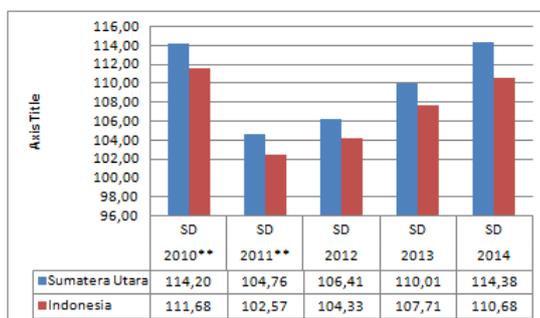
Grafik 2.5
Angka Rata-Rata Lama Sekolah

c. Angka Partisipasi Kasar

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sumatera Utara mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) secara umum mengalami trend positif hal ini dikarenakan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2010 – 2014 terus berada di atas capaian Nasional.

Pada tahun 2010, capaian APK Sekolah Dasar (SD) Provinsi Sumatera Utara sebesar 114,20 persen, berada di atas capaian Nasional pada tahun yang sama sebesar 111,68 persen. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sumut 89,63 persen sedangkan Nasional 80,59 persen, APK SMA Sumut 72,68 persen sedangkan Nasional 62,85 persen. Trend positif ini terus membaik hingga tahun 2014 APK SD Sumut (114,38 persen), SMP (101,22 persen), SMA (86,74 persen), sedangkan capaian

Nasional untuk APK SD (110,68 persen), SMP (96,91 persen) dan SMA (74,63 persen), sebagaimana grafik berikut :



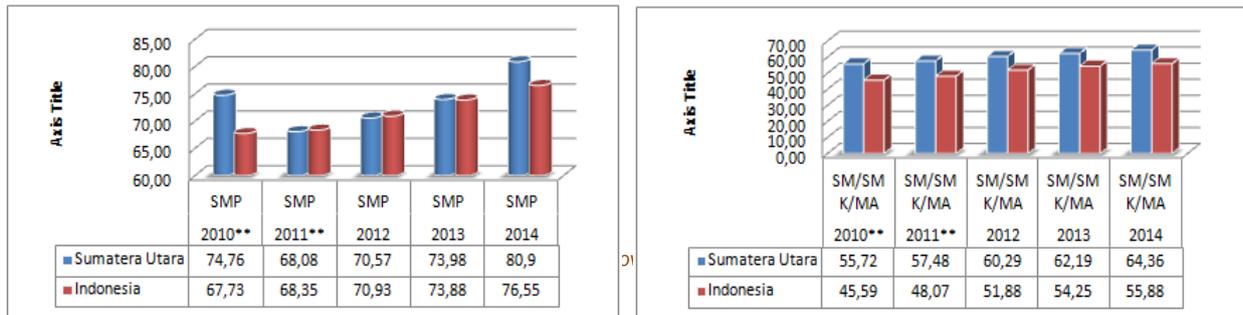
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Grafik. 2.6
Angka Partisipasi Kasar Provinsi Sumatera Utara

e. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Utara mengalami trend positif dengan peningkatan di seluruh jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMTA). Pada tahun 2010, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 95,33 persen, SMP (74,76 persen), SMTA (55,72 persen). Pada tahun 2011, APM SD (91,61 persen), SMP (67,05 persen), SMTA (55,34 persen). Hingga pada tahun 2012 APM untuk tingkat SD (93,26 persen), SMP (70,51 persen) dan SMTA (60,02 persen). Secara umum persentase Angka Partisipasi Murni (APM) di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan, namun masih terlihat adanya penurunan APM untuk jejang Sekolah Dasar (SD), hal ini menunjukkan masih kurangnya minat masyarakat Sumatera Utara untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Disamping masih terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam rangka pencapaian sasaran pendidikan di Sumatera Utara yakni Wajib Belajar 12 tahun dan untuk mewujudkan industrialisasi di Provinsi Sumatera Utara diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki pendidikan dan keahlian yang memadai atau minimal tamat Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SLTA) khususnya dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).



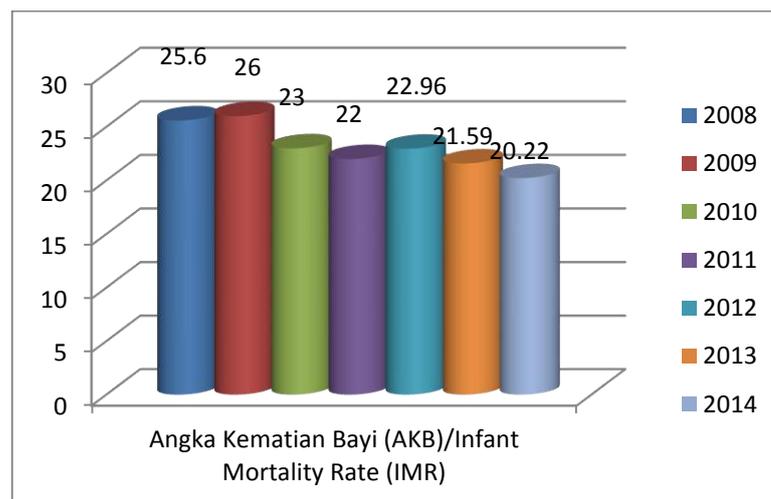
Sumber :

Grafik. 2.7
Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Utara

2) Bidang Kesehatan

Capain Indikator utama bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Utara, Indikator Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara per 1.000 kelahiran hidup cenderung mengalami perbaikan dari tahun ketahun. Sejak tahun 2008 dari 25,6 kematian bayi per 1.000 KH telah dapat diturunkan menjadi 20,22 kematian bayi per 1.000 KH, seperti terlihat pada grafik berikut :

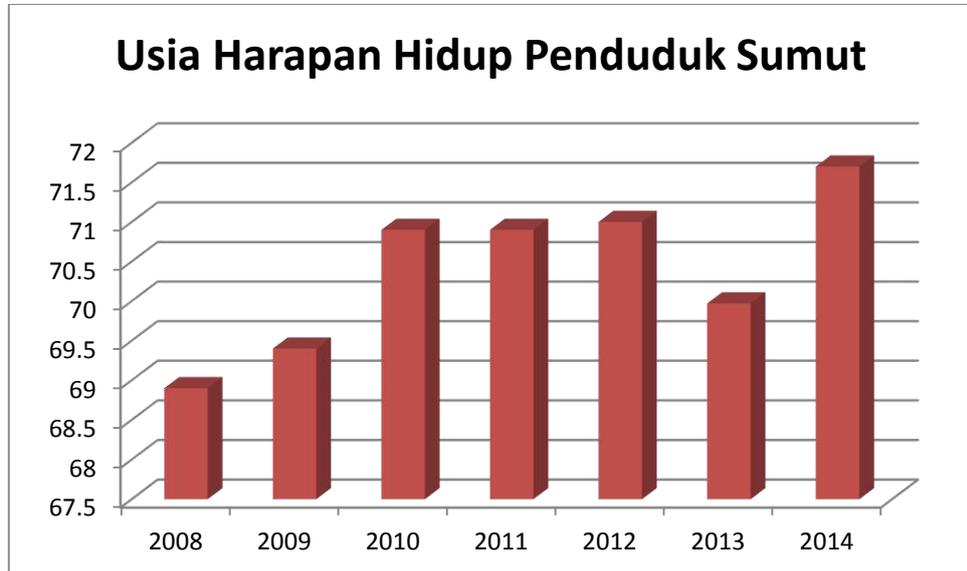


Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, data diolah

Grafik. 2.8
Jumlah Angka Kematian Bayi

a. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup penduduk Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 68,9 tahun pada tahun 2008 menjadi 69,65 tahun pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 telah mencapai 69,81 tahun dan pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 71,7 Tahun sebagaimana tertera pada grafik berikut:



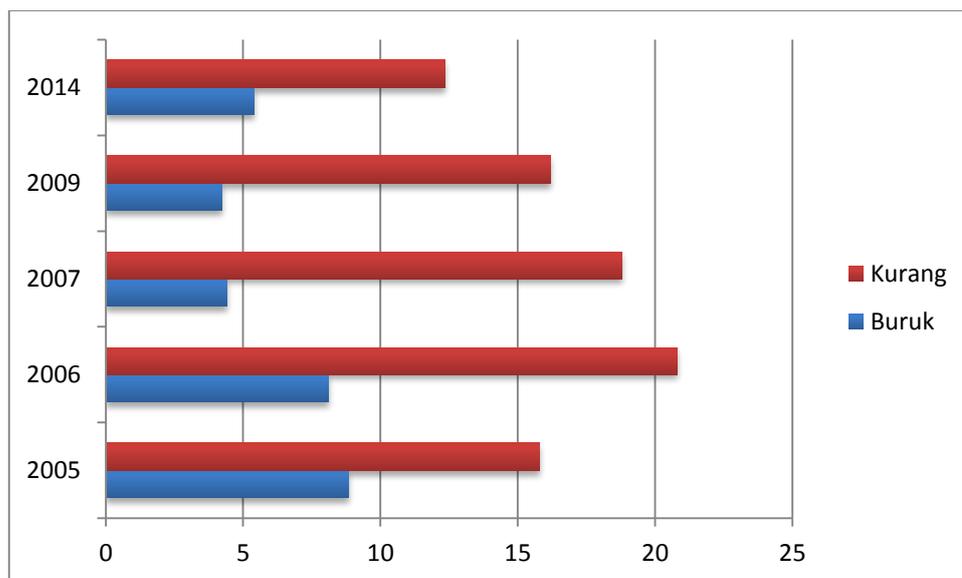
Grafik Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara 2008-2012
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Grafik. 2.9
Jumlah Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara

b. Persentase Balita Gizi Buruk

Status Gizi Balita merupakan prasyarat dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa karena status gizi anak akan mempengaruhi tingkat kesehatan fisik dan kecerdasan anak yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat produktivitas secara ekonomis.

Data Kementerian Kesehatan RI (Riskesmas, 2010), Provinsi Sumatera Utara masih tergolong provinsi dengan angka kekurangan gizi balitanya diatas angka rata-rata nasional yakni 21,4 sementara angka rata-rata nasional 17,9, meskipun secara umum persentase gizi kurang dan buruk di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami penurunan. Meskipun demikian status gizi balita berdasarkan Berat Badan per umur menunjukkan bahwa Prevalensi buruk-kurang (underweight) provinsi Sumatera Utara, jika dibandingkan dengan angka prevalensi buruk-kurang secara nasional maka pada tahun 2013 angka prevalensi buruk-kurang di provinsi Sumatera Utara (22,4 persen yang terdiri dari 8,3 persen gizi buruk dan 14,1 gizi kurang) lebih tinggi 2,8 persen dibandingkan dengan angka prevalensi buruk-kurang nasional (19,6 persen) (Riskesmas 2013)



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Grafik 2.10

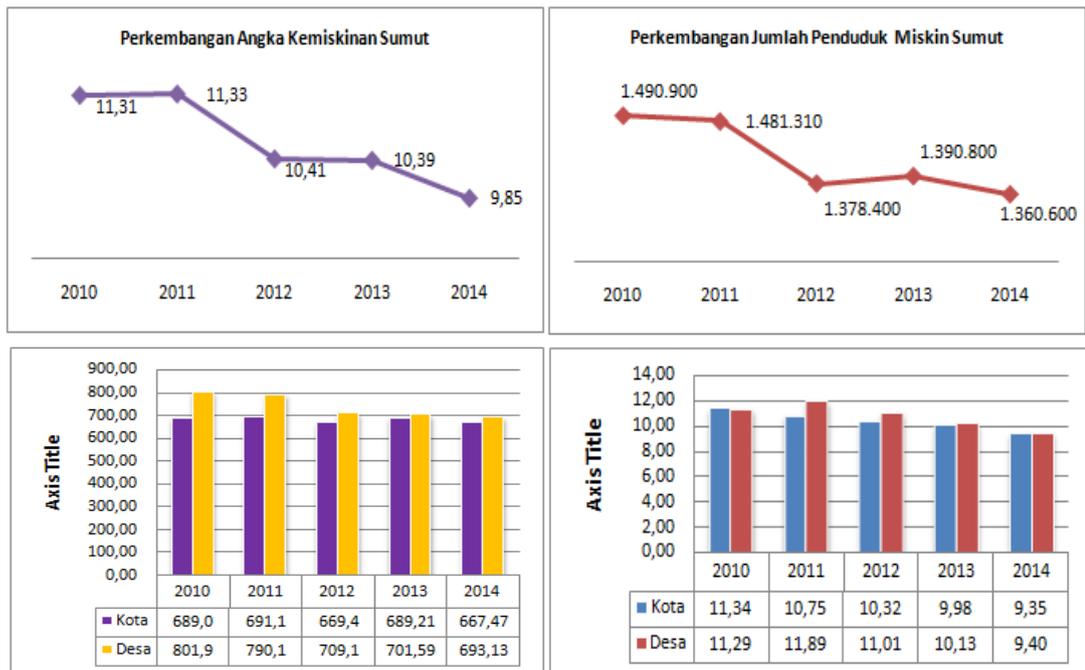
Persentase Gizi Kurang dan Buruk Provinsi Sumatera Utara 2007-2013

3) Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja

a. Persentase Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sejak tahun 2010 – 2014 mengalami perkembangan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Pada tahun 2010, angka kemiskinan di Sumatera Utara mencapai 11,31 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 1.490.900 orang. Kondisi ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2014, angka kemiskinan Sumatera Utara telah mencapai 9,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.360.600 orang.

Untuk sebaran penduduk miskin di Sumatera Utara, cenderung terfokus di wilayah perkotaan. Pada tahun 2010 sebaran penduduk miskin di Sumatera Utara wilayah perkotaan mencapai persentase sebesar 11,34 persen lebih rendah dari wilayah perdesaan sebesar 11,29 persen. Kondisi ini terus mengalami penurunan dengan tetap terfokus pada wilayah perkotaan. Namun pada tahun 2014, terjadi perpindahan fokus kemiskinan di Sumatera Utara, dimana wilayah perdesaan menjadi fokus penduduk miskin dengan capaian sebesar 9,40 persen di atas capaian fokus penduduk miskin wilayah perkotaan sebesar 9,35 persen. Hal ini merupakan bagian percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dimulai dari daerah-daerah kantong kemiskinan di desa-desa.



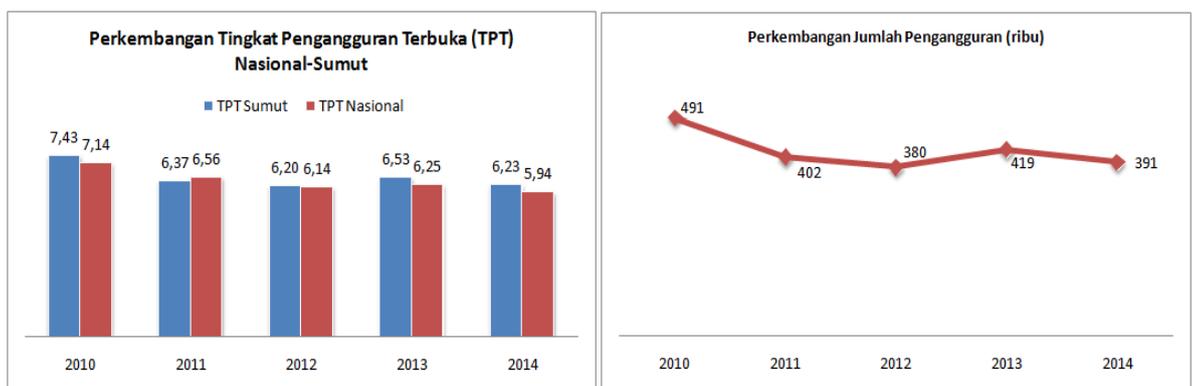
Sumber: Publikasi BPS

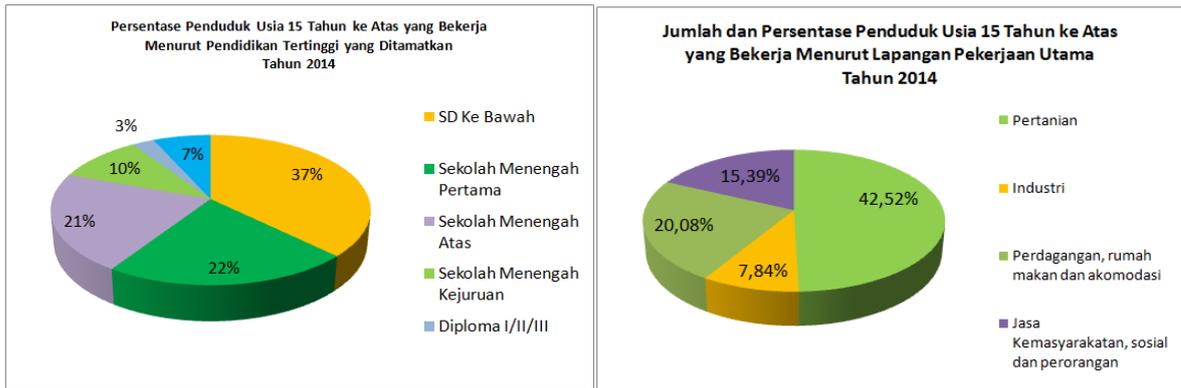
Grafik. 2.11
Perkembangan Angka dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014

b. Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

seorang yang tidak mempunyai pekerjaan) secara umum capaian Sumatera Utara berada di atas Nasional. Sejak tahun 2010 – 2014 Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara terus berada di atas capaian Nasional. Hingga tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara telah mencapai 6,23 persen, berada di atas nasional pada tahun yang sama sebesar 5,94 persen dengan jumlah pengangguran mencapai 391 ribu orang, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2013) yang mencapai 419 penganggur.

Domikasi pekerjaan bila dilihat dari besaran jumlah penduduk usia 15 tahun yang bekerja pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) mencapai 37 persen, Sekolah Menengah Pertama 22 persen, Sekolah Menengah Atas 21 persen, Sekolah Menengah Kejuruan 10 persen dan Perguruan Tinggi 10 persen dengan fokus pekerjaan pada sektor pertanian yang mencapai 42,52 persen, kemudian disusul oleh sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi (20,08 persen), sektor Jasa 15 persen dan Industri 7 persen.





Sumber: Publikasi BPS

Grafik 2.12

Perkembangan Kondisi Ketenaga Kerjaan Provinsi Sumatera Utara

c. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani)

Kondisi keamanan di Provinsi Sumatera Utara dilihat dari angka kriminalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.21. Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

Kasus	2012	
	Kejadian	Kejadian
Pembunuhan	152	152
Penganiayaan Berat	3.892	3.892
Penculikan	18	18
Pencurian dengan Kekerasan	1.145	1.145
Pencurian dengan Pemberatan	7.198	7.198
Pencurian Ranmor	7.232	7.232
Pencurian Kawat Telepon	5	5
Pemeriksaan	217	217
Pembakaran	142	142
Senpi/Handak	29	29
Pemerasan	619	619
Penyelundupan	15	15
Jumlah	20.659	20.659

Sumber : Polda Sumut, 2014

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pencapaian kinerja pada aspek layanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terdiri dari :

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Hasil capaian kinerja layanan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari :

2.1.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Selain jumlah penduduk yang besar, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah 38 relative besarnya disparitas ketersediaan sarana pendidikan. Di satu pihak, di wilayah perkotaan umumnya memiliki sekolah yang berkualitas dengan biaya pendidikan yang relative mahal dan dikelola secara mandiri.

Dipihak lain, beberapa daerah masih terfokus pada peningkatan cakupan, atau masih berkuat pada peningkatan kualitas.

Persentase Angka Buta Huruf Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari tahun 2010 – 2014. Dimana pada tahun 2010 Angka Buta Huruf Sumatera Utara mencapai 2,68 persen, 2011 sebesar 3,17 persen, tahun 2012 mencapai 2,65 persen dan tahun 2013 mencapai 2,19. Hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan Sumatera Utara dalam mengentaskan buta aksara di Provinsi Sumatera Utara.

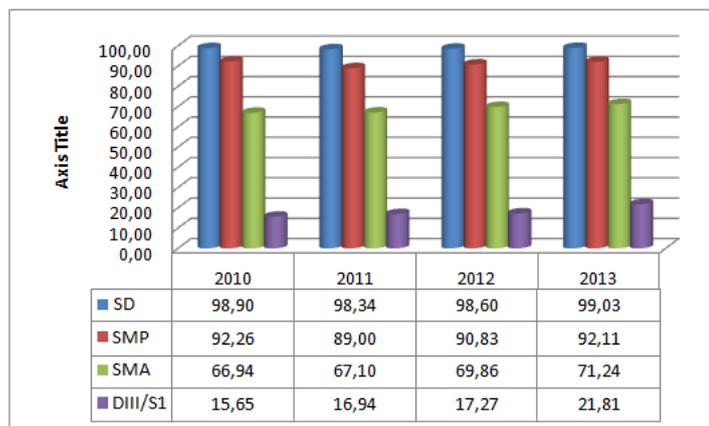
Tabel 2.22
Capaian Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Utama Bidang Pendidikan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Buta Huruf					
Usia >15 tahun	2,68	3,17	2,65	2,19	-
Usia 15-44 tahun	0,51	1,66	1,11	0,90	-
Usia >45 tahun	7,65	6,85	6,41	5,09	-
Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
Usia <7-12 Tahun)	98,9	98,33	98,59	99,03	-
Usia <13-15 Tahun)	92,26	89,1	90,85	92,11	-
Usia <16-18 Tahun)	66,94	67,54	69,73	71,24	-
Usia <19-24 Tahun)	15,65	16,42	17,36	21,81	-
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
SD/MI/Paket A	114,20	104,56	106,26	110,1	114,38
SMP/Mts/Paket B	89,83	89,02	88,55	86,84	101,22
SMA/SMK/MA/Paket C	72,69	79,69	80,58	77,15	86,74
Angka Partisipasi Murni (APM)					
SD/MI/Paket A	95,33	91,46	93,26	95,64	93,59
SMP/Mts/Paket B	74,76	67,96	70,51	73,98	80,9
SMA/SMK/MA/Paket C	55,72	57,83	60,02	62,19	64,36

Sumber : BPS Indonesia

a. Angka partisipasi sekolah (APS)

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 – 2013 dari jenjang sekolah SD – DIII/S1 secara umum mengalami trend positif. Dimana pada tahun 2010 Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 98,90 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2013 (99,03 persen). APS tingkat SMP pada tahun 2010 (92,26 persen) mengalami penurunan pada tahun 2013 (92,11 persen). APS jenjang SMA pada tahun 2010 (66,94 persen) mengalami kenaikan pada tahun 2013 (71,24 persen) dan APS DIII/S1 pada tahun 2010 (15,65 persen) mengalami kenaikan pada tahun 2013 (21,81 persen). Namun bila melihat partisipasi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga ke Perguruan Tinggi (DIII/S1) masih terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya keinginan masyarakat di Sumatera Utara untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.



Sumber :

Grafik. 2.13
Persentasi Partisipasi Sekolah Provinsi Sumatera Utara

b. Ratio Ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas pada berbagai jenjang pendidikan dasar

Tabel. 2.23
Ratio ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas
Pada berbagai jenjang pendidikan tahun 2010-2014

NO	Jenjang Sekolah	Tahun				
A.	Jumlah Gedung Sekolah	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD	8,050	10,292	8,172	9432	9483
2	SMP	1,873	2,230	2,040	2357	2388
3	SMA	861	950	869	868	1002
4	SMK	681	834	678	678	919
B.	Jumlah Ruang Kelas					
1	SD	48.005	68,268	61,255	84481	61200
2	SMP	26.997	17,010	17,807	19202	19495
3	SMA	7.745	9,445	9,188	8325	9426
4	SMK	5.777	6,639	6,467	7223	8085
C.	Ratio Kelas/Sekolah					
1	SD	5.96	6.63	7.49	8.95	6,45
2	SMP	14.40	7.62	8.72	8.15	8,16
3	SMA	8.99	9.94	10.57	9.6	9,4
4	SMK	8.48	7.96	9.53	8.72	8,79

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014 (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penambahan jumlah gedung sekolah, ditingkat SMP, SMA dan SMK selama tahun 2010-2014 Pada jenjang sekolah dasar pada tahun 2008 terjadi penggabungan beberapa sekolah dasar karena berkurangnya jumlah murid pada beberapa sekolah.

c. Jumlah Guru dan murid dan Rasio Guru/Murid pada berbagai Jenjang Pendidikan Dasar

Tabel. 2.24
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2010-2014 Provinsi Sumatera Utara

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD					
1.1.	Jumlah Guru	94.441	102.510	99.927	122.128	112.267
1.2.	Jumlah Murid	1.959.265	1.287.472	1.656.909	1.518.184	1.791.663
1.3.	Rasio	22%	24%	17%	12%	15,96%
2	SMP					
2.1.	Jumlah Guru	59.002	45.951	57.563		51.799
2.2.	Jumlah Murid	428.575	569.581	552.761		650.748
2.3.	Rasio	12	12	10		12,56%
3	SMA					
3.1.	Jumlah Guru	18.335	22.610	22.183	17.504	27.034
3.2.	Jumlah Murid	398.100	222.200	272.042	233.916	323.579
3.3.	Rasio	13	12	12	13%	11%
4	SMK					
4.1.	Jumlah Guru	11.726	16.019	18.374	14.178	24.146
4.2.	Jumlah Murid	300.092	220.074	234.983	228.809	267.406
4.3.	Rasio	20	30	13	16	11%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2014

Dari data diatas terlihat bahwa terjadi perkembangan yang fluktuatif pada Ratio Siswa/Guru. Angka ratio sudah cukup ideal antara 11-22 orang siswa untuk setiap orang guru. Untuk Ratio Guru/Murid pada jenjang SLTP dan SMA cenderung semakin membaik. Hanya pada jenjang SMK yang mengalami penurunan. Diharapkan dengan ratio jumlah guru/murid yang semakin ideal akan lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.

c. Rasio Pendidikan

Dilihat dari perbandingan jumlah siswa terhadap sekolah, perbandingan siswa terhadap jumlah kelas, perbandingan siswa terhadap jumlah guru, perbandingan jumlah kelas terhadap jumlah sekolah, perbandingan jumlah kelas terhadap guru dan perbandingan jumlah guru terhadap sekolah pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.25
Ratio Jenjang Pendidikan/Rasio Pendidikan
Tahun 2010-2014

No	Jenjang Pendidikan/ Rasio Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD					
	Siswa / Sekolah	2.15	1.99	202	161	188,93
	Siswa / Kelas	30	32	27	18	29,27
	Siswa / Guru	18	17	17	12	15,96
	Kelas / Sekolah	7.15	6.19	7.49	9	6,45
	Kelas / Guru	0.61	0.53	0.61	0.69	0,54
	Guru / Sekolah	12	12	12	13	11,84
2	SMP					
	Siswa / Sekolah	3.09	2.48	279	235	272,5
	Siswa / Kelas	36	29	32	29	33,38

No	Jenjang Pendidikan/ Rasio Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Siswa / Guru	15	13	12	10	12,56
	Kelas / Sekolah	8.59	8.66	8.72	8.15	8,16
	Kelas / Guru	0.41	0.44	0.39	0.33	0,37
	Guru / Sekolah	21	19	22	24	21,69
3	SMA					
	Siswa / Sekolah	0.43	3.08	313	269	322,93
	Siswa / Kelas	35	34	30	35	34,32
	Siswa / Guru	12	11	12	13	11,97
	Kelas / Sekolah	9.69	9.12	10.57	1	9,40
	Kelas / Guru	0.34	0.33	0.41	0.38	0,34
	Guru / Sekolah	28	27	26	20	26,98
4	SMK					
	Siswa / Sekolah	0.57	3.41	346	276	290,97
	Siswa / Kelas	39	35	36	28	33,07
	Siswa / Guru	12	13	13	16	11
	Kelas / Sekolah	9.18	9.78	9.53	9.6	8,79
	Kelas / Guru	0.3	0.37	0.35	0.5	0,33
	Guru / Sekolah	30	26	27	17	26,27

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Dari data diatas terlihat bahwa Ratio Siswa/Guru sudah cukup ideal antara 11-20 orang siswa untuk setiap orang guru, namun belum terjadi pemerataan pada semua Kabupaten/Kota. Dengan tercapainya ratio ideal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara.

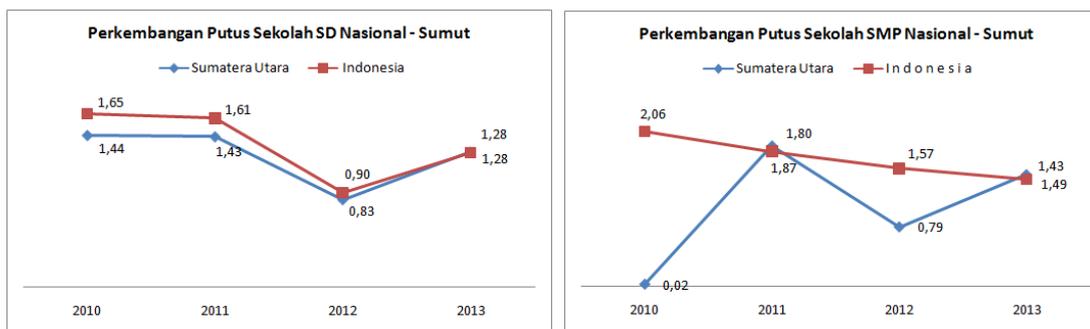
d. Fasilitas pendidikan

Dari data jumlah sekolah yang ada di Sumatera Utara pada tahun 2011, tercatat jumlah ruang kelas dalam kondisi baik berjumlah 54.986 buah (63.50%), kondisi rusak ringan berjumlah 16.484 (19.04%) dan kondisi rusak berat berjumlah 15.121 (17.46%). Hal ini menuntut adanya penanganan segera agar target indikator pendidikan dapat tercapai.

e. Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Utara masih memperlihatkan trend negatif, karena capaian Angka Putus Sekolah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 - 2013 terus berada di atas capaian Nasional, sebagaimana grafik berikut :

Tabel 2.23.
Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dasar 2010-2013





Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

f. Angka Kelulusan

Tabel 2.26.
Perkembangan Angka Kelulusan pada berbagai jenjang pendidikan dasar 2010-2014

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013
1	SD	205.289	506.881	237.821	286.681
2	SMP	171.304	172.973	148.873	282.212
3	SMA	91.717	98.199	75.413	117.254
4	SMK	60.513	57.987	40.172	-

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah kelulusan siswa pada berbagai tingkatan, selama tahun 2010-2014, hal ini menunjukkan adanya peningkatan prestasi peserta didik dalam menjalani pendidikannya disekolah. Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang.

Tabel 2.27.
Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi

No	Jenjang Pendidikan Guru Sekolah	Tahun									
		2010		2011		2012		2013		2014	
		S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2
1	SD	204.006	65	22.446	71	40.605	192	55.764	447	71.369	703
2	SMP	21.825	148	24.007	162	36.170	358	34.141	912	32.824	1.001
3	SMA	15.290	364	16.819	400	22.183	736	17.881	1.396		
4	SMK	10.013	90	11.014	99	15.531	739	11.063	399		
	Jumlah	251.134	667	74.286	732	114.489	2.025	118.849	3.154		

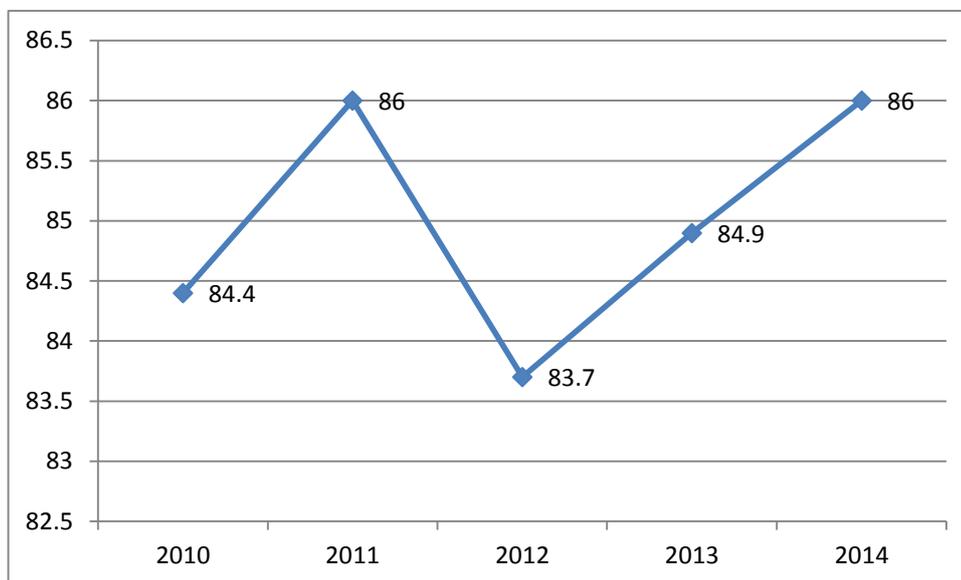
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Pemerintah provinsi Sumatera Utara secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas guru melalui program sertifikasi dan pemberian beasiswa untuk peningkatan jenjang pendidikan guru dari S0 ke S1 dan dari S1 ke jenjang S2. Dari data diatas terlihat peningkatan jumlah yang cukup signifikan sehingga dalam lima tahun terakhir (2009-2013) terjadi peningkatan kualifikasi guru berpendidikan S2.

2.1.3.1.2. Kesehatan

Pencapaian kinerja Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2014 dapat digambarkan dari capaian indikator kinerja yang ditetapkan didalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 sebagai berikut:

1. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan



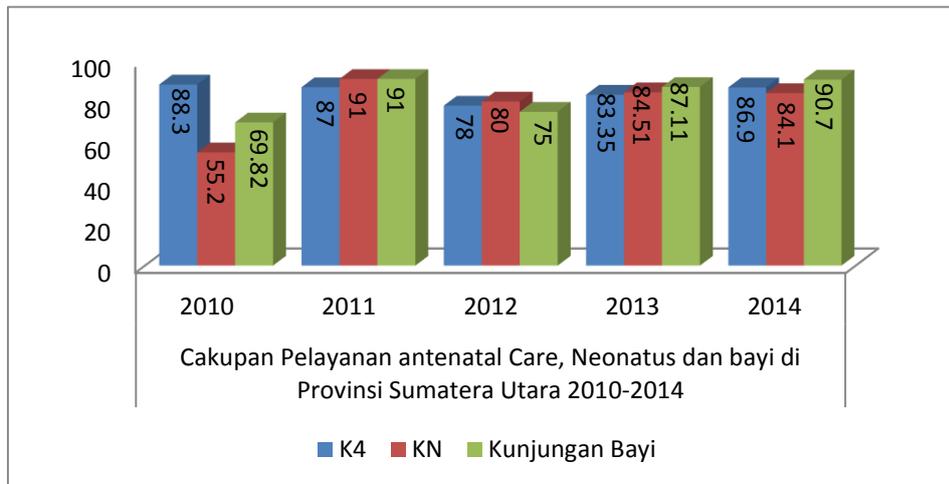
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2010-2014

Grafik. 2.14
Persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan
Tahun 2010-2014

Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu 2010-2014 menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2010, cakupan indikator ini mencapai 84,4 persen dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 84,9% pada tahun 2013 menjadi 86% pada tahun 2014. Diharapkan pada Tahun 2015 dapat dicapai menjadi 87%.

2. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan kunjungan bayi

Kunjungan antenatal care (K4) di Provinsi Sumatera Utara meningkat dari 78% pada tahun 2012 menjadi 84,10% pada tahun 2014, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan (90%). Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3) dan kunjungan bayi masing-masing sebesar 86,90% dan 90%, mencapai target yang telah ditetapkan.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2010-2014

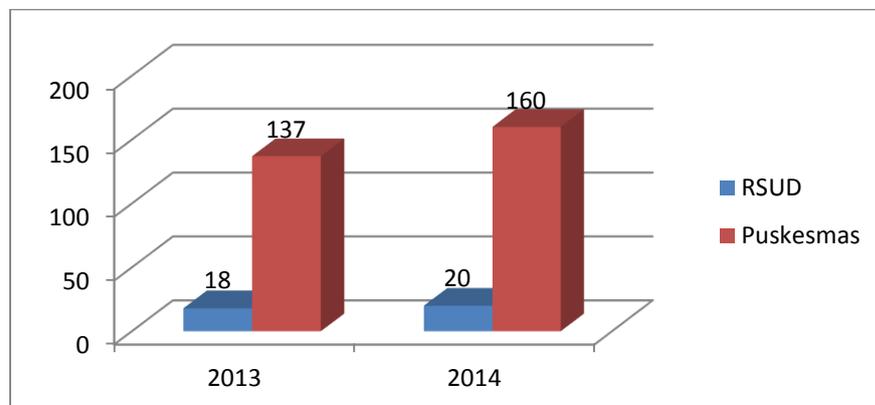
Grafik. 2.15

Persentase Antenatal Care (K4), Kunjungan Neonatus(KN Lengkap) dan Kunjungan Bayi Tahun 2010 - 2014

3. Sumber daya kesehatan pada Pelayanan kesehatan dasar dan Rujukan

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan didukung dengan ketersediaan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta. Di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014, terdapat 211 Rumah Sakit (RS), terdiri dari 35 RS pemerintah, 3 RS Khusus Pemerintah, 10 RS TNI/Polri, 13 RS BUMN, 30 RS Khusus swasta dan 120 RS swasta, serta tersedia 570 unit Puskesmas dan 1.992 unit Puskesmas Pembantu.

Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONEK berjumlah 160 Puskesmas, meningkat dibandingkan dengan jumlah tahun 2013 (140 Puskesmas). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menyelenggarakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS sebanyak 20 RS, dan terdapat 9 RSUD yang telah menjadi PPK-Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

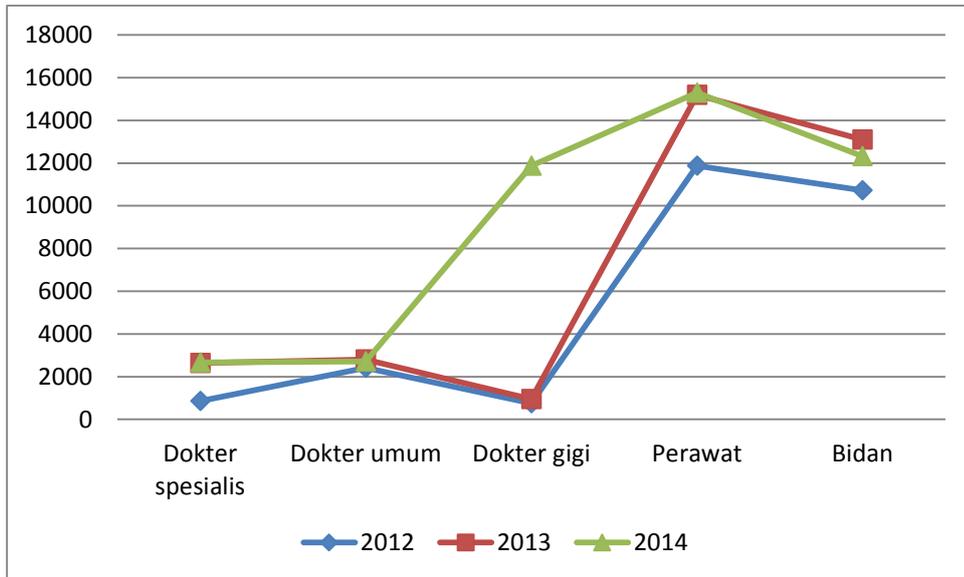


Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2014 (data diolah)

Grafik. 2.16

Jumlah RSUD mampu PONEK dan Puskesmas mampu PONEK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2014

Tenaga medis yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut : tenaga dokter spesialis meningkat dari 855 orang menjadi 2.672 orang; dokter umum meningkat dari 2.405 orang menjadi 2.705 orang; dokter gigi meningkat dari 746 orang menjadi 964 orang; perawat meningkat dari 11.876 orang menjadi 15.292 orang; dan bidan meningkat dari 10.723 orang menjadi 12.326 orang.

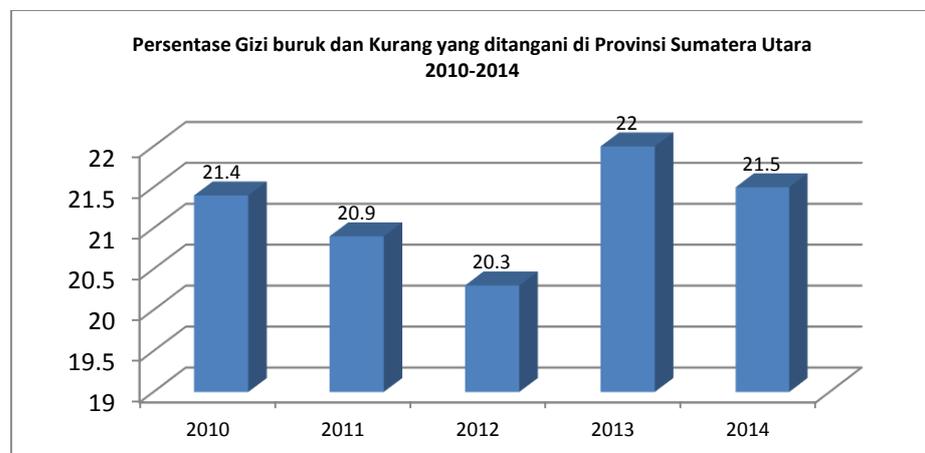


Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2014

Grafik. 2.17
Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2014

4. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Pada tahun 2014, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 21,5 balita dan keseluruhan balita yang mengalami gizi buruk tersebut mendapatkan penanganan (100%). Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan mendapatkan penanganan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 (22 kasus).

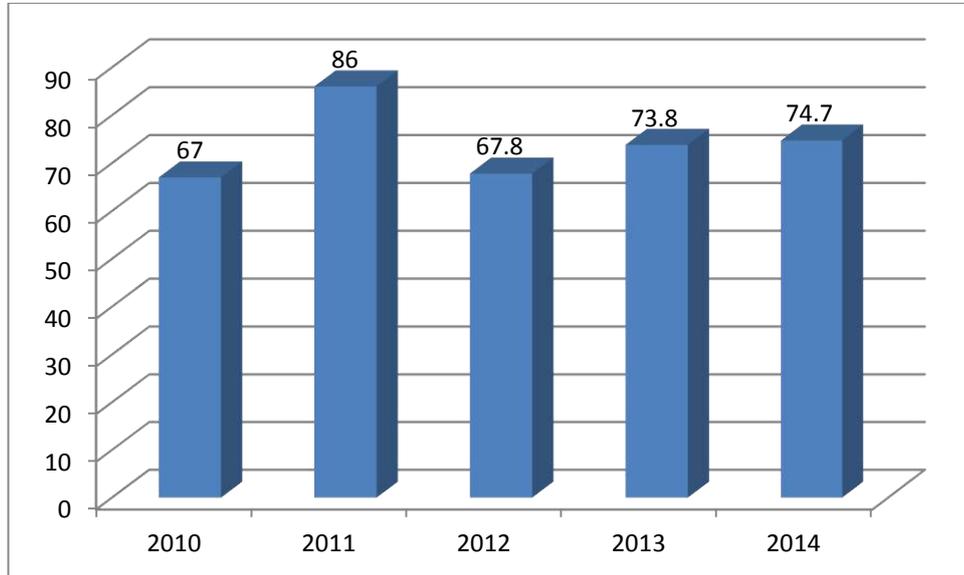


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Grafik. 2.18
Persentase Gizi Buruk dan Kurang yang ditangani di Provinsi Sumatera Utara 2010-2014

5. Desa/kelurahan *Universal Child Immunization*

Persentase desa yang mencapai UCI di Sumatera Utara mengalami fluktuatif 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2010 sampai tahun 2014. Pada tahun 2010 persentase Desa UCI mencapai 67 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2011, namun pada Tahun 2014 naik menjadi 74,7 persen namun masih dibawah target Provinsi tahun 2014 (80%)



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2014

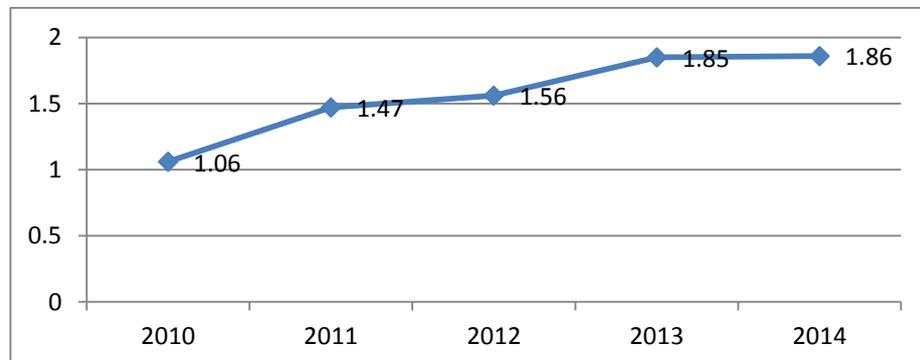
Grafik. 2.19

Persentase Desa UCI di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014

Persentase pencapaian desa UCI di Provinsi Sumatera Utara yang masih dibawah rata-rata nasional disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor supply side immunisasi, belum maksimalnya peran tenaga kesehatan yang bekerja di desa, revitalisasi posyandu yang belum maksimal.

6. Case Fatality Rate (CFR) Diare pada saat KLB (Kejadian Luar Biasa)

Pada tahun 2014 telah terjadi KLB diare di 5 Kab/Kota, yaitu di Kabupaten Padang Lawas 2 kali, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Mandailing Natal. Angka CFR Diare cenderung meningkat , dan masih diatas target nasional Tahun 2014 (kurang dari 1,2%)



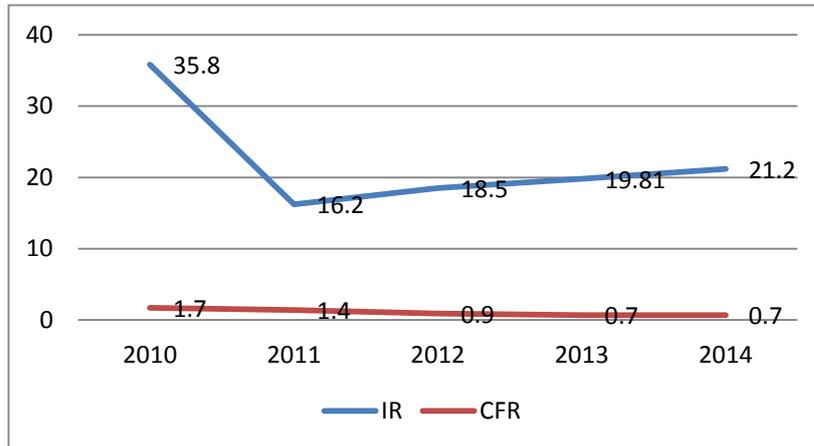
Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2014

Grafik 2.20

Persentase Angka Kematian (CFR) akibat Diare pada KLB Tahun 2010-2014

1. Angka Kesakitan dan Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk

Program Pemberantasan DBD di Sumatera Utara terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu angka kesakitan (Incidence Rate/IR) dan angka kematian (Case Fatality Rate/CFR). Target Angka kesakitan (Insiden rate) Tahun 2014 DBD <50 per 100.000 penduduk, sedangkan CFR <1%.



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2010-2014

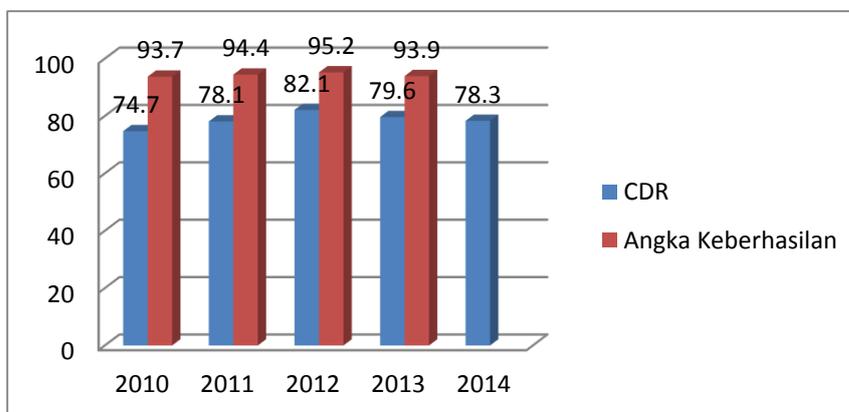
Grafik 2.21

Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2014

Angka kesakitan (IR) dan kematian (CFR) DBD per 100.000 penduduk kurun waktu 2010-2014 cenderung berada dibawah target Provinsi Sumatera Utara, meskipun dalam tiga tahun terakhir IR cenderung menurun namun CFR cenderung meningkat.

2. Angka Case Detection Rate (CDR) dan Keberhasilan Pengobatan TB

Angka CDR Penyakit TB atau Cakupan penemuan penderita TB Paru dilihat dari penemuan penderita TB Paru BTA+ yang berpotensi untuk terjadinya penularan di masyarakat. Cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA+ kurun waktu 2010-2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2010-2014

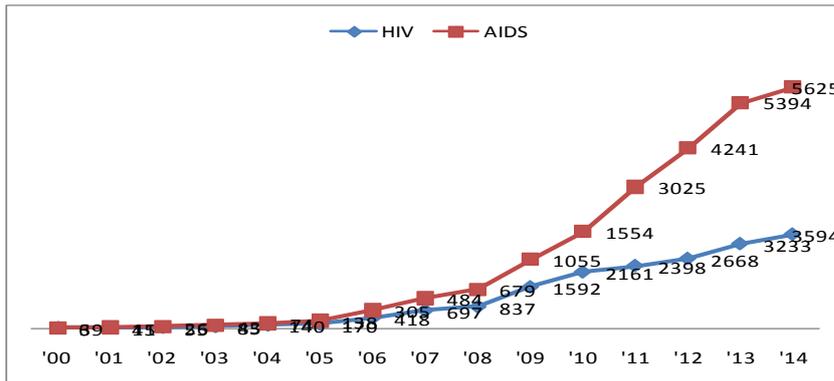
Grafik 2.22

Angka CDR (Cakupan Penemuan Penderita TB Paru BTA+) dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014

Pada tahun 2014, jumlah kasus BTA+ yang ditemukan yaitu 16.659 kasus atau 78,3% dari estimasi kasus BTA+ yaitu 21.277 kasus; dan mampu mencapai target nasional yaitu 75% lebih rendah dari tahun 2013 (76,6%). Dari grafik terlihat bahwa cakupan penemuan penderita TB Paru BTA+ mengalami peningkatan selama kurun waktu 2010-2012, namun tahun 2013 dan 2014 CDR cenderung menurun ini terjadi karena terdapat Kab/Kota tidak mengirimkan laporan

3. ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART

Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara sejak tahun 1992 kasus tersebut ditemukan dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2014

Grafik 2.23
Jumlah Kumulatif Kasus HIV/AIDS DI Sumut Tahun 2000 - 2014

Prevalensi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) mendapatkan pengobatan Anti-Retrovital Therapy (ART) meningkat dari 75% pada tahun 2013 menjadi 76% pada tahun 2014.

4. Persentase Ibu Hamil Positif yang mendapat ARV

Program Pencegahan penularan Penyakit HIV/AIDS dari ibu ke anak telah dibentuk 2 unit pelayanan PPIA dimana pada Tahun 2014 dari 130 orang ibu hamil HIV (+) yang masuk kelayanan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan) sebanyak 93 orang mendapatkan obat ARV (72%).

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum

Beberapa capaian indikator bidang pekerjaan umum sampai dengan tahun 2014, antara lain [proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik](#), [rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik](#), [Persentase rumah tinggal bersanitasi](#), [rasio rumah layak huni](#), [persentase rumah tangga pengguna air bersih](#), [persentase rumah tangga pengguna listrik](#).

- [Persentase rumah tinggal bersanitasi : 59,12 %](#)
- [Rasio rumah layak huni : 82,98 %](#)
- [persentase rumah tangga pengguna air bersih : 89,98 %](#)
- [Persentase rumah tangga pengguna listrik : 88,36 %](#)

- Bina Marga

Tabel 2.28
Proporsi Jalan Nasional Dalam Kondisi Mantap
Provinsi Sumatera Utara 2010-2014

	2010	2011	2012 (Akhir Tahun 2012)	2013 (Semester III Tahun 2013)	2014 (Semester II Tahun 2014)
Panjang Jalan (Km)	2.249,64	2.249,64	2.249,64	2.249,64	2.249,64
Kondisi Mantap (%)	77,69	81,59	87,30	81,51	80,30

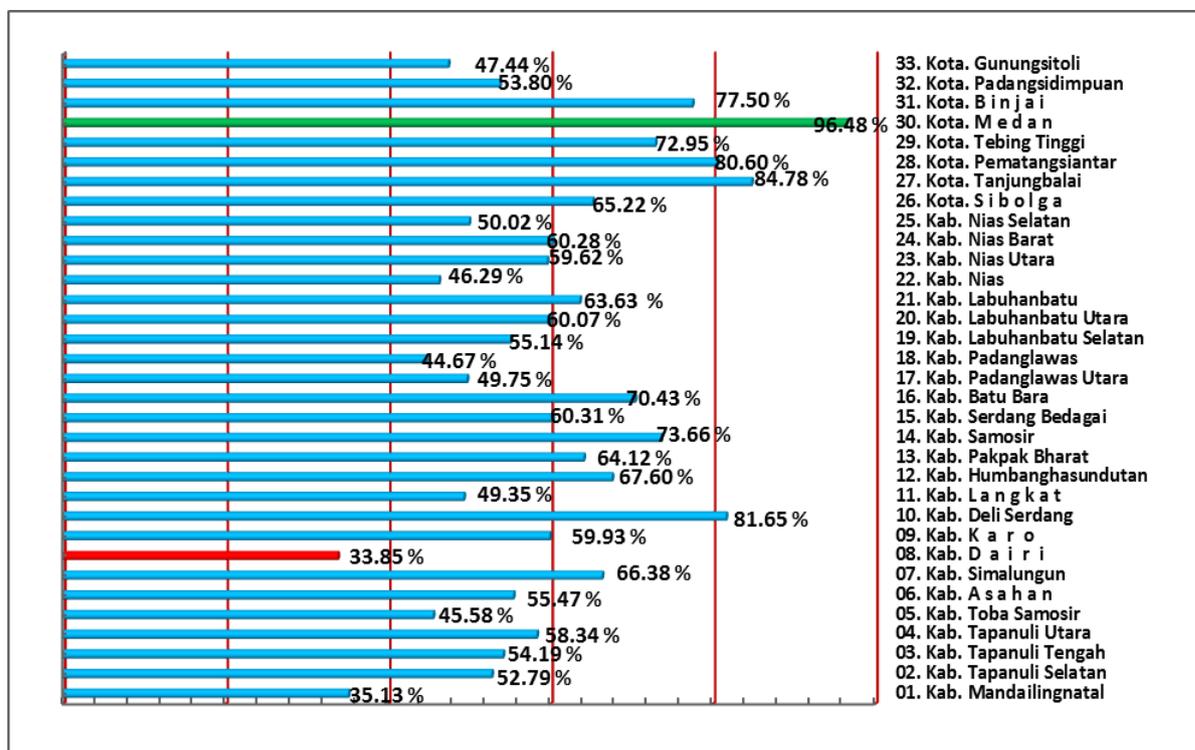
Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan

Tabel 2.29
Proporsi Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap
Provinsi Sumatera Utara 2010-2014

	2010	2011	2012 (Awal Tahun 2012)	2013 (akhir Tahun 2013)	2014 (Akhir Tahun 2014)
Panjang Jalan (Km)	2.752,41	2.754,41	3.048,50	3.048,50	3.048,50
Kondisi Mantap (%)	73,71	75,52	66,59	69,60	74,42

Sumber : Dinas Bina Marga Provsu

Tabel 2.30
Diagram Kondisi Jalan Mantap di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014
(Status Jalan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota)



Sumber : Dinas Bina Marga Provsu

Tabel 2.31
Luas Irigasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

	2011	2012	2013	2014
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi layanan optimal	52.200	53.069	52.200	53.330
Luas Total	86.999	86.999	86.999	86.999
(%) layanan optimal	60	61	60	61,3

Sumber : Dinas PSDA Provsu

2.1.3.1.4. Penataan Ruang

Provinsi Sumatera Utara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang RTRW Provsu Tahun 2003 - 2018. Saat ini Perda dimaksud sedang direvisi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta untuk mengakomodir perkembangan terkini. Proses penyusunan dan pembahasan revisi RTRW Provsu tersebut telah dimulai pada tahun 2008 dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pada Juli 2010 Gubernur telah menyampaikan Raperda RTRW Provsu ke DPRD Provsu. Kemudian DPRD Provsu membentuk Badan Legislasi Daerah (Balegda) dan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Setelah melalui Balegda, selanjutnya DPRD Provinsi Sumatera Utara membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dimana saat ini Raperda RTRW Provsu dimaksud sedang dibahas oleh Pansus Tata Ruang.

Kegiatan Pembahasan dengan Pansus Tata Ruang DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 dilakukan dengan mengadakan pertemuan/konsultasi publik ke kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara guna membahas hal-hal untuk dijadikan masukan maupun muatan terhadap substansi dari materi draft Raperda RTRW Provsu. Kabupaten/kota yang berjumlah 33 tersebut kemudian dibagi ke dalam 6 (enam) zona dan masukan-masukan yang didapatkan telah didokumentasikan untuk dibahas bersama Pansus RTRW DPRD Provinsi Sumatera Utara, tenaga ahli dan BKPRD Provinsi Sumatera Utara untuk dimuat di draft Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2013 bersama Panitia Khusus Tata Ruang DPRD Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dan menghasilkan Persetujuan Bersama antara Gubernur dengan DPRD Nomor 07/K/2013 dan 188.44/669/KPTS/2013 Tanggal 9 September 2013 tentang persetujuan bersama terhadap 4 (empat) rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2033, Raperda tentang PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara, Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Raperda Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Mempedomani amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, khususnya pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, terlebih dahulu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Rancangan Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034, yang telah mendapat kesepakatan Bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, tanggal 6 November 2013 kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Selanjutnya disampaikan bahwa menindaklanjuti hal tersebut, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara, oleh Ditjen. Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI tanggal 16 November 2013 di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah diterbitkan hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034 melalui Keputusan

Menteri Dalam Negeri RI Nomor 650-1650 Tahun 2014.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 579 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, sebagai rangkaian proses revisi Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka telah dilakukan proses integrasi Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 579 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara ke dalam Rencana Pola Ruang Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034 serta ke dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pusat data geospasial di Provinsi Sumatera Utara, sejak Tahun 2012 telah dimulai pembangunan Jaringan Pusat Data dan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Terkait status legalisasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota, 16 (enam belas) Kabupaten/Kota telah memperdakan RTRW nya. Status legalisasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut ini :

Tabel 2.32
Status Legalisasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN / KOTA	STATUS
1	Kota Medan	PERDA NO. 13 TAHUN 2011
2	Kota Binjai	PERDA NO. 12 TAHUN 2011
3	Kota Gunung Sitoli	PERDA NO. 12 TAHUN 2012
4	Kabupaten Simalungun	PERDA NO. 10 TAHUN 2012
5	Kota Pematangsiantar	PERDA NO. 1 TAHUN 2013
6	Kota Tebing Tinggi	PERDA NO. 4 TAHUN 2012
7	Kota Tanjung Balai	PERDA NO. 2 TAHUN 2013
8	Kabupaten Serdang Bedagai	PERDA NO. 12 TAHUN 2013
9	Kabupaten Batubara	PERDA NO. 10 TAHUN 2013
10	Kabupaten Tapanuli Tengah	PERDA NO. 8 TAHUN 2013
11	Kabupaten Langkat	PERDA NO. 9 TAHUN 2013
12	Kabupaten Asahan	PERDA NO. 12 TAHUN 2013
13	Kabupaten Nias	PERDA NO. 1 TAHUN 2014
14	Kabupaten Dairi	PERDA NO. 7 TAHUN 2014
15	Kota Padangsidimpuan	PERDA No. 4 TAHUN 2014
16	Kabupaten Nias Utara	PERDA No. 1 TAHUN 2015
17	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
19	Kabupaten Nias Barat	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
20	Kabupaten Nias Selatan	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
21	Kota Sibolga	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
22	Kabupaten Labuhan Batu	Di Biro Hukum
23	Kabupaten Pakpak Bharat	Evaluasi Teknis
24	Kabupaten Mandailing Natal	Evaluasi Teknis
25	Kabupaten Humbang Hasundutan	Evaluasi Teknis
26	Kabupaten Tapanuli Utara	Evaluasi Teknis
27	Kabupaten Toba Samosir	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
28	Kabupaten Samosir	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
29	Kabupaten Padang Lawas	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
30	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
31	Kabupaten Tapanuli Selatan	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur

32	Kabupaten Karo	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
33	Kabupaten Deliserdang	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara

2.1.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan, adalah sebagai berikut :

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 – 2015.
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2020.
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengendalian Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2020.

2.1.3.1.7. Perhubungan

Capaian Indikator bidang perhubungan antara lain adalah :

- Jumlah Pelabuhan Laut : **35 Pelabuhan**
- Bandar Udara : **8 Bandara**
- Terminal Bis : **40 buah**
- Angkutan darat : **3.927 unit (AKDP : 2.833 ; AKAP : 1.094)**

2.1.3.1.8. Lingkungan Hidup

Indikator lingkungan hidup antara lain dapat dilihat dari status mutu air dan kasus pencemaran air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, dan penegakan hukum lingkungan :

a. Status Mutu Air

Jumlah alokasi pelayanan status mutu air sungai dan danau di reseptor yang sensitif ditargetkan pada 6 lokasi, dan terealisasi 6 lokasi, dengan capaian kinerja 100%.

1) Sungai Deli

Status mutu air sungai deli di 7.sampling adalah status mutu air di 5 titik (Sibayakindo, Jemabatan Simalingkar B, Jembatan Jalan Ir. Juanda, Pertemuan antara Sungai Deli dan Sungai Babura, dan Jembatan Pulau Brayon) tergolong tercemar ringan. Status mutu air di 2 titik (PT. Unibis dan Jembatan Medan Labuhan) tergolong tercemar sedang.

- 2) Sungai Belawan
Status mutu air di 7 titik sampling (Jembatan Tuntungan, Pertemuan Sei Belawan-Sei Kriyo, PDAM Tirtanadi Medan, PT. Everbright, Pabrik gula Sei Semayang, PT. Rubber Hock Lie, Tirtanadi Hamparan Perak) pada sungai Belawan tergolong tercemar ringan.
 - 3) Sungai Asahan
Status mutu air Sungai Asahan di 6 titik sampling adalah status mutu air di 2 titik (Jembatan jalan Balige pasar Porsea, Jembatan Desa Meranti Pintu Pohan) tercemar ringan. Status mutu air di 2 titik (Titi Gantung-Deang-deang, Jembatan downstream PKS Pulau Raja) tergolong tercemar sedang. Status mutu air di 2 titik (Jembatan Kuning P. Simardan, Jembatan Tabayong, Desa Patembo) tergolong tercemar berat.
 - 4) Sungai Wampu
Status mutu air di 6 titik sampling (jembatan desa sogong, jembatan sei bahorok, jembatan desa tanjung lenggang, penyeberangan getek jumari desa perhiasan, jembatan jalan umar baki binjai, jembatan desa stabat) pada sungai wampu tergolong tercemar sedang
 - 5) Sungai Percut
Status mutu air sungai percut di 6 titik sampling adalah status mutu air di 2 titik (jembatan bukum desa cinta rakyat dan jembatan desa sari laba jahe) tergolong tercemar ringan. Status mutu air di 3 titik (jembatan desa aji baho batumbak, jembatan medan amplas dan jembatan desa bandar setia) tergolong tercemar sedang. Status mutu air di 1 titik (jembatan desa tembung) tergolong tercemar berat.
 - 6) Sungai Batahan
Status mutu air di 6 titik sampling (jembatan gantung desa batu, jembatan bitungan bejangkar baru/aerapa, jembatan bitungan bejangkar kampung, jembatan ramin tran-1, jembatan gantung simpang gordes, lubuk pusing) tergolong tercemar berat.
- b. Cakupan pelayanan Kasus-kasus lingkungan hidup
Target 100% capaian kinerja 59,38%
- Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima instansi Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam satu tahun sebanyak 32 kasus sedangkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti hanya 19 kasus. Capaian kinerja yang rendah disebabkan karena beberapa hal antara lain masih kurangnya koordinasi dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dalam melakukan tindaklanjut pengaduan kasus pencemaran dan atau kasus perusakan lingkungan sehingga beberapa kasus di Kabupaten/Kota tidak dapat ditindaklanjuti. Selain itu disebabkan karena kurangnya personil untuk menindaklanjuti kasus-kasus serta waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan proses penanganan kasus-kasus lingkungan.
- c. Cakupan terhadap Pelayanan AMDAL
Target 100%, capaian kinerja 100%.
Perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/RKL-RPL sebanyak 8 perusahaan dan dokumen yang sudah selesai/dalam proses dibahas oleh Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara Tahun 2014 sebanyak 8 dokumen.
- d. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
Telah dilakukan Analisa AMDAL, khususnya pada perusahaan besar di Sumatera Utara, sebanyak 19 dokumen dalam bentuk KA-ANDAL dan ANDAL/RKL-RPL, UKL-UPL dan DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, DPPL (Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup).
- e. Penegakan hukum lingkungan
Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan telah dilakukan melalui penanganan pengaduan masalah lingkungan, sebanyak 26(dua puluh enam) kasus pengaduan. 7 (tujuh) pengaduan terkait masalah pencemaran lingkungan telah diproses dengan melakukan verifikasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

2.1.3.1.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) sebagai salah satu capaian indikator pemberdayaan perempuan memperlihatkan trend positif. Dimana pada tahun 2011 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 67,39 persen dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 2 persen sehingga pada tahun tersebut IPG Sumatera Utara telah mencapai 69,82 persen.

Capaian IPG Sumatera Utara Tahun 2012 sebesar 69,82 persen ini tidak terlepas dari capaian beberapa indikator lain seperti keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun yang sama sebesar 17 persen, perempuan sebagai tenaga kerja profesional sebesar 51,62 persen dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja sebesar 35,64 persen.

Peningkatan peran serta perempuan pada bidang ketenaga kerjaan juga menunjukkan trend positif. Pada tahun 2013, persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 56,10 persen mengalami peningkatan sebesar 3,5 persen, dimana pada tahun 2012 persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Sumut hanya mencapai 60,85 persen.

Namun, peningkatan peran serta perempuan dalam berbagai sektor, tidak diikuti oleh upaya perlindungan terhadap perempuan, sehingga pada tahun 2013 telah ditemukan 20 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), angka ini mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya (2012) yang hanya mencapai 17 kasus kekerasan. Sehingga hal ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan.

2.1.3.1.10. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Indikator terkait dengan keluarga berencana dilihat dari rata-rata jumlah anak dalam keluarga menunjukkan penurunan dari 2,42 tahun 2007 menjadi 1,92 ada tahun 2008, namun pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 2,1 dan 2,07 pada tahun 2010. Hal ini perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan tekanan kepada pertumbuhan penduduk Sumatera Utara.

Disamping itu terjadi peningkatan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I, di tahun 2011 terapat 1.059.065 dari 3.138.657 kepala keluarga dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu 1.087.362 dari 3.253.024 kepala keluarga di Sumatera Utara.

2.1.3.1.11. Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang terdapat pada beberapa Kabupaten/Kota, yang menampung anak-anak terlantar, gelandangan, cacat fisik, pengemis dan lanjut usia.

- PMKS yg memperoleh bantuan sosial

Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara terdiri dari beberapa jenis, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.33.

PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

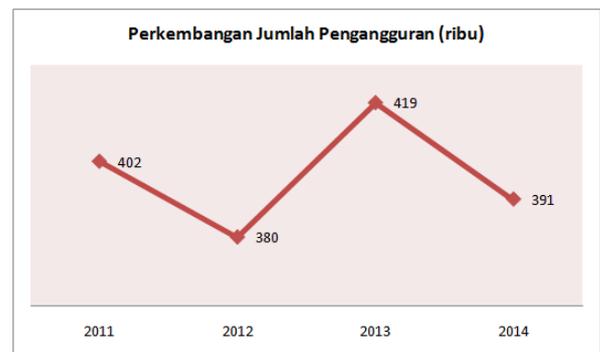
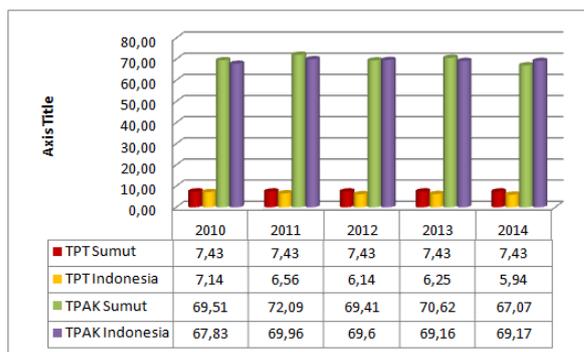
No	Jenis PMKS
1	Anak Balita Terlantar
2	Anak terlantar
3	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
4	Anak jalanan
5	Anak dengan kedisabilitas
6	Wanita rawan sosial ekonomi
7	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus

8	Lanjut Usia
9	Penyandang Disabilitas
10	Tuna susila
11	Pengemis
12	Gelandangan
13	Keluarga bermasalah sosial psikologis
14	Pemulung
15	Kelompok Minoritas
16	Bekas Narapidana
17	HIV/AIDS
18	Korban Narkotika
19	Traficking
20	Komunitas Adat Terpencil (KAT)
21	Korban Tindak Kekerasan
22	Pekerja Migran Bermasalah Sosial
23	Korban Bencana Alam
24	Korban Bencana Sosial
25	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
26	Fakir Miskin

Sumber :

2.1.3.1.12. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2014 yang mncapai 67,07 persen, sebesar 7,43 persen adalah pengangguran terbuka. Kondisi capaian ini berada di bawah capaian nasional pada tahun yang sama sebesar 6,25 persen, Sehingga hal ini juga menggambarkan bertambahnya jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Dimana pada tahun 2013 jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara sebesar 419.202 jiwa mengalami peningkatan menjadi 391.202 jiwa pada tahun 2014, sebagaimana grafik berikut :



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2014

Grafik 2.24
Kondisi Ketenaga Kerjaan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2010-2014

2.1.3.1.13. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan jumlah koperasi di Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 4,41 persen. Diantaranya koperasi aktif mengalami peningkatan sebesar 7,36 persen sedangkan Koperasi yang melaksanakan RAT meningkat sebesar 4,18 persen. Jumlah anggota koperasi menunjukkan kenaikan sebesar 1,74 persen. Jumlah tenaga kerja di bidang koperasi (manajer

dan karyawan) juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 7,18 persen manajer dan 5,47 persen karyawan, . Modal sendiri juga mengalami peningkatan, dimana modal sendiri meningkat sebesar 46,86 persen, modal luar menurun sebesar 16,35 persen. Penurunan modal luar ini menunjukkan tingkat ketergantungan koperasi terhadap permodalan dari luar koperasi semakin menurun karena dapat dipenuhi oleh permodalan dari koperasi itu sendiri baik dari simpanan wajib, simpanan pokok maupun dari pembagian SHU, Volume usaha meningkat sebesar 19,26 persen. SHU menunjukkan peningkatan sebesar 34,14 persen. Untuk jumlah UKM di Sumatera Utara periode 2013 – 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 1,14 % dngan penyerapan tenaga kerja di sektor UKM ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,11 % (Tabel. 3.33) ., Besarnya jumlah usaha kecil dan menengah ini merupakan pertanda positif jika dilihat bahwa keberadaanya merupakan persemaian usaha baru dan pengembangan kewirausahaan pada masyarakat di berbagai lapisan. Banyak UMKM yang masih bisa tumbuh atas upaya dan inisiatif sendiri, meskipun memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya.

Pada tahun 2014 Kabupaten/Kota yang tertinggi Ratio Koperasi aktif yakni Kota Medan sebesar 18 persen. dan yang terendah adalah Kabupaten Nias Utara (tabel 2.34).

Untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) pada tahun 2013 terdapat sejumlah 194 unit KSP dengan jumlah anggota 242.256 orang dan nasabah ber jumlah 254.338 nasabah, dengan total asset berjumlah ± Rp. 628 milyar dan jumlah pinjaman sebesar ± Rp.524 milyar (tabel 2.31)

Unit Simpan Pinjam (USP) sampai dengan tahun 2013, berjumlah 3.782 unit dengan jumlah anggota 835.848 orang dan nasabah berjumlah 1.002.008 nasabah. Total asset yang dikelola sejumlah Rp. 1.143 Milyar dengan jumlah pinjaman ± Rp. 1.090 Milyar (tabel 2.32)

Tabel 2.34.

Data Koperasi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2014

No	Kota/Kabupaten	Aktif	Tdk Aktif	Total	Anggota (orang)			RAT	Manajer (orang)			Karyawan (orang)			Modal Sendiri	Modal Luar	Volume Usaha	SHU
		(unit)	(unit)	Koperasi	L	P	JML	(unit)	L	P	JML	L	P	JML	(Rp 000)	(Rp 000)	(Rp 000)	(Rp 000)
1	2	3	4	5 = (3 + 4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kabupaten Deli Serdang	301	142	443	19,977	12,661	32,638	191	35	15	50	281	182	463	128,069,320	49,829,791	149,837,307	15,898,600
2	Kabupaten Karo	195	154	349	25,641	53,003	78,644	190	12	2	14	167	197	364	64,593,072	112,245,484	168,982,971	16,966,022
3	Kabupaten Langkat	280	321	601	28,480	29,807	58,287	67	28	3	31	221	275	496	224,225,724	99,112,165	248,275,309	32,894,556
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	167	209	376	17,391	8,583	25,974	76	26	6	32	192	297	489	19,036,000	32,701,220	69,755,000	4,807,000
5	Kabupaten Simalungun	272	219	491	56,067	41,098	97,165	124	17	15	32	216	107	323	158,134,682	62,165,602	166,608,709	14,568,953
6	Kabupaten Labuhan Batu	176	108	284	24,281	7,547	31,828	92	65	2	67	362	124	486	32,858,201	38,411,718	43,578,335	5,834,759
7	Kabupaten Dairi	147	127	274	17,815	5,025	22,840	85	24	21	45	105	83	188	21,753,511	16,418,610	40,632,888	6,368,057
8	Kabupaten Tapanuli Utara	195	203	398	26,693	13,619	40,312	119	85	58	143	125	125	250	25,651,579	17,807,662	71,367,350	2,497,380
9	Kabupaten Tapanuli Selatan	172	106	278	15,441	1,996	17,437	158	54	25	79	78	146	224	15,254,588	4,158,397	24,058,147	1,219,844
10	Kabupaten Asahan	538	310	848	38,825	24,995	63,820	82	53	30	83	206	325	531	138,163,150	26,656,382	244,622,741	53,171,993
11	Kabupaten Nias	73	49	122	8,336	5,694	14,030	81	17	12	29	98	72	170	5,131,952	8,996,607	30,565,746	1,304,682
12	Kota Tebing Tinggi	129	108	237	45,814	39,862	85,676	114	14	11	25	552	231	783	279,666,629	274,436,779	372,183,149	45,554,360
13	Kota Binjai	146	112	258	5,832	6,010	11,842	97	21	27	48	88	86	174	30,241,309	22,410,202	16,462,241	5,127,410
14	Kota Pematang Siantar	192	173	365	25,447	25,827	51,274	83	47	29	76	131	126	257	88,098,580	57,457,078	153,764,626	14,763,189
15	Kota Tanjung Balai	187	123	310	13,676	12,966	26,642	126	19	24	43	66	79	145	9,134,600	6,272,906	22,253,562	2,492,219
16	Kota Sibolga	199	60	259	6,369	8,165	14,534	134	22	11	33	158	98	256	23,125,748	10,610,500	37,789,084	3,886,862
17	Kota Medan	1,406	510	1,916	654,242	436,516	1,090,758	697	209	78	287	680	557	1,236	414,230,000	11,115,151	927,965,475	56,493,300
18	Kabupaten Mandailing Natal	287	87	374	19,953	17,348	37,301	185	24	11	35	62	84	146	61,464,070	164,034,510	240,895,375	3,493,806
19	Kabupaten Toba Samosir	176	219	395	8,832	9,670	18,502	92	8	1	9	61	86	147	127,304,304	1,450,600	2,195,469	658,000
20	Kota Padang Sidempuan	183	81	264	13,741	9,625	23,366	99	10	5	15	109	128	237	16,727,190	14,380,652	50,675,265	2,320,896
21	Kabupaten Humbang Hasundutan	128	137	265	15,262	13,346	28,608	120	12	8	20	87	95	182	13,998,667	10,946,567	23,505,878	1,448,350
22	Kabupaten Nias Selatan	45	77	122	5,523	5,620	11,143	84	37	25	62	91	78	169	14,973,630	8,223,338	21,801,276	1,974,650
23	Kabupaten Serdang Bedagai	198	140	338	19,631	14,531	34,162	136	12	7	19	75	169	244	19,241,593	1,202,423	40,333,752	4,438,389
24	Kabupaten Pak-pak Barat	94	29	123	5,974	12,735	18,709	88	6	3	9	81	99	180	1,716,691	2,072,345	3,560,150	169,256
25	Kabupaten Samosir	72	90	162	50,179	6,693	56,872	132	10	11	21	80	72	152	9,859,270	3,606,393	12,890,607	2,177,539
26	Kabupaten Batubara	102	173	275	6,566	6,201	12,767	78	10	12	22	87	82	169	22,512,857	14,559,115	38,168,010	3,466,750
27	Kabupaten Padang Lawas Utara	151	101	252	12,931	18,301	31,232	106	14	12	26	97	114	211	9,144,839	10,830,463	64,634,944	10,216,300
28	Kabupaten Padang Lawas	182	108	290	3,998	1,960	5,958	92	2	-	2	171	162	333	18,216,350	7,698,341	82,226,093	4,750,247
29	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	72	88	160	5,323	787	6,110	67	20	6	26	92	89	181	13,111,131	3,327,009	12,638,649	3,279,241
30	Kabupaten Labuhan Batu Utara	103	64	167	6,253	4,143	10,396	94	12	3	15	191	109	300	18,216,350	19,156,839	27,811,923	1,545,455
31	Kota Gunung Sitoli	79	87	166	5,883	3,878	9,761	93	4	2	6	85	73	158	3,462,143	4,643,638	12,572,158	697,201
32	Kabupaten Nias Utara	31	-	31	972	817	1,789	47	1	1	2	16	18	34	689,057	1,499,452	3,964,522	167,982
33	Kabupaten Nias Barat	25	23	48	1,159	1,063	2,222	74	5	2	7	40	23	63	850,346,650	119,214,800	969,561,450	115,751,850
34	Propinsi	777	255	1,032	31,885	29,443	61,328	202	120	63	183	1,292	1,063	2,355	179,747,994	283,124,892	652,378,104	60,107,832
	Jumlah	7,480	4,793	12,273	1,244,392	889,535	2,133,927	4,305	1,055	541	1,596	6,443	5,654	12,096	3,058,101,432	1,520,777,633	5,048,516,265	500,512,930

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu 2015 (data diolah)

Tabel 2.35
Data Keragaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2014

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KSP (UNIT)	ANGGOTA (ORANG)			JLH NASABAH (ORANG)	MODAL PINJAMAN (Rp.JUTA)	MODAL SEND/TTP (Rp.JUTA)	MODAL PENYERT (Rp.JUTA)	SIMPANAN DITERIMA (Rp.JUTA)	SHU BLM DIBAGIKAN (Rp.JUTA)	TOTAL ASSET (Rp.JUTA)	PINJAMAN DIBERIKAN (Rp.JUTA)	KET
			LAKI-LAKI	PEREMP	JLH									
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Deli Serdang	12	3,312	3,389	6,701	10,666	3,580	13,765	-	14,789	1,900	25,660	23,567	
2	Karo	10	19,789	7,689	27,478	27,900	1,279	8,900	-	400	400	10,979	8,090	
3	Langkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tapteng	11	10,678	2,245	12,923	13,098	1,450	12,643	-	5,680	1,900	21,673	19,759	
5	Simalungun	4	11,768	8,900	20,668	19,980	1,780	27,914	-	430	420	30,544	5,094	
6	Lab. Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Dairi	3	112	127	239	239	210	704	-	200	190	1,304	3,732	
8	Taput	4	8,900	2,670	11,570	11,809	1,400	13,416	-	10,560	4,560	28,900	25,900	
9	Tapsel	3	210	220	430	436	1,400	1,652	-	760	122	3,934	4,613	
10	Asahan	2	124	166	290	302	600	1,076	-	440	65	626	3,215	
11	Nias	3	1,267	1,190	2,457	2,560	1,000	2,917	-	168	88	4,173	10,667	
12	Tebing Tinggi	8	11,009	8,900	19,909	19,007	6,500	22,900	-	24,000	7,690	61,090	68,591	
13	Binjai	5	1,056	602	1,658	1,768	700	14,842	-	190	500	16,232	5,718	
14	P. Siantar	13	17,890	30,531	31,963	30,189	450	5,871	-	199	2,043	8,563	11,642	
15	Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Sibolga	10	456	200	656	690	450	600	-	567	400	2,017	2,100	
17	Medan	10	11,257	7,100	18,357	19,567	4,560	24,094	-	8,765	10,073	47,492	38,052	
18	Madina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Toba Samosir	13	6,789	4,588	11,377	11,590	800	3,570	-	2,000	900	7,270	13,284	
20	P. Sidempuan	7	1,288	790	2,078	2,078	300	1,762	-	560	120	2,742	1,467	
21	Humbahas	4	7,890	5,670	13,560	13,890	1,400	13,800	-	11,800	1,809	28,809	33,091	
22	Nias Selatan	2	6,757	2,314	9,071	11,675	2,100	5,678	-	12,768	1,009	14,390	13,900	
23	Pakpak Bharat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Sergei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Samosir	14	6,434	2,340	8,774	8,900	1,200	15,719	-	12,700	1,780	31,399	27,800	
26	Batubara	5	1,289	799	2,088	2,108	100	1,056	-	290	124	1,570	2,056	
27	Palas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Paluta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Labura	2	1,455	1,231	2,686	3,455	1,190	11,090	-	2,344	554	13,567	11,909	
30	Labusel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Nias Barat	1	211	194	405	929	50	617	-	456	122	1,245	1,608	
32	Nias Utara	1	111	104	215	1,078	100	440	-	430	145	1,115	1,471	
33	Gunung Sitoli	6	1,890	1,324	3,214	3,524	400	1,900	-	1,890	560	4,750	7,419	
34	Propinsi	41	21,089	12,400	33,489	36,900	17,456	189,004	-	37,900	13,870	258,230	180,062	
	JUMLAH	194	153,031	105,683	242,256	254,338	50,455	395,930	-	150,286	51,344	628,274	524,807	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu , 2015 (data diolah)

Tabel 2.36.

Data Keragaan Unit Simpan Pinjam (USP) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2014

NO	KAB/KOTA	JUMLAH USP (UNIT)	ANGGOTA (ORANG)			JLH NASABAH (ORANG)	MODAL PINJAMAN (Rp.JUTA)	MODAL SEND/TTP (Rp.JUTA)	MODAL PENYERT (Rp.JUTA)	SIMPANAN DITERIMA (Rp.JUTA)	SHU BELUM DIBAGIKAN (Rp.JUTA)	TOTAL ASSET (Rp.JUTA)	PINJAMAN DIBERIKAN (Rp.JUTA)	KET
			LAKI-LAKI	EREMPUAN	JLH 6=4+5									
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Deli Serdang	200	16.259	12.597	28.856	28.408	46.247	82.789	-	12.736	10.890	94.957	147.836	
2	Karo	212	17.296	18.643	35.939	33.490	36.941	19.560	-	4.689	1.567	62.757	80.276	
3	Langkat	110	32.890	22.610	55.500	56.748	5.735	13.789	-	9.856	690	23.445	25.768	
4	Tapteng	81	9.600	9.344	18.944	21.899	3.421	7.098	-	1.209	567	12.295	11.768	
5	Simalungun	128	23.567	11.714	35.281	35.478	8.977	15.678	-	9.046	789	34.490	30.541	
6	Lab. Batu	136	16.999	14.829	31.828	38.900	8.879	10.890	-	2.037	702	22.508	20.978	
7	Dairi	82	11.690	4.768	16.458	16.780	1.670	5.676	-	576	178	45.361	5.781	
8	Taput	108	9.002	5.678	14.680	14.567	3.146	7.230	-	2.485	390	13.251	11.124	
9	Tapsel	44	11.988	8.760	20.748	21.007	2.019	7.900	-	2.204	489	12.564	11.009	
10	Asahan	67	17.778	11.567	29.345	29.008	1.288	10.989	-	11.716	408	23.098	19.811	
11	Nias	21	12.143	5.785	17.928	17.900	895	5.890	-	3.565	190	10.540	5.678	
12	Tebing Tinggi	81	12.890	10.471	23.361	24.578	3.934	14.578	-	11.578	1.132	31.222	27.890	
13	Binjai	108	23.289	11.125	34.414	34.890	7.044	6.908	-	8.599	1.078	23.629	23.910	
14	P. Siantar	231	8.968	6.789	15.757	20.890	15.345	9.870	-	1.619	5.690	32.524	31.667	
15	Tanjung Balai	59	9.201	4.589	13.790	13.678	2.604	7.980	-	789	309	11.682	10.918	
16	Sibolga	83	12.210	4.356	16.566	24.556	3.402	7.689	-	1.090	209	12.390	8.078	
17	Medan	785	76.420	56.999	133.419	129.888	57.817	198.000	-	46.596	10.789	289.078	231.097	
18	Madina	79	11.002	7.523	18.525	17.890	2.838	5.468	-	1.567	209	10.082	11.456	
19	Toba samosir	54	11.765	5.980	17.745	16.789	2.145	6.790	-	780	308	10.023	19.800	
20	P.Sidempuan	173	13.223	7.755	20.978	28.034	5.670	12.899	-	12.567	1.678	32.814	23.516	
21	Humbahas	63	7.123	3.855	10.978	10.700	1.497	5.450	-	700	456	8.103	19.567	
22	Nias Selatan	39	13.002	5.294	18.296	17.567	2.312	5.068	-	450	290	8.120	10.700	
23	Pakpak Bharat	169	5.006	2.479	7.485	7.567	1.333	21.067	-	908	3.890	24.383	57.362	
24	Sergei	49	12.980	10.111	23.091	22.675	2.314	7.689	-	11.894	312	22.209	36.036	
25	Samosir	63	6.132	3.703	9.835	9.789	3.972	11.890	-	756	345	15.676	17.689	
26	Batubara	40	6.116	4.229	10.345	21.870	2.787	3.890	-	435	314	7.426	8.900	
27	Palas	31	8.098	650	8.748	11.790	2.414	2.980	-	367	300	6.061	5.670	
28	Paluta	41	8.908	5.436	14.344	15.600	2.677	3.800	-	799	378	7.654	5.789	
29	Labura	62	14.566	7.680	22.246	22.567	9.675	10.980	-	679	899	22.233	18.970	
30	Labusel	121	7.297	5.004	12.301	35.699	3.054	16.790	-	16.754	1.098	37.696	36.065	
31	Nias Barat	13	787	726	1.513	2.525	343	1.780	-	1.670	109	3.902	2.788	
32	Nias Utara	11	855	479	1.334	2.476	359	1.809	-	1.345	123	3.636	2.499	
33	Gunung Sitoli	66	4.099	3.990	8.089	10.006	1.393	8.900	-	7.908	678	19.675	13.681	
34	Propinsi	172	51.503	35.678	87.181	185.799	12.875	78.950	-	45.329	10.678	147.832	95.472	
	JUMLAH	3.782	504,652	331,196	835,848	1,002,008	267,022	638,714	-	235,298	58,132	1,143,316	1,090,090	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu ,2015 (data diolah)

Tabel 2. 37
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Sumatera Utara

No	Sektor	Jumlah (unit)	
		2013	2014
1	Jumlah UKM	2.823.210	2.855.399
2	Serapan Tenaga Kerja	4.234.802	4.282.098

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu ,2015 (data diolah)

2.1.3.1.14. Penanaman Modal Daerah

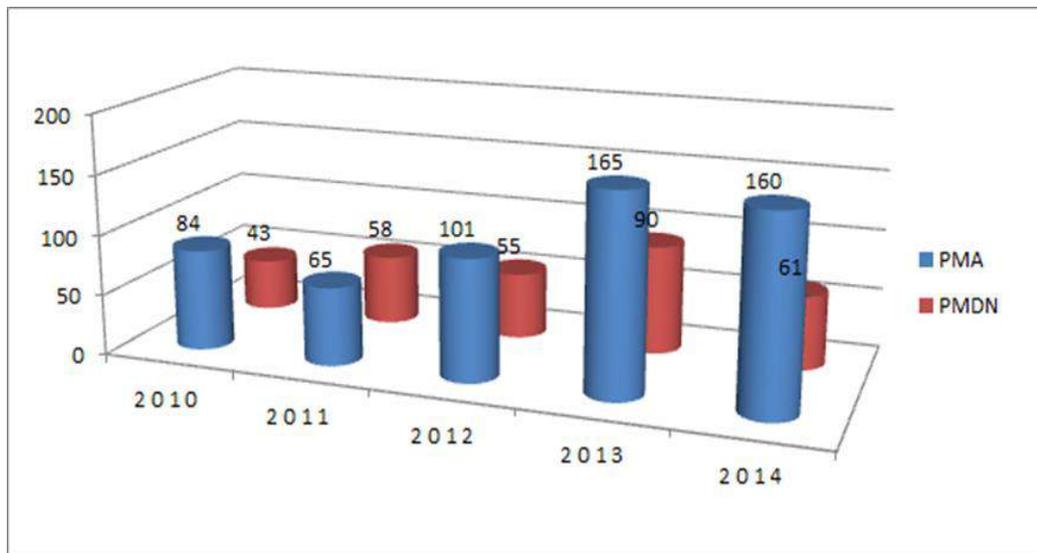
- a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dan nilai investasinya

Untuk menjelaskan jumlah investor yang telah menanamkan modalnya di Sumatera Utara untuk tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38.
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2010 – 2014
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	Jumlah Investor	43	84	127
2011	Jumlah Investor	58	65	123
2012	Jumlah Investor	55	101	156
2013	Jumlah Investor	90	165	255
2014	Jumlah Investor	61	160	221
JUMLAH		307	575	882

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu



Gambar 2.24. Grafik Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2010 – 2014 Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel dan grafik diatas terlihat kenaikan yang signifikan untuk jumlah investor PMA maupun PMDN. Jumlah investor PMDN mengalami peningkatan yang signifikan dari 43 jumlah proyek ditahun 2010 menjadi 61 proyek ditahun 2014, namun turun jika dibandingkan tahun 2013. Hal ini disebabkan karena terjadinya Pemilihan Umum Pemerintahan baru sehingga membuat investor menunggu kebijakan dari Pemerintah baru. begitu juga dengan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami kenaikan dari

semula 84 proyek menjadi 160 jumlah proyek yang terealisasi di Sumatera Utara tahun tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan (165 investor).

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan jumlah proyek dan nilai investasi baik yang masih dalam tahap persetujuan maupun yang sudah direalisasi di Sumatera Utara untuk tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39.

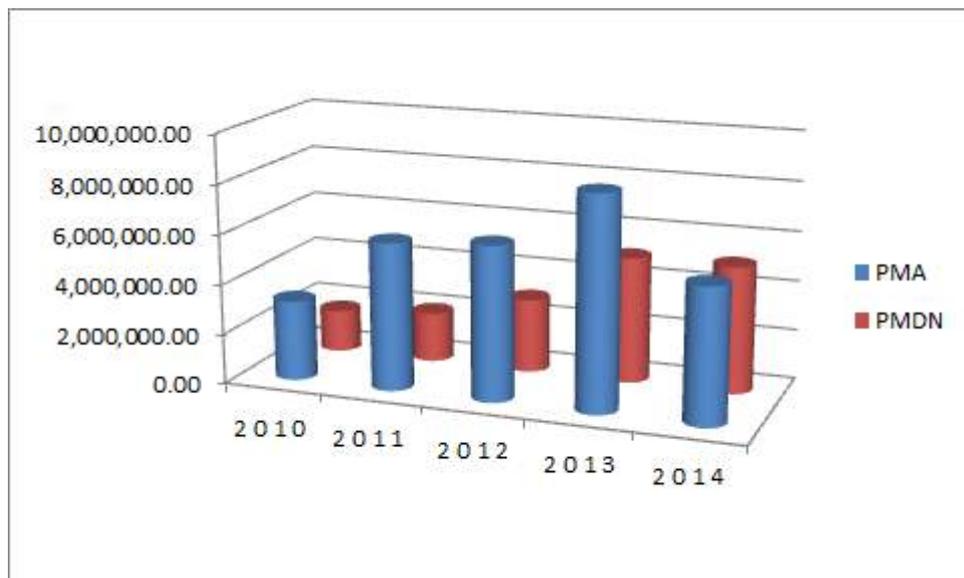
Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2010 – 2014

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US \$.000)*
2010	43	1.703.056.37	84	321.829.19
2011	58	2.004.055.78	65	658.466.72
2012	55	2.970.186.19	101	645.300.00
2013	90	5.068.881.40	165	887.452.00
2014	61	5.086.871.83	160	513.810.71
Total	307	16.833.051.57	575	3.026.858.62

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu.

- US \$ 1 = Rp. 10.000.- (2010)
- US \$ 1 = Rp. 9.000.- (2011)
- US \$ 1 = Rp. 9.600.- (2012)
- US \$ 1 = Rp. 9.600.- (2013)
- US \$ 1 = Rp. 10.500.- (2014)

Perkembangan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). terus mengalami pasang surut dalam lima tahun terakhir ini. baik dilihat dari jumlah proyek maupun jumlah dana yang terealisasi. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan nilai investasi dari Penanaman Modal Asing. Namun jika hal ini telah melampaui target investasi di tahu 2014 yaitu sebesar Rp. 10 Triliun.



Grafik 2.25. Grafik Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2010 – 2014 Provinsi Sumatera Utara (Juta Rp.)

b. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja Perusahaan Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA/PMDN)
Tahun 2010 – 2014 Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Tenaga Kerja yg Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN	14.138	12.920	27.255	30.826	27.677
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	127	123	156	255	221
3	Ratio Daya Serap Tenaga Kerja	111.32	105.04	174.71	120.89	125.24

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu



Grafik 2.26. Grafik Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA/PMDN selama 2010-2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2010 dan tahun 2013. Hal ini menggambarkan bahwa investasi pada sektor riil mengalami kenaikan dengan penggunaan teknologi masih mendominasi investasi hal ini disebabkan orientasi penyediaan lapangan kerja adalah padat karya bukan padat modal.

2.1.3.1.15. Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang sangat menarik. hal ini dapat dilihat dari suku/etnis yang tinggal di Sumatera Utara. Ada 8 (delapan) suku/etnis asli di Sumatera Utara, yaitu : Melayu, Batak Karo, Batak Toba, Mandailing, Batak Phakpak Dairi, Simalungun, Batak Angkola dan Nias. Selain itu terdapat juga beberapa suku/etnis pendatang antara lain adalah suku Jawa, Minangkabau, Cina dan Aceh. Untuk melestarikan keragaman budaya serta menjaga kerukunan antar

suku/etnis. diselenggarakan berbagai macam festival seni budaya. antara lain yaitu :

- Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang dilaksanakan rutin 1 tahun sekali.
- Pesta Danau Toba. Diselenggarakan setahun sekali di Kota Parapat.
- Festival Mejuah-juah . Diselenggarakan setahun sekali.
- SUMUT Gempar. Diselenggarakan rutin setahun sekali dan telah memperoleh rekor MURI.
- Pameran Warisan Budaya Islam.
- Festival Budaya Melayu.
- Pawai Budaya Hut RI.

b. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya.

Sarana dan Prasarana adalah salah satu hal penting dalam pengembangan maupun pelestarian seni dan budaya. Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa gedung (sarana) untuk penyelenggaraan kegiatan Seni dan Budaya. yaitu : Tapian Daya PRSU sebagai tempat penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera. Museum Taman Budaya dan Museum Negeri.

c. Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Selain memiliki kawasan wisata alam yg memukau. Sumatera Utara juga memiliki kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Benda. Situs budaya yang perlu dilestarikan antara lain yaitu :

- Candi Portibi di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Candi Bahal di Kabupaten Padang Lawas Utara
- Istana Maimun di Kota Medan.
- Masjid Raya Medan.
- Budaya Loncat batu di Kabupaten Nias.
- Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara.

2.1.3.1.16. Ketahanan Pangan

Pangan diartikan sebagai segala sesuatu dari sumber hayati (tanaman, hewan, ikan dan air) yang diolah maupun yang tidak diolah peruntukannya sebagai makanan dan minuman untuk konsumsi manusia. Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan merata dengan harga terjangkau dan berkelanjutan.

1. Regulasi Ketahanan Pangan

Menyangkut regulasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yakni :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 Nomor 14 Seri G).
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 25 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan dan Swasembada Pangan.
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

2. Ketersediaan Pangan Utama

Dalam Ketahanan pangan dikenal 3 aspek pokok yaitu Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Aspek Distribusi dan Akses Pangan serta Aspek Konsumsi. Mutu dan Keamanan Pangan.

Ketersediaan energi rata-rata penduduk Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 3.868 k.kal/kap/hari pada tahun 2013 menjadi 3.887 k.kal/kap/hari pada tahun 2014 (meningkat 0.49%). Begitu juga dengan ketersediaan protein mengalami peningkatan dari 76.18 gr/kap/hari pada tahun 2013 menjadi 76.96 gr/kap/hari pada tahun 2014 (meningkat 1.02%). Hal ini menunjukkan bahwa sumber karbohidrat

masyarakat Sumatera Utara tidak lagi mengandalkan beras. tetapi juga sumber lain seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar dan jagung. Sumatera Utara juga mengalami surplus beras sebesar 482.133 ton. dimana konsumsi beras penduduk sumatera utara pada tahun 2014 sebesar 1.740.545 ton sedangkan ketersediaan berasnya mencapai 2.194.959 ton. Jika diasumsikan konsumsi beras penduduk sumatera utara sebesar 142.735 ton/bulan. maka ketersediaan cadangan pangan Sumatera Utara aman untuk 3 bulan kedepan.

Untuk Pola Pangan Harapan (PPH) Sumatera Utara meningkat dari 83.6 pada tahun 2013 menjadi 85.0 pada tahun 2014 (meningkat sebesar 1.67%). Sedangkan tingkat konsumsi beras masyarakat Sumatera Utara menurun dari 130.61 kg/kap/tahun pada tahun 2013 menjadi 128.53 kg/kap/tahun pada tahun 2014 (menurun 1.60%) dan berada dibawah 128.65 kg/kap/tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pemerintah untuk melakukan penurunan konsumsi beras sebesar 1.5% per tahun. Hal ini dikarenakan adanya gerakan manggadong, one day no rice di Sumatera Utara.

Tabel 2.41.
Aspek Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

No.	URAIAN	Target 2014	Realisasi 2014	Pencapaian Target (%)
I.	KETERSEDIAAN PANGAN			
1.	Ketersediaan energi perkapita minimal 2400 k.kal dan penyediaan protein perkapita minimal 63gr per hari	Karbohidrat : 3.872 kkal. Protein : 76.58 gram	Karbohidrat : 3.887 kkal. Protein : 76.96 gram	Karbohidrat: 100.13 Protein : 100.49
2.	Ketersediaan Cadangan Pangan	106 Ton	-	-
3.	Kelembagaan Pangan	311 Lumbung	312 Lumbung	100.32
4.	Kelompok Lumbung Pangan	89 Gapoktan	84 Gapoktan	94.38
II.	DISTRIBUSI AKSES PANGAN			
1.	Sistem Distribusi Harga	90 %		
2.	Akses Pangan Masyarakat	62 Kelompok	70 Kelompok	112.90
III.	PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN			
1.	Penurunan Konsumsi Beras 1.5% dan Pola Pangan Harapan (PPH)	Konsumsi Beras 128.65 kg/kap/tahun; PPH 84.5	Konsumsi Beras 128.53 kg/kap/tahun; PPH 85.0	Konsumsi Beras : 100.09 PPH : 100.59
2.	Penanganan Keamanan Pangan Segar	70 %		
3.	Sertifikasi Buah dan Sayuran Segar	10 Kelompok Buah dan Sayuran	6 Kelompok Buah dan Sayuran	60
IV.	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
1.	Berkurangnya Penduduk Miskin dan Rawan Pangan	Penduduk Miskin 10.61 %. Rawan Pangan 1% per tahun	Penduduk Miskin berkurang 9.38% dan rawan pangan sebesar 5.2%	
2.	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	75 desa	27 desa	
V.	PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI KETAHANAN PANGAN			
1.	Efektivitas Koordinasi Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan	53%	60.61%	
2.	Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan provinsi dan kab/kota	5 kali	8 kali	160

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provsu 2015 (data diolah)

3. Kondisi Rawan Pangan

Kondisi sangat rawan pangan diukur dari konsumsi energi <1.400 Kkal/hari. Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini masih menghadapi kondisi rawan pangan. Dari data Susenas tahun 2009, diketahui bahwa angka proporsi penduduk sangat rawan pangan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 14,48% atau masih berada diatas angka rata-rata nasional sebesar 14,47%.

2.1.3.1.17. Perpustakaan dan Kearsipan

a. Jumlah perpustakaan

Berikut ini adalah Perpustakaan yang telah dibina Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provsu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.42.
Jumlah Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara
Jumlah Perpustakaan yang telah dibina (Mendapat Bantuan)

No	Jenis Perpustakaan	Data BPS 2008-2010	2010	2011	2012	2013	Total
1	Kabupaten/Kota	-	33	33	33	33	-
2	Kecamatan	-	30	10	-	50	-
3	Desa/Kelurahan	177	192	100	132	1321	177
4	PAUD/TK	-	-	10	-	10	-
5	SD	-	-	20	B	20	-
6	SMP	-	20	14	B	34	-
7	SMU	-	20	14	B	34	-
8	SMK	-	-	20	B	20	-
9	Pondok Pesantren	-	10	10	-	30	-
10	Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta)	6	6	6	-	24	6
11	Masjid	-	10	10	-	30	-
12	Gereja	-	10	10	-	30	-
13	Masyarakat/TBM	20	35	8	-	92	20
14	RSUD	-	10	-	-	20	-
15	Puskesmas	-	-	10	-	20	-
16	Khusus/Instansi	-	30	8	B	48	-
17	Lembaga Pemasyarakatan	1	5	10	-	17	1
18	Panti Sosial	-	12	-	-	12	-

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2014

b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Berikut ini adalah grafik tingkat kunjungan Pemustaka tiap tahunnya ke Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 2.43
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun

Tahun	Jumlah
2010	589.553
2011	593.834
2012	594.443
2013	100.000



Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara

Grafik 2.27. Jumlah pengunjung perpustakaan per-tahun (dalam ribuan) 2010-2014

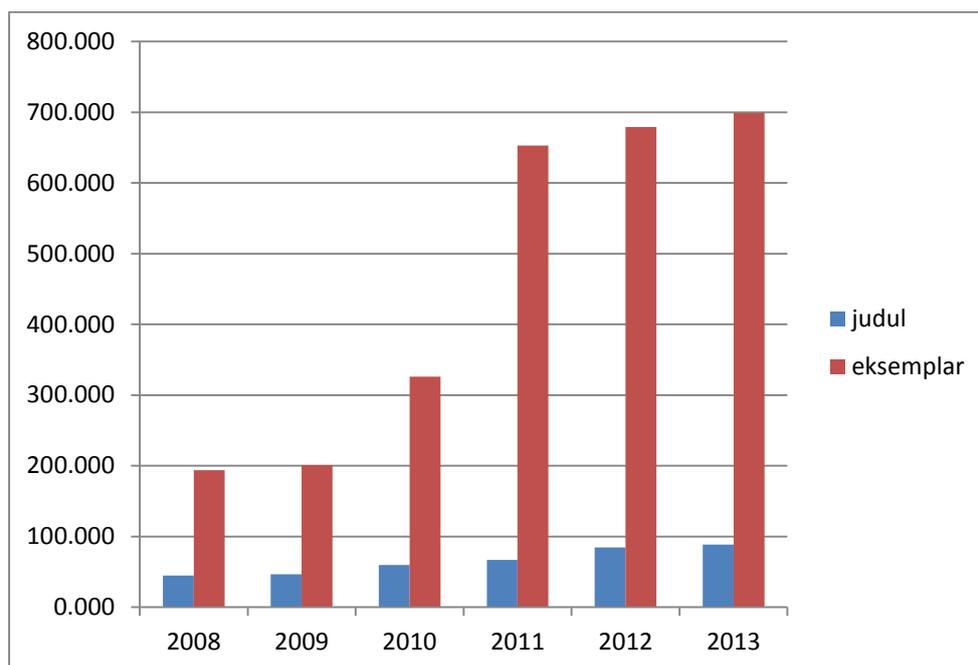
d. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Berikut ini adalah grafik koleksi buku yang ada di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara :

Tabel. 2.44
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan
Provinsi Sumatera Utara

TAHUN	JUDUL	EKSEMPLAR
2009	46.433	201.067
2010	59.855	326.170
2011	67.084	652.780
2012	84.419	679.289
2013	88.694	699.204

Grafik perkembangan jumlah dan Judul Buku dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Grafik 2.28
Grafik perkembangan jumlah dan judul buku 2009-2013

d. Kearsipan

Pengelolaan Arsip adalah proses pengendalian arsip secara efisien, efektif dan sistematis. Pengelolaan Arsip yang telah dilaksanakan di Bidang Arsip Daerah pada tahun 2010 dan 2011 adalah pengelolaan arsip dinamis aktif dan statis.

Proses/ sistem pengelolaan arsip secara baku di Bidang Arsip Daerah :

1. Mengumpulkan/ menerima arsip in aktif dan statis dari SKPD dilingkungan Pemprovsu.
2. Melakukan pemilahan arsip.
3. Melakukan pencatatan atau pendeskripsian arsip.
4. Melakukan manuver kartu deskripsi dan fisik arsip.
5. Melakukan penomoran arsip.
6. Membungkus arsip.
7. Membuat DPAS.
8. Menyimpan arsip ke dalam boks.
9. Memberikan nomor boks arsip.
10. Menyimpan boks arsip ke dalam Roll O'Pack.
11. Memasukkan data arsip statis ke dalam jaringan.

Tabel 2.45.
Jumlah Arsip Statis yang dikelola Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara

Arsip Statis

No.	Masalah	Tahun							
		2010		2011		2012		2013	
		Arsip	Boks	Boks	Arsip	Boks	Arsip	Boks	
1.	Umum	473	45	22	23	2	70	7	
2.	Keuangan	693	135	91	42	8	870	145	
3.	Kepegawaian	150	16	8	9	1	-	-	
4.	Organisasi dan Hukum	309	19	11	2174	616	-	-	

5.	Bina Program	247	29		15	19	4	-	-
6.	Jaringan Jalan Nasional dan Propinsi	575	159		114	175	43	-	-
7.	Laporan	606	85		99	-	-	12	2
8.	Hukum Teknis dan Hubungan Partisipasi	-	-		-	-	-	2798	248
9.	Program	-	-		1	-	-	12	2
10.	Pengawasan	119	14		5	-	-	-	-
11.	Pengawasan Pemanfaatan Jalan	-	-		-	-	-	-	-
12.	Pemerintahan	-	-		-	-	-	-	-
13.	Politik	-	-		-	-	-	-	-
14.	Keamanan dan Ketertiban	-	-		-	-	-	-	-
15.	Kesra	-	-		-	-	-	-	-
16.	Perekonomian	-	-		-	-	-	-	-
17.	Pembinaan	-	-		-	-	-	-	-
18.	Pembinaan	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Usaha Tani	-	-		-	-	-	-	-
20.	Perlindungan Tanaman	-	-		-	-	-	-	-
21.	Penelitian dan Laporan	-	-		-	-	-	-	-
22.	Kesiagaan	-	-		-	-	-	-	-
23.	Produk-Produk Hukum	-	-		-	-	-	-	-
24.	Pengendalian dan Pembinaan	-	-		-	-	-	-	-
25.	Umum dan Perlengkapan	-	-		-	-	-	-	-
26.	Pajak	-	-		-	-	-	-	-
27.	Retribusi dan Pendapatan	-	-		-	-	-	-	-
28.	Pengendalian dan Pengembangan	-	-		-	-	-	-	-
29.	Pengujian	-	-		-	-	-	-	-
Jumlah		3172	502	2793	366	2442	674	3762	404

2.1.3.1.18. Komunikasi dan Informatika

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018, disebutkan bahwa ada 6 (enam) indikator kinerja bidang komunikasi dan informatika, yaitu : (1) Jumlah jaringan komunikasi; (2) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk; (3) Jumlah surat kabar nasional/ lokal; (4) Jumlah penyiaran radio/TV lokal; (5) Website milik pemerintah daerah; (6) Pameran /expo.

Berdasarkan keenam indikator tersebut, maka capaian kinerja pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah jaringan komunikasi yang tertuang dalam RPJMD Provsu ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 4 jaringan., yaitu Local Area Network, Fiber Optik, Wireless dan Internet

Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2014 target tersebut telah terpenuhi, yakni 4 jaringan. Artinya capaian kinerjanya sebesar 100 %. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan, dimana pada tahun sebelumnya jaringan komunikasi yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5 jenis (Local Area Network, Fiber Optik, Radio Link, Wireless dan VPN-IP/intranet. Hal ini disebabkan jaringan VPN-IP/Intranet tidak difungsikan lagi untuk menginput atau mengakses data/informasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SPIKD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian, pada tahun 2014 telah terbangun DRC (Data Recovery Center) di Kantor Gubernur Lt. 6. Pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah jaringan komunikasi yang ada sebanyak 4 jenis.

2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk yang tertuang dalam RPJMD Provsu ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 64,64 %. Dalam realisasinya, pada tahun 2014 target tersebut telah dapat terpenuhi sebesar 64,64 %. Artinya capaian kinerjanya sebesar 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, capaian kinerja pada indikator rasio wartel/warnet terhadap penduduk mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 8,43 %. Adapun yang menjadi faktor pendorong peningkatan pada indikator ini adalah tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan informasi dan banyaknya pelaku bisnis yang menekuni bidang pengelolaan wartel/warnet di Sumatera Utara.
3. Jumlah Surat kabar nasional pada tahun 2014 yang terpantau dan tercatat sama dengan tahun sebelumnya (2013), yaitu 8 surat kabar. Kondisi ini, juga sama dengan jumlah Surat kabar lokal yang ada, yakni sebanyak 33 Surat kabar. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator jumlah Surat kabar nasional / lokal pada tahun 2014 sebesar 100 %. Pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah Surat kabar nasional sebanyak 8 Surat kabar dan 33 Surat kabar lokal.
4. Jumlah penyiaran radio pada tahun 2014 sebanyak 200 radio dan televisi lokal di Sumatera Utara sebanyak 12 televisi. Jumlah tersebut relevan dengan target yang ditetapkan pada RPJMD Provsu, yakni sebesar 200 radio dan 12 televisi lokal. Dengan demikian, maka capaian kinerja untuk indikator jumlah penyiaran radio / televisi lokal sebesar 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, maka kondisinya sama. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah penyiaran radio dan televisi sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 200 radio dan 12 televisi.
5. Website milik pemerintah daerah pada tahun 2014 sebanyak 15 website, terdiri dari 1 website milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 14 website SKPD di lingkungan Pemprovsu. Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Provsu, yaitu sebanyak 30 website. Dengan demikian, maka capaian kinerjanya sebesar 50 %. Pada tahun 2015, diproyeksikan website milik pemerintah daerah sebanyak 35 website.
6. Jumlah pameran yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu pada tahun 2014 sebanyak 1 kali dalam setahun, yakni Pekan Raya Sumatera Utara. Jumlah ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provsu sebanyak 4 kali. Dengan demikian, capaian kinerjanya sebanyak 25 %. Pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah pameran yang dilaksanakan sebanyak 1 kali.

2.1.3.2.Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pertanian

a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

Produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedele di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46.
Produksi dan Produktivitas Padi, Jagung dan Kedele
Provinsi Sumatera Utara

No.	URAIAN	Tahun				Pencapaian Target (%) Tahun 2014
		Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014*	
1	Produksi Padi (ton)	3.549.371	3.727.249	3.771.545	3.628.968	96,22
2	Luas Panen Padi (ha)	-	742.968	-	713.254	-
3	Produktifitas Padi (kw/ha)	47,70	50,17	49,90	50,64	101,48
4	Produksi Jagung (ton pipilan kering)	1.335.970	1.183.011	1.529.636	1.159.698	75,81
5	Luas Panen Jagung (ha)	-	211.750	-	199.377	-
6	Produktifitas Jagung (kw/ha)	55,40	55,87	56,50	57,82	102,33
7	Produksi Kedele (ton)	3.645	3.229	14.131	5.705	40,37
8	Luas Panen Kedele (ha)	-	3.126	-	4.363	-
9	Produktifitas Kedele (kw/ha)	10,10	10,33	10,50	11,36	108,19

Sumber :

* : Angka Sementara BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas dapat dijelaskan pada komoditi padi baik dari sisi produksi maupun luas panen tahun 2014 mengalami penurunan dibanding tahun 2013 akan tetapi produktifitasnya meningkat dari 50.17 ku/ha menjadi 50.64 ku/ha pada tahun 2014 dan ini melebihi target RPJMD yaitu 49.90 ku/ha. Peningkatan produktivitas ini dikarenakan adanya usaha intensifikasi dengan berbagai upaya dalam rangka peningkatan produktivitas seiring dengan sulitnya melakukan ekstensifikasi luas lahan pertanian walaupun ada upaya dengan melakukan perlindungan terhadap lahan pangan berkelanjutan.

Pada komoditi jagung pada tahun 2014 terjadi penurunan baik dari sisi produksi, luas panen maupun produktivitas dibanding tahun 2013 sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya bencana alam di Kabupaten Karo yang merupakan salah satu sentra produksi jagung.

Pada komoditi kedele pada tahun 2014 terjadi peningkatan baik sisi produksi, luas panen maupun produktivitas dibanding tahun 2013. Akan tetapi peningkatan ini belum juga memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga untuk komoditi jagung maupun kedele harus menjadi perhatian bagi pihak yang terkait dengan sektor pertanian.

b. Tanaman Perkebunan

Luas areal tanaman perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47.
Luas Areal Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara menurut jenis komoditi dan perusahaan Tahun 2014*)

No	Jenis Komoditas	Luas Lahan (ha)				
		Perkebunan Rakyat	PTPN	PBSN	PBSA	Total Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7
1	Karet	395.190,02	42.525,81	102.152,43	52.710,54	592.578,80
2	Kelapa Sawit	415.040,31	313.133,27	327.646,52	145.914,18	1.201.734,28
3	Kopi Arabika	61.275,56	-	-	-	61.275,56
4	Kopi Robusta	20.659,13	-	796,86	-	21.455,99
5	Kelapa	110.480,02	-	1.735,35	1.122,82	113.338,19
6	Kakao	66.643,87	6.783,42	3.096,82	2.696,54	79.220,65
7	Cengkeh	3.110,30	-	-	-	3.110,30
8	Kemenyan	22.399,00	-	-	-	22.399,00
9	Kulit Manis	5.673,44	-	-	-	5.673,44
10	Nilam	816,01	-	-	-	816,01
11	Kemiri	10.856,54	-	-	-	10.856,54
12	Tembakau	1.795,70	1.215,24	-	-	3.010,94
13	Tebu	1.195,12	8.980,80	-	-	10.175,92
14	Pala	132,31	-	-	-	132,31
15	Lada	150,65	-	-	-	150,65
16	Kapuk	456	-	-	-	456
17	Gambir	1.988,00	-	-	-	1.988,00
18	Teh	-	2.574,12	178,04	-	2.752,16
19	Aren	5.179,10	-	-	-	5.179,10
20	Pinang	5.560,35	-	-	-	5.560,35
21	Vanili	196,75	-	-	-	196,75
22	Jarak	14	-	-	-	14
23	Kapulaga	16	-	-	-	16
24	Jambu Mete	13	-	-	-	13
Jumlah :		1.128.841,18	375.212,66	435.606,02	202.444,08	2.142.103,94

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2015

*) angka sementara

Produksi komoditas perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014. dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48.
Produksi komoditas perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014*

No	Jenis Komoditas	Produksi (ton)					
		Perkebunan Rakyat	PTPN	PBSN	PBSA	Total Produksi (ton)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Karet	327.521,03	27.940,48	124.590,75	73.263,70	553.315,96	
2	Kelapa Sawit	TBS	5.724.308,06	2.605.971,37	5.272.210,65	2.605.349,80	16.207.839,89
		MS	1.506.278,71	681.917,44	1.379.605,48	681.754,79	4.249.556,41
		IS	173.412,86	104.675,85	211.772,52	104.650,88	594.512,12
3	Kopi Arabika	49.619,37	-	-	-	49.619,37	

No	Jenis Komoditas	Produksi (ton)				Total Produksi (ton)
		Perkebunan Rakyat	PTPN	PBSN	PBSA	
1	2	3	4	5	6	7
	Kopi Robusta	8.733.79	-	769.28	-	9.503.07
4	Kelapa	93.454.00	-	2.090.38	1.266.74	96.811.12
5	Kakao	41.923.67	8.240.47	4.593.29	3.012.48	57.769.92
6	Cengkeh	424.81	-	-	-	424.81
7	Kemeyan	4.746.80	-	-	-	4.746.80
8	Kulit Manis	3.369.89	-	-	-	3.369.89
9	Nilam	212.01	-	-	-	212.01
10	Kemiri	12.701.16	-	-	-	12.701.16
11	Tembakau	1.812.95	166.16	-	-	1.979.11
12	Tebu	4.929.66	37.274.96	-	-	42.204.62
13	Pala	33.5	-	-	-	33.5
14	Lada	87.81	-	-	-	87.81
15	Kapuk	119.88	-	-	-	119.88
16	Gambir	1.842.23	-	-	-	1.842.23
17	The	-	4.418.72	192.83	-	4.611.55
18	Aren	3.202.35	-	-	-	3.202.35
19	Pinang	3.612.80	-	-	-	3.612.80
20	Vanili	64.91	-	-	-	64.91
21	Jarak	4	-	-	-	4
22	Kapulaga	15	-	-	-	15
23	Jambu Mete	2	-	-	-	2
Jumlah :		6.456.154,54	2.788.688,01	5.616.219,70	2.787.543,60	17.648.605,88

Keterangan : Untuk produksi Kelapa Sawit digunakan produksi dalam bentuk TBS (Tandan Buah Segar)

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2015

*) angka sementara

1) Kelapa Sawit

Secara umum kondisi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara cukup berkembang dengan baik. hal ini terbukti dengan terus meningkatnya produksi kelapa sawit baik milik perkebunan rakyat, swasta asing maupun nasional dan perkebunan negara (PTPN) yang di Sumatera Utara saat ini terdapat 3 BUMN Perkebunan yakni PTPN II, III dan IV.

Berikut ini akan disajikan data luas tanaman dan produksi kelapa sawit dari tahun 2010-2014 yang diperoleh dari data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.49

Luas Areal Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2010-2014

Tahun	Rincian	Perkebunan rakyat	PTPN	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
2010	Luas (Ha)	396.564	305.435	251.489	112.323	1.065.811
	Produksi (Ton)	5.221.132	4.823.524	3.107.385	1.545.758	14.697.799

2011	Luas (Ha)	405.799	306.302	248.426	115.168	1.075.695
	Produksi (Ton)	5.428.535	4.972.107	3.190.120	1.592.849	15.183.610
2012	Luas (Ha)	411.843.76	255.764.34	309.955.39	141.169.77	1.118.733.26
	Produksi (Ton)	5.511.644.29	2.531.276.00	4.911.914.42	2.483.784.76	15.438.619.47
2013	Luas (Ha)	414.915.84	313.070.66	327.561.00	145.885.00	1.201.452.50
	Produksi (Ton)	5.612.066.73	2.540.676.00	5.140.109.83	2.540.070.00	15.832.922.56
2014*)	Luas (Ha)	415.040.31	313.133.27	327.646.52	145.914.18	1.201.734.28
	Produksi (Ton)	5.724.308.06	2.605.971.37	5.272.210.65	2.605.349.80	16.207.839.89

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2015

*) estimasi angka sementara

Berdasarkan data yang disajikan di atas, diperoleh gambaran bahwa terjadi peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara dari tahun 2010-2014. Dengan rata-rata peningkatan sebesar 3.09 % per tahun. Untuk tahun 2014 terjadi peningkatan seluas 281.50 hektar dibanding tahun 2013. Peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit terjadi pada semua pengelolaan baik pada perkebunan rakyat, PTPN, PBSN maupun PBSA.

Sedangkan untuk produksi terus terjadi peningkatan dari tahun 2008 hingga tahun 2014 dengan rata-rata peningkatan sebesar 2.48 % per tahun. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi peningkatan produksi sebesar 374.917.33 ton dibanding produksi pada tahun 2013. Seperti halnya pada peningkatan luas areal, peningkatan produksi juga terjadi pada semua pengelolaan baik pada perkebunan rakyat, PTPN, PBSN maupun PBSA.

2) Karet

Secara umum kondisi perkebunan karet di Provinsi Sumatera Utara cukup relatif berkembang dengan baik. Berikut ini akan disajikan data luas tanaman dan produksi komoditi karet dari tahun 2009-2014 yang diperoleh dari data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.50.
Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Karet di Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2010-2014

Tahun	Rincian	Perkebunan rakyat	PTPN	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
2010	Luas (Ha)	376.335	85.632	64.053	39.824	565.844
	Produksi (Ton)	261.249	61.019	75.530	46.455	444.253
2011	Luas (Ha)	378.309.95	93.254.60	62.264.96	41.252.99	575.083
	Produksi (Ton)	280.445.65	65.466.39	63.005.42	50.542.88	459.460
2012	Luas (Ha)	390.951.68	42.403.05	97.897.03	50.425.35	581.677.11
	Produksi (Ton)	310.266.17	26.843.35	125.866.00	57.877.00	520.852.52
2013	Luas (Ha)	394.113.57	42.317.35	102.132.00	52.700.00	591.262.92
	Produksi (Ton)	321.099.05	27.240.40	121.469.00	71.428.00	541.236.45
2014*)	Luas (Ha)	395.190.02	42.525.81	102.152.43	52.710.54	592.578.80
	Produksi (Ton)	327.521.03	27.940.48	124.590.75	73.263.70	553.315.96

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2015

*) angka sementara

Dari data di atas terlihat bahwa secara total terjadi peningkatan luas areal tanaman dari tahun 2010 sampai 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.16 % per tahun dan produksi komoditi karet meningkat dari tahun 2010 sampai 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.73 % per tahun. Untuk tahun 2014, luas areal meningkat seluas 1.315.88 hektar dan produksi meningkat sebesar 12.079.51 ton dibanding tahun 2013.

Komoditas karet masih didominasi oleh perkebunan rakyat, pada tahun 2014 seluas 395.190.02 Ha dengan produksi sebesar 327.521.03 ton. Jika dilihat dari produktifitasnya perkebunan rakyat 0.83 ton/Ha, masih berada dibawah dari produktifitas karet hasil Perkebunan PBSN sebesar 1.22 ton/Ha dan PBSA sebesar 1.39 ton/Ha. Sedangkan produktifitas karet dari Perkebunan PTPN sebesar 0.66 ton/Ha. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan yang lebih besar kepada pertanaman karet rakyat untuk meningkatkan produktifitasnya, baik dengan penggunaan teknologi yang lebih baik atau peremajaan karet tua dengan klon yang lebih unggul.

3) Kakao

Provinsi Sumatera Utara juga merupakan salah satu daerah penghasil kakao yang terbesar di Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan luas areal dan produksi komoditi kakao di Provinsi Sumatera Utara, maka berikut ini akan disajikan data dari tahun 2008-2013 seperti tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.51.
Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Kakao di Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2010-2014

Tahun	Rincian	Perkebunan rakyat	PTPN	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
2010	Luas (Ha)	67.119	19.503	4.005	2.303	92.930
	Produksi (Ton)	39.582	20.357	3.984	2.543	66.466
2011	Luas (Ha)	66.413	11.853	2.811	2.467	83.544
	Produksi (Ton)	37.683	13.374	2.648	2.477	56.183
2012	Luas (Ha)	66.220	7.759	3.062	2.686	79.728
	Produksi (Ton)	39.800	8.810	4.198	2.872	55.682
2013	Luas (Ha)	66.623.88	6.782.06	3.096.20	2.696.00	79.196.14
	Produksi (Ton)	41.101.64	7.034.00	4.478.20	2.937.00	56.550.84
2014*)	Luas (Ha)	66.643.87	6.783.42	3.096.82	2.696.54	79.220.65
	Produksi (Ton)	41.923.67	8.240.47	4.593.29	3.012.48	57.769.92

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2015

*) angka sementara

Dari data di atas terlihat bahwa secara total terjadi penurunan luas areal tanaman dari tahun 2010 sampai 2013, sedangkan pada tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2013, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3.83 % per tahun dan produksi komoditi karet sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2010-2014 sebesar -3.16 % per tahun.

Komoditas kakao masih didominasi oleh perkebunan rakyat, pada tahun 2014 seluas 66.643.87 Ha dengan produksi sebesar 41.923 ton. Namun jika dilihat dari produktifitas masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan PTPN, PBSN dan PBSA. Untuk tiap hektar lahan hasil produksi kakao rakyat baru sekitar 0.63 ton/Ha. Sementara produktifitas kakao PTPN sebesar 1.21 ton/Ha, PBSN sebesar 1.48 ton/Ha dan PBSA sebesar 1.12 ton/Ha. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengelolaan pertanaman kakao yang dikelola oleh rakyat. Sehingga perlu pembinaan yang lebih intensif dan berkelanjutan, baik dalam budidaya maupun penanganan pasca panen dalam rangka meningkatkan harga penjualan kakao rakyat.

Sementara itu dari data pertanaman rakyat ternyata masih terdapat areal yang tidak produktif (Tanaman Tidak Menghasilkan) yang membutuhkan peremajaan seluas 64.749.32 Ha, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.52.
Luas Areal Perkebunan Rakyat tahun 2014

No	Jenis Komoditas	Luas Areal (Ha)			
		TBM	TM	TTM	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Karet	60.237.59	299.913.49	35.038.95	395.190.02
2	Kelapa Sawit	60.126.76	351.435.29	3.478.26	415.040.31
3	Kopi Arabika	14.394.43	43.208.56	3.672.57	61.275.56
4	Kopi Robusta	2.101.43	12.838.09	5.719.61	20.659.13
5	Kelapa	9.630.32	92.401.18	8.448.52	110.480.02
6	Kakao	16.536.04	47.051.72	3.056.12	66.643.87
7	Cengkeh	641.59	1.854.47	614.25	3.110.30
8	Kemenyan	817.64	19.533.07	2.048.28	22.399.00
9	Kulit Manis	1.088.59	3.874.52	710.33	5.673.44
10	Nilam	-	816.01	-	816.01
11	Kemiri	888.22	9.289.20	679.11	10.856.54
12	Tembakau	-	1.795.70	-	1.795.70
13	Tebu	-	1.195.12	-	1.195.12
14	Pala	11.8	93.54	26.97	132.31
15	Lada	14.52	111.43	24.70	150.65
16	Kapuk	70.6	315.10	70.30	456.00
17	Gambir	378.16	1.420.88	188.96	1.988.00
18	Aren	1.244.38	3.276.37	658.35	5.179.10
19	Pinang	1.117.80	4.157.90	284.65	5.560.35
20	Vanili	33.6	138.55	24.60	196.75
21	Jarak	-	11.04	2.96	14.00
22	Kapulaga	6	9.39	0.61	16.00
23	Jambu Mete	6.24	5.54	1.22	13.00
Jumlah :		169.345.71	890.949.35	64.749.32	1.128.841.18

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2015
*) estimasi angka sementara

c. **Peternakan**

1) Ternak Besar

Populasi ternak besar di Sumatera Utara yang meliputi ternak kuda, sapi, kerbau dan sapi perah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.53.
Kondisi Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara
dari Tahun 2010-2014

Jenis Ternak Besar	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kuda	3.098	3.175	3.069	2.133	2.153
Sapi	462.443	456.752	609.951	523.277	654.185
Kerbau	161.046	128.540	131.483	93.966	127.487
Sapi Perah	2.569	932	1.057	1.901	1.184
Total	629.156	589.399	745.560	621.277	785.009

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara.SUDA 2014

(*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara. 2015

Jika dilihat secara total, dari tahun 2010-2014 jumlah populasi ternak besar sangat fluktuatif. Rata-rata pertumbuhan populasi ternak besar dari tahun 2010 hingga 2014 sebesar 7.47 % per tahun. Pada tahun 2014 populasi ternak besar mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 163.732 ekor. Peningkatan populasi ini terutama terjadi pada ternak Sapi diikuti oleh ternak Kerbau dan Kuda. Sedangkan pada ternak sapi perah mengalami penurunan populasi pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 sebesar 717 ekor.

2) Ternak kecil

Kondisi populasi ternak yang dikategorikan kecil di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.54.
Kondisi Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010-2014

Jenis Ternak Kecil	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kambing	744.535	763.147	781.774	849.487	894.235
Domba	317.777	325.722	374.286	595.517	625.297
Babi	742.670	761.235	866.207	978.717	989.120
Total	1.804.982	1.850.104	2.022.267	2.423.721	2.508.652

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara. SUDA 2014

(*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara. 2014

Populasi ternak kecil pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 84.931 ekor dibanding tahun 2013. Peningkatan populasi terjadi pada ternak Kambing dan Domba sedangkan pada ternak Babi mengalami penurunan populasi pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan total populasi ternak kecil dari tahun 2010 sampai 2014 sebesar 8.79 % per tahun.

3) Ternak Unggas

Kondisi populasi ternak yang dikategorikan unggas di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.55.
Kondisi Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak
Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2010-2014

Jenis Ternak Unggas	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Ayam Ras Petelur	8.839.750	9.060.742	12.055.592	15.704.311	16.383.627
Ayam Ras Pedaging	39.376.258	40.360.663	42.813.178	46.064.412	47.528.611
Ayam Kampung	11.671.883	11.963.681	12.073.428	15.545.153	16.475.729
Itik Manila	2.569.664	2.633.909	2.790.326	2.411.989	2.526.035
Total	62.457.555	64.018.995	69.732.524	79.725.865	82.914.002

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara. SUDA 2014

(*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara. 2014

Populasi ternak unggas pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 3.188.137 ekor dibanding tahun 2013. Peningkatan populasi terbesar pada Ayam Ras Pedaging diikuti oleh Ayam Kampung, Ayam Ras Petelur dan Itik Manila. Sedangkan rata-rata pertumbuhan populasi ternak unggas dari tahun 2010 sampai 2014 sebesar 7.44 % per tahun.

d. **Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (ADHK 2010)**

Dari data diatas dapat disimpulkan tentang produktifitas dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sumatera Utara berdasarkan harga konstan. sebagai berikut :

Tabel 2.56.
Produktivitas Bahan Pangan Utama. Kontribusi Sektor Pertanian
Terhadap PDRB ADHK

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*
1.	Produktivitas Bahan Pangan (Kw/Ha)					
	- Padi (GKG)	47.47	47.62	48.56	50.17	50.64
	- Jagung	50.13	50.71	55.41	55.87	57.82
	- Kedele	12.10	10.01	9.90	10.33	11.36
2.	Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK 2010)	-	5,88	5,3	4,71	4,37
3.	Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK 2010)	25,79	25,42	24,9	24,5	23,2

Sumber : - BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

- Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

2.1.3.2.2. Kehutanan

a. Luas Kawasan Hutan

Data luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.57.
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Tahun 2006– 2014 (Ha)

Tahun	Fungsi Hutan			
	Produksi	Lindung	Hutan Konsevasi	Hutan Produksi Dikonversi
2006*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2007*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2008*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2009*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2010*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2011*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2012*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2013*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2014**)	1.346.221.88	1.206.881.32	427.007.49	75.684.33

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

*) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penujukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

***) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas menunjukkan adanya perubahan luas kawasan hutan pada fungsi hutan yang berbeda sebagai akibat diterbitkannya SK Menteri Kehutanan Nomor: SK. 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara (menggantikan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penujukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 47/P/Hum/2011 pada tanggal 23 Desember 2013). Total luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara adalah 3.055.795.02 hektar atau 42.90% dari luas total wilayah (yang sebelumnya seluas 3.742.120 hektar). Terdiri dari Hutan Konservasi seluas 427.007.49 hektar; Hutan Lindung seluas 1.206.881.32 hektar; Hutan Produksi Terbatas seluas 641.769.79 hektar; Hutan Produksi Tetap seluas 704.452.09 hektar dan Luas Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 75.684.33 hektar.

Hasil hutan baik merupakan hasil utama maupun hasil ikutan dari tahun 2009-2014 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.58.
Produksi Hasil Hutan Sumatera Utara Menurut Jenis Produksi Tahun 2010-2014

Jenis Produksi		Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
A.	Hasil Utama						
1.	Log Rimba	M ³	157.776.95	367.638.30	621.543.83	106.228.77	290.360.00
2.	Log Pinus	M ³	27.863.39	78.586.89	93.665.92	3.405.48	149.907.27
3.	Kayu Gergajian	M ³	264.955.86	233.781.35	464.866.105	360.066.032	451.953.94
4.	Kayu Lapis	M ³	37.334.43	60.427.34	45.417.480	31.467.219	104.704.67
5.	PULP	M ³	176.082.31	185.403.99	178.676.080	182.436.560	139.618.05
6.	Block Board	M ³	-	-	-	-	8.884.54
7.	Moulding	M ³	143.179.44	70.047.54	-	52.447.433	-
B.	Hasil Ikutan						

1.	Rotan	Ton	315.12	65.70	45.00	-	-
		Batang	185.02*)	-	7.654.00	-	-
2.	Arang	Ton	-	-	-	-	-
3.	Getah Tusam	Ton	572.00	518.79	56.27	-	798.52

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Batang

b. Kerusakan Kawasan Hutan

Lahan kritis adalah bidang tanah yang tidak produktif dan kurang memiliki daya dukung bagi pertumbuhan tanaman hutan. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya. sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Berdasarkan kondisinya vegetasinya, kondisi lahan dapat diklasifikasikan sebagai : sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan kondisi normal (tidak kritis).

Total luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2014 adalah 6.620.036.86 hektar, dengan tingkat kekritisannya lahan sebagai berikut:

- Tidak Kritis : 1.549.264.76 hektar
- Potensial Kritis : 1.749.347.63 hektar
- Agak Kritis : 1.520.973.87 hektar
- Kritis : 1.460.817.50 hektar
- Sangat Kritis : 339.633.10 hektar

Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa lahan dengan kategori potensial kritis memiliki persentase luas terbesar yakni 27% dari total luas lahan kritis atau seluas 1.749.347.63 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa lahan di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi kritis yang besar. Sedangkan untuk kategori lahan sangat kritis memiliki persentase 5% atau seluas 339.633.10 hektar. Untuk kategori ini memerlukan penanganan rehabilitasi lahan yang sangat prioritas.

c. Rehabilitasi hutan dan lahan

Rehabilitasi hutan adalah usaha yang dilakukan baik fisik maupun vegetative guna memulihkan nilai dan fungsi hutan serta lingkungannya, akibat mengalami kerusakan dari beberapa macam gangguan. Rehabilitasi lahan adalah upaya memulihkan kondisi dengan penanaman pohon dan konservasi tanah.

Total luas lahan yang telah direhabilitasi pada tahun 2014 adalah 27.977.99 hektar yang terdiri dari rehabilitasi di dalam kawasan hutan seluas 7.993.99 hektar dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan seluas 19.984.00 hektar. Kegiatan rehabilitasi lahan yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Provinsi Sumatera Utara meliputi kegiatan reboisasi seluas 573.50 hektar, penanaman hutan rakyat seluas 3.388.00 hektar, pembangunan kebun bibit rakyat sebanyak 173.00 unit, pembuatan dam pengendali sebanyak 5 unit, dan pembuatan sumur resapan sebanyak 5 unit.

d. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Konstan selama tahun 2010 -2012 terjadi penurunan kontribusi, walaupun nilai rupiahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan masih perlunya perhatian terhadap intensitas pengusahaan hutan, tanpa melupakan aspek pelestariannya. Untuk selengkapnya dapat dilihat ada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59.
*Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK
Tahun 2008 - 2012 Provinsi Sumatera Utara*

Tahun	Kontribusi ADHB		Kontribusi ADHK	
	(Miliar Rp.)	%	(Miliar Rp.)	%
2009	2.506	1,06	1.460	1,31
2010	2.736	0,99	1.442	1,21
2011	2.987	0,95	1.451	1,15
2012	3.196	0,91	1.504	1,12

Sumber : Statistic Indonesia , PDRB Menurut Lapangan Usaha 2009-2013

2.1.3.2.3 Energi dan Sumberdaya Mineral

a. Energi Listrik

Sistem tenaga listrik Provinsi Sumatera Utara tidak bisa dilepaskan dari sistem Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT) PT. PLN (Persero). Tenaga listrik dipasok kepada masyarakat melalui sistem terintegrasi pembangkit, transmisi dan distribusi. Karena seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah usaha PT. PLN (Persero), penyediaan tenaga listrik terintegrasi hanya dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Sistem ketenagalistrikan SUMBAGUT terdiri dari Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Sistem SUMBAGUT dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Sumber energi primer yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik sistem SUMBAGUT bervariasi dari minyak bumi, gas, batubara, air dan panas bumi.

Tabel 2.60.
Inventarisasi Pembangkit Listrik Terpasang yang Memasok Energi Listrik ke Sistem Sumbagut sampai dengan Tahun 2014

No	Lokasi Pembangkit	Kapasitas Terpasang (MW)				
		Energi Fosil		Energi Terbarukan		
		Diesel	Batubara	Air	Panas Bumi	Biomassa
Sektor Belawan						
1	PLTU. PLTGU. PLTD sewa	1.284				
Sektor Medan						
2	Glugur	36				
3	Paya Pasir	119				
4	Titi Kuning	25				
5	PLTD Sewa	335				
Sektor Pandan						
6	Sipansihaporas			50		
7	Renun			80		
8	PLTMH tersebar			5		
Sektor Labuhan Angin						
9	Labuhan Angin #1. #2		230			
Sektor Pangkalan Susu						
10	Pangkalan Susu #1. #2		440			
Independent Power Producer (IPP)						
11	Asahan I (#1. #2)			180		
12	PLTM Parlilitan			7.5		
13	PLTM Silau			7.5		
14	PLTM Huta Raja			5		
15	PLTM Karai			8.3		
16	Sibayak #1				10	
17	PLTU Growth Sumatera					11
18	PLTU Growth Asia					20
19	PLTU Rambutan					2
Jumlah		1.799	670	343.3	10	33
		2.469		386.3		
Total		2.855.3				

(Sumber : UPB PT. PLN Sumatera Utara)

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Provinsi Sumatera Utara yang memasok daya ke sistem SUMBAGUT adalah sebesar 2.855.3 MW. Selain menggunakan bahan bakar terbarukan berupa diesel dan batubara, beberapa pembangkit listrik memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi dan biomassa. Kapasitas pembangkit berbasis energi fosil dan energi terbarukan masing-masing 2469 MW dan 386.3 MW. Komposisi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yaitu sebesar 13.5 % dari total kapasitas terpasang di Provinsi Sumatera Utara

Selain Pembangkit Listrik Terpasang yang Memasok Energi Listrik ke Sistem Sumbagut, sumber daya listrik terpasang lain di Sumatera Utara yang dikelola oleh PLN Wilayah Sumut sebesar 7.500 KW yang berasal dari pembangkit listrik PLTM dan 132.000 KW yang berasal dari PLTA, tersebar di 8 lokasi. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.61.
*Inventarisasi pembangkit listrik tenaga air
 Yang dikelola PLN Persero Wilayah Sumut Status Tahun 2014*

No.				KLASIFIKASI PEMBANGKIT	DAYA TERPASANG (KW)
	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA / DUSUN		
1.	Simalungun	Tanah Jawa	Tonduhan	PLTM	2 x 200 = 400
2.	Pakpak Bharat	- Kerajaan	Kombih I	PLTM	2 x 750 = 1500
		sda	Kombih II	PLTM	2 x 750 = 1500
3.	Madina	Penyabungan	Batang Gadis	PLTM	2 x 450 = 900
4.	Humbahas	- Dolok Sanggul	Silang	PLTM	1 x 750 = 750
		- Dolok Sanggul	Sibundong	PLTM	1 x 750 = 750
5.	Tap. Utara	- Adian Koting	Raisan I	PLTM	1 x 750 = 750
		sda	Raisan II	PLTM	1 x 750 = 750
6.	Samosir	Pangururan	Boho	PLTM	1 x 200 = 200
7.	Dairi	Sumbul	Silalahi II	PLTA Renun	2 x 41.000 = 82.000
8.	Tap. Tengah	Sibolga	Sibuluan II	PLTA Sipansihaporas	1 x 50.000 = 50.000
			TOTAL	PLTM = 9 PLTA = 2	7.500 132.000

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provsu

Berdasarkan data UPB PT. PLN Sumatera Utara, kapasitas terpasang pembangkit listrik yang berlokasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebesar 463 MW. Jadi, total kapasitas terpasang pembangkit sistem SUMBAGUT yaitu sebesar 3318.3. Sedangkan daya mampu pasok pembangkit sistem SUMBAGUT hanya sekitar 1500 MW atau sekitar 45.2 % dari total kapasitas terpasang. Kemampuan pasok pembangkit relatif rendah disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Kondisi pembangkit eksisting yang sudah berumur di atas 20 tahun khususnya di pembangkit sektor Belawan dan Medan sehingga rentan mengalami kerusakan.
2. Pembangkit-pembangkit baru dibangun berbahan bakar batubara justru sering tidak stabil atau keluar sistem kelistrikan seperti PLTU Labuhan Angin (230 MW).
3. PLTU Nagan Raya (220 MW) dan PLTU Pangkalan Susu (440 MW) belum beroperasi maksimal terkendala persoalan teknis.

Penyediaan energi listrik di sisi pembangkit sangat terbantu oleh kebijakan PT. PLN (Persero) melakukan sewa pembangkit diesel (455 MW) yang tersebar di sektor Medan dan Belawan. Beban puncak sistem Sumatera Bagian Utara pada tahun 2013 dan 2014 sudah mencapai sekitar 1750 MW. Kondisi ini tidak dibarengi dengan daya mampu pasok yang hanya sekitar 1500 MW, sehingga terjadi defisit listrik sekitar 250 MW. Kondisi kelistrikan Sumatera Bagian Utara masih jauh dari kondisi ideal yaitu seharusnya memiliki cadangan listrik ideal 30 % dari beban puncak. Apabila beban puncak sistem Sumatera Bagian Utara sekitar 1750 MW maka seharusnya cadangan daya listrik sudah mencapai sekitar 525 MW.

Data Bank Indonesia pada tahun 2014, Provinsi Sumatera Utara mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5.55 %. Jika pertumbuhan kebutuhan listrik optimistik Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada angka di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata yaitu sekitar 7 % maka kebutuhan listrik pada Tahun 2015 akan mengalami kenaikan 122.5 MW sehingga beban puncak listrik dapat mencapai angka sekitar 1872.5 MW. Jika tidak maksimal perbaikan

kinerja pembangkit eksisting dan tidak adanya pembangunan pembangkit baru di Sumatera Utara maka bisa dibayangkan pertumbuhan sektor listrik tidak bisa menunjang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang relatif tinggi.

b. Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sumatera Utara relatif kecil hanya sekitar 1.31% yang terutama berasal dari galian mineral/batuan. Pertumbuhan sektor Pertambangan dan penggalan di Sumatera Utara jika dilihat dari tahun 2010 naik yaitu sebesar 1.01 % menjadi 1.31 % di tahun 2014.

Pertambangan berpotensi membawa kerusakan disekitar kawasan pertambangan akibat masyarakat sekitar yang ikut melakukan penambangan secara liar. Oleh karena itu perlu penertiban penambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat. selain itu perlu dikembangkan mata pencarian alternative bagi masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.

2.1.3.2.4. Pariwisata

Sumatera Utara memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata minat khusus. Namun jika dilihat dari kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara yang masih sangat kecil dibandingkan sektor lainnya menunjukkan kurang optimalnya penanganan pariwisata di Sumatera Utara. Salah satu faktor pendukung yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata adalah aksesibilitas menuju ke daerah wisata yang dirasa masih sangat kurang. Selain itu dukungan masyarakat pariwisata di Sumatera sangat diperlukan untuk peningkatan sektor pariwisata di Sumatera Utara. Berikut ditampilkan jumlah kunjungan wisman ke Sumatera Utara dala jangka waktu 5 tahun terakhir,

Tabel 2.62.
Wisatawan Mancanegara yang datang Ke Sumatera Utara menurut Pintu Masuk
(tahun 2010-2014)

Tahun	Bandar Udara Polonia/ Kuala Namu	Pelabuhan Laut Belawan	Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan	Jumlah Total
2010	202.296	18.260	14.962	235.518
2011	192.650	18.975	11.501	223.126
2012	205.845	22.132	13.856	241.833
2013	225.550	22.631	11.118	259.299
2014	234.724	24.769	11.344	270.837

Sumber : BPS Prov.Sumatera Utara

Selama Januari-Desember 2014, jumlah wisman yang berkunjung ke Sumatera Utara mencapai 270.837 orang, yang berarti meningkat 4,45 persen dibanding jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2013. Persentase kenaikan tertinggi terjadi di pintu masuk Belawan sebesar 9,45 persen, melalui pintu masuk Bandara Kuala Namu dengan kenaikan sebesar 4,07 persen, dan jumlah wisman yang datang melalui pintu masuk Pelabuhan Laut Tanjungbalai Asahan mengalami kenaikan sebesar 2,03 persen.

Tabel 2.63.

Jumlah Hotel Menurut Kelas di Sumatera Utara dari Tahun 2010 – 2014

No.	Kelas	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Melati	710	712	712	693	N/A
2	Bintang 1	22	24	24	23	N/A
3	Bintang 2	20	20	23	26	N/A
4	Bintang 3	13	14	18	25	N/A
5	Bintang 4	10	12	11	16	N/A
6	Bintang 5	9	6	7	6	N/A
Jumlah		727	788	795	789	N/A

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Utara pada bulan Desember 2014 mencapai rata-rata 45,86 persen, atau naik 1,37 poin dibanding TPK hotel berbintang bulan November 2014 yang sebesar 44,49 persen. Namun jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya angka TPK Desember 2014 turun 1,98 poin, yaitu dari 47,84 persen bulan Desember 2013 menjadi 45,86 persen pada bulan Desember 2014.

2.1.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

1) Perikanan tangkap

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan. Provinsi Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan produksi perikanan tangkap untuk dapat dikonsumsi di dalam negeri serta di ekspor ke luar negeri. Tabel berikut ini menyajikan data mengenai perkembangan produksi perikanan tangkap Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010-2014.

Tabel 2.64.
Kondisi Produksi Perikanan Tangkap
Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2010-2014

Rincian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Penangkapan di Laut	370.507	379.770	391.352	508.360.6	515.325.00
Penangkapan di Perairan Umum	24.979	28.979	32.892	46.950.4	50.471.27
JUMLAH	395.486	408.748	424.244	555.311	565.796.27

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu. 2015. (Data diolah)

Dari tabel di atas diketahui produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 meningkat sebesar 1.89 % dibanding produksi perikanan pada tahun 2013. Dengan rata-rata pertumbuhan produksi perikanan tangkap dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebesar 9.98 %.

2) Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. seperti tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.65.
Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Tahun 2010-2014

Rincian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Perikanan Budidaya	118.942.80	126.386.40	143.447	193.750	204.744.20

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu. 2015. (Data diolah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa produksi perikanan budidaya pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 5.67 % dibanding produksi tahun 2013. Sedangkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budidaya sebesar 15.12 %.

Sementara itu menurut data volume dan nilai ekspor serta konsumsi ikan/kapita penduduk Sumatera Utara juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.66.
Produksi Ekspor. Konsumsi Ikan/Kapita Tahun 2010-2014

TAHUN	EKSPOR		KONSUMSI IKAN/KAPITA (KG)
	Volume (ton)	Nilai (US \$)	
2010	54.678.73	206.058.110.53	29.59
2011	51.508.65	213.663.776.33	34.66
2012	52.719.29	225.434.288.08	31.92
2013	56.185.92	250.900.694.10	38.95
2014	57.314.05	299.591.121.35	40.10

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu. 2015. (Data diolah)

Volume ekspor perikanan pada tahun 2014 meningkat sebesar 1.128.13 ton atau 2.01 % dibanding tahun 2013. Begitu juga untuk konsumsi ikan/kapita tahun 2004 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 1.15 kg/kapita atau meningkat sebesar 2.95 %. Naiknya konsumsi ikan/kapita pada masyarakat menjadi indikator kenaikan gizi masyarakat terutama untuk sumber protein.

Tabel 2.67.
Potensi Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Ekspor Ikan (ton / thn)	Produksi ikan (ton / thn)
2010	54.678.73	514.429.10
2011	51.505.65	535.134.60
2012	52.719.29	567.691.10
2013	56.185.92	758.972.69
2014	57.314.05	204.744.20

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu. 2015. (Data diolah)

2.1.3.2.6. Perdagangan

- a. Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB

Kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB adalah perbandingan antara nilai kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap jumlah PDRB dalam

bentuk persentase. Nilai ini menggambarkan seberapa besar peran kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB pada tahun tertentu. Tabel berikut menjelaskan kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB untuk tahun 2010-2014 di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.68.

Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap ADHK 2010 dan ADHB Tahun 2010 s/d 2014 Provinsi Sumatera Utara

Tahun	PDRB (ADHK 2010)	ADHK 2010		PDRB (ADHB)	ADHB	
		(JutaRp.)	%		(JutaRp.)	%
2010	331,085,237.47	56,555,799.54	17.08	331,085,237.47	56,555,799.54	17.1
2011	353,147,591.20	60,589,055.04	17.16	377,037,101.03	64,308,761.08	17.1
2012	375,924,139.50	65,384,605.2	17.39	417,120,438.7	70,891,922.7	17.0
2013	398,779,250.40	69,025,207.6	17.31	470,221,983.6	78,324,823.4	16.7
2014	419,649,281.70	73,817,641.8	17.59	523,771,565.5	89,596,998.2	17.1

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

b. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan adalah Nilai Ekspor suatu daerah selama satu tahun dikurangi dengan jumlah Nilai Impor selama satu tahun. Untuk menggambarkan nilai ekspor bersih perdagangan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 s.d 2014 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.69.

Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2010-2014
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	EKSPOR		IMPOR		Neraca (000 US\$)
	BeratBersih	Nilai FOB	BeratBersih	Nilai CIF	
	(Ton)	(000 US\$)	(Ton)	(000 US\$)	
2010	7.992.103	9.147.778	6.171.734	3.576.248	5.571.530
2011	8.161.003	11.883.268	6.718.063	4.953.462	6.929.806
2012	8.695.942	10.393.936	6.813.898	5.164.751	5.229.185
2013	9.275.859	9.597.907	6.922.414	5.108.737	4.489.170
2014	9.087.526	9.361.110	7.391.305	5.046.514	4.314.598

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (BRS 02 maret 2015)

2.1.3.2.7. Perindustrian

Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dari tahun 2011-2014 sangat fluktuatif, bahkan cenderung mengalami penurunan di dua tahun terakhir. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan hanya mencapai 2,97 persen, hal ini dikarenakan adanya indikasi awal bahwa penurunan ini merupakan imbas dari pasokan energy yang belum optimal, seperti pasokan listrik dan gas.

Tabel 2.70.
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Berdasarkan ADHK 2010 dan ADHB
Provinsi Sumatera Utara 2010-2014

Tahun	Kontribusi						LajuPert umbuha n ADHK
	ADHK 2010			ADHB			
	PDRB (ADHK 2010)	Sektor Industri Pengolahan (Rp. Milyar)	%	PDRB	SektorIndustri(Rp . Milyar)	%	
2010	331,085,237.47	70,540,953.80	21.31	331,085,237.47	70,540,953.80	21.3	-
2011	353,147,591.20	72,815,223.08	20.62	377,037,101.03	79,947,917.24	21.2	3.22
2012	375,924,139.50	76,922,410.60	20.46	417,120,438.7	86,171,929.7	20.7	5.6
2013	398,779,250.40	80,648,618.0	20.22	470,221,983.6	93,241,472.5	19.8	4.84
2014	419,649,281.70	83,042,087.5	19.79	523,771,565,5	104,224,003.8	19.9	2.97

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dilihat capaian indikator kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia :

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus Kemampuan Daerah dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Nilai tukar petani dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan).

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Perbulan selama periode tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.71.
Angka Konsumsi RT perkapita/bulan Tahun 2009 - 2013

NO	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Total Pengeluaran RT	432.389	499.694	564.565	599.060	656.133
	a. Pangan	236.917	267.180	316.343	344.467	363.363
	b. Non Pangan	195.472	232.514	248.222	254.593	292.770
2	Jumlah RT	3.027.500	3.037.716	3.083.199	3.131.600	3.168.566
3	Rasio (Pengeluaran RT/ Jumlah RT)	14,28	16,44	18,31	19,13	20,71

Sumber : BPS Sumatera Utara (data diolah)

b. Nilai Tukar Petani

Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Meskipun NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari

kesejahteraan petani. namun NTP sampai saat ini masih merupakan salah satu indikator untuk mengidentifikasi kesejahteraan petani.

Berikut ini disajikan tabel yang memperlihatkan kondisi Nilai tukar Petani Sumatera Utara tahun 2010-2014 :

Tabel 2.72.
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2010 s.d 2014
Provinsi Sumatera Utara

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	129.12	138.20	141.49	147.08	NA
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	126.14	133.64	139.12	147.83	NA
3.	NTP	102.36	103.42	101.71	99.49	100.08

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selama 5 (lima) tahun terakhir atau selama periode 2010-2014. NTP Sumatera Utara tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan pada angka 99-103. Selama periode tersebut. NTP turun pada tahun 2013 yaitu sebesar 99.49. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima petani dari sektor pertanian lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Terjadinya penurunan NTP pada tahun 2013, terutama disebabkan penyesuaian harga BBM bersubsidi yang terjadi pada bulan Juni 2013 yang dampaknya dirasakan oleh petani perdesaan. Kenaikan tersebut terlihat dari kenaikan inflasi perdesaan yang mencapai 2.53 pada bulan Juli 2013. Akan tetapi pada tahun 2014 terjadi kenaikan NTP menjadi 100.08.

- c. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Tabel 2.73.
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Tahun 2009-2013 Provinsi Sumatera Utara

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	195.472	232.514	248.222	254.593	292.770
2.	Total Pengeluaran RT	432.389	499.694	564.565	599.060	656.133
3.	Rasio	45.21	46.53	43.97	42.50	44,62

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data diolah)

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Capaian Indikator Iklim Berinvestasi dilihat dari lama pengurusan ijin dan kondisi keamanan daerah (angka kriminalitas dan aksi demonstrasi) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Lama Proses Perijinan

Dalam hal proses perizinan di Provinsi Sumatera Utara telah diterbitkan Peraturan Gubernur no. 55 Tahun 2010. tentang pedoman. tata cara permohonan dan jenis perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal.

Dalam pergub tersebut telah diatur tentang penerbitan perizinan dan non perizinan lama proses nya 10 hari. terkecuali perizinan yang terkait dengan penataan ruang. lingkungan hidup. keamanan. keselamatan dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan perundang-undangan.

b. Angka kriminalitas

Tabel 2.74.
Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara 2009-2013

No	Jenis Kriminal	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Kasus Narkoba	2.802	2.718	2.728	2.432	2.713
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	105	130	129	133	118
3	Jumlah Kasus Perkosaan	214	207	113	124	305
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	6.210	6.836	6.971	6.898	7.445
5	Jumlah Kasus Pencurian	9.040	10.355	11.639	10.783	10.797
6	Jumlah Kasus Penipuan	1.707	2.317	2.808	2.316	1.877
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	22	13	31	17	12
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	35.336	41.806	47.156	43.234	43.652
9	Jumlah Penduduk	13.201.715	13.339.353	13.103.596	13.215.401	13.326.307
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0.26%	0.31%	0.35%	0.32%	0.33%

Sumber : SUDA 2014

c. Jumlah Demonstrasi

Tabel 2.75.
Jumlah Demo Provinsi Sumatera Utara, 2009 – 2012

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1	Bidang Politik	243	193	84	64
2	Ekonomi	82	47	55	211
3	Sosial Budaya	66	279	70	309
4	Kasus Pemogokan Kerja	82	72	60	47
5	Jumlah Unjuk Rasa	473	591	269	631

Sumber : POLDA SUMUT, 2013

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ada tren peningkatan gangguan keamanan dari tahun 2009 – 2013 dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi dan gangguan kenyamanan berupa aksi demonstrasi yang berakibat negatif terhadap investasi di daerah ini.

Hal ini perlu diantisipasi dan dukungan dari semua pihak, baik aparat keamanan, maupun masyarakat untuk menjaga agar kondisi keamanan tetap kondusif, sehingga menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Jika dilihat dari rasio ketergantungan terlihat bahwa terjadi penurunan angka rasio ketergantungan usia tidak produktif, yang menunjukkan semakin baiknya struktur angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel ini memperlihatkan data rasio ketergantungan penduduk di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.76.
Jumlah penduduk dan Rasio Ketergantungan
Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	4.139.648	3.461.930	4.344.275	4.381.084	4.311.313
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	517.226	568.777	509.599	513.793	514.899
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	4.656.874	4.030.707	4.853.874	4.894.877	
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	6.076.121	6.379.748	6.105.409	5.950.598	8.500.095
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,76	0,63	0,79	0,82	

Sumber : BPS, 2013

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel rangkuman berikut ini :

Tabel 2.77.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Sumatera Utara

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	PDRB ADHB (Rp. Trilyun)	331.09	337.04	417.12	470.22	523.77		<
1.2.	PDRB ADHK (Rp. Trilyun)	331.09	353.15	375.92	398.78	419.65		<
1.3.	Pertumbuhan ekonomi (%)	6.38	6.66	6.45	6.08	5.23		<
1.4.	Laju inflasi provinsi (%)	8.0	3.67	3.86	10.18	8.17		<
1.5.	PDRB per kapita ADHB (Rp.Juta/Jiwa)	25.5	28.77	31.56	35.29	38.83		<
1.6.	Nilai Tukar Petani (NTP)	102.36	103.42	101.71	99.49	100.08		<
1.7.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,7148	0,051	0,049	0,045			<
1.8.	Persentase penduduk miskin (%)	11,31	10,83	10,41	10,39			<
Fokus Kesejahteraan Masyarakat								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf (%)	97,32%	97,46%	97,65	97,51	-		-
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,85	8,91	-		-		-
1.3.	Angka partisipasi kasar							-
1.3.1.	PAUD (%)	31,27	35,50	33,87	33,87	-		-
1.3.2.	SD/MI (%)	114,20	104,56	104,56	106,26	-		-
1.3.3.	SMP/MTs (%)	89,83	89,02	89,02	88,55	-		-
1.3.4.	SMA/SMK/MA (%)	72,69	79,69	79,69	80,58	-		-
1.4.	Angka Partisipasi Murni							
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	95,33	91,46	91,46	93,26	-		-
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	74,76	67,96	67,96	70,51	-		-
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	55,72	57,83	57,83	60,02	-		-
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi, dilihat dari Angka Kematian Bayi /1000 kelahiran hidup	23,0	23,0	23	22	-		=
2.2.	Angka Kematian Ibu dilihat dari Kematian Ibu Melahirkan/ 100.000 kelahiran hidup	268,0	250,0	250	285	-		>
2.3.	Angka usia harapan hidup (Tahun)	69,8	72,0	-	69,65	-		>
2.4.	Persentase balita gizi buruk (%)	21,4	20,0	-	22,50	-		=
3.	Ketenagakerjaan							
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja (%)	91,99	93,63	93,80	93,40	-		>
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini	31,27	35,50	33,87	33,87	-		-
1.2.	Pendidikan dasar							
1.2.1.	APK SD + MI + Paket A	114,20	104,56	104,56	106,26	-		=
1.2.2.	APM SD + MI	95,33	91,46	91,46	93,26	-		=
1.2.3.	APK SMP + MTs + Paket B	89,83	89,02	89,02	88,55	-		=
1.2.4.	APM SMP + MTs	74,76	67,96	67,96	70,51	-		=
1.2.5.	APK SMA + MA + Paket C	72,69	79,69	79,69	80,58	-		=
1.2.6.	APM SMA	55,72	57,83	57,83	60,02	-		=
1.2.1.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	97,32	97,46	-	97,51	-		>
1.2.2.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,85	8,91	-		-		=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
1.3.	Fasilitas Pendidikan:					-		
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (Unit)				-	-		-
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (Unit)				-	-		-
1.4.	Angka Putus Sekolah				-	-		-
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	1.03	0.93		-	-		-
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	4.60	4.14		-	-		-
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA (%)	6.21	5.59		-	-		-
1.5.4.	Angka Putus Sekolah (APS) SMK (%)	2.15	1.94			-		
1.5.	Angka Kelulusan:				-	-		-
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	205.289	506.881	278,219	286,681	-		-
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	171.304	172.973	242,182	282,212	-		-
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	76.115	73.393	120,090	117,254	-		-
1.6.4.	Angka Kelulusan (AL) SMK	251.134	74.286	93,900	116,884	-		-
1.6.5.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 (orang)	31,27	35,50	33,87	33,87	-		-
1.6.6.	S2 (orang)	667	732		-	-		
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka Kematian Bayi /1000 KLH	23,0	22,0	222	22	-		>
2.2.	Angka Kematian Ibu/100.000/KLH	305	295	285	275	-		<
2.3.	Angka usia harapan hidup (Tahun)	69,6	70,4	71,2	71,30	-		<
2.4.	Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang	21,80	21,20	20,6	20	-		>
2.5.	Rasio posyandu per satuan balita	1:55,71	1:24.681		-	-		
2.6.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:25.332	1:24.681		-	-		-
2.7.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:69.918	1:67.616		-	-		-
2.8.	Rasio dokter per satuan penduduk	1:14.67	1:17,64		-	-		-
2.9.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:25,61	1:29,69		-	-		-
2.10.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%		-	-		-
2.11.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	64,20%	86,73%		-	-		-
2.12.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	NA	65,78%		-	-		-
2.13.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%		-	-		-
2.14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100%	100%		-	-		-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
2.15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%		-	-		-
2.16.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%		-	-		-
2.17.	Cakupan kunjungan bayi	69,82%	76,82%		-	-		-
2.18.	Cakupan puskesmas	1:25.332	1:24.681		-	-		-
2.19.	Cakupan pembantu puskesmas	1:6.918	1:7.137		-	-		-
3.	Pekerjaan Umum							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	40,86	44,11	41,74	43,47	39,04		
3.2.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang (%)	37,99	31,32	24,85	26,13	35,38		
3.3.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak ringan (%)	9,53	13,42	17,00	13,52	8,50		
3.4.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak berat (%)	11,64	11,15	16,41	16,88	17,08		
3.5.	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	40,86	44,11	41,74	43,47	39,04		
3.6.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1: 381	1: 381		-			
3.7.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)	2.752,04	2.752,04	3048,50	3048,50	-		
3.8.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) (km)	32.115,92	33.078,18	33.078,18	33.383,66	-		
3.9.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	29,08	38,70	38,25	36,88			
3.10.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	39.149	52.199	53.069	52.199	53.330	62.639	<
4.	Perencanaan Pembangunan							
4.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Dokumen)	-	-		-	-		=
4.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	-		-	-		=
4.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	1	-		-	-		=
4.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	1	1		-	-		=
5.	Lingkungan Hidup							
5.1.	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	85	-	-	-	-		
5.2.	Penegakan hukum lingkungan (kasus)	-	-	-	-	-		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
6.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-				
6.1.	Rasio KDRT (kasus)	18	17	17	20	-		
6.2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	57%	57%	60,85 %	56,10 %	-		
7.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
7.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	2,07	3.8	3.8	3.0	-		
7.2.	Jumlah Akseptor KB	405,961	406.638	424.583	2.210.958	-		
7.3.	Cakupan peserta KB aktif	1.429.414	1.367.255	1.463.520	1.423.051	-		
7.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	1.048.191	1.059.065	198.538	1.111.883	-		
8.	Sosial							
8.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (UPT Layanan Sosial)	19	19	19	19	-		
8.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (jenis)	23	23	26	26	-		
8.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (program)	6	6	6	6	-		
9.	Ketenagakerjaan							
9.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	77,10	72,09	69,41		-	
9.2.	Pencari kerja yang ditempatkan (org)	52.974			-	
9.3.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,43	6,37	6,20	6,00	-		<
10.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
10.1.	Persentase koperasi aktif (%)	58,57	58.60	59,8	56,8	-	
10.2.	Jumlah UKM non BPR (Unit)
10.3.	Jumlah BPR/LKM (unit)	95	95				
10.4.	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	2.151.729				
11.	Penanaman Modal							
11.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	127	123	156	378	-		>
11.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)	2.024.885,56	1.662.522,50.	9.163.446,19	13.588.420,60	-		>
11.3.	Daya serap tenaga kerja (%)	110,2	104,3	173,7	126,18	-		<
11.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	(10.02304,430)	(362.363,00)	7.500.923,69	4.424.974,41	-		
12.	Ketahanan Pangan							
12.1.	Regulasi ketahanan pangan (Pergub)	-	-	1	-			
12.2.	Ketersediaan pangan utama							
12.2.1	Padi (ton) GKG	3.582.302	3.607.403	3.715.514	3.727.249	3.628.968	3.794.985	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
12.2.2	Jagung (ton)	1.377.718	1.294.645	1.347.124	1.183.011	1.159.698	1.672.076	<
12.2.3	Kedele (ton)	9.436	11.426	5.419	3.229	5.705	15.051	<
12.2.4	Daging Sapi (ton)	15.707,60	18.299,60	24.546,61	32.170,78	145.449.709* daging secara keseluruhan	147.687,22* daging secara keseluruhan	
13.	Statistik							
23.1.	Buku Provinsi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada			>
14.	Kearsipan							
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	Ada	Ada	Ada				
15.	Komunikasi dan Informatika							
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	4	4	4	5	2	2	=
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	NA	NA	NA	NA	NA	NA	=
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5/20	5/34	5/34	8/33	8/33	8/33	=
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6/2	15/2	15/2	200/12	200/12	200/12	=
25.5.	Web site milik pemerintah daerah	23	15	15	15	15	35	<
25.6.	Pameran/expo	Tiap tahun	Tiap tahun	Tiap tahun	Tiap tahun	Tiap tahun	4	<
16.	Perpustakaan							
26.1.	Jumlah perpustakaan	31 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota			
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	589.553	593.834	594.443	99.771			
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	326,170	652.780	679.289	699.204			
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas Padi (kw/ha)	47,47	47,62	48,56	50,17	50,64	50,3	<
1.2.	Produktivitas Jagung (kw/ha)	50,13	50,71	55,41	55,87	57,82	57,3	<
1.3.	Produktivitas Kedele (kw/ha)	12,10	10,01	9,90	10,33	11,36	10,7	<
1.4.	Kontribusi Kategori pertanian, kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%) ADHK 2010	25,84	25,65	25,38	26,05	24,85		
1.5.	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	7,75	7,42	7,14	-	-		
1.6.	Kontribusi sektor perkebunan PDRB	9,67	9,74	9,81	-	-		
1.7.	Kontribusi sektor peternakan	2,40	2,38	1,12	-	-		
1.8.	Kontribusi sektor perikanan	2,58	2,53	2,50	-	-		
1.9.	Kontribusi sektor kehutanan	1,21	1,15	1,12	-	-		
2.	Kehutanan							
2.1.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,21	1,15	1,12	-	-		
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
3.1.	Kontribusi Kategori pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB (ADHK 2010)	1,01	1,05	1,10	1,31	1,31		
4.	Pariwisata							
4.1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHK)	-	-	-	-	-		
5.	Kelautan dan Perikanan							
5.2.	Produksi perikanan	514.429,1	535.134,60	567.691,00	758.965,69	204.744,20		
5.3.	Konsumsi ikan	29,59	34,66	31,92	38,95	40,10		
6.	Perdagangan							
6.1.	Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (ADHK 2010)	17,08	17,16	19,39	17,31	17,59		
6.2.	Volume Ekspor (Juta ton)	7,99	8,16	8,70	9,28	9,09		
6.3.	Nilai Ekspor (Milyar US\$)	9,15	11,88	10,39	9,597	9,36		
6.4.	Volume Impor (Juta ton)	6,17	6,72	6,81	6,92	7,39		
6.5.	Nilai Impor (Milyar US\$)	3,58	4,95	5,16	5,11	5,05		
6.6.	Nilai Bersih Perdagangan (Milyar US\$)	5,57	6,93	5,23	4,49	4,31		
7.	Perindustrian							
7.1.	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHK 2010)	21,31	20,62	20,46	20,22	19,79		
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	-	-	-	-	-		
ASPEK DAYA SAING DAERAH		ASPEK DAYA SAING DAERAH						
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah		Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	499.694	564.565	599.060	656.131			
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp.)	232.514	248.222	254.593	292.770			
1.3.	Produktivitas total daerah							
2.	Pertanian							
2.1.	Nilai tukar petani	102.36	103.42	101.71	99.49	100.08		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
Fokus Iklim Berinvestasi		Fokus Iklim Berinvestasi						
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Angka kriminalitas yang tertangani				-	-		
1.2.	Jumlah demo	6.285		-	-		
1.3.	Lama proses perijinan	581	269	631	-	-		
1.4.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha			-	-		
1.5.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa				-	-		
Fokus Sumber Daya Manusia								
1.	Ketenagakerjaan							
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3				-	-		
1.2.	Rasio ketergantungan	0,63	0,79	0,82	-	-		

2.1.5. Ekonomi dan Keuangan Daerah

Secara umum gambaran hasil Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.78.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah / Berkurang	Proyeksi	
			2013	2014		2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDRB (Harga Berlaku)	Triliun Rp	470,22	523,77	-	-	-
2	PDRB (Harga Konstan)	Triliun Rp	398,78	419,65	-	-	-
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Berlaku Tahun Tertentu	%					
4	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan Tahun Tertentu	%	6,08	5,23	-	-	-
5	Tingkat Inflasi	%	10,18	8,17	-	-	-
6	Struktur PDRB Pendekatan Produksi Atau Sektoral :						
	- Pertanian	%	21,32	-	-	-	-
	- Pertambangan & Penggalian	%	1,30	-	-	-	-
	- Industri Pengolahan	%	21,58	-	-	-	-
	- Listrik, Gas dan Air Bersih	%	0,85	-	-	-	-
	- Bangunan	%	6,92	-	-	-	-
	- Perdagangan, Hotel & Restoran	%	19,29	-	-	-	-
	- Pengangkutan dan komunikasi	%	9,55	-	-	-	-
	- Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	%	7,68	-	-	-	-
	- Jasa - jasa	%	11,51	-	-	-	-
7	Produktivitas Sektoral yang merupakan Rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap Sektor terhadap jumlah Tenaga Kerja di sektor yang bersangkutan						
	- Pertanian	Juta	33,67	-	-	-	-
	- Pertambangan & Penggalian	Juta	178,06	-	-	-	-
	- Industri Pengolahan	Juta	174,85	-	-	-	-
	- Listrik, Gas dan Air Bersih	Juta	306,01	-	-	-	-
	- Bangunan	Juta	84,09	-	-	-	-
	- Perdagangan, Hotel & Restoran	Juta	65,22	-	-	-	-
	- Pengangkutan dan komunikasi	Juta	157,54	-	-	-	-
	- Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	Juta	210,37	-	-	-	-
	- Jasa - jasa	Juta	52,62	-	-	-	-
8	Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)		1,65	-	-	-	-
9	Jumlah Penduduk Miskin	Juta Jiwa		-	-	-	-
10	Tingkat Pengangguran	%	6,08	-	-	-	-
11	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :						
	- Pendapatan Perkapita	Rp Juta	29,59	-	-	-	-
	- Kemampuan Investasi	Rp Triliun	87,11	-	-	-	-

	- Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)		0,354	-	-	-	-
	- Besaran IPM (indeks Pembangunan Manusia)	-	75,57	-	-	-	-
12	Berbagai Macam Besaran Rasio dan Perbandingan-perbandingan			-	-	-	-
	- Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,12	-	-	-	-
	- Biaya Pendidikan, Kesehatan, Penelitian dan sebagainya terhadap PDRB	%	0,15	-	-	-	-
	- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)	%	1,81	-	-	-	-

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Tahun 2009-2013.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun lalu (2009 - 2013), didasarkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018 yang merupakan penjabaran tahun ke-tiga dari masa bhakti Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat Kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun 2016. Selain itu untuk mereview RPJMD dan RKPD, dengan memperhatikan dokumen RKPD tahun 2015. Perkembangan capaian pelaksanaan kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2014-2014) adalah sebagai berikut :

2.2.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2014

Keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya dapat dilihat dari capaian Indikator makro pembangunan, baik indikator makro pembangunan sosial, maupun indikator makro pembangunan ekonomi. Salah satu indikator makro pembangunan sosial yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu : meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak.

Selanjutnya, salah satu indikator makro pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yaitu : PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi (atas dasar harga Konstan), Pendapatan per Kapita dan Tingkat Inflasi.

Tabel 2.79
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2014
Provinsi Sumatera Utara

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
I. Wajib																	
1.	Pendidikan	1.1. Indeks Pendidikan			60												
		1. APK PAUD			112,59											55,67	
		2. APK SD + MI + Paket A	111,4	112,59	92,66	111,4						100				108,11	<
		3. APM SD + MI	92,66	92,66	105,01	92,66						100				96,40	>
		4. APK SMP + MTs + Paket B	101,19	105,01	97,52	101,19						100				96,35	<
		5. APM SMP + MTs	93,29	97,52	89,99	93,29						100				85,90	<
		6. APK SMA + MA + SMK	82,46	89,99	74,57	82,46						100				92,28	<
		7. APM SMA	68,5	74,57	1,54	68,5						100				80	<
		8. Buta Aksara	1,79	1,67	10,07	1,54						86,03				99,77	>
		9. Rata - Rata Lama Sekolah (tahun)	9,66	10,07		9,66						100				12	<
2.	Kesehatan	2.1. Indeks Kesehatan			22												
		1. Angka Kematian Bayi (/1000 KLH)	24	23	275	22,0						91,7				19	>
		2. Angka Kematian Ibu (AKI) (100.000 KLH)	295	285	72	250,0						118,0				235	<
		3. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	70,4	71,2	20	72,00						98,9				72	=
		4. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang (%)	21,20	20,6		20,9						101,4				20	>
3	Pekerjaan Umum																
	a. Sumber Daya Air	3.1. Irigasi (Ha)															
		1. Pemeliharaan (rutin tiap tahun)	80.659	88.725	73.326	72.934	73.326	73.318	80.000	73.318	75.201	90,94	82,64	98,04	103,10	90	<
		2. Perbaikan/ Peningkatan	7.480	8.228	9.051	21.712	6.040	5.599	9.051	10.225	12.062	80,75	68,05	100	55,56	61,86	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		3,2 Rawa (Ha)															
		1. Pemeliharaan (rutin tiap tahun)	67.905	74.696	82.166	55.832	61.732	55.232	80.413	55.232	52.832	67,9	74,69	82,16	103,10	74,91	<
		2. Perbaikan/ Peningkatan	4.620	5.590	5.590	41.046	2.604	1.135	5.560	5.560	7.000	56,36	22,33	100	55,56	59,30	<
		3,3 Sungai (m)															
		1. Perkuatan tebing	11.550	12.705	13.976	4.426	12.261	5.814	11.976	4.060	3.090	106,15	45,76	85,68	69,81	41,60	<
		2. Normalisasi/ pelurusan	10.495	11.495	12.645	19.469	16.345	42.070	10.000	15.000	36.300	156,41	36,59	79,87	186,45	332,70	>
		3. Pembangunan/ Perbaikan tanggul	16.775	18.453	20.298	19.469	17.615	14.430	20.296	14.800	36.300	115,5	78,20	100	186,45	71,09	<
		3,4 Penyediaan Air Baku/Embung (unit)	4	4	4	20	9	7	4	7	1	225,0	175	100	5	175	>
	b. Bina Marga	4.1. Kondisi Jalan dan Jembatan Bertambah Baik, Pelayanan Lalu lintas menjadi Lebih Baik (km)															
		1. Pembangunan Jalan (Km)	121,00	133,10	146,41	241,54	320,70	208,93	100,55	147,30	203,37	172,67	75,54	100,47	84,20	63,41	>
		2. Penggantian Jembatan (m)	374,00	411,40	452,54	402,74	475,90	599,10	379,00	308,00	612,70	160,19	91,46	68,06	152,13	128,75	>
		4.2. Berkurangnya Jalan - jalan berlobang	37,90	41,68	45,85	45,00	54,00	7,45	16,80	15,70	20,70	19,70	40,31	34,24	46,00	38,33	<
		1. Pemeliharaan Berkala Jalan (Km)	2.552	2.807,20	3.082,92	3.017,47	3.005,00	2.280,93	2.203,41	2.856,33	2.145,70	89,40	78,49	92,65	71,11	71,40	<
		2. Pemeliharaan Rutin Jalan (Km)	15.015	16.516,50	18.168,15	9.054,28	7.988,04	10.101,93	10.237,16	9.433,10	9.504,28	67,30	61,98	51,92	100,00	113,35	<
		3. Pemeliharaan Rutin Jembatan (m)	121,00	133,10	146,41	241,54	320,70	208,93	100,55	147,30	203,37	172,67	75,54	100,47	84,20	63,41	>
	c. Perhubungan	5.1 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan															
		1. Tersedianya alat keselamatan pelayaran (buah)	-	-	1.680	1.350	500	-	1.472	-	-	-	-	-	-	-	<
		5.2 Meningkatnya Keselamatan															
		1. Tersedianya Rambu Lalu Lintas (buah)	350	500	1.670	1.000	800	190	216	375	1.100	54,29	43,20	22,46	110,00	137,50	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		2. Tersedianya Delineator (buah)	1.000	1.900	2.075	4.000	800	545	700	490	3.000	54,45	36,84	23,61	23,33	375,00	<
		3. Tersedianya Guardrail (buah)	1.500	1.000	4.275	4.000	800	745	-	1.550	1.800	49,67	-	56,88	45,00	225,00	<
		4. Tersedianya APILL / Warning Light (lokasi)	3	5	13	4	5	-	2	1	3	-	40,00	7,69	75,00	60,00	<
		5. Tersedianya Paku Jalan (buah)	-	-	2.085	4.000	96.375	-	1.080	1.005	-	-	-	48,20	-	-	<
		6. Tersedianya Marka Jalan (m)	1.500	2.000	9.487	335.000	915.563	2.080	1.247	1.990	124.500	138,80	62,35	20,98	37,16	13,60	<
		7. Tersedianya LPJU (buah)	-	-	-	45	25	4	-	-	-	-	-	-	-	-	<
		8. Tersedianya Cermin Tikungan (buah)	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
		9. Tersedianya Rambu Perairan (buah)	50	100	100	50	200	-	-	-	20	-	-	-	40,00	10,00	<
		10. Tersedianya ZOSS (lokasi)	2	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
	d. Energi Listrik	4.1 Rasio Elektrifikasi Desa	-	-	90	-	80,85	83,63	-	-	-	-	-	90,26	90,26	-	-
		4.1 Rasio elektrifikasi rumah tangga	-	-	80	-	78,00	86,45	-	-	-	-	-	89,91	89,91	-	-
I.	Pilihan																
1.	Pertanian	1.1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya															
		a. Padi															
		1. Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	132,79	132,12	131,46	-	-	134,00	132,60	130,61	-	100,91	97,22	99,35	-	-	-
		2. Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	1.782.837	1.795.953	1.808.895	-	-	1.755.881,86	1.752.362	1.740.549	-	98,49	97,57	96,22	-	-	-
		3. Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi (Ton)	2.111.039	2.159.846	2.209.782	-	-	2.042.665,05	2.158.612	2.338.4762	-	96,76	99,94	105,82	-	-	-
		4. Surplus/Penyanga per Tahun (Ton) (4-3)	328.202	363.893	400.887	-	-	286.783,00	406.250	597.927	-	87,38	111,64	149,15	-	-	-
		5. Produksi GKG	3.727.413	3.813.591	3.901.761	3.771.545	4.087.420	3.607.036,00	3.715.513	3.727.249	3.626.968	96,77	97,43	95,53	96,17	88,73	<
		6. Luas Panen (Ha)	841.980	854.609	867.428	-	-	757.428,00	765.099	742.968	-	89,96	97,43	85,65	-	-	-
		7. Produktivitas (Kw/Ha)	44,27	44,62	44,98	49,9	51,3	47,62	48,56	50,17	50,64	106,48	89,53	111,53	101,48	98,71	<
		8. Luas Tanam (Ha)	859.163	872.050	885.131	-	-	757.428,00	769.174	739.040	-	88,16	88,21	83,49	-	-	-
		b. Jagung															

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)	
			2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18	
		1. Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	61.492	61.615	61.739	-	-		61.615	60.820		-		100,00	98,51	-	-	-
		2. Kebutuhan (Konsumsi + Industri) per Tahun (Ton)	825.609	837.534	849.504	-	-		873.503	904.236**		-		104,29	106,44	-	-	-
		3. Surplus/Penyanga per Tahun (Ton)	194.540	217.529	241.669	-	-		473.621	278.775		-		217,73	108,41	-	-	-
		4. Produksi Jagung (Ton)	1.020.149	1.055.063	1.091.173	1.529.636	1.831.820	1.294.645	1.347.124	1.183.011	1.159.698	126,91	127,68	73,38	75,81	63,31	<	
		5. Luas Panen (Ha)	274.632	281.498	288.536	-	-	255.291	243.098	211.750		92,96	86,36	147,72	-	-	-	
		6. Produktivitas (Kw/Ha)	37,15	37,48	37,82	56,5	59,9	50,71	55,41	55,87	57,82	136,50	147,84	74,15	102,33	96,53	<	
		7. Luas Tanam (Ha)	280.237	287.243	294.424	-	-	262.079	253.234	218.319		93,52	88,16	108,41	-	-	-	
		c. Kedele																
		1. Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	4,447	4,452	4,456	-	-		4,452	4,830		-		108,39	-	-	-	-
		2. Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	59.710	60.512	61.316	-	-		4.730	64.532		-		105,25	-	-	-	-
		3. Impor/Surplus per Tahun (Ton) *	(19.379)	(14.374)	(9.366)	-	-		689	(61.313)		-		654,63	-	-	-	-
		4. Produksi Kedele (Ton)	40.337	46.138	51.950	14.131	16.687	11.426	5.419	3.229	5.705	28,33	11,75	6,22	40,37	34,19	<	
		5. Luas Panen (Ha)	34.300	39.200	44.100	-	-	11.413	5.475	3.126		33,27	13,97	7,09	-	-	-	
		6. Produktivitas (Kw/Ha)	11,76	11,77	11,78	10,5	11,3	10,01	9,90	10,33	11,36	85,12	84,11	87,69	108,19	100,53	>	
		7. Luas Tanam (Ha)	35.000	40.000	45.000	-	-	14.915	5.450	4.175		42,61	13,63	9,28	-	-	-	
		1.2. Produksi tanaman perkebunan (ton) *																
		1. Perkebunan Rakyat	5.621.653,58	5.766.437,79	5.914.635,24	6.405.697,46	7.090.026,31	5.851.971	6.088.712,25	6.372.946,65	6.456.154,54	104,09	105,59	107,75	100,79	91,06	<	
		2. PTPN	5.006.924,07	5.135.602,02	5.267.586,99	-	-	5.372.409	5.222.013,90	2.369.684,25		107,30	101,68	44,99	-	-	-	
		3. PBSN	4.150.919,94	4.257.598,59	4.367.018,87	-	-	3.484.123	3.259.386,82	5.800.592,56		83,94	76,55	132,83	-	-	-	
		4. PBSA	1.686.821,24	1.730.172,55	1.774.637,99	-	-	1.838.419	1.688.057,64	2.618.354,65		108,99	97,57	147,54	-	-	-	
		Jumlah	16.466.618,84	16.889.810,94	17.323.879,09	-	-	16.546.923	16.258.170,61	17.161.578,11		100,49	96,26	99,06	-	-	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		1.3. Produksi perikanan															
		1. Produksi Perikanan (ton)	545.720,36	545.720,36	581.192,19	623.465,3	760.485,09	535.134,4	567.691	749.061	770.540,47	98,06	104,03	128,88	123,59	101,32	>
		2. Ekspor hasil perikanan (ton)	64.151,19	70.566,31	77.622,94	55.929,9	67.983,18	51.508,65	52.719,29	56.185,92	57.314,05	80,29	74,71	72,38	102,47	84,31	<
		3. Konsumsi ikan (kg/Kapita/tahun)	32,61	34,73	36,98	38,1	46,33	34,66	31,92	38,95	40,10	106,29	91,91	105,33	105,25	86,55	<
		1.4. Produktivitas peternakan															
		1. Kebutuhan Konsumsi/Kapita/Tahun (Kg)	0,99	1,04	1,10	-	-	-	1,86	2,41	-	178,85	219,09	-	-	-	-
		2. Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	13,262	14,172	15,142	-	-	-	24.580,65	32.116,4	-	173,45	212,10	-	-	-	-
		3. Produksi Daging yang diharapkan (Ton)	13.838	15,174	16,640	-	-	16.066	24.546,61	32.170,78	-	116,10	161,77	193,33	-	-	-
		4. Jumlah Pemotongan Sapi (Ekor)	74.373	81,558	89,434	-	-	86.347	131.880	172.842	-	116,10	161,70	204,44	-	-	-
		5. Produktivitas (Kg/Ekor)	186	186	186	-	-	186	186,13	186,13	-	100,03	100,07	100,07	-	-	-
		6. Pemotongan Sapi Lokal (Ekor)	68.896	77,451	86,697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7. Populasi (Ekor)	491.038	521,975	554,859	-	-	480.941	611.008	626.892	-	97,94	117,06	112,98	-	-	-
		1. NTP Peternak	-	-	-	107,32	109,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Daging (Ton)	-	-	-	141.687,22	164.792,09	-	-	-	145.449,71	-	-	-	102,66	88,26	<
		3. Telur (Ton)	-	-	-	139.363,38	162.959,87	-	-	-	159.945,50	-	-	-	114,77	98,15	<
		4. Susu (Ton)	-	-	-	835,17	1.131,67	-	-	-	783,36	-	-	-	93,80	69,22	<
2.	Koperasi dan UMKM																
		1. Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan rata-rata 10 - 15% per tahun (KUKM)	1.100	1.000	800		800	875				86,36					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja per unit koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan rata - rata 10% per tahun (Orang)	55.000	50.000	50.000		50.000	45.000				103,64					
		3. Meningkatnya daya saing dan nilai ekspor produk koperasi dan pertumbuhan nilai tambahnya (KUKM)	30	30	30		30	28				100,00					
		4. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi (Koperasi)	1.200	1.200	1.100		1.100	1.000				91,67					
		5. Pemberdayaan usaha Mikro dan Menengah (UMKM)	250.000	250.000	250.000		250.000	240.000				88,00					
		6. Terbinanya Koperasi dan UKM pada daerah Agropolitan dan Agromarinepolian (KUKM)	10	10	10		10	10				120,00					
		7. Terbinanya Koperasi pada Desa TP. PKK Provinsi (Koperasi)	5	5				5				120,00					
		8. Peningkatan peran gender dalam Pengembangan KUKM (Orang)	200	200	200		200	190				110,00					
		9. Pembentukan Koperasi Primer (Unit)	200	200	200		200	185				90,00					
		10. Terbinanya UMKM dalam Sentra (UMKM)	300	300	300		300	287				90,00					

2.2.1 Review Capaian Kinerja terhadap RPJMD

Review capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2014, target yang ingin dicapai pada tahun 2015 dan proyeksi untuk tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.80.
Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
Komitmen Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa							
1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk					Keberadaan rumah ibadah yang tidak merata di daerah	Kemudahan syarat pendirian rumah ibadah
2.	Pelayanan publik yang baik melalui Good Governance dan Clean Government					Masih adanya persepsi lambannya pelayanan aparat pemerintah dan kurangnya daya saing daerah	Penguatan Lembaga perijinan terpadu
		Terbangunnya sistem e-Planning, e-Budgeting, e-Ofiice	-	-	-	Masih adanya isu KKN dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah	Pembentukan LPSE diseluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam mendukung pemberlakuan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah
		-	-	-	-	Masih tingginya inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perda tentang sistem perencanaan dan penganggaran secara terpadu - Pembangunan sistem yang terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran
Komitmen Mewujudkan Rakyat tidak lapar							
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
	- Padi (Kw/Ha)	50,17	50,64			Luas tanam belum tercapai	Pencetakan sawah baru
						Produktifitas masih perlu	Penanaman bibit unggul

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						ditingkatkan untuk memenuhi target produksi	adaptif
						Irigasi belum optimal	Pembangunan dan perbaikan Irigasi
	- Jagung (Kw/Ha)	55,87	57,82	-	-	Konsumsi masih rendah	Diversifikasi pangan non beras dengan meningkatkan konsumsi jagung
						Luas tanam belum tercapai	Tumpang sari dengan kedede dan lahan kebun TBM
	- Kedede (Kw/Ha)	10,33	11,36	-	-	Luas tanam belum tercapai	Tumpang sari dengan jagung
						Produktifitas masih rendah	Penanaman bibit unggul dan teknologi pertanian
						Bibit unggul masih terbatas	Revitalisasi BBI untuk pengadaan benih
	- Daging (ton)	186,13 (Daging Sapi)	145.449.709 (Total Produksi Daging)	-	-	Ketergantungan impor masih tinggi	Pengadaan bibit ternak sapi untuk menambah populasi
						Populasi masih kurang	Pembangunan Cluster industri pengolahan ternak
						Pengembangan ternak masih terbatas	Integrasi ternak dengan kebun dan hutan (agroforestry)
2.	Kontribusi Kategori pertanian, kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%) ADHK 2010	26,05	24,85	-	-	Anomali iklim makro	Manajemen sistem usaha tani dan maksimalisasi peran BMG
							Komitmen Mewujudkan Rakyat Tidak Bodoh
1.	APK PAUD (%)	NA	-	-	-	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumatera Utara pada tahun 2010 53,50 persen masih dibawah rata-rata APK PAUD Indonesia yang sebesar 53,70	Pembinaan terhadap Lembaga PAUD di Kabupaten/Kota
2.	APK SD + MI	112,59	-	-	-	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Pemberian bantuan bagi siswa

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
3.	APM SD + MI	92,66	-	-	-	Sekolah Dasar (SD) di Sumatera Utara sebesar 94,24 masih dibawah rata-rata APK Nasional yang sebesar 95,23	dari keluarga tidak mampu
4.	APK SMP + MTs	105,01	-	-	-	APK SMP/MTs Nasional = 98,11% Hal ini berarti bahwa APK SMP/MTs Sumut lebih tinggi daripada APK SMP/MTs secara Nasional	Pemberian bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu
5.	APM SMP + MTs	97,52	-	-	-		
6.	APK SMA + MA + SMK (%)	89,99	-	-	-	APK SMA/MA/SMK Nasional = 69,6%, yang berarti APK SMA/MA/SMK Sumut lebih tinggi daripada APK SMA/MA/SMK secara Nasional	Pemberian bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan revitalisasi SMK
7.	APM SMA	74,57	-	-	-		
8.	APK Perguruan Tinggi	NA	-	-	-	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Sumatera Utara pada tahun 2010 sebesar 18,19 persen masih dibawah rata-rata APK Perguruan Tinggi (PT) Nasional sebesar 18,36	Pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang D-I dan D-III
9.	Angka Melek Huruf (%)	98,46	-	-	-	Masih terdapat buta aksara usia produktif diatas 15 tahun	Pembelajaran di luar ruang kelas dan peningkatan kesempatan belajar
10.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,07	-	-	-	Target Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun sudah tercapai tetapi perlu ditingkatkan untuk Wajib Pendidikan Dasar 12 Tahun	Perluasan kesempatan belajar formal melalui kemudahan sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan
							Komitmen Mewujudkan Rakyat tidak Sakit
1.	Angka kelangsungan hidup bayi (Angka Kematian Bayi)	22	-	-	-	Target sudah tercapai namun AKB masih cukup tinggi di beberapa Kabupaten	Meningkatkan kesehatan ibu pra kehamilan
2.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	265	-	-	-	Beberapa Kabupaten sudah memenuhi target namun masih ada yang AKI tinggi	Meningkatkan layanan kesehatan bagi ibu yang melahirkan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
3.	Usia harapan hidup	72,0	-	-	-	Beberapa Kabupaten sudah memenuhi target namun masih ada disparitas	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada kabupaten yang belum memenuhi target
4.	Prevalensi balita gizi buruk dan kurang	20	-	-	-	Target rata-rata sudah tercapai namun masih ada beberapa Kabupaten yang prevalensi balita gizi buruk Sangat Tinggi (diatas 30%)	Peningkatan kesehatan bagi ibu pra kehamilan dan selama masa pertumbuhan balita
6.	Rasio posyandu per satuan balita	-	-	-	-	Keberadaan Posyandu sudah kurang berperan aktif sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar masyarakat	Revitalisasi posyandu melalui rehabilitasi posyandu dan pemberian insentif bagi tenaga pelayanan kesehatan
7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	-	-	-	-	Kurangnya fungsi pelayanan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	Revitalisasi Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	-	-	-	-	Keterbatasan daya tampung pasien di Rumah Sakit	Pemberian kemudahan bagi pihak swasta dalam mendirikan Rumah Sakit dan pemberian stimulan bantuan melalui Hibah dan Bansos
9.	Rasio dokter per satuan penduduk	-	-	-	-	Kurang meratanya keberadaan tenaga pelayanan kesehatan di daerah disebabkan ketertarikan melayani di daerah perkotaan	Pemberian insentif dan beasiswa bagi tenaga pelayanan kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan tertinggal.
10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	-	-	-	-		
11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	-	-	-	-	Kurangnya kompetensi SDM Bidan	Pembinaan bidang melalui seminar, workshop, lokakarya dan pelatihan keterampilan
12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	-	-	-	-		
13.	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	-	-	-	-	Masih terdapatnya kondisi balita gizi kurang dan gizi buruk serta pemberian imunisasi yang tidak lengkap	Pemberian imunisasi, makanan pengganti ASI dan makanan tambahan secara gratis bagi balita melalui Puskesmas, Pustu, Pusling
14.	Cakupan Balita Gizi Buruk	-	100%	-	-		

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
	mendapat perawatan						dan Posyandu
15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	-	100%	-	-	Masyarakat kurang memahami gejala penyakit yang diderita dengan cepat sehingga penanganan selalu terlambat	Sosialisasi gejala penyakit penderita TBC BTA dan BDB dan tindak lanjut penanganan dengan pengobatan dasar
16.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	-	100%	-	-		
17.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	100%	-	-	Masyarakat miskin yang menerima pelayanan kesehatan rujukan belum tertangani seluruhnya melalui Jamkesmas	Pengalokasian dana Jamkesda bagi masyarakat miskin di luar peserta Jamkesmas, Askes, Asabri dan Jamsostek
18.	Cakupan kunjungan bayi	-	95%	-	-	Kunjungan rutin bayi melakukan imunisasi masih kurang	Pemberian imunisasi dasar secara gratis melalui pelayanan Posyandu dan Puskesmas
19.	Cakupan puskesmas	-	1 : 23.000	-	-	Menurunnya fungsi Pelayanan Dasar Puskesmas, Pembantu Puskesmas	Revitalisasi Puskesmas dan Pembantu Puskesmas
20.	Cakupan pembantu puskesmas	-	1 : 6.700	-	-		
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)		70,64	-	-	Rendahnya kemampuan SDM angkatan kerja sehingga kurang memenuhi permintaan kesempatan kerja	Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai pelaksanaan berbagai pelatihan kerja dan pemagangan serta menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan
2.	Pencari kerja yang ditempatkan			-	-	Penempatan angkatan kerja masih belum memenuhi permintaan kesempatan kerja	Pelatihan dan pemagangan para pencari kerja oleh perusahaan pencari pekerja
3.	Persentase koperasi aktif (%)	56,8		-	-	Produktifitas koperasi yang masih rendah serta sumber daya manusia belum mampu untuk aplikasi sistem informasi teknologi khususnya pasar	Pelatihan dan pembinaan Koperasi serta pemberian aksesibilitas permodalan yang murah antara lain dengan skim kredit bunga

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
							murah seperti dengan pendirian Badan layanan Umum Daerah (BLUD) dengan konsep Gramming Bank
4.	Usaha Mikro dan Kecil						
5.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	378	120		123	Penerbitan izin usaha yang masih terpusat di Pusat, selain itu juga daya saing infrastruktur yang rendah	Perlu ada desentralisasi penerbitan izin investasi di daerah serta perbaikan fasilitas infrastruktur khususnya jalan dan energi
6.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.Juta)	13.588.420,60	10.000.000	11.000.000		Promosi investasi yang masih rendah, serta permasalahan lokasi investasi yang belum jelas (status lahan yang bermasalah)	Promosi investasi harus terus ditingkatkan baik skala internasional maupun nasional, serta komitmen Pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan UU tentang Pertanahan yang baru
7.	Daya serap tenaga kerja (%)	126,18	108	110		Masih rendahnya serapan tenaga kerja	Menyelaraskan kurikulum pelatihan dan pemagangan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja
8.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	4.424.974,41	35 %	40%		Proses perizinan yang masih birokratif, serta status lokasi usaha yang masih belum pasti (sengketa lahan)	Harus terdapat SOP untuk pengurusan izin investasi dan biaya yang jelas untuk pengurusan izin investasi serta ada payung hukum tentang ruang (RTRW Provsu) harus segera selesai diperdakan
9	Nilai Tukar Petani (NTP)	99.49	100.08	-	-	NTP sudah memenuhi target, namun masih ada disparitas antar kabupaten	Perlu peningkatan SDM petani dengan penyuluhan pertanian dan bantuan permodalan
10	Angka Kemiskinan	10,30	10,2	-	-	Perlu kerja keras untuk menanggulangi Angka Kemiskinan sesuai Target MDG's 2015 sebesar 7,5%	Perlu terobosan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha
11	Angka Pengangguran	6,5	6,0	-	-	Masih perlu upaya serius untuk	Perlu terobosan untuk

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						mengatasi Angka Pengangguran Terbuka sesuai Target MDG's 2015 sebesar 7%	perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan investasi dan peluang usaha produktif
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,54	76,35	-	-	Target IPM tahun 2009 sudah tercapai, namun disparitas antar Kabupaten masih sangat jauh	Perlu peningkatan pada aspek terkait kesehatan (angka harapan hidup) pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan ekonomi (pengeluaran riil/ perkapita)
							Pengembangan Infrastruktur Wilayah
1.	Tingkat Kemantapan Jalan(%)	68,22	74,42	84,44	89,08	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi topografi yang sangat bervariasi dimana daerah dataran rendah rawan bencana banjir, sedangkan di daerah pegunungan rawan longsor. Di kawasan pegunungan dan hutan lindung lebar standar 7 m tidak terpenuhi. Tonase kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pendanaan yang terbatas. Pelaksanaan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan. Peralatan kerja yang tidak memadai. SDM yang terbatas. Masih terdapat ± 400 Km kondisi jalan permukaan tanah. 	Peningkatan alokasi anggaran APBD dan APBN Peningkatan SDM dan Kelembagaan Regulasi pembatasan berat kendaraan Peningkatan Peralatan
2.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	36,88	39,45	48,50	60,00	Kemampuan keuangan yang terbatas sehingga kapasitas jalan dan geometri jalan tidak sesuai dengan standar teknis	Peningkatan bantuan APN untuk penanganan jalan di Kab/Kota

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						minimal	
3.	Jaringan irigasi						
	Pemeliharaan Rutin	80.000 Ha	88,773 Ha	86,999 Ha	72.934	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kondisi irigasi teknis dan semi teknis akibat kerusakan alat ukur dan bangunan irigasi. 2. Kondisi jaringan irigasi secara keseluruhan masih banyak yang belum dilengkapi bangunan-bangunan irigasi yang berfungsi sebagai pengatur pembagian air , pengendali kelebihan air dan pengamanan terhadap kerusakan. 3. Daerah irigasi di dataran tinggi yang jaringan irigasinya terletak pada lereng-lereng perbukitan rentan terhadap longsor. 4. Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa. 5. Penurunan fungsi jaringan irigasi dan belum lengkapnya dan/telah rusaknya bangunan pengatur sehingga pengalokasian air tidak optimal menaikkan intensitas tanam, saat ini intensitas tanam 115 %. 6. Terjadinya alih fungsi lahan pada Daerah Irigasi menjadi non pertanian. 7. Sulitnya pelaksanaan 	Meningkatkan fungsi jaringan irigasi pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						<p>pembebasan tanah untuk kebutuhan infrastruktur SDA.</p> <p>8. Kelembagaan/orgasnisasi pemakai air irigasi yang masih lemah dan belum berkembang untuk menunjang sistem pengelolaan irigasi yang berkelanjutan.</p> <p>9. Masih lemahnya pemahaman tentang berbagai kebijakan dan regulasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.</p> <p>10. Belum terlaksananya pengelolaan aset irigasi dengan baik yang sangat penting untuk Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)</p> <p>11. Belum aktifnya Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara serta belum terbentuknya Komisi Irigasi kabupaten pada sebagian besar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara</p>	
	Perbaikan/Peningkatan	10.225 m	12.062 m	21.711 m	21.712 m		
	Jaringan Rawa						
	Pemeliharaan Rutin	80.413 Ha	55.232 Ha	55.232 Ha	55.832 Ha	<p>1. Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan Rawa.</p> <p>2. Terjadinya alih fungsi lahan pada Daerah Rawa menjadi non pertanian setelah</p>	Meningkatkan fungsi jaringan Rawa pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/normalisasi /rehabilitasi jaringan Rawa
	Perbaikan/Peningkatan	5.590 m	7000 m	4857 m	4856 m		

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						dibangun jaringan pengairan 3. Tidak adanya lembaga masyarakat Pengelolaan Jaringan Rawa	
	Penanganan Tebing Sungai /Pantai	4.060 m	4.090 m	4.426 m	4.428 m	Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan Sungai.	Penanganan banjir akibat sudah berkurangnya hutan di daerah hulu sungai
	Normalisasi /Pelurusan Sungai	15.000 m	36.300 m	19.469 m	19.469 m		
	Perbaikan dan pembangunan tanggul banjir	14.800 m	36.300 m	19.469 m	19.469 m		
	Penyediaan Air baku/Embung	4	30	40	10	Terbatasnya dan penyediaan air baku	Penyediaan sarana air baku sebagai kebutuhan dasar masyarakat seiring dengan peningkatan penduduk dan terjadinya krisis air
5.	Rasio elektrifikasi desa	90.25 %	90.26 %	90.42 %	90.60 %	Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi belum mampu terlayani	Pembangunan Pembangkit Listrik Mini Hydro dan PLTS (energi terbarukan)
6.	Rasio elektrifikasi rumah tangga	88.52 %	89.91 %	88.65 %	88.79 %	Potensi energi di Sumut yang belum sepenuhnya dieksploitasi	
7.	Cakupan pelayanan air minum (%)						
8.	Status Mutu Sumber Air Minum	Layak Minum	Layak Minum				

2.2.3. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPDP Provinsi

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.81.
Identifikasi Kebijakan Nasional
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No.	Kebijakan Nasional		
	RPJMN*)	RKPDP Provinsi	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra produksi pertanian dan perkebunan;	Peningkatan ketersediaan bahan pangan, dengan kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi bahan pangan dengan sasaran pokok terwujudnya swasembada beras di Sumatera Utara	Revitalisasi UPT dan BBI untuk meningkatkan ketersediaan benih/bibit tanaman pangan, perkebunan dan perikanan dan Gema Pangan
2.	Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut;	Pengelolaan terpadu perikanan darat dan perikanan laut	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung (kapal, pelabuhan perikanan dan pasar lelang)
3.	Pengembangan industri unggulan;	- Pengembangan industri hilir CPO di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei - Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung berbasis aluminium	
4.	Pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra industri migas dan lumbung energi nasional;	Pembangunan PLTA Asahan III, dan PLTA Asahan IV	Pembangunan PLTP Sarulla Pengembangan Bio Mass
5.	Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya;	Pengembangan tujuan wisata Danau Toba, dan Kepulauan Nias,	Pengembangan wisata MICE di Kota Medan Pengembangan Geo Park di Danau Toba
6.	Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi;	- Pemasangan Jaringan Listrik Desa - Pembangunan SHS/PLTS 50 Wp - 100 Wp di Desa Terpencil - Pembangunan PLTS terpusat 15 KW - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) - Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya - Pemasangan Sambungan Listrik Baru Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu	
7.	Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera;	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan Toll se-Sumatera • Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api se-Sumatera • Interkoneksi listrik se-Sumatera • Global hub Kuala Tanjung • Bandara Kuala Namu sebagai hub penerbangan nasional/internasional 	

8.	Pengembangan Sumatera sebagai <i>pool</i> angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN;	Pemberdayaan BLK Dukungan terhadap penciptaan 1 juta pengusaha pemula (12.000)	
9.	Peningkatan program penanggulangan kemiskinan;	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni • Beasiswa siswa miskin • Jamkesda • Bantuan Sosial 	
10.	Reformasi birokrasi dan tata kelola;	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan e-Government melalui system e-Planning, e-Budgeting, e-Office, e-Procurement dan e-Performance • Pencapaian WTP pada Laporan Keuangan Provinsi 	
11.	Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional	Pengembangan daerah terdepan, terluar, perbatasan (pulau Berhala)	
12.	Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.	Pengembangan Taman Nasional Gn. Leuser dan TN Batang Gadis Penataan kawasan industri berbasis lingkungan	
13.	<p>Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera. diarahkan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; - Menjaga kelestarian pengembangan ekosistem Kawasan Danau Toba 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan PKN Kawasan Mebidang-ro - Pembentukan kelembagaan Mebidang-ro - Pengembangan Kerjasama Pembangunan di KSN Mebidangro - Pengembangan KSN Danau Toba berbasis lingkungan 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra produksi pertanian dan perkebunan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Cluster Industri CPO • Pengembangan Kawasan Peternakan • Pengembangan produk unggulan daerah (PUD) • Penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian 	
14.	Penanggulangan Pasca Bencana Kepulauan Nias	Pengembangan <i>Regional Management</i> dan kerjasama sektor produksi unggulan di Kepulauan Nias	
15		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan <i>Regional Management Lake Toba</i> di kawasan Danau Toba - Pengembangan infrastruktur wilayah permukiman di daerah-daerah tertinggal. seperti Pakpak Bharat. Tapanuli 	

		Tengah. Nias. Nias Selatan. Nias Barat. dan Nias Utara	
--	--	--	--

Keterangan :

*) Kebijakan Nasional terhadap Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam RPJMN-2010-2014

2.2.4. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD tahun 2014. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2015 berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Rangkuman hasil telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.82.
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi
Provinsi Sumatera Utara*)
(9 Prioritas Provinsi)

O	DAPIL	USULAN KEGIATAN	LOKASI KABUPATEN/KOTA	KEWENANGAN PUSAT/PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	SKPD PROVSU PENANGGUNG JAWAB / KOORDINATOR
1	Dapil I Kota Medan	Masyarakat mengeluhkan masalah kurikulum pendidikan serta model ujian akhir yang membingungkan bagi peserta didik dan pelaku pendidikan	Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan	Pusat	Dinas Pendidikan
		Warga mengeluhkan pembagian kartu pintar tidak merata dan tidak adanya sosialisasi (11)	Medan Amplas, Kota Medan	APBN	Dinas Pendidikan
		Masyarakat mengharapkan adanya bantuan pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dan kurang mampu (12)	Medan Kota, Kota Medan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
		Dimohon kepada pihak Dinas Pendidikan agar sekolah negeri tidak mengambil sekolah aplausan pagi-sore sampai mencapai 10 kelas sehingga berdampak kepada sekolah swasta yang muridnya menjadi berkurang. (16)	Medan Denai, Kota Medan	APBN	Dinas Pendidikan
		Masyarakat emohon permasalahan pendidikan untuk dana operasional sekolah dapat direalisasikan (17)	Medan Area, Kota Medan	APBN	Dinas Pendidikan
		Pemerintah diharapkan diharapkn masyarakat agar menertibkan warnet-warnet yang menjamur saat ini, berdampak buruk pada perkembangan pendidikan anak-anak, karena menjadi fenomena bahwa anak-anak diwilayah perkotaan kecanduan berada ditempat warnet pada waktu belajar. (21)		APBD Prov	Dinas Pendidikan

		Masyarakat mengharapkan adanya bantuan pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dan kurang mampu khususnya yang putus sekolah (22)	Medan Perjuangan , Kota Medan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
		Warga menanyakan tentang rencana Perda Wajib Pendidikan Diniyah yang pernah diwacanakan Pemkot Medan. Sampai sejauhmana realisasinya. (24)	Medan Deli, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Pendidikan
		Orangtua murid mengeluhkan banyaknya pungutan liar disekolah-sekolah mengingat adanya sekarang dana bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah (24)	Medan Marelan, Kota Medan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
		Masyarakat memohon agar dibangun sarna gedung untuk pendidikan khusus penderita autis (24)		APBN	Dinas Pendidikan
		Kiranya menjadi perhatian bagi Pemprov maupun Pemko Medan untuk lebih memperhatikan pembangunan di bidang pendidikan khususnya MDA dan rumah ibadah di daerah Medan Marelan (25)		APBD PROV/APBD PEMKO MDN	Dinas Pendidikan
		Pendidikan bagi anak autis ataupun pendidikan bagi anak yang berasal dar keluarga yang tidak mampu harus menjai perhatian yang serius bagi Pemerintah Provsu maupun Pemko Medan. Sebagai gambaran bahwa untuk menyekolahkan anak autis dibutuhkan biaya yangng tidak sedikit dan sangat memberatkan bagi orangtua anak tersebut. Belum lai harus menghadapi kenyataan bahwa kualitas pendidikan anak autis tersebut tidaklah memadai. (27)	Medan Labuhan, Kota Medan	APBD PROV/APBD PEMKO MDN	Dinas Pendidikan
		Masyarkat mengharapkan bantuan dana BOS atau		APBN	Dinas Pendidikan

		beasiswa agar pembagiannya lebih transparan sehingga masyarakat merasa lebih paham atau lebih mengerti dengan syarat-syarat pengajuan untuk beasiswa tersebut (33)			
		Masyarakat mengharapkan agar program-program BPJS dapat lebih disosialisasikan dan dipublikasikan pada warga masyarakat karena program ini sangat bermanfaat namun kurangnya informasi menyebabkan masih banyak warga masyarakat yang belum mendaftar (Hal 6)	Medan Amplas, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Kesehatan
		Warga masyarakat jalan garu III kel harjosari I kec. Medan Amplas masih mengeluhkan mengenai Pengurusan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah diprogramkan Pemerintah Pusat sebagai pengganti jamkesmas, sangat banyak masyarakat di kec. Medan amplas belum mengurus BPJS untuk kesehatan keluarganya, untuk itu masyarakat menyampaikan keluhannya melalui anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan I Kota Medan untuk memberikan penjelasan prosedur pengurusannya dengan baik dan terhindar dari percaloan serta tidak dipersulit dalam pengurusan surat-suratnya (hal 6)		APBN	Dinas Kesehatan
		Diharapkan kepada Pemerintah agar memperhatikan penyakit demam berdarah, mohon dilakukan penyemprotan di daerah tersebut (8)	Medan Kota, Kota Medan		Dinas Kesehatan
		Masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki Jamkesmas mempertanyakan bagaimana cara untuk memiliki BPJS sebagai pengganti		APBN	Dinas Kesehatan

		Jamkesmas. (10)			
		Masyarakat kel. Tegal Sari-Mandala I mempertanyakan tentang kepesertaan Jamkesmas, Kartu Medan Sehat yang pernah berlaku berkaitan dengan keberadaan BPJS saat sekarang ini dan dipublikasikan kepada masyarakat karena program ini sangat bermanfaat. (12)	Medan Denai, Kota Medan	APBN	Dinas Kesehatan
		Masyarakat kurang mampu jalan pelajar Gg. Sempurna Kel. Binjai Kec. Medan Denai mempertanyakan permasalahan pemberian Kartu Medan Sehat, Kartu BPJS dan kartu-kartu yang telah diluncurkan/diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dapat disosialisasikan penggunaan dan masa berlaku pemakaiannya. (12)		APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Masyarakat kec. Medan denai menyampaikan biaya berobat ke RS. Mahal, terkadang berobat ditunda, sedangkan program layanan melalui Jamkesmas/JKN sulit didapatkan bahkan banyak warga yang kurang mampu tidak mendapatkannya, untuk itu masyarakat meminta kepada pemerintah terus memonitor/mengawasi ke lapangan, mendata masyarakat kurang mampu agar mendapatkan bantuan kesehatan tepat sasaran. (12)		APBN	Dinas Kesehatan
		Pelayanan BPJS bagi masyarakat dirasa sangat lambat dan belum maksimal, masih ada masyarakat yang mengeluhkan dibiarkan begitu saja (14)	Medan Area, Kota Medan	ABPBD Kota Medan	Dinas Kesehatan
		Warga masyarakat kec. Medan area masih banyak belum memiliki kartu BPJS meminta kepada pemkot medan agar melakukan pengawasan lebih		ABPBD Kota Medan	Dinas Kesehatan

		aktif, mendata ulang kembali masyarakat miskin atau kurang mampu dan mensosialisasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), karena rata-rata masyarakat belum mengurus BPJS yang telah diprogramkan pemerintah bagi kesehatan masyarakat. (17)			
		Masyarakat meminta kepada pemerintah pemkot medan dapat meninjau kembali kebijakan jika kartu BPJS hilang tidak melaporkan ke Polisi dan dipersulit (17)		APBD Kota Medan	Dinas Kesehatan
		Masyarakat mempertanyakan mengapa seluruh anggota keluarga harus didaftarkan dalam kepesertaan BPJS yang iurannya terasa cukup memberatkan bila jumlah anggota keluarganya besar. Dan bagaimana kondisinya bagi warga yang kepesertaannya ganda dan dua-duanya dipotong, hal tersebut terasa merugikan. Masyarakat juga mempertanyakan tentang Jamkesda, Kartu Sehat dan Jamkesmas yang dirasakan sangat membantu masyarakat, apakah masih berlaku sampai saat ini ? (20)	Medan Perjuangan, Kota Medan	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Masyarakat mengeluhkan biaya iuran untuk BPJS sebesar Rp. 25.000/orang, sementara dalam 1 (satu) keluarga lebih dari 1 (satu) orang, sehingga masyarakat merasa terbebani (25)	Medan Marelan, Kota Medan	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Memohon agar Pemerintah memperhatikan BPJS untuk warga miskin yang sulit mendapatkan (26)	Medan Labuhan, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Kesehatan
		Terkait dengan pengalihan Kartu Medan Sehat yang diintegrasikan ke program BPJS, masyarakat mengeluhkan adanya beberapa persyaratan yang dirasa memberatkan. Antara lain harus		APBD Kota Medan	Dinas Kesehatan

		mencatatkan Nomor Induk Kependudukan, merubah KK yang berwarna merah (lama) ke KK yang berwarna biru. Sementara saat ini masih banyak masyarakat yang kartu keluarga (KK) nya masih yang lama. Masyarakat berharap, agar prosedur pengalihan Kartu Medan Sehat dan kartu keluarga dipermudah oleh Pemko Medan dan BPJS (27)			
		Masyarakat Medan Labuhan mengharapkan kiranya program BPJS hendaknya betul-betul membantu masyarakat dan diharapkan kiranya birokrasinya jangan dipersulit. Sampai saat ini masih banyak warga yang belum mengurus BPJSnya, mengapa masyarakat enggan untuk mengurus BPJS ternyata karena mereka tidak mengetahui bagaimana dan dimana mengurusnya dan ditambah pula dengan pengurusannya yang sulit. Masyarakat mengharapkan kiranya instansi terkait turun langsung ke desa-desa untuk menssialisasikan BPJS, karena sekarang ini mereka hanya mau mengurus BPJS apabila mereka sudah berurusan dengan RS walaupun dengan birokrasi yang sulit. Mohon kiranya Pemerintah dapat menugaskan pemerintah desa agar benar-benar membantu masyarakat dalam pengurusan BPJS (29)		APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Masyarakat memohon kepada Pemprovsu khususya Pemko Medan untuk dapat merealisasikan pelayanan pendidikan, kesehatan kepada masyarakat setempat pemberian Jamkesmas kepada masyarakat yang kurang		APBD PROV/APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan

		mampu, dan pemberiannya tidak salah sasaran (32)			
		Dalam pertemuan masyarakat mengeluhkan pelayanan Jamkesmas yang dianggap terbelah pilih. Penyelenggara Jamkesmas tidak merata, karena pelaksanaannya dianggap tidak maksimal dalam melayani peserta Jamkesmas. Masyarakat meminta agar pelaksanaan jamkesmas dilakukan dengan baik dan terukur, sehingga masyarakat miskin yang tidak berkecukupan dapat terlayani dengan baik. (32)		APBD PROV/APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Masyarakat mengharapkan agar peredaran narkoba dan perjudian dapat dihilangkan serta oknum aparat yang terlibat ditindak tegas karena begitu buruknya dampak yang ditimbulkan akibat narkoba dan judi tersebut (hal 6)	Medan Amplas, Kota Medan	APBD Prov	Dinas Sosial
		Masyarakat mengharapkan agar peringatan hari-hari besar dengan pesta petasan dan kembang api tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban yang ada (hal 6)		APBD Prov	Dinas Sosial
		Warga masyarakat meminta pihak kepolisian untuk tanggap menangani Geng Motor dan Peredaran Narkoba, togel, judi karena sangat meresahkan warga (hal 7)		APBD Prov	Dinas Sosial
		Warga meminta pihak kepolisian untuk menangkap Peredaran Narkoba, togel, judi, perampokan dan berbagai kejahatan lainnya karena sangat meresahkan warga (hal 7)		APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Warga mengharapkan tindakan dari instansi terkait yaitu Pemerintah Kota Medan bersama pihak kepolisian dan jajarannya agar turun ke	Medan Kota, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Sosial

		kelurahan-kelurahan di kota medan ini karena narkoba sudah sangat merusak para Generasi muda kita. Dimana para pemuda sudah tidak ada rasa malu dan malas bekerja, sungguh sangat meresahkan para orangtua (8)			
		Masyarakat sangat resah dengan peredaran Narkoba yang merusak generasi muda, diharapkan kepada pihak kepolisian dan pihak yang terkait menindak tegas bandar-bandar narkoba. (13)	Medan Denai, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Peredaran narkoba sudah sangat menkhawatirkan di wilayah kec.medan area, dimohon kepada pemerintah untuk menyiapkan wadah agar para remaja dapat menggunakan waktunya untuk hal yang positif, serta diharapkan agar pemerintah dapat membuka lapangan kerja baru seperti memberikan kredit UKM kepada warga yang membutuhkan untuk mengurangi pengangguran (14)	Medan Area, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Tokoh masyarakat memohon kepada semua pihak terutama pemerintah untuk memperhatikan Pendidikan Agama untuk anak-anak dan kalangan remaja agar ada dasar yang kuat berupa moral dan akhlak yang baik dalam menghadapi tantangan zaman dan budaya luar sehingga anak-anak generasi penerus kita tidak terjerat narkoba, kejahatan dan tindak kekerasan terhadap sesama dan lainnya. Hal ini perlu kita sikapi secara serius dengan menyediakan sarana dan wadah dalam rangka menyalurkan kreatifitas anak-anak muda yang positif dan bermanfaat. (14)		APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Masyarakat meminta kepada pihak kepolisian		APBD Kota Medan	Dinas Sosial

		agar memberantas geng motor yang sangat meresahkan warga kota medan (16)			
		Masyarakat meminta kepada Poldasu agar lebih aktif memberikan rasa aman kepada masyarakat yang saat ini ketakutan dengan maraknya narkoba, perjudian, togel, perdagangan manusia, prostitusi (17)		APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Masyarakat meminta kepada Poldasu agar lebih aktif memberikan rasa aman kepada masyarakat yang saat ini ketakutan dengan maraknya narkoba, perjudian, togel, perdagangan manusia, prostitusi (20)	Medan Perjuangan, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Masyarakat mengharapkan agar keamanan lingkungan yang kondisinya kian meresahkan akibat peningkatan sejumlah aksi kejahatan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. (23)	Medan Deli, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Masyarakat mengharapkan agar peredaran narkoba dan perjudian dapat dihilangkan serta oknum aparat yang terlibat ditindak tegas karena begitu buruknya dampak yang ditimbulkan akibat narkoba dan judi tersebut (23)		APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Masyarakat memohon perhatian Pemerintah Kota untuk menertibkan gubuk liar yang berada dibantaran sungai deli sebagai tempat maksiat dan transaksi narkoba (28)	Medan Labuhan, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Masyarakat khususnya kompleks martubung mengeluhkan adanya danau buatan sampai sekarang sehingga menjadi tempat kumpul-kumpul dan sarang mesum yang meresahkan masyarakat (33)		APBD Kota Medan	Dinas Sosial
		Warga masyarakat di jalan Puri Gg. Mawar Kec.	Medan Area, Kota	APBD Kota Medan	Dinas Pemuda dan

		Medan Area meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan memberikan fasilitas pelatihan-pelatihan kemandirian/keahlian, sarana prasarana olahraga untuk melakukan kegiatan positif agar jauh dari perbuatan negatif (17)	Medan		Olah Raga
		Masyarakat di Komplek Marelan III kel. Rengas Pulau meminta disediakan sarana olahraga berupa Lapangan Volley dan Badminton (24)	Medan Marelan, Kota Medan	APBD Kota Medan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Diharapkan kepada agar memperhatikan perekonomian keluarga kec. Medan kota dengan membantu ibu-ibu dan membuka lapangan pekerjaan bagi para pemuda dan pemudi (8)	Medan Kota, Kota Medan	APBD Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Masyarakat memohon perhatian pemerintah dan swasta dalam rangka memberdayakan dan merekrut anak-anak muda kel. Kota bangun kec. Medan deli sebagai pekerja di industri/pabrik yang ada di kawasan tersebut, sehingga anak-anak muda kel. Kota bangun mdn deli tidak hanya menjadi penonton di wilayahnya. (22)	Medan Deli, Kota Medan	APBD Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Masyarakat mengharapkan kepada pemerintah untuk dapat memberdayakan anak-anak muda dengan membuat usaha-usaha lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran (29)	Medan Labuhan, Kota Medan	APBD Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Diharapkan Pemerintah membuka peluang kepada perusahaan agar membuka penerimaan Tenaga Kerja bagi para pemuda pemudi di medan labuhan warga sangat mengharapkan lapangan pekerjaan (30)		APBD Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meminta kepada pemerintah agar menertibkan akses informasi yang sekarang ini sarat dengan	Kecamatan Medan Area, Medan Area	APBD Prov	Dinas Kominfo

		informasi dan visualisasi yang destruktif terhadap moral anak bangsa, baik itu di media cetak, terlebih lagi di media televisi dan internet. (17)			
		Masyarakat memohon perhatian dan bantuan bagi komunitas di kel. sidorame barat II dalam rangka menjalankan aktifitas sosial keagamaan (19)	Medan Perjuangan	APBD Kota Medan	
		Diharapkan perhatian pemerintah yang serius terhadap pendidikan agama bagi anak-anak generasi penerus bangsa saat ini, mohon aparat kepolisian dapat sinerhi dengan aparat kelurahan serta masyarakat untuk menjauhkan pada pemuda-pemudi kita dari narkoba, karena pengaruh narkoba sangat merusak mental, akhlak dan masa depan pemuda itu sendiri. (24)	Medan Marelan	APBD Kota Medan	
		Masalah pengurusan surat-surat yang diperlukan masyarakat seperti kartu keluarga (KK), KTP, Akte Kelahiran dan surat-surat administrasi untuk usaha di kel dan kec. kiranya pemkot medan dapat lebih meningkatkan sistem yang terbaik bagi masyarakat, tidak dipersulit. (hal 7)	Medan Amplas	APBD Prov	Biro Pemerintahan
		Warga Garu V mengeluh sudah setahun tidak ada kepling sehingga menghambat administrasi dalam pengurusan seperti KK, KTP, BPJS dan pengurusannya lainnya. (hal 8)		APBD PEMKO MEDAN	Biro Pemerintahan
		Masyarakat mempertanyakan tentang penggantian kartu keluarga (KK) merah menjadi biru, karena blanko nya habis maka masyarakat menggunakan KK sementara yaitu KK putih. Apakah tidak ada pengaruh dalam kepenurusan administrasi kependudukan lainnya dengan	Medan Denai	APBD PEMKO MEDAN	Biro Pemerintahan

		menggunakan KK putih tersebut ? (12)			
		Perwakilan masyarakat Griya Martubung 2 dan martubung 3 kel. Tangkahan memohon kepada Pemko Medan untuk mengisi jabatan Kepling di wilayah tersebut karena terkendala dalam pengurusan KTP, KK dan urusan administrasi kependudukan lainnya. (29)	Medan Labuhan	APBD PEMKO MEDAN	Biro Pemerintahan
		Kelurahan Bagan Deli sudah hampir 8 bulan lamanya tidak memiliki Lurah yang definitif dan selama itu hanya dijabat oleh Sekretaris Camat sebagai Plh. Lurah. Kondisi ini sangat meresahkan dan memberatkan warga dalam pengurusan surat ataupun proses administrasi lainnya di kelurahan. Masyarakat berharap kepada Walikota Medan untuk segera mengangkat dan menetapkan Pejabat Lurah yang definitif di Kelurahan Bagan Deli. (34)	Medan Belawan	APBD PEMKO MEDAN	Biro Pemerintahan
		Musholla Aisyiyah Harjosari yang berlokasi di Jl Garu III Gang III No. 25 A1 14 sedang dalam renovasi, mohon bantuan dana dari Pemerintah. (hal 5)	Medan Amplas, Kota Medan	APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprov
		Masyarakat meminta dibangun Mushola tepatnya di lorong 1 kel sukarama 1 (16)	Medan Area, Kota Medan	APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprov
		Permohonan bantuan keuangan untuk kelanjutan perbaikan/pembangunan Mesjid Al Munawwarrah Jalan M. Basir kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan (25)	Medan Marelan, Kota Medan	APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprov
		Permohonan bantuan keuangan untuk kelanjutan perbaikan/pembangunan Musholla Nurul Hidayah Jl. Datuk Rubiah Link. 28 kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan (25)		APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprov

		Mesjid Taqwa Pekan labuhan sesuai dengan informasi dari pantia pada akhir tahun Anggaran 2014 sudah didatangi Tim Verifikasi dari Pemprovsu terkait dengan permohonan bantuan yang telah mereka sampaikan, namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Untuk itu masyarakat bermohon kepada Gubernur Sumatera Utara dapat segera mencairkan bantuan keuangan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Taqwa Pekan Labuhan atau memasukkan kembali kedalam Bantuan Keuangan Pemprovsu pada APBD Tahun Anggaran 2016 (27)	Medan Labuhan	APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprovsu
		Mohon perhatian Pemerintah agar dapat mengalokasikan dana untuk pembangunan Madrasah-madrasah untuk masyarakat Medan Labuhan (28)		APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprovsu
		Bantuan keuangan untuk kelanjutan pembangunan Musholla Al Insyaf yang berada di lingk. 3 Lr. Prooyek Jalan besar Bagan Deli Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan (34)	Medan Belawan	APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprovsu
		Bantuan keuangan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Nurul Hilal di kel. Bagan Deli Kec. Belawan. (34)		APBD PROV	Biro Bina Sosial Setdaprovsu
		Masyarakat mempertanyakan pemberian raskin kepada masyarakat kurang mampu mengapa ada pengurangan sedangkan ekonomi masyarakat tidak berubah (17)	Medan Area	APBN	
		Warga menyampaikan masalah pembagian Raskin dan BLT masi saja tidak tepat sasaran. Warga tidak akan bosan menyampaikan masalah ini karena terkadang tetap saja warga yang lebih	Medan Perjuangan	APBN	

		mampu yng menerim bantuan tersebut. Mohon perhatian yang serius instansi terkait. Masyarakat sangat menyayangkan sekaligus mempertanyakan mengapa banyak warga miskin tidak mendapatkan raskin. (19)			
		Masyarakat kel. Kota bangun mengharapkan kepada pemerintah untuk mendata ulang penerima bantuan raskin, Jamkesmas dll, agar bantuan sosial program pemerintah semuanya tepat sasaran dengan kata lain yang benar-benar berhak yang menerima bantuan tersebut. (21)	Medan Deli	APBN	
		Lagi-lagi masyarakat membicarakan beras miskin yang sudah ada dan beras miskin tersebut sudah diterima dan dinikmati oleh masyarkat yang miskin di daerah kami tetapi ada sebagian ibu janda-janda miskin belum mendapatkannya mohon agar didata ulang kembali beras miskin tersebut memang untuk orang yang tidak mampu (miskin). Mohon kepada Bapak DPRD Provsu agar program beras miskin tersebut dilanjutkan karena sangat membantu kami masyarakat Komplek Uka Martubung Jl. Rawe 5 Lingkungan 7 Lorong 1 Ujung el. Tangkahan Kec. medan Labuhan, dan jamkesmas sangat membantu kami. (32)	Medan Labuhan		
		Perbaikan Jalan Jalan Armada- Jalan Pelangi	Kecamatan Medan Kota,, Kota Medan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Pengaspalan/Pembetonan jalan Santun		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Perbaikan Jalan Saudara samapi ke Simpang Limun		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Perbaikan/Pengaspalan Jalan Bahagia By Pas		APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

				Kab.Kota	Provsu
		Perbaiki Jalan Saudara dari Simpang Jalan Bahagia sampai Jalan SM. Raja		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Perbaiki/Pengaspalan Gg. Tengah jalan AR. Hakim sep. 200 m lebar 3,5 m	Kecamatan Medan Area, Kota Medan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Pengaspalan jalan Batubara disamping Hotel Yanglim Plaza sepanjang 300 m		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Pengaspalan jalan Amaliun sepanjang 1000 m		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Perbaiki/Pengaspalan Jalan Bausit Kelurahan Kota Bangun	Kematan Medan Deli, Kota Medan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Pembangunan Jembatan Sungai Deli yg menghubungkan Lingk III dgn Lingk IV		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Pelebaran Jembatan penyeberangan Tol Mabar Hilir		APBN/APBD Prov.SU	Dinas Bina Marga Provsu
		Mohon Pengaspalan di Kawasan Lingk VI Desa Bangun sep. 1 km yg sudah dilakukan perkerasan	Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Perbaiki Infrastruktur jalan di Kec. Medan Marelان yg sudah rusak		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Perbaiki Infrastruktur jalan yg sudah rusak dan berlubang	Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Pembangunan Jalan baru atau jalan alternatif jika terjadi banjir dan kebakaran		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Jalan penyeberang di bawah Jalan Tol, jika terjadi hujan maka akan banjir atau tergenang		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		Peninggian Badan jalan besar Bagan Deli kel. Bagan Deli	Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga Provsu
		a) Peningkatan saluran drainase di jalan SM. Raja mulai dari Simpang Marendal, Banjar	Kec. Medan Amplas	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		<p>II, Garu V dan Garu VI sampai di depan Gedung Polda hujan turun sering terjadi banjir.</p> <p>b) Penambahan bak sampah, mohon agar Pemerintah memfasilitasi tempat pembuangan sampah.</p> <p>c) Perbaikan drainase di jalan Garu V dengan pengorekan parit-parit</p> <p>d) Penambahan bak sampah agar Pemerintah memperhatikan masalah sampah yang semakin menambah problem banjir</p>			
		<p>a) Perbaikan infrastruktur dari Jl. Armada-Jl.Pelangi.</p> <p>b) Perbaikan pelayanan kualitas air PDAM Tirtanadi.</p> <p>c) Perbaikan drainase di kawasan Sidorejo II tertutup oleh Bangunan.</p> <p>d) Perbaikan drainase di kawasan Sidorejo II tertutup oleh Bangunan di parit busuk Simpang Limun sampai ke Jl. Air Bersih.</p> <p>e) Peningkatan pelayanan dan kualitas air PDAM Tirtanadi bagi warga kota Medan.</p>	Kec. Medan Kota	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		<p>a) Pengerukan sungai agar kotoran sampah dan sedimentasi lumpur.</p> <p>b) Pengerukan parit untuk menghindari banjir saat hujan akibat air tidak mengalir.</p> <p>c) Bantuan Pengelolaan sampah dengan</p>	Kec. Medan Denai	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		menyediakan tempat sampah organik dan sampah non organik.			
		<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan jaringan drainase di kelurahan kota Matsum II karena jalan yang dibuat Pemerintah lebih tinggi dari rumah serta tidak ada parit. b) Pengerukan parit akibat dari adanya proyek MUDP parit yang berada di jalan Amaliun menjadi tinggi karena tanah bekas galian masuk ke dalam parit. c) Peningkatan saluran drainase kota d) Pengerukan parit di kec. Sukarame I dan Kota Matsum I, di jalan Medan Area Selatan e) Peningkatan saluran drainase kota dengan pembuatan parit di jalan Emas dan jalan AR. Hakim sampai Jl. Mandala by pass 	Kec. Medan Area	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan saluran drainase kota dengan pembuatan parit di jalan Pelita II, III, dan IV b) Peningkatan saluran drainase kota dengan pembuatan parit di Kel. Sidorame Barat II c) Peningkatan jaringan air minum PDAM Tirtanadi 	Kec. Medan Perjuangan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan saluran drainase di kelurahan Kota Bangun b) Perbaikan saluran drainase dengan pengerukan 	Kec. Medan Deli	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		a) Perbaikan saluran drainase dengan pengerukan di jalan Menteng Komplek Marelان III b) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM	Kec. Medan Marelان	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM di Komplek Uka Martubung jalan rawe 5 lingkungan 7 lorong 1 ujung kelurahan Tangkahan. b) Perbaikan saluran drainase di lingkungan V, 22, 23 dan 24 dan di kelurahan Tangkahan. c) Penertiban perusahaan – perusahaan penghasil limbah yang membuang ke sungai Deli. d) Perbaikan sanitasi dan persampahan lingkungan	Kec. Medan Labuhan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase kota b) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM c) Perbaikan sanitasi dan persampahan lingkungan	Kec. Medan Belawan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
	Dapil II (Medan Johor, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan	Masyarakat penyandang disabilitas mengharapkan Pemprovsu untuk memperhatikan dan membantu organisasi Penyandang Disabilitas dan membuat Perda bagi Penyandang Disabilitas.	Medan Polonia	APBD Prov	Dinas Sosial

	Baru)				
		Mohon penutupan terhadap cafe-cafe yang mengurus ke hal yang tidak baik di wilayah kec. Medan Polonia.		APBD PEMKO MEDAN	Dinas Sosial
		Masyarakat mengharapkan dan bermohon kepada Dinas Sosial Pemko medan untuk dapat mendata ulang bagi warga miskin dan kurang mampu agar mendapatkan fasilitas dari pemerintah berupa KKS, KIS dan KIP yang tepat sasaran.	Medan Barat	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Sosial
		Masyarakat mengharapkan kepada kepolisian melalui pemerintah provsu untuk lebih serius memberantas peredaran narkoba yang sangat meresahkan masyarakat di kec. Medan Sunggal	Medan Sunggal	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Sosial
		Mohon untuk penanganan panti rehabilitasi yang ditangani oleh Dinas Sosial karena terjadi pembiaran pelepasan pasien rehabilitasi secara sengaja	Medan Tuntungan	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Sosial
		Masyarakat mohon bantuan dan sosialisasi untuk masuk ke dalam data penerimaan bantuan iuran (PBI) yang berguna untuk mendapatkan Kartu BPJS yang iurannya di bayarkan oleh Pemerintah.	Medan Johor	APBD PROV/APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Masyarakat mengaharapkan sosialisasi dari pihak pemerintah tentang BPJS sebab masih banyak masyarakat yang belun mengetahui manfaat dari keberadaan BPJS, untuk itu diminta kepada pihak BPJS agar segera melakukan sosialisasi agar masyarakat mengerti tentang manfaatnya.	Medan Polonia	APBD PROV/APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Masyarakat meminta agar Pemerintah Kota Medan melakukan Foging disetiap keluarahan/lingkungan sebab rawannya penyakit		APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan

		BDB.			
		Tidak terdaftarnya warga kurang mampu sebagai Pemegang Kartu Jamkesmas	Medan Maimun	APBD PROV	Dinas Kesehatan
		Masyarakat juga mengeluhkan tentang kurangnya sosialisasi tentang BPJS dan meminta agar pihak BPJS tidak mempersulit pengurusan khususnya dalam hal rujukan.	Medan Petisah	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Masyarakat meminta Pemkot Medan dapat mensosialisasikan perpindahan dari kartu medan sehat menjadi BPJS yang iurannya ditanggung oleh Pemerintah Kota Medan.	Medan Barat	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Masyarakat kec. Medan sunggal mengharapkan kepada pemerintah untuk mempermudah pengurusan BPJS dan membuat kantor-kantor cabang	Medan Sunggal	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Warga berharap Pemerintah Pemko Medan memberikan pendidikan dan kesehatan secara gratis bagi warga khususnya yang kurang mampu dan warga juga bermohon kiranya pemerintah dapat memberikan bantuan kendaraan ambulance gratis setiap kelurahan untuk membantu/digunakan warga apabila ada warga yang jatuh sakit.		APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh dan memberatkan dengan ituran BPJS diminta kepada Pemerintah untuk tidak memberatkan masyarakat dibawah garis kemiskinan.		APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Puskesmas di kec. Medan Selayang harap dibangun dengan sebaik-baiknya dan perlu adanya peninjauan/pemindahan mengingat puskesmas tersebut sudah tidak layak.	Medan Selayang	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan

		Masyarakat memohon kepada Pemerintah untuk penambah penerima bantuan iuran (PBI) guna mendapatkan fasilitas dari program pemerintah berupa Kartu Indonesia Sehat serta BPJS bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.	Medan Tuntungan	APBN	Dinas Kesehatan
		Diminta kepada Pemprovsum untuk merealisasikan Jamkesda ke masyarakat yang merupakan program Provsu		APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Kepala Lingkungan VI Titi Rante menyelaskan pihak BPJS memberikan data yang berbeda dengan kenyataan dilapangan, masyarakat memohon untuk bantuan untuk warga miskin dan pendataan ulang yang lebih selektif	Medan Baru	APBD PEMKO MEDAN	Dinas Kesehatan
		Diminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mensosialisasikan sekolah Adiwiyata yang dikelola oleh Pemprovsum	Medan Barat	APBD PROV	Dinas Pendidikan
		Tenaga pengajar SMK Pemprovsum yang telah lengkap dengan peralatannya, mengharapkan kepada Pemprovsum untuk mempermosikan dan memberdayakan pengerjaan pembuatan meubeleur, service kendaraan dan keahlian lainnya pada instansi Pemerintah maupun Swasta sebagai pendapatan untuk penunjang kegiatan Pendidikan SMK Pemprovsum.		APBD PROV	
		Masyarakat Pondok Surya kec. Medan barat memohon bantuan kepada Pemprovsum untuk pembangunan dan penambahan ruangan belajar Madrasah Diniyah Awaliyah Al Iklas.		APBD PROV	
		Masyarakat mohon bantuan dalam pembangunan PAUD untuk menampung anak-anak usia dini.		APBD PROV	
		Pengusulan pembuatan pelatihan khususnya		APBD PROV	

		untuk anak putus sekolah yang orangtuanya tidak mampu setara tingkat SMA/SMK di sekolah SMK Binaan Provsu			
		Masyarakat memohon bantuan untuk merenovasi dan membantu pembangunan Mesjid Al-Hidayah.	Medan Sunggal	APBD PROV	
		Pertambahan jumlah penduduk di Medan Selayan yang cukup pesat hingga mempengaruhi dunia pendidikan diharapkan adanya pembangunan SMA Negeri di kec.Medan Selayang	Medan Selayang	APBN	
		Mohon untuk mensejahterakan tutor PAUD dengan menaikkan gaji mereka	Medan Tuntungan	APBN	
		Warga dikec. Sunggal protes terhadap pendataan warga yang mendapat jatah beras miskin (raskin) , dimohon kepada Pemerintah Kota Medan dan Pemprovsum untuk segera menengahi dan pendataan ulang lebih selektif dalam penyaluran raskin di kec. Medan sunggal pada umumnya.	Medan Sunggal	APBN	Bidang Kemiskinan
		Masyarakat memohon kepada pemkot medan dan pemprovsum untuk mendata ulang BLT yang tidak tepat sasaran.		APBD PROV/ APBD PEMKO MEDAN	
		Masyarakat mohon bantuan Bansos dari Pemko Medan maupun Pemprovsum untuk dapat pembangunan rumah ibadah di Jl. Karya Gg. Ayem kel karang berombak kec. Medan Barat	Medan Barat	APBD PROV/APBD PEMKO MEDAN	Biro Binsos
		Masyarakat memohon kepada Poldasu untuk membangun Pos Polisi di kel. Kwala Bekala.	Medan Johor	APBN	Biro Hukum
		Masyarakat di kec. Medan Selayang memohon kepada Poldasu adanya Polsek di setiap kecamatan.	Medan Selayang	APBD PEMKO	Biro Hukum
		Masyarakat meminta Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Medan Johor	APBD Prov	Pemerintahan Umum

		mensosialisasikan pengurusan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai dasar untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)			
		Warga memohon kepada Pemerintah dan Dinas terkait untuk mensosialisasikan Kartu Indonesia Pintar dikarenakan warga masih banyak yang tidak mengerti.		APBN	Pemerintahan Umum
		Masalah pengurusan akte kelahiran dan kartu keluarga yang memakan waktu lama sekitar 2-3 bulan.		APBD PEMKO MEDAN	Pemerintahan Umum
		Walikota Medan menyampaikan kePemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus bersinergi dan bekerjasama dalam pembangunan di bidang Kesehatan, pendidikan dan kependudukan.		APBD PROV/APBD PEMKO MEDAN	Pemerintahan Umum
		Masyarakat mengharapkan Pemkot Medan untuk tidak mempersulit dalam pengurusan Akte Kelahiran dan KK berwarna biru untuk pengurusan BPJS, diminta agar Pemkot Medan dapat memperhatikan hal ini.	Medan Petisah	APBD PEMKO MEDAN	Pemerintahan Umum
		Masyarakat meminta kepada pemerintah kota medan untuk mempermudah pengurusan KK dan akte kelahiran	Medan Sunggal	APBD PEMKO MEDAN	Pemerintahan Umum
		Warga lingkungan IV memohon kepada pihak kel. Ataupun kec. Untuk menetapkan dan mengganti Kepala Lingk. IV kel Babura kec. Medan Baru dikarenakan Kepling tidak berdomisili di lingk. IV karena sulit menghubungi secara langsung.	Medan Baru	APBD PEMKO MEDAN	Pemerintahan Umum
		Pihak kelurahan dan kepling mengutip biaya iuran keamanan setiap bulan. Warga memohon kepada		APBD PEMKO MEDAN	Pemerintahan Umum

		pihak kec. Dan kel. Memberikan pelayanan dalam keamanan.			
		Masyarakat juga menyampaikan keluhan tentang langkanya Gas Elpiji ukuran 3 kg,dan harganya cukup mahal diatas HET,melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada pihak pertamina diminta agar dapat mengawasi menertibkan pihak agen/penyalur Gas Elpiji agar masyarakat yang susah tidak bertambah susah.	Kecamatan Medan Petisah		Biro Perekonomian/ Distamben
		Pengusulan pembuatan pelatihan khusus untuk anak putus sekolah yang orang tuanya tidak mampu setara tingkat SMA/SMK disekolah SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara.	Kecamatan Medan Barat		Dinas Koperasi dan UKM
		a) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM di kelurahan Kwala Belaka. b) Peningkatan saluran drainase di kawasan HKBP Pordomuan c) Pengerukan sungai Babura di kelurahan Kwala Belaka d) Peningkatan drainase di jalan karya Jaya Kecamatan Medan Johor	Kec. Medan Johor	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase kota b) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM c) Perbaikan sanitasi dan persampahan lingkungan melalui pengerukan parit	Kec. Medan Polonia	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase kota	Kec. Medan Maimun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase kota di jalan Gatot Subroto hingga kawasan Makro	Kec. Medan Petisah	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		b) Pengerukan parit di wilayah Simpang Iskandar Muda Baru.			
		a) Peningkatan drainase di sekitar RS Colombia, Selecta, dan PLN.	Kec. Medan Barat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase kota dengan pengerukan saluran parit di jalan kapten Sumarsono, dan kapten Muslim b) Perbaikan sanitasi dan Penanganan sampah pada kawasan perbatasan	Kec. Medan Helvetia	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase kota di jalan Djamin Ginting dan jalan Ngumban Surbakti. b) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM c) Perbaikan sanitasi dan persampahan lingkungan melalui pengerukan parit	Kec. Medan Selayang	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM b) Peningkatan saluran drainase melalui pembuatan parit di jalan Setia Budi Ujung, di kawasan sungai Bekala Perumnas Simalingkar c) Penghijauan pada bantaran sungai belawan	Kec. Medan Tuntungan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase melalui pengerukan parit di kel. Titi Rante, jalan Darussalam sampai ke jalan Sei Wampu b) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM Tirtanadi c) Peningkatan saluran drainase melalui	Kec. Medan Baru	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		pembangunan infrastruktur pendukung di kelurahan Sei Kambing dan kelurahan Babura			
		1. Perbaikan perbaikan Titi/Jembatan di lingk Lingkar Raya yg sudah rusak 2. Pelebaran jalan Karya Jaya hingga perbatasan Namu Rambe	Kecamatan Medan Johor	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		1. Pengaspalan jalan Bilal dan Jalan Cempaka di Kelurahan Sari Rejo 2. Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kec. Medan Polonia	Kecamatan Medan Polonia	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan Nasional Jl. Jamin Ginting - Titi Bengggali di depan RS. Siti Hajar	Kematan Medan Petisah	APBN	Dinas Bina Marga
		1. Perbaikan Jalan Sumarsono sep. 2. Pembuatan jalan Tembus antara Jalan Gereja ke Jalan Ayahanda	Kecamatan Medan Barat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		1. Usulan memperbaiki/mengaspal jalan di Kec. Medan Sunggal 2. Pembangunan jalan alternatif Medan-Binjai- Jalan TB. Simatupang dan SMPN 9 dirueslag sebagai pembangunan 3. Pembanguan Fly Over Pinang Baris/Kampung Lalang	Kecamatan Medan Sunggal	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota APBN	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan dan pelebaran jalan Provinsi Jalan Bunga Raya, Jalan Setia Budi, Jalan Pasar I Lingk VIII (lebar m panjang 450 m)	Kecamatan Medan Selayang	APBD Prov. SU	Dinas Bina Marga
		1. Pengaspalan dan pelebaran jalan Provinsi Jalan Flamboyan Raya sampai Simpang Pasar Melati Kec. Tuntungan	Kecamatan Medan Tuntungan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

		2. Pembangunan jalan tembus dari Jalan Bunga Lau (RS. Adam Malik) ke Jalan di Deli Serdang			
		1. Perbaiki jalan Kelurahan Titi Rante, Kel. Darat, Jalan Sei. Mencirim dan Jalan Darusalam serta Jalan Bahagia dan gang Pelita. 2. Perbaiki Infrastruktur Jalan di Kel. Sei. Sikambang dan Kec. Medan Petisah	Kecamatan Medan Baru	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Dapil III (Kabupaten Deli Serdang)	Hibah untuk sarana dan prasarana muda-mudi remaja Masjid Al Watu Iman Dusun XX dan XXI Desa Mulyorejo kecamatan Sunggal	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Bantuan hibah untuk sarana prasarana rebana remaja masjid Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Penyediaan lahan untuk wakaf warga di Jl. Blok Gading Desa Klambir V Kebun Dusun XX Kec. Hampanan Perak	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Bantuan pengadaan peralatan, perbaikan rumah ibadah dan kegiatan sosial lainnya terhadap aksi sosial masyarakat di Kali Serayu Belakang Dusun 11 Desa Saentis/Cinta Rakyat	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Bantuan pembangunan mesjid di Pasar X Desa Bandar Kalippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Bantuan pemerintah terhadap Pembangunan sarana musholla di Desa karang Anyar Kec. Berigi	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Bantuan pembangunan Mesjid Al Jihad di Desa jati Kusuma Kec. Namorambe	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Bantuan pembangunan Balai Desa (Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe)	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial

		Bantuan atas tanah wakaf (Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe)	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Bantuan perwira ibu2 (Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe)	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Revitalisasi Taman makam Pahlawan di Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Perbaikan Jambur Lost yang merupakan tempat kegiatan keagamaan dan pesta masyarakat (Desa gunung Rintih Kec. STM Hilir)	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Bantuan pengeras suara untuk para remaja mesjid di hamparan perak khususnya remaja mesjid Abasiya Sei Baharu (Kec. Hamparan Perak-Komplek IRA)	Kabupaten Deli Serdang	Hibah/Bansos	Dinas Sosial
		Pemerataan pembangunan sekolah lanjutan di Kecamatan atau Desa	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Peningkatan kemampuan dan keterampilan para pendidik	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Bantuan beasiswa kepada anak-anak berprestasi dan kurang mampu secara proporsional	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Perhatian terhadap kesejahteraan guru	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Sosialisasi yang lebih intensif terhadap program pemerintah Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera KUR dan bantuan sosial lainnya	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Bantuan anggaran untuk masyarakat tidak mampu seperti dana tabungan, syarat dan prosedur mendapatkannya agar masyarakat Desa Karang Anyar Kec. Berigi	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan

		Pembangunan gedung SMA dan TK di Desa karang Anyar Kec. Berigi	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Rehab sarana PAUD, kesejahteraan guru, biaya operasional Masyarakat di Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Pendirian PAUD dan fasilitasnya (Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Penambahan sekolah atau ruang kelas baru agar proporsional dengan jumlah penduduk (Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Kualitas pendidikan yang kurang memadai di SD Negeri (Desa Pematang Lalang, Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Tidak adanya guru agama Kristen di 2 (dua) SD Negeri (Desa Pematang Lalang, Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APBN	Dinas Pendidikan
		Perhatian terhadap sekolah PAUD di Desa Pematang Lalang dalam operasionalnya	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Kurangnya fasilitas sekolah SD, SMP dari segi kualitas sekolah dan jarak (Desa Serdang Kec. Beringin)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Agar masalah pemotongan tunjangan sertifikasi guru ditindaklanjuti (Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakkam)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pendidikan
		Peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan PAUD (Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Sosialisasi maksud dan tujuan program BPJS terhadap masyarakat oleh pihak BPJS	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Bantuan hibah pembangunan Puskesmas Dusun XX dan XXI desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Sosialisasi program pemerintah BPJS di Desa Desa	Kabupaten Deli	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan

		Bandar Kalippa Pasar X Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	Serdang		
		Sosialisasi program pemerintah BPJS di Jl. Blok Gading Desa Klambir V Kebun Dusun XX Kec. Hamparan Perak agar diketahui masyarakat akan kegunaan dan manfaatnya	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Bantuan poging dan obat-obatan dikarenakan merebaknya endemik muntaber di dusun VI barisan Gereja Desa Durian yang telah menelan 3 korban jiwa	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Bantuan pengurusan kartu BPJS untuk masyarakat Desa Sawit Rejo Kec. Kutalimbaru	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Sosialisasi penggunaan pelayanan kartu BPJS dengan angsuran Rp. 25.000/orang Desa Karang Anyar Kec. Berigi	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Keluhan masyarakat Desa Karang Anyar Kec. Berigi terhadap minimnya pelayanan BPJS	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov dan APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Masyarakat Desa Karang Anyar Kec. Berigi meminta peninjauan ulang Program BPJS karena harus membayar iuran tiap bulan	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov dan APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Bantuan pengadaan obat-obatan bagi masyarakat Desa Karang Anyar Kec. Berigi	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Agar pendaftaran BPJS dapat dilakukan di Kantor Kepala Desa agar tidak terlalu jauh ke Lubuk Pakkam	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Agar BPJS di Deli Serdang dapat dibuat menjadi kartu sehat gratis (Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe)	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Sulitnya mendapatkan kartu BPJS (Desa Pematang Lalang, Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Masyarakat merasa terbebani dengan kartu BPJS	Kabupaten Deli	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan

		mandiri dengan biaya Rp. 60.000 per bulan, agar pindah ke BPJS Umum yang dikeluarkan oleh PemKab Deli Serdang (Desa gunung Rintih Kec. STM Hilir)	Serdang		
		Bantuan honor untuk kader2 posyandu (Kec. Hampan Perak-Komplek IRA)	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Bantuan pendidikan dan Pelatihan untuk anak putus sekolah Dusun 11 Desa Saentis/Cinta Rakyat oleh Balai latihan kerja di Kali Serayu Belakang Dusun 11 Desa Saentis/Cinta Rakyat	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Bantuan pendidikan dan Pelatihan untuk remaja putus sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap di Dusun X Desa Medan Krio	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program pelatihan untuk masyarakat yang tidak bekerja dan tidak mempunyai lahan (Desa Pematang Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengadaan program2 pelatihan untuk masyarakat bagi pengangguran (Desa Serdang , Kec. Beringin)	Kabupaten Deli Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penertiban peredaran narkoba di kafe-kafe yang sangat meresahkan di Desa Klambir Lima Dusun V Kel. Tg. Gusta	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	BNN
		Penertiban peredaran narkoba di kafe-kafe yang sangat meresahkan di Desa Bandar Kalippa Pasar X Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	BNN
		Peneritiban peredaran narkoba kerjasama dengan pihak kepolisian di Desa Klambir V Kebun Dusun XX Kec. Hampan Perak	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	BNN
		Penanganan meluasnya peredaran narkoba di Dusun X Desa Medan Krio	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	BNN
		Perhatian pemerintah dan Polsek Pancur Batu dalam penanganan narkoba (Desa Jati Kusuma	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	BNN

		Kec. Namorambe)			
		Masalah peredaran narkoba di Desa Suka Maju Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	BNN
		Penangan Masalah nasrkoba di Kec. Deli Tua	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	BNN
		Bantuan pembuatan lapangan olahraga di Desa Sidodadi Dusun I dan II Kecamatan Pagar Merbau kabupaten Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota*)	Dispora
		Bantuan pembangunan sarana dan prasarana remaja agar dapat melakukan kegiatan di Desa Sawit Rejo Kec. Kutalimbaru	Kabupaten Deli Serdang	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota*)	Dispora
		Pembangunan sarana prasana fasilitas kegiatan remaja di Desa Lantasan baru Kec. Patumbak	Kabupaten Deli Serdang	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota*)	Dispora
		Pembangunan lapangan bola(Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe)	Kabupaten Deli Serdang	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota*)	Dispora
		Bantuan sarana olahraga (lapangan bulutangkis0 untuk para pemuda di wilayah jalan mawar (Kel. Kadal, Kec. Deli Tua)	Kabupaten Deli Serdang	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota*)	Dispora
		Dukungan Pemerintah Deli Serdang dan Provsu untuk menindak lanjuti permasalahan tanah Desa Ramunia ke Pemerintah Pusat agar bisa terselesaikan di Dusun IV Pematang Blara Desa Pantai Labu Kec. Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Pemerintahan Umum
		Permasalahan Tanah pemukiman yang sampai sekarang belum ada suratnya	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov	Pemerintahan Umum
		Perhatian terhadap kepemimpinan Kepala Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe yang akan berakhir	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Pemerintahan Umum
		Permohonan prona untuk sertifikat tanah bagi masyarakat desa Pematang Kec. Percut Sei Tuan	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Pemerintahan Umum

		Pengurusan Akte Pernikahan (Desa Pematang lalang Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Pemerintahan Umum
		Masalah tanah Ex HGU (Kec. Percut Sei Tuan)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov	Pemerintahan Umum
		Masalah tapal batas desa dan hutan lindung mengacu kepada SK Menhut No. 44 (Desa gunung Rintih Kec. STM)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Prov	Pemerintahan Umum
		Tindak tegas oleh Kapolda terhadap premanisme di Desa Klumpang dusun Dusun XVI Timur Sidomulyo Desa Klumpang Kec. Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Kesbangpol
		Penertiban kafe2 yang meresahkan masyarakat di Desa lantasan baru Kec. Patumbak	Kabupaten Deli Serdang	APBD Kab/Kota	Kesbangpol
		Diminta pemerintah Deli Serdang bantuan pengadaan mesin mencari kerang bagi masyarakat Pantai labu	Dusun: IV Pematang Biara, Desa:Pantai Labu, Kec :Deli Serdang, Kab. Deli Serdang		Dinas Kelautan Perikanan
		1.Karena belakangan ini sering terjadi kelangkaan Gas Tabung Elpiji 3 kg apalagi sekarang pemerintah menaikkan harga minyak ditambah susahny mendapatkan minyak tanah kembali,masyarakat desa sidodadi memohon kepada Pemerintah Provsu dan Pemerntahan Kabupaten untuk segera mengatasi hal ini.	Desa :Sidodadi, Kec : Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang		Biro Perekonomian
		2.Hal serupa dari Tahun-ketahun yang dikeluhkan masyarakat masih juga terjadi di Desa sidodadi yaitu masih terdapatnya kelangkahan Pupuk dan sulit memperoleh pada saat musim tanam yang menjadi masalah besar.Kelangkahan pupuk bersubsidi dikarenakan kurangnya Pengawasan dari Pemerintahan Kabupaten ditambah lagi			Dinas Pertanian

		banyaknya pupuk yang dijual Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seharusnya diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu,hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja mohon menjadi perhatian Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang untuk meninjau ulang masalah kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut.			
		1.Masyarakat mengusulkan kepada pemerintah detempst sgsr mendiriks khusus Koperasi Pertanian agar petani mudah untuk memperoleh pupuk,bibit dan lain-lain yang lebih murah dan terjangkau oleh petani-petani kecil karena sesuai dengan aturan pemerintah,kalau ingin mendapatkan bantuan dari Pemerintah masalah bibit harus mempunyai lahan seluas 5 Ha.	Desa :Dusun II		Dinas Pertanian
		2.Dari pertemuan reses yang dilaksanakan di desa Namo Bintang yang juga turut hadir dari Dinas Koperasi dan UKM,Masyarakat ingin membentuk suatu lembaga yang berbentuk Koperasi sehingga para petani/pemulung bisa menjual hasilnya dan mempunyai legalitas yg sah.Masyarakat meminta kepada dinas terkait agar dapat membantu apa yang diharapkan masyarakat Dusun II Desa Namo Bintang kab.Deli Serdang bisa tercapai.	Desa :Dusun II		Dinas Koperasi Dan UKM
		Dimohon kepada Pemerintah untuk memberi bantuan kepada masyarakat dalam penyediaan bibit ikan,kambing,babi,dan sapi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Kec :Sunggal, Kabupaten Deli Serdang		Dinas Kelautan Perikanan
		Dimohon kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat/petani dalam pengadaan pompa penyedot air dari sungai untuk	Kec :Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang		Dinas Pertanian

		menghadapi musim kemarau panjang setiap tahunnya yang selalu dialami para petani karena pada saat musim kemarau tali air tidak berfungsi disebabkan pintu berada diatas permukaan air parit.			
		Masyarakat meminta kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pemeberian pupuk untuk membantu pertanian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			Dinas Pertanian
		Dimohon kepada pemerintah untuk memberi bantuan kepada masyarakat dalam penyediaan bibit ikan,kambing,babi dan sapi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			Dinas Kelautan Perikanan,Dinas Peternakan
		Pengembangan Wirausaha masyarakat seperti:pelatihan bordir,Salon,pembuatan makanan ringan serta diintensifikannya pelatihan dan bimbingan dari instansi terkait kepada kelompok usaha masyarakat maupun perorangan,untuk mengoptimalkan potensi yang desanya dan perbaikamn penghasilan nelayan	Desa :Bagan Serdang, Kec :Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang		Dinas Koperasi dan UKM
		Masih banyak sawah warga yang dikelola pertanian yang dikelola dengan sistem tadah hujan,sehingga hasilnya tidak maksimal.Pembangunan dan perawatan irigasi ,agar menjadi prioritas pemerintah ,karena Percut Sei Tuan merupakan daerah lumbung beras di sumatera utara.Masyarakat juga mengharapkan diberikan bantuan pengadaan peralatan pertanian,penyaluran bantuan bibit tanaman dan	Desa :Saentis/cinta rakyat, Kec :Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang		Dinas Pertanian,Dinas Peternakan

		bantuan ternak.dengan bantuan tersebut,akan meningkatkan hasil pertaniandan peternakan warga yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Deli Serdang.			
		Perlu segera ditambah Petugas Penyuluh Lapangan,untuk membimbing masyarakat tentang cara pertanian /perkebunan dan peternakan yang baik serta diberikannya bantuan bibit unggul dan tahan lama,penyaluran pupuk bersubsidi secara teratur dan tepat sasaran serta penyaluran bantuan ternak kepada warga kurang mampu,dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahterannya.	Kabupaten Deli Serdang		Bakorluh
		Dusun III sebagai ketua Koperasi Mandiri mengharapkan bantuan modal untuk meningkatkan status Koperasi kami.	Desa :Lantaran Baru, Kec :Patumbak, Kab. Deli Serdang		Dinas Koperasi dan UKM
		Banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan bahan dan alat-alat pertanian berupa bibit pertanian,bibit ternak,alat pertanian serta alat-alat keterampilan.	Kec :Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang		Dinas Pertanian,Dinas Peternakan
		Desa Tanjung Rejo sebagai daerah wisata Mangrove diharapkan bantuan Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan daerah wisata ini.	Kec :Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Masyarakat memohon bantuan bibit padi.setiap turun kesawah masyarakat kekurangan bibit untuk berladang oleh sebab itu masyarakat sangat mengharapkan adanya program bantuan	Desa :Pematang Lalang, Kec :Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang		Dinas Pertanian

		bibit padi dari pemerintah, seperti yang telah diterima di desa-desa lain.			
		Masyarakat petani sangat kesulitan mendapatkan pupuk untuk bertani karena pupuk sangat terbatas dan langka. Masyarakat petani meminta adanya program penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani.	Desa :Serdang, KEC :Beringin, Kab. Deli Serdang		Dinas Pertanian
		Masyarakat memohon bantuan bibit ternak seperti lembu kepada kelompok ternak atau kelompok yang menerima bantuan benar-benar berprofesi sebagai petani ternak.	Desa :Gunung Rintih, KEC :STM Hilir, Kab. Deli Serdang		Dinas Peternakan
		Dimohon kepada Pemerintah agar kiranya memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak serta perbaikan dan pembenahan Drainase di kec.Percut Sei Tuan.	Desa :Tembung, KEC :Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang		Biro Perekonomian
		Masyarakat juga memohon kiranya perlu ada kegiatan atau bimbingan dan penyuluhan tentang Modal Usaha bagi masyarakat UKM.			Dinas Koperasi dan UKM
		Masyarakat mengeluhkan mahal dan langkanya Gas Elpiji 3 kg di desa tersebut dan masyarakat juga mengeluhkan pemadaman yang dilakukan lagi oleh pihak PLN karena menghambat kegiatan para warga di Desa Bakaran Batu.	Desa :Bakaran Batu, KEC :Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang		Biro Perekonomian
		Masyarakat mengeluhkan mahal dan langkanya Gas Elpiji 3Kg di Desa tersebut.	Desa :Marindal I, KEC :Patumbak, Kab. Deli Serdang		Biro Perekonomian
		Guna peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat petani di daerah ,perlu ditingkatnya	Kabupaten Deli Serdang		Dinas Pertanian

		bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain pemberian bantuan bibit/benih variates unggul tahan hama,ketersediaan pupuk,pengadaan alat-alat pertanian serta ditambahnya penyuluh lapangan.			
		Mohon membantu mempercepat pemasangan jaringan listrik sampai Dusun V Desa Namuriam	Desa :Namuriam, KEC :Pancur batu, Kab. Deli Serdang		Distamben
		a) Pembangunan sarana dan prasarana air minum di Desa Paya Bakung b) Pembangunan sumur bor di Dusun XX dan XXI Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal c) Peningkatan saluran drainase melalui pengerukan parit di Desa Tembung Dusun I dan Dusun II d) Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM Tirtanadi di Dusun XX dan XXI Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal	Kabupaten Deli Serdang	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan saluran drainase melalui pengerukan parit	Desa Klambir Lima Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kec. Hampan perak	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Peningkatan saluran drainase melalui pembangunan saluran parit b) Peningkatan pelayanan air bersih PAM TIRTA DELI agar masuk ke Dusun XX	Desa Klambir V Kebun Dusun XX Kec. Hampan perak	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan saluran drainase melalui pembangunan saluran parit	Desa Bandar Kalippa Pasar X Kec. Percut	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

			Sei Tuan		
		Peningkatan saluran drainase melalui pembangunan saluran parit	Desa Bandar Kalippa Pasar X Kec. Percut Sei Tuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Desa Sidodadi Batu 8 Dusun II Kec. Pagar Merbau	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan MCK	Desa Bangan Serdang Kec. Pantai Labu	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan saluran drainase melalui pembangunan saluran parit	Dusun 11 Desa Saentis/ Cinta Rakyat, Kec. Percut Sei Tuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase melalui pengerukan sampah	Desa Karang Anyar Kec. Beringi	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase seperti parit	Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan pipanisasi air minum	Desa Kutalimbaru kec. kutalimbaru	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase melalui pengerukan parit	Desa Sampali kec. Percut Sei Tuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase melalui pengerukan parit	Desa Medan Estate kec. Percut Sei Tuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase melalui pengerukan parit	Desa Mekar Sari dan Desa Suka Maju kec. Deli tua	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase melalui pengerukan parit	Desa Serdang Kec. Beringin	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		Peningkatan drainase jalan provinsi	Desa Tembung kec. Percut Sei Tuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan jaringan air minum	Desa Deli Tua Barat kec. Deli Tua	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Perbaikan Jalan dan saluran drainase	Desa Tanjung Morawa kec. Tanjung Morawa	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan jaringan air minum	Dusun III kec. Hamparan Perak	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pengaspalan jalan di Desa pantai Labu Deli Serdang, karena jalan tersebut jalan lintas ke Bandara kuala Namu.	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kab atau BKP	Bina Marga
		Pengaspalan Jalan di Dusun XVI Desa Klumpang sepanjang 3 km.	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kab atau BKP	Bina Marga
		Ruas Jalan Durin Tinggiung - Gunung Merah sepanjang ± 8 Km (Kondisi ruask berat)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Ruas Jalan Gunung Meriah – Watas Simalungun sepanjang ± 8 Km	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Ruas jalan Tiga Juhar – Durin Tinggiung (Kondisi rusak sedang)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Watas Serdang Bedagai – Gunung Meriah (kondisi rusak sedang)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Ruas Jalan Bangun Purba – Watas Serdang Bedagai (Kondisi rusak sedang)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga

		Ruas jalan Galang – Bangun Purba (kondisi rusak sedang)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten atau BKP	Bina Marga
		Ruas jalan Deli Tua – Talun Kenas (kondisi rusak sedang)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Ruas jalan Talun Kenas – Tiga Juhar (pemeliharaan berkala)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Watas Kota Medan (Kolonel Bejo) Percut Sei Tuan (Bandar Setia) Batang Kuis – Bandara Kuala Namu.	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Simpang Penara – Penara – bandara Kuala Namu	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lubuk Pakam – Berigin – P.labu – Kuala Namu	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Simpang Warung Seri – Sidoarjo I Ramunia (P.Labu) – Pintu Belakang Kuama namu	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lubuk Pakam – Bandara Kuala Namu – Batang Kuis – Percut Sei Tuan – Medan Labuhan (Kota Medan) – Hampanan Perak – Watas Langkat (Jalan Lingkar Mebidangro)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Bandara Kuala Namu – Tanjung Morawa – Patumbak – D.Tua – P.Batu – Sunggal – Hampanan Perak (jalan lingkar Mebidangro)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		T.Morawa – Saribu Dolok – Tongging (Rawa Saring)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		Tiga Juhar – Liang Pematang – Tiga Panah (Tanah karo)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Ranatu Panjang – Pantai labu – P.Cermin (Kab. Sergai)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Tandem Hilir I – Bulu Cina – Simp.Beringin – Hamparan Perak – Sp.Kantor (Medan)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Watas Medan – Patumbak Kampung – Sigara-gara – Lantasan lama – Patumbak I	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Simpang Abadi – Bandar Labuhan – Talun Kenas	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Sampali – Saentis – Bagan Percut	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Batang Kuis – Sugiharjo – Pematang Biara – Pantai Labu – Denai Kuala - P.Cermin (Kab.Sergai)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Tuntungan (Watas Medan) – Sawit Rejo – Mencirim – Simp.Diski (Watas Binjai)	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan Jalan Ibnu Chattab di Dusun III Tanjung Morawa B.	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan Industri Gang Tapai Dsn I Tanjung Morawa B dengan ukuran L.4 m dan P.800 m.	Kecamatan Deli Serdang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan jalan dan saluran parit di jalan Wakaf	Kecamatan Deli	APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

		Tanjung Morawa	Serdang, Kab. Deli Serdang	Kab.Kota	
		Perbaikan Jalan dari Batang Kuis sampai Pantai Labu sepanjang 10 km	Kecamatan Batang Kuis, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan Pertanian sepanjang 2.400 meter, jalan Pembangunan 2.200 meter Jalan Pelita Dusun V sepanjang 800 meter dan jalan RK sepanjang 850 meter	Kecamatan Namo Bintang, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan jalan Klambir Lima – Desa Hampan Perak berbatasan dengan Medan Helvetia – Deli Serdang dan berbatasan dengan Medan Marelan sepanjang ± 15 km dan menaikkan status Jalan Kabupaten selama ini untuk meningkat statusnya menjadi Jalan Provinsi.	Kecamatan Namo Bintang, Kab. Deli Serdang	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Pembangunan Jembatan Penghubung yang dimana akses jembatan tersebut menghubungkan beberapa desa seperti : Desa Klambir Lima Kebu Desa Klambir Kampung Desa Paya bakung dan mengurangi dampak kemacetan yang sering kali terjadi di Jalan Klambir Lima Kec. Hampan Perak tersebut.	Kecamatan Hampan Perak, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Memperbaiki (Pengecoran) Jalan – jalan / Gang – gang yang ada di Desa Bandar Kalippa Pasar X Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.	Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kab. Deli Serdang	APBD Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
		Perbaikan jalan mulai dari Pasar 16 Saentis menuju Bangan.	Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembuatan Jembatan 3 x 4 M di Dusun II Sidodadi Kecamatan Pagar Marbau sudah hancur dan rubuh,	Kecamatan Pagar Marbau, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

	Aspal Cor di Dusun I dan Dusun II Sidodadi Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang sudah hancur dan berlubang-lubang	Kecamatan Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Perbaikan jalan di depan gereja HKI Sei Semayang Kec. Sunggal kab. Deli Serdang kondisinya sangat memprihatinkan.	Kecamatan Sunggal	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Bina Marga
	Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi pariwisata Pantai Bagan di Desa Bangan Serdang dan Pantai Muara Indah di Desa Denai Kuala	Kecamatan Pantai Labu, Kab. Deli Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Pembangunan jalan-jalan di desa Beringin yang kondisinya masih banyak yang berupa jalan tanah dan batu		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Perbaikan dan pengaspalan jalan-jalan kampung di Kecamatan Kutalimbaru	Kecamatan Kutalimbaru	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Perbaikan jembatan di Dusun Sejahtra yang menghubungkan Dusun Sejahtra menuju sekolah jalannya sangat rusak ditambah jembatan tersebut tidak mempunyai dinding pengaman.	Kecamatan Kutalimbaru	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di Kec. Kulimbaru.	Kecamatan Kutalimbaru	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Peningkatan status ruas jalan Tuntungan-Kutalimbaru-Bandar Baru menjadi status jalan Provinsi	Kecamatan Kutalimbaru	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Peningkatan status ruas jalan Tanjung Anom-Lau Bakeri-Perpanden yang tembus sampai ke Langkat/ Binjai menjadi jalan Provinsi.	Kecamatan Kutalimbaru	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Silebo-lebodi Kecamatan Kutalimbaru dengan Desa Pasar IV Namo Trasi Kab Langkat yang melintasi Syngai Mencirim sepanjang kurang	Kecamatan Kutalimbaru	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		lebih 20 meter.			
		Jalan alternatif di pasar Pancur Batu untuk menghindari kemacetan	Kecamatan Pancur Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan dan Pemeliharaan Ruas Jl Letda Sudjono-Tembung-Batang Kuis yang merupakan jalan nasional yang merupakan akses yang termudah oleh masyarakat Kota Medan bila hendak menuju Bandara KNIA.	Kecamatan Percut Sei. Tuan	APBN	Bina Marga
		Pengaspalan jalan sepanjang 3000 meter dari Dusun X Desa Serdang yang berbatasan dengan rel Kereta Api menuju arah jalan Bandara Kuala Namu.	Kecamatan Beringin	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan dari jalan simpang Kutambaru sampai ke Dusun II Kutambaru.	Kecamatan STM Hilir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua	Kecamatan Deli Tua	APBD Prov. SU	Bina Marga
		Perbaikan/Pemeliharaan daerah Irigasi kewenangan Provinsi : 1. Namurambe seluas 1.036 Ha 2. Medan Krio seluas 2.800 Ha 3. Bekala (irigasi lintas Kabupaten/Kota)	Kabupaten Deli Serdang	APBD Provinsi	PSDA
		Pembuatan Tembok Kupingan Pinggir Sungai/Titi di Dusun I Sidodadi Kecamatan Pagar Marbau Kabupaten Deli Serdang	Kecamatan Pagar Merbau	APBD Provinsi	PSDA
		pengadaan pompa penyedot air dari sungai untuk menghadapi musim kemarau panjang	Kecamatan batang Kuis	APBD Provinsi	PSDA
		Pembangunan dan perawatan irigasi	Kali Serayu Belakang Dusun 11, Desa Saentis/Cinta Rakyat	APBD Provinsi	PSDA
		Perbaikan saluran jaringan irigasi Bandar Sidoras	Desa Cinta Damai	APBN	PSDA dan BWSS

		yang rusak	dan Pematang Lalang		
		pembangunan pleningan tali air dan pintu air di Desa Pematang Lalang Dusun Sekata	Desa Pematang Lalang	APBD Provinsi	PSDA
		Pembangunan/Rehabilitasi saluran irigasi pertanian di Desa Serdang Kec. Beringin	Desa Serdang Kecamatan Beringin	APBD Provinsi	PSDA
		Membangun kembali Benteng Penahan Air di Dusun 4 (Empat) Sei Belawan	Dusun 3 (Tiga) Kecamatan Hampan Perak – Komplek IRA	APBN	PSDA dan BWSS
	Dapil IV (Kab.Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi)	Pembangunan sekolah TK Gereja HKBP Sei Rampah Kel. Pangkalan Budiman.	Kabupaten Serdang Bedagai	Hibah/Bansos	Dinas Pendidikan
		Masalah pembuangan air selokan menuju sekolah yang menyebabkan banjir (Kel. Pangkalan Budiman Kec. Sei Rampah)	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Perhatian terhadap biaya sekolah yang mahal	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Peningkatan mutu pendidikan (Kec. Sei Rampah)	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan
		Peningkatan pelayanan di Puskesmas maupun RSUD serta obata-obatan dan peralatan. (Kec. Sei Rampah)	Kota Tebing Tinggi	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Bantuan pengobatan, pangan, biaya kematian, peralatan rumah tangga bagi masyarakat pasien penyakit kusta (Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah)	Kabupaten Serdang Bedagai	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
		Pembangunan klinik khusus pengobatan/pasien	Kabupaten Serdang	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan

	sakit kusta (Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah)	Bedagai		
	Bantuan obat-obatan untuk puskesmas di Kota Tebing Tinggi (Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir)	Kota Tebing Tinggi	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
	Pendaftaran ulang kembali kartu sehat (Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis kota T.Tinggi)	Kota Tebing Tinggi	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
	Kurangnya pemahaman mengenai program BPJS dan banyaknya masyarakat yang sudah mendaftar namun belum menerima kartu BPJS (Desa Bengkel Kec. Perbaungan)	Kabupaten Serdang Bedagai	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
	Pelayanan RS untuk pasien JKN diskriminatif	Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi	APDB Kab/Kota	Dinas Kesehatan
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan wanita untuk menambah pendapatan (Kec. Pantai Cermin)	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Kegiatan keterampilan untuk remaja putus sekolah (Kec. Sei Rampah)	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Kurangnya lapangan kerja untuk generasi muda usia produktif (Desa Bengkel Kec. Perbaungan)	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Kurangnya lapangan kerja untuk generasi muda usia produktif (Kota Tebing Tinggi)	Kota Tebing Tinggi	APBD Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Mohon diadakannya penyuluhan narkoba (Kec. Perbaungan)	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab/Kota	BNN
	Mohon diadakannya penyuluhan narkoba (Kec. Sei Rampah)	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab/Kota	BNN
	Perhatian terhadap maraknya peredaran narkoba di Kota Tebing Tinggi (Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir Kota T. Tinggi)	Kota Tebing Tinggi	APBD Kab/Kota	BNN
	Maraknya peredaran narkoba Di Sergai	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kab/Kota	BNN

		Rehab Mesjid sebesar Rp. 400.000 (Desa Pulau Tagor Dusun VI Kec. Serdang Bedagai	Kabupaten Serdang Bedagai	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Bantuan untuk pembangunan mesjid dana P.APBD Provsu TA. 2015 Desa Pegajahan Kec. Pegajahan)	Kota Tebing Tinggi	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Bantuan pembangunan perluasan parkir dan teratak stainless untuk halaman mesjid jamik di Dusun I Sukajadi Kec. Perbaungan	Kabupaten Serdang Bedagai	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Masalah banjir dan perbaikan tanah wakaf kristen HKBP simpang Bedagai (Kel. Pangkalan Budiman Kec. Sei Rampah)	Kabupaten Serdang Bedagai	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Pengadaan penerangan lampu jalan listrik di gang Gereja HKBP Sei Rampah Kel. Dusun I Kec. Dolok Masihul)	Kota Tebing Tinggi	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Pembangunan drainase berupa parit	Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan jaringan air minum	Kec. Pantai Cermin	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase berupa gorong-gorong	Kec. Sei Rampah	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan sumur bor	Desa Pertambakan kec. Dolok Masihul	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Perbaikan drainase dan pengerukan lumpur	Kel. Pinang Mancung kec. Bajenis	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembuatan Kanal dan drainase	Kel. Pangkalan budiman kec. Sei Rampah	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		a) Pembangunan drainase di jalan budi utomo b) Perbaikan jalan dan drainase perkotaan	Kel. Siambut-umbut kec. Kota Kisaran Timur	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		di jalan teratai			
		1. Bantuan ternak lembu kepada kelompok Ternak di Desa Melati II	Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2. Bantuan ternak budidaya ikan tawar di Desa Melati II	Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Kelautan dan Perikanan
		3. Masyarakat bermohon pembangunan lumbung ketahanan pangan Dusun III Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan sebanyak 1 Unit	Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai		Badan Ketahanan Pangan
		4. Mohon bantuan bibit ternak lembu untuk Dusun I s/d IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan	Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		5. Gabungan Kelompok Tani dari Dusun III Desa Sukajadi mohon bantuan teknologi hand traktor sebanyak 3 unit dan nantinya akan dibagikan perkelompok tani yang ada di Desa Sukajadi untuk mengolah sawah yang luasnya ± 200 Ha	Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		1. Mohon kepada Dinas Perkebunan agar jangan melakukan perawatan Areal Perkebunan dengan cara meracuni semua rumput karena semua peternak sudah cukup lama bergantung dengan perkebunan untuk mengambil rumput sebagai Pakan utama ternak.	Kec. Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Perkebunan
		2. Masyarakat Desa Jati Mulia/ kelompok ternak mohon bantuan ikan air tawar	Kec. Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Kelautan dan Perikanan
		3. Mohon bantuan ternak Sapi sebanyak 20 ekor di Dusun IV Desa Pegajahan	Kec. Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		4. Mohon bantuan mesin babat rumput sebanyak	Kec. Pegajahan,		Dinas Pertanian

		3 unit di Dusun IX A Desa Bingkat	Kabupaten Serdang Bedagai		
		5. Mohon bantuan 50,000 ekor benur bibit ikan gurami yang akan dibagikan kepada 10 kelompok tani di Desa Jati Mulyo	Kec. Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		6. Mohon Pemerintah agar pembagian gas LPG 3 Kg hendaknya harus perkelurahan karena warga setempat banyak yang tidak kebagian warga lain yang mendapat	Kec. Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai		Biro Perekonomian
		7. Mohon Pemerintah agar dapat menindaklanjuti gas LPG 3 KG harganya melambung diatas 20.000 dan hilang dari peredaran sulit untuk men dapatkannya	Kec. Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai		Biro Perekonomian
		1. Mohon bantuan sarana alat penangkap hasil laut untuk kelompok Jenahar di Desa Lubuk Saban Kec. Pantai Cermin	Kec. Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Kelautan dan Perikanan
		2. Masyarakat kelompok ternak bermohon diadakan pelatihan tentang ternak ikan air tawar, lembu dan kambing	Kec. Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		1. Masyarakat mohon diadakannya kegiatan keterampilan untuk remaja yang putus sekolah	Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Koperas dan UKM
		2. Masyarakat Petani mohon bantuan bibit Padi dan Pupuk	Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		3. Masyarakat Desa Simpang Empat mohon bantuan bibit jagung	Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		4. Mohon bantuan pupuk bersubsidi untuk Petani di Desa Simpang Empat	Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian

		5. Mohon bantuan ternak kambing dan lembu untuk menambah penghasilan masyarakat Desa Simpang Empat	Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		1. Mohon bantuan bibit Kelapa Sawit untuk meningkatkan pendapatan Petani Desa Pertambakan	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Perkebunan
		2. Mohon bantuan pupuk bersubsidi untuk Petani di Desa Pertambakan	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		3. Mohon agar penyaluran Gas Elpiji 3 Kg tepat sasaran dan menjaga agar harga tidak melambung	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Biro Perekonomian
		4. Masyarakat mengeluh atas sulit dan mahal nya untuk mendapatkan Gas Elpiji 3 Kg di Kel. Pekan Dolok Masihul	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Biro Perekonomian
		5. Kelompok tani Kel. Pekan Dolok Masihul juga mengeluhkan langkanya pupuk bersubsidi untuk itu Dinas terkait agar dapat membantu mengatasi kelangkaan pupuk tersebut	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		6. Mohon Pemerintah agar mengadakan penyuluhan-penyuluhan Pertanian kepada para Petani guna meningkatkan hasil panen	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		7. Mohon bantuan alat-alat pertanian Jetor dan Bibit unggul yang bermutu kepada Kelompok Tani di Desa Serdang Bedagai Kec. Sei Bamban	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		8. Mohon merealisasikan Pupuk Subsidi yang langka, harganya mahal, hilang dari peredaran dan pemberian tidak tepat sasaran di Desa Suka Damai	Kec. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		1. Bantuan untuk mendapatkan Gas Elpiji ukuran 3 Kg dengan harga murah, karena pada saat ini	Kec. Padang Hilir, Kabupaten Serdang		Biro Perekonomian

		masyarakat membeli Gas dengan harga mahal	Bedagai		
		2. Mohon bantuan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi agar petani bisa mendapatkan hasil Pertanian yang maksimal	Kec. Padang Hilir, Kabupaten Serdang Bedagai		Dinas Pertanian
		1. Mohon agar mendapatkan pakan subsidi karena selama ini hasil panen para petani tidak sesuai dengan harga jual, yang mana harga pakan lebih tinggi dari harga jual di Kel Pinang Mancung	Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi		Dinas Pertanian Provsu
		2. Mohon agar dapat mengadakan Balai Benih ikan di Kel. Pinang Mancung karena sampai saat ini belum ada dibuat Balai Benih ikan agar supaya ada masukan untuk para petani yang telah selesai panen di sawah	Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi		Dinas Kelautan dan Perikanan
		3. Mohon bantuan jetor dan alat semprot hama yang masih kurang di Kel Pinang Mancung	Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi		Dinas Pertanian Provsu
		4. Mohon untuk Pemerintah dapat mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 Kg di Kec. Bajenis	Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi		Biro Perekonomian
		5. Mohon bantuan untuk mengadakan penanaman kedelai, padi dan lain-lain untuk mendatangkan pupuk yang murah dan bermutu tinggi.	Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi		Dinas Pertanian Provsu
		6. Mohon bantuan agar dapat merealisasikan pupuk subsidi yang langka, pupuk mahal tidak sesuai hasil panen	Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi		Dinas Pertanian Provsu
		Pengaspalan kembali jalan lintas Kecamatan dari Kecamatan Perbaungan menuju Sukasari Kecamatan Pengajahan sepanjang 15 km	Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan hotmix di Dusun Jambu Desa Melati sepanjang 1300 m	Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

			Bedagai		
		Pengaspalan Lapen di Dusun Rambe Desa Melati II sepanjang 1600 m	Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan parit jalan dari Dusun I s.d II Desa Sei Jenggi (Jalan lintas Medan - Tebing Tinggi) sepanjang 3000 m	Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan parit jalan dari Dusun II s.d III Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan (Jalan lintas Medan - Tebing Tinggi)	Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan Jalan Dusun I s.d II Desa Sukajadi sepanjang 1200 m	Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jalan setapak Dusun I s.d IV Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan sepanjang 2970 m	Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan ulang Jalan Antar Kecamatan Pegajahan menuju Kecamatan Serbajadi dari Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan s.d Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi	Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan Jalan Kecamatan dari Desa Pegajahan Dusun V menuju Desa Bengabing	Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan ulang jembatan di Dusun V Desa Pegajahan menuju Desa Lestaridadi Kecamatan	Kecamatan Pegajahan,	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		Pegajahan	Kabupaten Serdang Bedagai		
		Pengaspalan Jalan Dusun II Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan sepanjang 1000 m	Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan sepanjang 1500 m di Desa Simpang Empat Kecamatan Serdang Bedagai	Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan desa sepanjang 2500 x 3 m yang menghubungkan Dusun III s.d Dusun IV Desa Pulau Tagor Kecamatan Serdang Bedagai	Dusun IV Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan Jalan alternatif atau jalan pemotongan di Kecamatan Dolok Masihul untuk menghindari macet di jalan Provinsi	Kelurahan Dusun I Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan/pengaspalan jalan dari Desa Damakurat s.d Desa Simalas Kecamatan Sipispis	Kelurahan Dusun I Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jalan di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan	Kelurahan Dusun I Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaiki jalan di Kelurahan Pinang Mancung dan Jalan Pramuka	Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis, Kota Tebing	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

			Tinggi		
	Dapil V (Kabupaten Batu Bara, Asahan dan Kota Tanjung Balai)	Bantuan perbaikan/rehabilitasi Masjid Al Muhtadin Desa Sei Kamah I Dusun V Kampung Tempel	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan untuk pembangunan rumah ibadah di Dusun II Desa Perlompongan Kec. Batu.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan hibah keuangan kepada Persatuan Wirid Yasin Muhibbah Desa Sei Paham	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan dan perhatian juga support agar gereja dan rumah ibadah diberi perhatian lebih dan juga bantuan dana hibah/sosial	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Al-Hidayah Dusun I Punggulan Kec. Air Joman	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Ar-Rahman Dusun II Kec. Air Joman	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Al-Ikhwan Dusun V Desa Punggulan Kec. Air Joman	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan berupa alat kesenian Islam lengkap untuk digunakan oleh remaja mesjid Al-Hidayah (KURMA) Dusun I Desa Punggulan Kec. Air Joman untuk digunakan pada hari besar Islam maupun kegiatan Desa	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan pagar mesjid Al-Ikhal Desa Rawa Sari Dusun I Kec. Aek Kuasan.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan mesjid Jariyah Desa PR Pekan Dusun VI Sidomulyo Kec. Pulau Rakyat.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan menara mesjid dan melantai halaman mesjid Syuhada Desa Bangun Dusun II Kec. Pulau Rakyat.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembuatan pagar dan paving block	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos

		Masjid Nurul Imam di Desa Sei Silau Barat.			
		Bantuan renovasi Masjid Al-Fallah Desa Banjar Dusun IV Kec. Air Joman.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Al-Huda Desa Binjai Baru Kec. Talawi Kabupaten Batubara.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan Mesjid Al-Ikhlas berupa pembangunan MCK, pagar Mesjid dan penambahan areal bangunan (diperbesar) di Dusun IV Desa Karang Baru Kec. Talawi.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP dan APBD Kab. Batubara	Binsos
		Bantuan kepada bilal mayat dan nadzir mesjid di Desa Suka Damai Barat Kec. Pulo Bandring.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan pagar dan pemasangan paving blok Masjid Ar-Rahman Dusun III Desa Glugur Maksmur Kec. Talawi	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan mesjid Al-Ikhlas Dusun II Desa Karang Baru Kec.a Talawi	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan mesjid Al-Hijratul A'Zhom Dusun II Desa Pahang Kec. Talawi	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan mesjid Alhuda, pembangunan pagar mesjid beserta rehab atemapt wudhu dankamar mandi, di dusun IV Sidorejo Desa Sei Muka, Kec. Talawi.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan renovasi pembangunan Mesjid Al-Amin Desa Benteng Kec.a Talawi.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan Menara Mesjid Nurul Iman Desa Perk. Tanah Datar Kec. Talawi	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan renovasi Mushollah Ar-Rohim Dusun V Desa Glugur Makmur Kec. Talawi.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
		Bantuan pembangunan Mesjid Al-Muttaqin Desa Lubuk Besar Kec. Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos

	Bantuan Pembangunan Masjid Al-Hidayah Desa Mangkai Baru Kec. Lima Puluh.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
	Bantuan Dana Masjid Nurul Hasanah Dusun III Pulau Rejo Desa Sumber Rejo Kec. Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
	Bantuan Dana untuk pembangunan Menara Masjid Al-Ikhlas Kampung Baru Kec. Talawi.	Kabupaten Batu Bara	Hibah/ BKP	Binsos
	Bantuan Alat Olah Raga Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.	Kabupaten Asahan	Hibah/BKP	Dispora
	Bantuan Alat Olah Raga Kepada EGC Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten	Kabupaten Asahan	Hibah/BKP	Dispora
	Bantuan Pendidikan Swasta Desa Sei Paham Kecamatan Sei kepayang kabupaten Asahan.	Kabupaten Asahan	Hibah/BKP	Dinas Pendidikan
	Mohon Kepada pemerintah agar dibangun sekolah SMP Negeri di Desa Hutapadang Kecamatan bandar pasir mandoge Kabupaten Asahan.	Kabupaten Asahan	Hibah/BKP	Dinas Pendidikan
	Mohon pembangunan SMK Negeri di kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan	Kabupaten Asahan	Hibah/BKP	Dinas Pendidikan
	Bantuan Beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu maupun mahasiswa berprestasi	Kota Tanjung Balai	Hibah/BKP	Dinas Pendidikan
	bantuan beasiswa yang terkendala karena tidak memiliki KIP	Kota Tanjung Balai	Hibah/BKP	Dinas Pendidikan
	Mohon supaya program Pemerintah terutama mengenai Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Sejahtera agar cepat dapat dilaksanakan di Desa Air Putih Kecamatan Meranti kabupaten Asahan.	Kabupaten Asahan	APBN	Dinas Kesehatan
	Mohon supaya program Pemerintah terutama mengenai Kartu Indonesia Pintar,	Kabupaten Asahan	APBN	Dinas Kesehatan
	Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Sejahtera agar dilakukan dengan tepat sasaran	Kabupaten Asahan	APBN	Dinas Kesehatan

		dan sesuai dengan tujuan program di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.			
		Masyarakat berharap kepada Pemerintah dengan adanya peralihan dari Jamkesmas ke BPJS agar diberikan penjelasan dan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik tanpa membedakan agama, suku, ras dan golongan.	Kabupaten Asahan	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Rumah sakit Umum Daerah Belum mampu melayani masyarakat secara maksimal yang masih ditemukan pelayanan amburadul yang berawal dari kelemahan sistem pelayanan di Puskesmas. Pelayanan di Puskesmas, BPJS Maupun dari Rumah sakit Umum Daerah kabupaten Batubara.	Kabupaten Batu Bara	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Masyarakat Desa Karang batu kecamatan talawi kabupaten batu bara meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten batu bara untuk lebih mensosialisasikan program BPJS karena Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui program ini apalagi tentang pembuatan kartu BPJS tersebut.	Kabupaten Batu Bara	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Masyarakat meminta kepada Pemerintah agar dapat mensosialisasikan tata cara pengurusan BPJS dan berharap kepada aparat desa supaya menata kembali masyarakat yang belum menerima kartu BPJS.	Kabupaten Batu Bara	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Pemerintah/Pihak BPJS perlu melakukan sosialisasi tentang pengaturan dan pelaksanaan BPJS serta kaitannya dengan program Bapak Presiden RI tentang Kartu Indonesia Sehat sampai	Kota Tanjung Balai	APBD Prov	Dinas Kesehatan

		ke tingkat Desa.			
		Mendata ulang penerima manfaat Jamkesmas dan Raskin yang tidak tepat sasaran di Kecamatan Datuk Bandar Timur	Kota Tanjung Balai	APBN	Dinas Kesehatan
		peninjauan ulang pembuatan BPJS kesehatan dimana masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan kartu BPJS	Kota Tanjung Balai	APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Bantuan perbaikan/rehabilitasi Masjid Al Muhtadin Desa Sei Kamah I Dusun V Kampung Tempel	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan untuk pembangunan rumah ibadah di Dusun II Desa Perlompongan Kec. Batu.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan hibah keuangan kepada Persatuan Wirid Yasin Muhibbah Desa Sei Paham	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan dan perhatian juga support agar gereja dan rumah ibadah diberi perhatian lebih dan juga bantuan dana hibah/sosial	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Al-Hidayah Dusun I Punggulan Kec. Air Joman	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Ar-Rahman Dusun II Kec. Air Joman	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Al-Ikhwan Dusun V Desa Punggulan Kec. Air Joman	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan berupa alat kesenian Islam lengkap untuk digunakan oleh remaja mesjid Al-Hidayah (KURMA) Dusun I Desa Punggulan Kec. Air Joman untuk digunakan pada hari besar Islam maupun kegiatan Desa	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan pagar mesjid Al-Ikhal Desa Rawa Sari Dusun I Kec. Aek Kuasan.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan mesjid Jariyah Desa PR	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama

		Pekan Dusun VI Sidomulyo Kec. Pulau Rakyat.			
		Bantuan pembangunan menara mesjid dan melantai halaman mesjid Syuhada Desa Bangun Dusun II Kec. Pulau Rakyat.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembuatan pagar dan paving block Masjid Nurul Imam di Desa Sei Silau Barat.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan renovasi Masjid Al-Fallah Desa Banjar Dusun IV Kec. Air Joman.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan Rehab lantai Masjid di Desa Banjar Dusun IV Kec. Air Joman	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan untuk pembangunan Masjid Al-Mutaqin di Desa Mangga Dua	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan dan perbaikan Mesjid Al-Huda Desa Binjai Baru Kec. Talawi Kabupaten Batubara.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan Mesjid Al-Ikhlas berupa pembangunan MCK, pagar Mesjid dan penambahan areal bangunan (diperbesar) di Dusun IV Desa Karang Baru Kec. Talawi.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP dan APBD Kab. Batubara	Agama
		Bantuan kepada bilal mayat dan nadzir mesjid di Desa Suka Damai Barat Kec. Pulo Bandring.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan pagar dan pemasangan paving blok Masjid Ar-Rahman Dusun III Desa Glugur Maksmur Kec. Talawi	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan mesjid Al-Ikhlas Dusun II Desa Karang Baru Kec.a Talawi	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan mesjid Al-Hijratul A'Zhom Dusun II Desa Pahang Kec. Talawi	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan mesjid Alhuda, pembangunan pagar mesjid beserta rehab atemapt wudhu dankamar mandi, di dusun IV	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama

		Sidorejo Desa Sei Muka, Kec. Talawi.			
		Bantuan renovasi pembangunan Mesjid Al-Amin Desa Benteng Kec.a Talawi.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan Menara Mesjid Nurul Iman Desa Perk. Tanah Datar Kec. Talawi	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan renovasi Mushollah Ar-Rohim Dusun V Desa Glugur Makmur Kec. Talawi.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan pembangunan Mesjid Al-Muttaqin Desa Lubuk Besar Kec. Lima Puluh	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan Pembangunan Mesjid Al-Hidayah Desa Mangkai Baru Kec. Lima Puluh.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan Dana Mesjid Nurul Hasanah Dusun III Pulau Rejo Desa Sumber Rejo Kec. Lima Puluh	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan Dana untuk pembangunan Menara Masjid Al-Ikhlas Kampung Baru Kec. Talawi.	Kabupaten Asahan	Hibah/ BKP	Agama
		Bantuan penyuluhan dan rehabilitasi gratis kepada generasi muda yang belum terkontaminasi maupun yang sudah terkontaminasi Narkoba Kabupaten Batubara khususnya Desa Sumber Padi Kec. Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara	APBD Provinsi/BNN	Kesbangpol
		Peningkatan pemberian penyuluhan kepada generasi muda untuk tidak terjebak kepada barang-barang haram seperti narkoba, di Desa Pematang Rambai Kec. Tanjung Tiram.	Kabupaten Batu Bara	Pemerintah Provsu dan Kab. Batubara	Kesbangpol
		Permohonan untuk mengangkat sekretaris desa di Desa Suka Damai Barat Kec. Pulo Bandring yang sudah bertugas di atas 7 (tujuh) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Kabupaten Batu Bara	Pemerintah Provsu dan Kab. Batubara	Kesbangpol
		Agar Pemerintah dan Pihak Kepolisian agar dapat memperhatikan dan menuntaskan masalah narkoba di Desa Mekar Baru.			Kesbangpol

		Pemerintah setempat agar bertindak tegas kepada generasi muda dalam hal pergaulan bebas dan bahaya Narkoba di Desa Binjai Serbangan Lingkungan II Pasar V Kec. Air Joman Kab. Asahan	Kabupaten Asahan	Pemerintah Kab. Asahan	Kesbangpol
		Aparat keamanan agar bertindak tegas dan cepat untuk memberantas peredaran dan perdagangan NARKOBA pada generasi muda sebagai penerus bangsa di Desa Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai	Kabupaten Asahan	Pemerintah Kab. Asahan	Kesbangpol
		Permintaan lahan HGU PT. BSP untuk kuburan Muslim di Pasar 4 Kelurahan Karang Anyar Kec. Kota Kisaran Timur.	Kabupaten Batu Bara	APBD Kabupaten Batu Bara	Pemerintahan
		Pengaduan Masyarakat Desa Empat Negeri, Desa Perk. Kwala Gunung Kec. Lima Puluh tentang PT. Kualagunung tentang Indikasi HGU Mati, truk pengangkut sawit pajak mati bertahun-tahun 10 unit, tidak pernah memberikan dana CSR pada warga sekitar.	Kabupaten Batu Bara	APBD Kabupaten Batu Bara	Pemerintahan
		Agar dibuat penyesuaian kearifan lokal Kota Tanjung Balai terkait Peraturan Menteri Nomor 57. Agar dibuat penyesuaian kearifan lokal Kota Tanjung Balai terkait Peraturan Menteri Nomor 57.	Kota Tanjung Balai	APBD Kota Tanjung Balai	Pemerintahan
		Agar Pemerintah dan wakil-wakil rakyat secara berkala dapat turun (blusukan) ke masyarakat untuk memperhatikan permasalahan dan mendengarkan keluhan masyarakat serta kepentingan rakyat.	Kabupaten Asahan	APBD Kabupaten Asahan	Pemerintahan
		Bimbingan dan penyuluhan pemerintah terutama untuk peningkatan pendapatan dan ekonomi	Kabupaten Batu Bara		Biro Perekonomian

		rumah tangga bagi masyarakat di desa Simodong kec. Sei Suka Kab. Batubara			
		Pemasangan tiang tiang listrik sekaligus aliran listriknya ke Desa Pematang Rambai menuju ke Desa Panca Arga yang belum ada listriknya	Kabupaten Batu Bara		Distamben
		Beras miskin kepada masyarakat	Kabupaten Batu Bara		Ro Perekonomian
		pupuk gratis	Kabupaten Batu Bara		Ro Perekonomian/ Distan
		Bantuan bibit jeruk nipis guna pengembangan usaha pertanian	Kabupaten Batu Bara		Disbun
		Pengadaan bibit ikan, berupa bibit ikan lele jumbo, bibit ikan mujair dan bibit ikan nila serta juga pakan ikannya	Kabupaten Batu Bara		Distan
		Bantuan berupa sapi brahman, pembuatan kandang sapi, pembangunan rumah kompos serta mesin cincang sampah dan alat kerja lainnya	Kabupaten Batu Bara		Dis Peternakan & Kesehatan Hewan
		Pemasangan tiang-tiang listrik karena di Dusun IX Panca arga menuju Dusun VI Desa Pematang Rambai, masyarakatnya belum menikmati aliran listrik sampai sekarang	Kabupaten Batu Bara		Distamben
		Bantuan UKM dan LKP khususnya kepada para kaum perempuan guna lebih memberdayakan kelompok perempuan yang berada di desa tersebut	Kabupaten Batu Bara		Biro Perekonomian
		Pengawasan pendistribusian gas elpiji	Kabupaten Asahan		Biro Perkenomian Setda Provsu
		Bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan)	Kabupaten Asahan		Dinas Pertanian Provsu
		Bantuan bibit ikan, pakan dan kolam terpal Koptan Setia Dame	Kabupaten Asahan		Diskanla
		Bantuan bibit ikan kepada Koperasi Nelayan	Kabupaten Asahan		Diskanla

		Bahari Sentosa serta Koperasi Nelayan Madani dan Koptan Harapan Desa Sei Paham			
		Bantuan alsintan kepada Koptan Maju Jaya Desa Sei Paham	Kabupaten Asahan		Diskanla
		Pengadaan alat berat untuk membuka lahan keras pertanian 1000 Ha	Kabupaten Asahan	Hibah/Bansos	Dinas Pertanian Provsu
		Penambahan atau pembangunan tali air menuju ke daerah dusun I desa air putih kec. Meranti	Kabupaten Asahan	Hibah/Bansos	Dinas Pertanian Provsu
		Penyuluh pertanian di daerah Dusun I desa air putih kec. Meranti supaya lebih aktif melaksanakan penyuluhan	Kabupaten Asahan	Hibah/Bansos	Dinas Pertanian Provsu
		Penyuluhan peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat di desa air putih kec. Meranti	Kabupaten Asahan		Biro Perekonomian
		Penyuluhan peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat di desa simpang empat kec. Simpang empat	Kabupaten Asahan		Biro Perekonomian
		Bimbingan dan Penyuluhan peningkatan pendapatan dan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat di desa Hutabagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan	Kabupaten Asahan		Biro Perekonomian
		Supaya Desa-desa terpencil di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan dapat dimasukkan aliran Listrik dari PLN	Kabupaten Asahan		Distamben
		Perhatian pemerintah mengenai masalah pertanian yang gagal panen karena banjir yang merusak persawahan masyarakat di Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan	Kabupaten Asahan		Distan (Pertanian)
		Pendataan ulang kembali mengenai bantuan langsung tunai yang pelaksanaannya di Kabupaten Asahan tidak tepat sasaran	Kabupaten Asahan		Biro Perekonomian

		kelangkaan Gas Elpiji ukuran 3 Kg di Kecamatan Tanjungbalai yang disebabkan terjadinya kenaikan harga BBM	Kabupaten Asahan		Biro Perekonomian / Distamben
		merajelanya operasi pukat harimau dan sejenisnya yang mengakibatkan penghasilan mereka semakin terpuruk , sehingga para istri-istri nelayan tersebut pagihari sudah mencari kerang guna menambah penghasilan keluarga	Kabupaten Asahan		Biro Perekonomian / Diskanla
		nelayan kecamatan Air Joman dan Silo Laut memohon bantuan alat tangkap berupa kapal nelayan yang lebih besar (5 GT) karena akhir – akhir ini gelombang ombak yang semakin tinggi hingga mencapai 3 meter sehingga tidak memungkinkan lagi menggunakan kapal kecil	Kabupaten Asahan		Diskanla
		Bantuan ternak lembu, bibit ikan lele, bibit ikan gurami	Kabupaten Asahan		Dinas Peternakan
		Bantuan modal usaha berupa Kredit Usaha bagi ibu-ibu nelayan agar bisa membuka lapangan usaha seperti menjahit, membordir dan usaha membuat kripik ubi dan lain sebagainya	Kabupaten Asahan		Biro Perekonomian
		Bantuan bibit ikan kepada KUBE As Syarif Tanjung Balai dan KUBE Subur Tanjung Balai,	Kota Tanjung Balai		Diskanla
		pengawasan mengenai pendistribusian gas elpiji di Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai		Biro Perkenomian / Distamben
		bantuan bibit ikan, padi dan pupuk bagi petani	Kota Tanjung Balai		Diskanla
		Pendataan ulang penerima manfaat JAMKESMAS dan RASKIN yang tidak tepat sasaran	Kota Tanjung Balai		Biro Perkenomian / Dinkes
		Bantuan ternak untuk masyarakat Kota Tanjung Balai seperti lembu, kerbau, kambing, babi dan hewan ternak lainnya	Kota Tanjung Balai		Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan
		Bantuan alat tangkap ikan bagi kelompok nelayan	Kota Tanjung Balai		Diskanla

		yang sudah terbentuk			
		peraturan khusus untuk kota Tanjung Balai mengenai masuknya ikan luar ke pasar Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai		
		Peningkatan drainase berupa pembuatan parit	Sei Kamah I Dusun V Desa Kampung Tempel Kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan drainase dan pembangunan jalan	Desa Simpang Empat Kec. Simpang empat Kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan drainase berupa parit	Desa Aras Kec. Air putih Lima Puluh Kab. Batubara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan sumur bor	Desa Air Putih kec. Meranti kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Normalisasi saluran drainase	Desa Sei Mataram Pematang Nibung kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Perbaikan drainase	Kec. Kisaran Barat kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Kec. BP Mandoge kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Dusun IV, dusun VIII kec. BP Mandoge kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan drainase berupa normalisasi saluran pembuang	Desa Sei Sembilang kec. Sei Kepayang Timur	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		Peningkatan kualitas drainase	Desa Binjai Serbangan kec. Air Joman Kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Kel. Sei Ranggung kec. Kota Kisaran Barat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase berupa pembuatan parit	Kel. Sentang kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase berupa pembuatan parit	Kel. Sei Silau Timur kec. Buntu Pane Kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase berupa pembuatan parit	Desa Buntu Pane Kec. Buntu Pane Kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase berupa pembuatan parit	Desa Mekar Sari kec. Buntu Pane Kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Desa Mangkai Baru kec. Lima Puluh Kab Batubara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Desa Lima Puluh kec. Lima Puluh Kab. Batubara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Desa Sumber Makmur kec. Lima Puluh Kab. Batubara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan drainase	Desa Suka Ramai kec. Sei Balai Kab. Batubara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		Pembuatan Riol/ drainase pada jalan Provinsi	Kel. Aek Loba Pekan kec. Aek Songsongan kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembuatan Drainase	Desa Aek Korsik kec. Aek Ledong kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembuatan Riol/ drainase	Desa Aek Loba Afdeling I kec. Aek Ledong kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembuatan Drainase	Desa Sei Lama kec. Simpang Empat kab. Asahan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		pengaspalan jalan utama dari Simpang Sumur Bor Desa Simpang Dolok menuju Desa Kwala Gunung sepanjang 1,2 Kilometer di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara	Desa Kwala Gunung, Kabupaten Batu Bara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan jalan Hotmix terutama pada ruas jalan dari desa Simodong kec. Sei Suka Kab. Batubara menuju desa Tanjung Sigoni kec. Medang Deras Kab. Batubara.	Kec. Sei Suka Kab. Batubara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengaspalan jalan utama dari Simpang Sumur Bor Desa Simpang Dolok menuju Desa Kwala Gunung sepanjang 1,2 Kilometer di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara.	Desa Kwala Gunung Kecamatan Lima puluh Kabupaten Batubara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan jalan dan titi (jembatan) dari Desa Pematang Rambai menuju Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan	Desa Pematang Rambai Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		memperbaiki jalan yang telah mengalami kerusakan sepanjang ± 7 Km dan pengaspalan	Desa Karang Baru di Kecamatan Talawi	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		jalan tanah merah sepanjang ± 10 Km di Desa Karang Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara	Kabupaten Batu Bara		
		pembangunan Peningkatan Ruas Lapem Dusun III Sepanjang ± 500 m.	Desa Empat Negeri Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan Jalan Rambung Merah Desa Empat Negeri Sepanjang ± 500 m.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapem Titi Putih Dusun II Desa Empat Negeri Sepanjang ± 500 m.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Penimbunan Jalan Tanah Doman, Jembatan menuju Glugur Desa Empat Negeri.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan Jalan Dusun III Jalan Bustami Desa Pulau Sejuk Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara Sepanjang ± 500 m.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan jalan-jalan yang rusak Desa Sei Suka Kecamatan Tanjung Kasau Kabupaten Batu Bara.	Desa Sei Suka Kecamatan Tanjung Kasau Kabupaten Batu Bara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Renovasi jembatan di Desa Ambalutu	Desa Mangga Dua Dusun Iv Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Jalan Dusun II menuju ke Dusun IV.	Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengaspalan jalan dari Simpang Pir sampai ke Desa Tinggi Raja yang merupakan jalan	Desa Tinggi Raja Kecamatan Tinggi	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		Kabupaten.	Raja Kabupaten Asahan.		
		pengaspalan jalan Provinsi dari Desa Tinggi Raja sampai ke Desa Rowo Rejo .	Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengerasan jalan Dusun VI Desa Sidomulyo .	Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Bantuan Lapen Jalan Kegiatan Pasar 12 Dusun V menuju ke Dusun IV Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan sepanjang 1 kilometer	Kabupaten Asahan		Bina Marga
		pembangunan peningkatan ruas jalan dengan Hotmix dari Dusun I menuju Dusun III desa Hutabagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan.	Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan/peningkatan Jalan dengan hotmix terutama di jalan Swadaya dan jalan Karya Dusun 19 di desa Simpang Empat kec. Simpang empat Kab. Asahan	Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan/peningkatan jalan yang melalui Dusun 11 di desa Simpang Empat kec. Simpang empat Kab. Asahan	Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan/peningkatan jalan dari Dusun 12 menuju Jampalan Wetan Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.	Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan / pengaspalan jalan Protokol Desa Sei Kamah I Dusun V Kampung Tempel sepanjang ± 1 km.	Dusun V Desa Kampung Tempel Kab. Asahan.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengaspalan Jalan Pendidikan di Desa Hesa Perlompongan Dusun II Kec. Air Batu	Dusun II Desa Hesa Perlompongan Kec. Air Batu Kab. Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan jalan provinsi di Kecamatan Sei	Desa Sei Paham	APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

		Kepayang	Kecamatan Sei Kepayang Kab. Asahan	Kab.Kota	
		lanjutan pembangunan jalan menggunakan Hotmix dari Desa Serdang 2 menuju Desa Air Putih Kec. Meranti Kab. Asahan.	Kec. Meranti Kab. Asahan.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan/peningkatan Jalan dengan hotmix terutama di jalan Swadaya dan jalan Karya Dusun 19 di desa Simpang Empat kec. Simpang empat Kab. Asahan	Kec. Simpang Empat Kab. asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan/peningkatan Jalan dengan hotmix jalan yang melalui Dusun 11 di desa Simpang Empat kec. Simpang empat Kab. Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan/peningkatan Jalan dengan hotmix jalan dari Dusun 12 menuju Jampalan Wetan Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		peningkatan jalan dengan Hotmix di Dusun 6 Tangkahan Limau Desa Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kab. Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan peningkatan ruas jalan dengan Hotmix dari Dusun I menuju Dusun III desa Hutabagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan.	Kec. Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Jalan Kegiatan Pasar 12 Dusun V menuju ke Dusun IV Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan sepanjang 1 kilometer	Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembuatan jembatan sebagai jalan penghubung dari Jalan Desa Perjuangan Pasar V menuju Tugu Perjuangan Pasar Lembu Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		Perbaiki Jalan di Jalan Lobak menuju Jalan Kecipir.	Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaiki dan Pembangunan Jalan dan drainase sepanjang + 800 Meter di Jalan Teratai		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan dan pengaspalan Jalan Sanusi Pane serta Jalan Rimbang 1 dan 2 Lingkungan 9 Kelurahan Siambut Baru		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pelebaran jalan menuju Air Joman dari Karang Anyer		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jembatan di Siambut umbut	Kecamatan Air Joman, Kab. Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Peningkatan ruas jalan dari perkerasan menuju SMK Negeri 1 BP Mandoge Kecamatan BP Mandoge Kabupaten Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan drainase di jalan Provinsi dari Dusun IV menuju Dusun VIII Kecamatan BP Mandoge Kabupaten Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Kec. Aek Songsongan Rahuning Bandar Pulau, Aek Kuasan, Aek Ledong Pulo Rakyat Kab. Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Hotmix jalan sepanjang 1,5 km lingkungan VI jalan Pandu.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembuatan Riol kiri kanan jalan lintas Provinsi sepanjang 3000 m.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Penghotmixkan jalan lingkungan VI ke VII sepanjang 5 km.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan badan jalan sepanjang 7 km di Aek Ledong		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembuatan Drainase 14 km kiri kanan di Aek Ledong		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembuatan Riol Dusun VI sepanjang 2 km kiri		APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

		kanan di Aek Loba.		Kab.Kota	
		Pengerasan di Dusun IV ukuran 3m x 200m Danau Sijabut Kec. Air Batu Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan di Dusun II 3m x 300m di Desa Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Drainase di Dusun II menuju Desa Pasiran ukuran 1m x 0.75m x 350m di Desa Sei Lama Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan di Jalan Pertanian ukuran 3m x 300m di Desa Sipaku Area Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen di jalan Listrik Dusun VIII menuju Simp Empat ukuran 4m x 200m di Desa Simpang Empat Kec Simpang Empat Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan Perkerasan Jalan, Jembatan dan Turab Desa Glugur Makmur Kec. Talawi Kab. Batubara.	Kec. Lima Puluh, Medang Deras, Air putih, Talawi, Kab. Batubara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Drainase Jalan Protokol 400M Depan Kantor Desa di Desa Mangkai baru Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapem Dusun IV Desa Antara Belakang PKS Kuala Gunung 800m di Desa Antara Kec. Limapuluh Kab. Batubara		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Drainase MTSN 50 2m X 300m Desa Limapuluh Kota Kec. Limapuluh Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapem Dusun I – II 500m Desa Perk. Tanah Gambus Kec. Limapuluh Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Drainase Dusun IV – V 500m Desa Sumber Makmur Kec. Limapuluh Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapem Jalan Dusun V Sidodadi 500m Desa Sumber		APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

		Rejo Kec. Limapuluh Kab. Batubara.		Kab.Kota	
		Lapen Jalan Protokol Desa Mekar Baru Kec. Talawi Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Jalan Protokol Desa Karang Baru Kec. Talawi Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Dusun IV 500m Desa Glugur Makmur Kec. Talawi Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Dusun I Desa Petatal Kec. Talawi Kab. Batubara		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perkerasan jalan Dusun IV Kamp. Petani 500m Desa Ujung Kubu Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Dusun IV 1000m Desa Siajam Kec. Sei Balai Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Drainase Dusun I 1000m Desa Suka Ramai Kec. Sei Balai Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Dusun VIII 1000m Desa Pematang Kuing Kec. Sei Suka Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lening jalan Desa 1000m Dusun VIII di Desa Sei Suka Deras Kec. Sei Suka Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen Dusun 15 – 16 1500m Desa Laut Tador Kec. Sei Suka Kab. Batubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perkerasan jalan baru Dusun VI 500m Desa Dewi Sri Kec. Sei Suka Kab. Barubara.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pelebaran Jalan utama Desa Sei Silau Barat di Dusun V sepanjang 300 meter.	Kec. Setia Janji, Tinggi Raja, Buntu Pane, Pasir Mandoge, Kab. Asahan.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembuatan Jembatan di Dusun V Desa Sei Silau Barat lebar 3x6 meter.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		Jalan Dusun VI, di turap panjang + 200 meter.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembuatan jembatan dengan panjang 2x5 meter		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan protokol simpang Butu Pane menuju Setia Janji		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Drainase satu sisi Lk II ke Lk. I di jalan Singa Kel. Sei Renggas ukuran 1m x 1m x 150m Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen di Jalan Arwana Lk I Kel. Sidomukti ukuran 2m x 150m Kel.sidomukti Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Drainase di jalan Bacang Kel Sentang ukuran 1m x 1m x 150m Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapen di Dusun IIB depan Budi Hesti ukuran 3m x 100m Kel. Sei silau Kec. Buntu Pane Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perkerasan di Dusun IIB Simp. Gerandong hingga Rumah Trisan ukuran 2.5m x 300m Desa Karya Ambalutu Kec. Buntu Pane Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan di Dusun III ukuran 3.5m x 200m di Desa Sei Silau Barat Kec. Setia Janji Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan di Dusun IV ukuran 3.5m x 300m Desa Urung Pane Kec. Setia Janji Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan di Dusun V ukuran 3.5m x 200m Desa Piasa Ulu Kec. Setia Janji Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lanjutan pengerasan di jalan Garuda Dusun VI ukuran 3.5m x 200m Desa Tinggi Raja Kec. Tinggi Raja Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan di Dusun VI ukuran 3m x 300m Desa Hutang Padang Kec. BP. Mandoge Kab. Asahan.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Desa Binjai Serbangan Lingkunagn li Pasar V		APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

				Kab.Kota	
		pembangunan infrastruktur jalan lintas antar desa, dusun dan pengaspalan jalan-jalan kecamatan	Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pemeliharaan jalan dikecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan	Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan infrastruktur jalan yang rusak parah yang menghubungkan desa- desa di Kecamatan Air Joman dan Silau laut khususnya	Desa Binjai Serbangan Kebun Sayur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Lapem jalan SD Inpres No. 014694 Dusun III Desa Air Joman .	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Kecamatan Tanjung Balai Utara	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaiki jalan hotmix di jalan DTM Abdullah Gg. Logam Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara sepanjang + 300 meter.	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Kecamatan Datuk Bandar	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jalan menuju perkuburan umat kristiani yang terletak di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan panjang 30 meter dan lebar 8 meter.	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Penghotmitan jalan dengan lebar 6 meter dan panjang 600 meter yang terletak di jalan Kampong Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaiki jalan yang terletak di daerah Pantai	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

	Olang Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai		Kab.Kota	
	Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 3 Km di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Kecamatan Datuk Bandar Timur	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Perbaikan jalan MT Hariono ujung Kelurahan Tanjung Balai Selatan beserta pemasangan lampu jalan dengan panjang jalan 2 Km.	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Kecamatan Sei Tualang Raso	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Pembangunan jalan Perumnas di Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso menuju perumahan Anggkatan Laut	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Kecamatan Teluk Nibung	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Penghotmixan kembali jalan Sipori-Pori Ujung sampai dengan perbatasan Tanjung Balai – Asahan sepanjang 3 Km di Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
	Pembangunan pembentengan sungai Sukaraja di kec. Simpang Empat Kab. Asahan	Kabupaten Asahan	APBN	PSDA
	Perbaikan tanggul di Desa Binjai Serbangan Lingkungan II Pasar V Kec. Air Joman		APBN	PSDA
	Pembuatan tanggul untuk penahan abrasi pantai		APBN	PSDA
	Perbaikan/Rehab jaringan irigasi di Kecamatan Sei Suka Kab. Batu Bara untuk meningkatkan debit air	Kabupaten Batu Bara	APBN	PSDA
	Rehabilitasi/peninggian Pintu Air SMB yang	Kabupaten Batu Bara	APBN	PSDA

		terletak di Desa Brohal kec. Sei Suka untuk menaikkan debit air untuk irigasi			
		Pembangunan DAM Irigasi Dusun IV dan V Desa Karang Baru Kecamatan Talawi	Kabupaten Batu Bara	APBN	PSDA
		Saluran Pembuang Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur areal rawa yang efektif terlayani rehab dan peningkatan jaringan pembuang 150 Ha normalisasi saluran pembuang pasar bondang 5000 meter	Kabupaten Batu Bara	APBD Provinsi	PSDA
		Saluran Pembuang Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur areal rawa yang efektif terlayani rehab dan peningkatan jaringan pembuang 170 Ha normalisasi saluran pembuang Pasar Kaya 5000 meter	Kabupaten Batu Bara	APBD Provinsi	PSDA
		Saluran Pembuang Desa Sei Pasir dan Sarang Holang Kecamatan Sei Kepayang Timur areal rawa yang efektif terlayani rehab dan peningkatan jaringan pembuang 150 Ha normalisasi saluran pembuang Desa Sei Pasir dan Sarang Holang 5000 meter	Kabupaten Batu Bara	APBD Provinsi	PSDA
		Perkuatan Tebing Desa Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur areal rawa yang efektif terlayani rehab dan peningkatan jaringan pembuang 150 Ha perkuatan tebing Desa Sei Pasir 350 Meter	Kabupaten Batu Bara	APBD Kab / Prov	PSDA
		Pembuatan Tanggul Desa Sarang Holang Kecamatan Sei Kepayang Timur areal rawa yang efektif terlayani rehab dan peningkatan jaringan pembuang 150 Ha pembuatan tanggul penahan air asin 6000 meter	Kabupaten Batu Bara	APBD Provinsi	PSDA
		Saluran Pembuang Desa Sei Kepayang Timur areal rawa yang efektif terlayani rehab dan	Kabupaten Batu Bara	APBD Kab / Prov	PSDA

		peningkatan jaringan pembuang 150 Ha Normalisasi saluran pembuang Desa Sei Kepayang Tengah menuju Desa Sei Sembilang 5000 meter			
		Saluran Pembuang Desa Pembangunan Kecamatan Sei Kepayang areal rawa yang efektif terlayani rehab dan peningkatan jaringan pembuang 150 Ha normalisasi saluran pembuang pasar 14 8000 meter	Kabupaten Batu Bara	APBD Kab / Prov	PSDA
		Saluran Pembuang Desa Sei Kepayang Kanan Kec. Sei Kepayang Kanan areal rawa yang efektif terlayani rehab dan peningkatan jaringan pembuang 170 Ha normalisasi saluran pembuang Dusun X menuju Dusun XII 8000 meter	Kabupaten Batu Bara	APBD Kab / Prov	PSDA
	Dapil VI (Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan)	Pengadaan dan pembangunan tanah wakaf di desa Silumajang	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Rehab Paving Block Masjid Al Munawwaroh Dusun IV Sumber Rejo Desa Padang Maninjau	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Pemasangan pagar dari Dusun I s/d Dusun IX Desa Padang Maninjau Kec. Aek Kuo	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Bantuan sosial untuk mesjid di Desa Lobuhuala Kec. Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Pembangunan Musholla Al Ikhlas di Jl. Suka Jadi Lingkungan VIII Kelurahan Sungai Berombang Kec. Panai Hilir	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Pengadaan honor para bilal mayit dan nazir mesjid	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ Bansos	Dinsos
		Pembangunan mesjid di dusun Karya Maju Kec. Torgamba	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Hibah/ Bansos	Dinsos

		Pengadaan sarana pendidikan dan MCK untuk sekolah di Kec. Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/ APBD Kab. Kota	Diknas
		Pembangunan pagar sekolah SMP 3 Negeri di Dusun Montong Desa Silumajang	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/ APBD Kab. Kota	Diknas
		Penambahan 2 lokal sekolah MTS Al-Mukmin di Dusun Sibito Desa Silumajang	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/ APBD Kab. Kota	Diknas
		Pembangunan sekolah MDA di Desa Silumajang	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/ BKP/APBD Kab. Kota	Diknas
		Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan di Kec. Na XIX agar dibangun Aula Dinas Pendidikan	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/ BKP	Diknas
		Rehab 5 ruangan belajar dan penambahan 1 ruang belajar untuk sekolah MTS Islamiyah di Dusun VII Desa Padang Maninjau	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ BKP	Diknas
		Pendidikan gratis tingkat SMP dan SMA	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBN	Diknas
		Honor daerah untuk guru PAUD dan perhatian untuk infrastruktur PAUD	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/ APBD Kab. Kota	Diknas
		Kesetaraan pembangunan sekolah-sekolah agama dengan sekolah negeri di Sungai Berombang	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ BKP	Diknas
		Pembangunan sekolah agama MDTA di Desa Tebing Lingga Hara	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ BKP	Diknas
		Pembangunan SD Negeri di Lingkungan Bulu Cina Desa Sidorejo	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ BKP	Diknas
		Pembangunan SMA Negeri Sitongit kampung dalam	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ BKP	Diknas
		Pembangunan sekolah SD dan SMA	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ BKP/APBD Kab. Kota	Diknas
		Pembangunan Ruang Kelas Baru di Desa Cikampak untuk SD, SMP, SMA	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Prov/ BKP	Diknas
		Pemagaran keliling sepanjang +- 750 M untuk	Kabupaten Labuhan	APBD Prov/ BKP	Diknas

		Sekolah Madrasah Al Muttaqin di Desa Suhud Kec. Silangkitang	Batu Selatan		
		Pengadaan akses internet dan jaringan selular di Desa Beringin Jaya untuk siswa-siswa agar mengenal dunia interbet	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Diknas
		Pengadaan meubileur di sekolah SD Negeri 118270 Desa Beringin Jaya	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Diknas
		Ketepatan pembayaran dana BOS yang berkaitan dengan pembayaran honor atau gaji bagi guru honor di sekolah Desa Suhud	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Diknas
		Pembangunan Rumah Sakit di Kota Aek Kanopan	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ BKP	Dinkes
		Penambahan Puskesmas di Desa Ujung Padang	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ BKP	Dinkes
		Pembuatan/ Pembangunan Puskesmas Desa	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Hibah/ BKP	Dinkes
		Pembangunan dan perbaikan Puskesmas serta penambahan perawat dan bidan di Desa Kuala Beringin	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/ BKP	Dinkes
		Pengembalian alihfungsi Puskesmas Model menjadi Rumah Sakit di Labuhan Bilik	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ APBD Kab. Kota	Dinkes
		Pihak Puskesmas menyediakan obat-obatan sebagai perangsang untuk ibu-ibu hamil yang sulit melahirkan di Desa Senah	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ APBD Kab. Kota	Dinkes
		Membangun sarana POLINDES di Dusun Kampung Jawa Raya	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/ APBD Kab. Kota	Dinkes
		Evaluasi dan mengawasi kinerja pegawai di Puskesmas di Desa Cikampak	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Dinkes
		Sosialisasi mengenai kartu BPJS dan pendistribusian kartu sehat tepat sasaran di Desa Beringin Jaya	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Dinkes

		Subsidi untuk mendaftar sebagai peserta BPJS untuk masyarakat tidak mampu	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Dinkes
		Penyuluhan dan pendistribusian Kartu Sehat tepat sasaran	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Dinkes
		Pelayanan kesehatan yang maksimal	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Dinkes
		Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Dusun Bulu Cina Desa Sidorejo	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Kab. Kota	Disnakertran
		Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Desa Beringin Jaya serta pembinaan dan pelatihan bagi pemuda di Desa Beringin Jaya	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Kab. Kota	Disnakertran
		Informasi Perekrutan untuk penerimaan CPNS sampai ke masyarakat, karena banyak kekurangan jumlah aparatur	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Provsu	BKD
		Permohonan dari masyarakat Desa Kampung Padang, Kec. Pangkatan mengenai penerimaan CPNS agar dapat diawasi karena menurut masyarakat setempat terdapat kenakalan dari beberapa oknum DPRD setempat yang ikut mengganggu objektivitas penerimaan CPNS tersebut.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Provsu	BKD
		Penanganan peredaran narkoba serta perjudian yang telah merebak dari kota sampai ke pedesaan	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Provsu	Kesbangpol
		1. Kelompok Tani Tunas Baru Dusun Kampung Lima Puluh Desa Tanjung Pasir Kec. Kualuh Selatan menyampaikan permohonan bantuan sapi dan kelompok tani bunga tanjung dan kelompok tani harapan makmur mengharapkan bantuan sapi potong dalam rangka peningkatan populasi	Kabupaten Labuhan Batu Utara		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

		ternak di desa			
		2. Mohon pemerintah untuk bantuan kelompok tani mekar utama di Dusun IV berupa bantuan sapi	Kabupaten Labuhan Batu Utara		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3. Pengadaan bibit, baik bibit padi maupun bibit ternak di Desa Adian Torop dan pengadaan pupuk bersubsidi	Kabupaten Labuhan Batu Utara		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian
		1. Masyarakat mengharapkan bantuan bibit sawit bersertifikasi, yang mana selama ini masyarakat menanam bibit sawit sembarangan, bahkan sekitar 10% masyarakat yang menggunakan bibit sawit bersertifikasi	Kabupaten Labuhan Batu		Dinas Perkebunan
		2. Masyarakat mengharapkan agar pupuk bersubsidi selalu ada di daerah Dusun Kampung Jawa sebab selama ini pupuk bersubsidi tersebut kadang tersedia dan kadang tidak sama sekali	Kabupaten Labuhan Batu		Dinas Pertanian
		3. Masyarakat mengharapkan Pemerintah agar mendorong Pertamina dalam rangka penanganan kelangkaan Gas LPG 3 Kg dan 12 Kg yang sangat meresahkan masyarakat	Kabupaten Labuhan Batu		Biro Perekonomian
		1. Masyarakat meminta kepada Pemerintah agar memberikan bantuan ke kelompok tani berupa bibit pertanian dan bantuan hewan ternak	Kabupaten Labuhan Batu Selatan		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian
		2. Masyarakat mengharapkan bantuan bibit pertanian seperti bibit karet dan bibit sawit serta bibit ternak seperti ternak sapi bagi peternak di Desa Aek Goti	Kabupaten Labuhan Batu Selatan		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan
		3. Mengharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan petani karet di Huta Godang, karena saat ini harga karet sangat murah	Kabupaten Labuhan Batu Selatan		Dinas Perkebunan
		a) Peningkatan kualitas drainase	Dusun Kampung	APBN/APBD Provsu	Distarukim

		b) Pembangunan MCK	Lima Puluh Desa Tanjung Pasir kec. Kualuh Selatan kab. Labuhan Batu	(BKP)	
		Pembangunan sarana air minum	Desa Silumajang kec. Na IX-X kab. Labura	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan Drainase	Dusun I, Dusun II, dan Dusun VII Desa Padang Maninjau Kec. Aek Kuo kab. Labura	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan sarana air minum	Desa Bandar Durian kec. Aek Natas, Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Penyediaan Air Minum	Dusun Pardomuan Nauli kec. Kualuh selatan kba. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan sarana air minum	Dusun Beringin Jaya kec. Aek kou kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan sarana air minum	Dusun karya Maju kec. Torgamba kab. Labuhanbatu Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan sarana air minum	Desa Suhud kec. Silangkitang kab. Labuhanbatu Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan sarana air minum	Desa Aek Goti kab. Labusel	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim

		Peningkatan drainase menuju Sungai Sentang	Desa Parlabian Kab. Labuhanbatu	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan drainase Desa Teluk Sentosa yang berbatasan dengan Sungai Barumun	Desa Selat Belting kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan drainase jalan provinsi mulai km. 6 s/d km. 9	Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan drainase didaerah Kampung Jawa Tengan	Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Pembangunan sumur bor	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Distarukim
		Peningkatan Badan jalan H. T. Milwan/Makam Desa Telaga Suka di Dusun V Kec. Panai Tengah sepanjang 1.500 meter dan lebar 3 meter.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Peningkatan Badan Jalan Kampung Selamat Desa Telaga Suka di Dusun VI Kec. Panai Tengah sepanjang 1.300 meter dan lebar 3 meter.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Peningkatan Badan Jalan Jembatan di Jalan Panglima Timur Desa Telaga Suka di Dusun I Kec. Panai Tengah sepanjang 80 meter dan lebar 4 meter.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Peningkatan badan jalan Panglima Timur Desa Telaga Suka di Dusun IV dan V Kec. Panai Tengah sepanjang 400 meter dan lebar 3 meter.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembuatan Jembatan Penghubung Jalan Kampung Selamat Desa Telaga Suka di Dusun VI Kec. Panai Tengah sepanjang 12 meter dan lebar 3 meter.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		Pengaspalan Jalan Sungai Rakyat menuju Sungai Berombang sepanjang 24 km yang sangat dibutuhkan masyarakat.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan Jalan Sungai Cina Kec. Panai Tengah sepanjang 6 km	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan Jalan Sungai Merdeka di Dusun I menuju Dusun III Kec. Panai Tengah sepanjang 1 km yang sudah hancur agar segera diselesaikan	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jalan sirtu/beton sepanjang 3.000 meter di Desa Selat Beting Kec. Panai Tengah.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan Titi Beton 4 meter x 30 meter sebagai penghubung antar desa di Desa Selat Beting.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan Badan Jalan Suka Jadi Lingkungan VIII Kelurahan Sungai Berombang Kec. Panai Hilir.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan Jalan Pendidikan (SMP Negeri & SMK Negeri ke Jalan Provinsi) di Dusun III menuju Dusun VI sepanjang 1 km dan lebar 4 meter di Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jembatan beton di Jalan Besar Dusun IV sepanjang 17 meter, lebar 4 meter dan tinggi 1 meter di Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jembatan beton di Dusun IV Gg. Panen sepanjang 12 meter, lebar 5 meter dan tinggi 1 meter di Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengerasan Jalan di Dusun VII Sei Tawar sepanjang 5 km dan lebar 4 meter di Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		membangun jembatan sepanjang 100 meter yang	Kabupaten Labuhan	APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

		menghubungkan dua desa yaitu Desa Kampung Padang dan Desa Tanjung Harapan yang dipisah oleh sungai Bilah	Batu	Kab.Kota	
		peninggian badan jalan di Daerah Desa Kampung Padang	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Kabupaten Labuhanbatu.	Bina Marga
		peninggian jalan di Kabupaten Labuhan Batu seiring dengan pembangunan Drainasenya.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Kabupaten Labuhanbatu.	Bina Marga
		pembangunan jalan ke Desa desa dapat dipercepat karena masih ada desa yang belum mempunyai akses jalan.	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengaspalan jalan dusun tanjung sari menuju Jl. Siluman B dengan Volume 3,5m X 15000 m	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Kabupaten Labuhanbatu.	Bina Marga
		pembangunan jalan sigambal sampai janji sepanjang 3 km	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pemprovsu membangun Jalan Lingkar (Ring Road) untuk menghindari kemacetan di Kota Aek Kanopan	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU	Bina Marga
		pembangunan jalan dari simpang Tanjung pasir menuju kampung Lima Puluh sepanjang 16 Km.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengalihan status jalan dari gunting saga ke tanjung leidong dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pemeliharaan dan perbaikan jalan Kualuh Hilir dan Kualuh Hulu	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan jalan beton sepanjang 500 meter di Dusun I Desa Lobuhuala	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan jembatan di Dusun II Desa Lobuhuala sebagai urat nadi transportasi produksi.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga

		pengerasan jalan sepanjang 1.000 meter mohon bantuan dari APBD Provinsi	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengaspalan jalan sepanjang 2 Km yang berlokasi di Dusun Montong Desa Silumajang Kecamatan Na XIX.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengaspalan jalan sepanjang 1 Km yang berlokasi di Dusun II Desa Silumajang sampai Desa Simonis.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan jalan beton sepanjang 750 meter di Dusun 6 Desa Padang Maninjau Kec. Aek Kuo	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan parit beton sepanjang 3 Km, dengan lokasi di Dusun I, Dusun II, Dusun VI dan VII Desa Padang Maninjau Kec. Aek Kuo	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan berbatas dengan desa sidodadi sampai ke desa karang rejo	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan dan pengaspalan jalan di Kabupaten Labuhan Batu Utara	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pembangunan dan perbaikan jalan lintas mulai dari desa ujung padang sampai desa Bandar durian	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pengaspalan jalan sepanjang 15 km dari desa hapoltahon sampai ke desa pamingke pos.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		perbaikan jalan serta pengaspalan jalan dari desa Bandar durian sampai ke desa pangkalan dusun III hapoltahon nauli.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Pembangunan jembatan aek mongom	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		membangun jalan yang sudah sangat rusak di Kuala Beringin	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		pengaspalan jalan dari Desa Beringin Jaya menuju	Kabupaten Labuhan	APBD Prov. SU/APBD	Bina Marga

		dusun Beringin Makmur sepanjang + 6 Km	Batu Selatan	Kab.Kota	
		pembangunan jalan dari simpang tiga menuju TPU sepanjang + 1 Km yang merupakan jalan lintas anak sekolah.	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Bina Marga
		Perbaikan tanggul di daerah Tanjung pasir sungai kualuh dimana beberapa titik rawan jebol.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/APBD Kabupaten	PSDA
		Perbaikan tanggul kiri Sungai Kualuh Desa Sialang Taji Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sepanjang 15 m	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/APBD Kabupaten	PSDA
		Pembangunan irigasi di Dusun I Desa Gunung Lonceng	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/APBD Kabupaten	PSDA
		Pembuatan tanggul sungai aek natas yang telah rusak di desa adian torop sepanjang 300 m	Kabupaten Labuhan Batu Utara	APBD Prov/APBD Kabupaten	PSDA
		Pembangunan bronjong sungai padang matinggi	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/APBD Kabupaten	PSDA
		Pembuatan Beronjong Pantai Jalan Panglima Timur Desa Telaga Suka di Dusun I Kec. Panai Tengah sepanjang 80 meter dan lembar 4 meter	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/APBD Kabupaten	PSDA
		Pembuatan Bronjong di sungai agar jalan disekitar sungai tidak tergerus oleh air aliran sungai di Desa Tebing Lingga Raya	Kabupaten Labuhan Batu	APBD Prov/APBD Kabupaten	PSDA
	Daerah Pemilihan VII (Kab. Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan)	Bantuan sosial untuk rumah ibadah	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial
		Penyediaan kartu Indonesia Sehat, kartu indonesi pintar dan kartu keluarga sejahtera	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial

	Bantuan Rumah Ibadah di desa Somonggal Parmonangan dan desa Aek Badak	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial
	Bantuan Sosial untuk rumah ibadah ke kec. Tanotombangan angkola	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial
	pemberantasan narkoba yang masih duduk di bangku sekolah	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial
	Bantuan Hibah aset tanah milik pemprov untuk bantuan pembangunan lapangan terbang	Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial
	Memperhatikan Pemberantasan Narkoba	Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial
	Renovasi mesjid taqwa di kelurahan tamiang	Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Sosial
	Masyarakat di kecamatan Saipar Dolok Hole meminta untuk dapat segera dibangunnya Gedung Sekolah SMK Negeri	Tapanuli Selatan	APBN	Dinas Pendidikan
	Pembangunan gedung dan fasilitas laboratorium pada SMU Negeri 1 yang berada di Kelurahan Aek Pinang Kec. Batang toru, dan SMK Negeri 2 pertambangan yang berada di kelurahan Aek Pining di Kec Batangtoru	Tapanuli Selatan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Penyediaan alat berat bagi SMK N. 2 Pertambangan yang berada di kel. Aek pinang	Tapanuli Selatan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Penyediaan bantuan dana pada murid-murid berprestasi dan ekonomi lemah serta putus sekolah mulai tingkat SD, SLTP, SMA sederajat serta Universitas di kec. Batangtoru	Tapanuli Selatan	APBN	Dinas Pendidikan
	Penyediaan tenaga guru sesuai dengan bidang pendidikan	Tapanuli Selatan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil	Tapanuli Selatan	APBD Prov	Dinas Pendidikan

	Bantuan peningkatan kualitas pendidikan	Tapanuli Selatan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Meminta pemberian gaji kepada tenaga pengajar madrasah yang masih honor, dan bantuan buku-buku agama.	Tapanuli Selatan	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Pengangkatan guru Honores menjadi PNS	Mandailing Natal	APBD Pemkab	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Gedung SMP di Simpang Durian	Mandailing Natal	APBN	Dinas Pendidikan
	Masih banyak guru pegawai honorer dan membutuhkan penambahan 3 unit ruang kelas baru di kec. dolok	Padang Lawas Utara	APBD Pemkab	Dinas Pendidikan
	MTs kecamatan Dolok sangat minim PNS hanya 2 guru PNS dari 18 orang guru	Padang Lawas Utara	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	pembangunan gedung SMP dan SMA Negeri	Padang Lawas Utara	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Guru Honor yang sudah lulus K2 belum ada kejelasan pengangkatan sebagai PNS	Padang Lawas	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Bangunan Sekolah membutuhkan penambahan 3 ruang kelas di desa hutaraja kec. Sosa	Padang Lawas	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Masih kurangnya tenaga guru PNS	Padang Lawas	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Masdrasah stanawiyah Darul Ilmu membutuhkan bantuan pembangunan gedung sekolah dan fasilitas sekolah seperti perpustakaan dan laboratorium	Padang Lawas	APBD Prov	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Provinsi Sumatera Utara di desa Simirik yang terdapat asset pemerintah sebesar 7 hektar	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Kartu Indonesia Sehat	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan

	Penyediaan kartu Indonesia Sehat kec. Tatonombangan Angkola	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Penambahan peralatan medis yang mendukung kegiatan palang Merah Indonesia Kab. Tapsel	Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
				Dinas Kesehatan
	Pembangunan rumah sakit umum p. sidempuan di ds pijor koling	Padang Sidempuan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
				Dinas Kesehatan
	Pembangunan Rumah Sakit Umum di Madina	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Pemerintah mengharapkan Pemberian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Sosialisasi BPJS di kec. Desa Gunung Berani kec. Panyabungan	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Pembangunan puskesmas pembantu di desa huta Nauli	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Percepatan program BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Pembangunan ruang Rawat Inap dan ICU di RSUD Panyabungan	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Meminta bantuan alat City Scan dan obat-obatan	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Meminta bantuan dokter Radiologi, spesialis patologi dan anatomi yang blm ada di rumah sakit panyabungan	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
	Meminta Dokter spesialis otak, spesialis kandungan dan bedah yang belum ada di rumah sakit permata madina	Madina	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
				Dinas Kesehatan
	Masih minimnya tenaga medis	Padang Lawas Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan

		Pembangunan gedung puskesmas beserta peralatan yang lengkap	Padang Lawas Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kesehatan
		Para Kepala Desa memohon kenaikan honor kepdes, honor yang diterima Rp. 1.000.000	Padang Lawas	APBD Kab. Kota	BPMD
		Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta agar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan lebih serius dalam hal penerimaan CPNS dengan sistem UBK (Ujian Berbasis Komputer) agar dapat berjalan dengan baik.	Tapanuli Selatan	APBD Prov	BKD
		Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan agar lelang jabatan di pemerintahan ditiadakan agar lebih mengutamakan putra daerah.	Tapanuli Selatan	APBD Prov	BKD
		Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta agar Pemerintah Kota Padang Sidempuan lebih serius dalam hal penerimaan CPNS dengan sistem UBK (Ujian Berbasis Komputer) agar dapat berjalan dengan baik.	Padang Sidempuan	APBD Prov	BKD
		Pemerintah Kota Padangsidempuan menyampaikan agar lelang jabatan di pemerintahan ditiadakan agar lebih mengutamakan putra daerah.	Padang Sidempuan	APBD Prov	BKD
		Masyarakat Kec. Sihitang meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperbaiki jalan dari jembatan Tugu Siborang sampai dengan perbatasan Desa Palopat Maria karena jalan tersebut sudah banyak yang rusak diakibatkan tidak adanya Anggaran Kota Padang	Kota Padang Sidempuan	APBD Prov	PEMUM

		Sidempuan.			
		Masyarakat meminta agar Pemkab Padang Lawas Utara dan Pemprov dapat memediasi masyarakat transmigran di Desa Batang Pane III dengan Pihak PT. Muslim terkait sengketa lahan seluas 6.000 hektar dengan segera Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemprov, memberikan data-data terkait tapal batas antara lahan masyarakat dengan PT. Muslim dengan demikian diharapkan permasalahan dimaksud bisa menjadi jelas, siapa yang salah apakah masyarakat atau PT. Muslim.	Padang Lawas Utara	APBD Prov	PEMUM
		usulan anggaran untuk pengadaan alat musik / nasyid di kecamatan dolok (hal 30 point 3)	Padang Lawas Utara	APBD Prov	PEMUM
		Pembangunan sekolah dan asrama putri di kecamatan holongonan desa bergotong hal 31 point 5)	Padang Lawas Utara	APBD Prov	PEMUM
		usulan pemberian honor bagi guru-guru non formal dan guru pasantren (hal 35 point 2)	Padang Lawas Utara	APBD Prov	PEMUM
		Beberapa warga desa terpencil di Kecamatan Panyabungan Utara bercocok tanam ganja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Hal tersebut dapat merusak generasi bangsa, maka dari itu diharapkan pemerintah pusat beserta pemerintah daerah bersinergi memberantas tanaman ganja serta membina warga tersebut.	Mandailingnatal	APBD Prov	Kesbangpol
		Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan upaya pemberantasan narkoba di Kecamatan Lingga Bayu. Hal ini berdasarkan tes urine yang telah dilakukan oleh Camat dengan pihak-pihak terkait terhadap siswa-siswa di beberapa sekolah	Mandailingnatal	APBD Prov	Kesbangpol

		yang ada di Kecamatan Lingga Bayu, tingkat siswa pengguna narkoba cukup tinggi dan memprihatinkan.			
		Kehadiran OTP Geotermal di wilayah Lembah Sorik Marapi telah menimbulkan perpecahan diantara warga ada yang pro dan ada yang kontra yang selama ini cukup harmonis dan kekeluargaan. Oleh karena itu, diminta kepada pemerintah untuk menangani konflik antar warga dimaksud serta diminta agar OTP Geotermal terlebih dahulu mensosialisasikan dampak positif dan negatif atas keberadaannya di wilayah ini kepada masyarakat.	Mandailingnatal	APBD Prov	Kesbangpol
		Meminta kepada pemerintah untuk membasmi kejahatan Narkoba dan Maksiat di Desa Naga Saribu.	Padang Lawas Utara	APBD Prov	Kesbangpol
		Rehabilitasi mesjid Al-Muttaqin di Desa Padang Matinggi dan mesjid di Mompang Jae, Kec. Penyabungan Utara	Mandailingnatal	APBD Prov	BINSOS
		Meminta agar Pemerintah Provisi Sumatera Utara memberikan bantuan untuk merenovasi Masjid Taqwa, yang berada di Kelurahan Tamiang yang apabila terjadi hujan atap Masjid sering bocor, dan memperluas bangunan Masjid supaya bisa menampung jamaah yang sedang beribadah.	Mandailingnatal	APBD Prov	BINSOS
		Meminta kepada pemerintah untuk di bangun Mesjid di Kec. Padang Bolak Julu, karna mayoritas masyarakat di Desa tersebut agama Islam	Padang Lawas Utara	APBD Prov	BINSOS

		Masyarakat meminta kepada Pemerintah agar membantu pemasaran produk-produk salak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kec. Angkola Barat, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tokoh masyarakat meminta agar jalan usaha tani menuju kelahan pertanian sepanjang ± KM untuk diperbaiki karena selama ini masyarakat yang membawa hasil pertanian mereka sangat sulit dilalui	Kec. Saipar Dolok Hole, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Masyarakat mengharapkan bantuan untuk penyediaan alat bantu Traktor tangan (jetor) agar lebih memudahkan para petani untuk bercocok tanam padi	Kec. Saipar Dolok Hole, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
				ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	
		Pemberian bantuan bibit, traktor dan penyediaan pupuk pada pertanian di Kec. Batang Toru	Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Diadakannya penyuluhan pertanian bagi kelompok tani dan masyarakat di Kec. Batang Toru	Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pembentukan dan bantuan modal koperasi usaha masyarakat di Kec. Batang Toru	Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Pemberian bantuan bibit, traktor dan penyediaan pupuk pada pertanian untuk kelompok tani dan masyarakat desa Aek Badak dan desa Somanggal Parmonangan	Kec. Sayur Matinggi, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Diadakannya penyuluhan pertanian di Desa Aek Badak dan Desa Somanggal Parmonangan	Kec. Sayur Matinggi, Kab. Tapanuli	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian

			Selatan		
		Pembuatan pasar tradisional diperbatasan Desa Somanggal Parmonangan dengan Desa Aek Badak	Kec. Sayur Matinggi, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pembentukan dan bantuan modal koperasi usaha masyarakat Desa Somanggal Parmonangan dan Desa Aek Badak	Kec. Sayur Matinggi, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Pemberian bantuan bibit, traktor dan penyediaan pupuk pada pertanian untuk kelompok tani dan masyarakat seluruh desa Kec. Tanotombangan Angkola	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Diadakannya penyuluhan pertanian untuk kelompok tani dan masyarakat seluruh desa	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pembentukan dan bantuan modal koperasi usaha masyarakat se Kec. Tanotombangan Angkola	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Dijadikannya tempat budaya dan pariwisata atas penemuan batu berukiran kepala manusia yang berada di Desa Purbatua Kec. Tanotombangan Angkola	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pembangunan jalan pertanian panjang \pm 50 meter dan lebar \pm 1,5 meter	Kec. Angkola Julu, Kota Padangsidempuan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Penambahan volume pupuk subsidi	Kec. Angkola Julu, Kota Padangsidempuan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Masyarakat mengharapkan adanya Pembangunan	Kec. Panyabungan,	ABPN/APBD	Dinas Perindustrian

		industri hilir dari hasil hutan dan perkebunan yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat	Kab. Mandailing Natal	Prov/APBD Kab.Kota	dan Perdagangan
		Mohon bantuan bibit kopi, ayam, ikan dan bebek kepada kelompok tani yang berada di Desa Gunung Barani	Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Perbaiki tambak-tambak ikan milik warga masyarakat di wilayah Kec. Panyabungan Utara	Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Bantuan bibit ternak bagi warga miskin Desa Sinondoan	Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Perbaiki tambak-tambak ikan milik warga masyarakat di wilayah Kec. Panyabungan Timur	Kec. Panyabungan Timur, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Mengusulkan agar pemerintah turun tangan menstabilkan harga komoditi karet yang saat ini harganya turun yang berpengaruh pada pendapatan masyarakat	Kec. Panyabungan Timur, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Mengusulkan agar pemerintah turun tangan menstabilkan harga komoditi karet yang saat ini harganya turun yang berpengaruh pada pendapatan masyarakat	Kec. Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Mengusulkan agar pemerintah turun tangan menstabilkan harga komoditi karet yang saat ini harganya turun yang berpengaruh pada pendapatan masyarakat	Kec. Lembah Sorik Marapi, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan

		Perbaiki tambak-tambak ikan milik warga masyarakat di wilayah Kec. Puncak Sori Marapi	Kec. Puncak Sorik Marapi, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Mohon untuk meningkatkan fasilitas pertanian dan perkebunan berupa bantuan pupuk bersubsidi, bibit tanaman, ternak dan perikanan di kel. Tamiang	Kec. Kota Nopan, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian
		Mohon bantuan modal usaha untuk budidaya ikan dan bantuan bibit kopi, bibit cabe dan ternak kepada kelompok tani yang ada di Desa Manambin	Kec. Kota Nopan, Kab. Mandailing Natal	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Masih banyak hutan lindung yang belum bersertifikat, mohon keseriusan pemerintah untuk mengatasi masalah ini	Kec. Dolok, Kab. Padang Lawas Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kehutanan
		Mohon untuk membangun Koperasi di beberapa Desa di Kec. Padang Bolak supaya harga barang dari hasil pertanian masyarakat bisa stabil	Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Mohon untuk menyediakan lahan pertanian untuk kebun cabai	Kec. Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Mohon Untuk merenovasi Pasar Tradisional, supaya lebih teratur, rapi dan tidak mengundang kemacetan	Kel. Pasar Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Masyarakat mengharapkan agar bisa menggunakan tanah milik Dinas Kehutanan	Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kehutanan

		Pemprovsu yang terlantar, sudah disurati ke Pemkab namun belum ada jawaban			
		Renovasi pasar ujung batu sebagai Pusat Central Perekonomian	Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Harga getah sangat anjlok, padahal mayoritas penduduk adalah petani getah	Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Jalan Pertanian Desa Siundul, Lokasi Kebun Hopong, Panjang 3 Km dan lebar 2 M	Usulan Tambahan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Jalan Pertanian Desa Aek Bargot, Lokasi Kebun Gariang Aek Bargot, Panjang 2 KM dan Lebar 2 M	Usulan Tambahan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pembangunan lanjutan jalan pertanian Aek Mags, Lokasi Kebun Sibodak Aek maga, Panjang 2 KM dan lebar 2 M	Usulan Tambahan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pengadaan Mesin rontok padi jumlah 2 unit	Usulan Tambahan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pengadaan alat bajak sawah jumlah 2 unit	Usulan Tambahan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM	Kel. Sitinjak kec. Angkola Barat kab. Tapanuli selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana dan prasarana air minum	Dusun Pagaran pandoan Desa Simangambat kec. Saipar Dolok Hole Tapanuli Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penyediaan Air Bersih	Kel. Aek Pinang Kec. Batang Toru Kab.	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman

			Tapstel		
		Penyediaan mobil pemadam kebakaran	Kel. Aek Pinang Kec. Batang Toru Kab. Tapstel	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Desa Aek Badak kec. Sayur matinggi Kab. Tapanuli Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Desa Somanggal Parmonangan kec. Sayur matinggi kab. Tapanuli selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Kec. Tanotombangan kab. Tapanuli Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembuatan sumur bor air bersih	Desa Rimba Soping kec. Angkola Julu kota padang sidempuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembuatan sumur bor air bersih	Kel. Sitamiang Baru, kec. Padang sidempuan kota padang sidempuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembuatan sarana MCK	Kel. Panyabungan II kec. Panyabungan Kab. Madina	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Kel. Panyabungan II kec. Panyabungan Kab. Madina	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Program penyehatan permukiman kumuh	Kel. Panyabungan II	APBN/APBD Provsu	Dinas Penataan Ruang

			kec. Panyabungan Kab. Madina	(BKP)	dan Permukiman
		Pembangunan sarana dan prasarana air minum	Desa Tanjung Mompang kec. Panyabungan utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan MCK	Desa Manambin kec. Kotanopan kab. Madina	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas drainase	Kel. Pasar Gunung Tua kec. Padang bolak kab. Paluta	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan MCK	Kec. Barumon kab. Padang Lawas	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Kec. Panyabungan Utara dan kec. Lingga Bayu	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana dan prasarana air minum	Desa Hutasuhut Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana dan prasarana air minum	Desa Bulugading Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan jaringan air minum	Desa Aek Bayur Kec. Sidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan jalan usaha tani	Desa Simpang Banyak Julu Kec. Ulu Pungkut Kab.	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman

			Mandailing Natal		
		Pembangunan sarana dan prasarana air minum	Kec. Panyabungan, Kec. Bukit Malintang, Kec. Naga Juang Kab. Mandailing Natal	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan MCK	Kec. Panyabungan Utara, Kec. Bukit Malintang, Kec. Naga Juang Kab. Mandailing Natal	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pengaspalan jalan dari perbatasan Kota Padang Sidempuan sampai di Kecamatan Angkola Barat.	Kecamatan Angkola Barat , Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan/pengaspalan Jalan Lintas Kecamatan Angkola Barat sampai dengan perbatasan Sibolga.	Kecamatan Angkola Barat , Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan/perbaikan jalan usaha tani menuju kelahan pertanian sepanjang ±2 KM.	Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembukaan jalan baru sepanjang ±3KM dari Desa Pangindran ke Desa Somba Debata Purba.	Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah	Kecamatan Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembuatan saluran air pada sisi kiri dan kanan jalan provinsi	Kecamatan Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga

		Pengaspalan jalan di Desa Napa sepanjang 1,5 km dan Dusun Kampungbaru Desa Wek 4 sepanjang 600 meter di Kecamatan Batangtoru	Kecamatan Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pelebaran jalan penghubung antara Kelurahan Panabari Hutatonga Kecamatan Tanotombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan desa Somanggal Parmonangan dan desa Aek Badak Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pergantian jembatan gantung menjadi jembatan permanen yang menghubungkan Kelurahan Panabari Hutatonga Kecamatan Tanotombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan desa Somanggal Parmonangan dan desa Aek Badak Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jembatan penghubung antara desa Simaninggir Kecamatan Tanotombangan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan desa Muara Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal di sungai Batanggadis	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan serta saluran air pada sisi kiri dan kanan jalan Kecamatan Tanotombangan Kabupaten Tapanuli Selatan	Kec. Tanotombangan Angkola, Kab. Tapanuli Selatan	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pemeliharaan jalan Provinsi di kota Padang Sidempuan menuju kota Sibolga.	Kota Padang Sidempuan, Kota Padang Sidempuan.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pemeliharaan dan pelebaran jalan Provinsi di Kota Padang Sidempuan menuju Kabupaten Paluta.	Kota Padang Sidempuan, Kota	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga

			Padang Sidempuan.		
		Pembangunan/perbaikan jembatan dari Tugu Siborang Desa Palopat Maria sampai dengan Tapsel.	Kota Padang Sidempuan, Kota Padang Sidempuan.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan dari jembatan Tugu Siborang sampai dengan perbatasan Desa Palopat Maria.	Kecamatan Sihitang, Kota Padang Sidempuan.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pelebaran jalan parsobolan atau simirik sampai simpang tiga Kantor Dinas Perhubungan.	Kecamatan Sihitang, Kota Padang Sidempuan.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan/pengaspalan jalan mulai dari Bundaran Tugu Juang sampai keperbatasan Tapsel.	Kecamatan Padang Sidempuan, Kota Padang Sidempuan.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan pertanian Panjang : $\pm 50 \times 1,5$ meter.	Kecamatan Angkola Julu, Kota Padang Sidempuan.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan kelurahan, Duma I – VI, Kel. Sitamiang Baru	Kec. Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan yang menghubungkan Kabupaten Madina dengan Kabupaten Palas ± 40 Km dari Madina ke perbatasan Kab. Palas	Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan Pantai Barat, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan-Madina-Provinsi Sumatera Barat.	Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga

		Pembangunan Dermaga Pelabuhan Laut di Batahan Kecamatan Natal.	Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Bantuan hibah aset tanah milik Provinsi Sumatera Utara seluas ± 100 hektar yang terletak di Desa Malintang kepada Pemkab Madina. Hal ini dimaksudkan untuk pembangunan lapangan terbang di Kabupaten Madina	Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan/pembangunan jalan desa Simaninggir, sepanjang ± 1.8 Km.	Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan desa Simaninggir menuju Desa Lumban Dolok.	Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perluasan jembatan.	Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jalan Penghubung dari Kec. Panyabungan barat ke Kec. Hutabargot sepanjang 4 km.	Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan setapak di Jalan Pahlawan Kelurahan Panyabungan II.	Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jalan Panyabungan Timur ke Sibuhuan Kab. Padang Lawas, sepanjang 60 km.	Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan antar desa Mompang Jae dan sekitarnya.	Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga

		Rehabilitasi total jembatan/rambin di Desa Mompang Jae.	Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jembatan/rambin di Desa Tor Banua Raja, aek Batang Gadis.	Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan dan pelebaran jalan pedesaan di wilayah Kecamatan Panyabungan Timur.	Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan dan jembatan pedesaan di Desa Simpang Koje dan Desa Pangkalan	Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan dan jembatan yang menghubungkan Desa Huta Baru – Rato Naginjang sepanjang 2,5 km.	Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan Hotmix sepanjang 700 m ke arah kantor Kecamatan Lembah Sorik Marapi.	Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Madina	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pemeliharaan jalan provinsi Gunung Tua-Sibuhuan, Gunung Tua-Langga Payung dan Gunung Tua-Padang Sidempuan.	Kabupaten Padang Lawas Utara.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan aspal hotmix. dari Pasar Sipiongot menuju Desa Siburbur.	Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga

		Pembangunan jalan-jalan yang rusak di Desa Batang Pane III, Kecamatan Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara.	Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan Provinsi antara perbatasan Paluta Dengan Palas.	Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan Provinsi maupun Kabupaten yang rusak dan berlubang termasuk di kota Gunung Tua.	Kel. Pasar Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pemb. Parit di sekitar Jl.Merdeka di link.III pasar Gunung Tua	Kel. Pasar Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pemeliharaan jalan provinsi Sibuhuan-Gunung Tua dan Sibuhuan-Sosopan khususnya pada lokasi ruas jalan yang rusak berat.	Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Membuat program kegiatan pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Kabupaten Palas dengan Kabupaten Madina,	Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan / renovasi jalan menjadi aspal hotmix sepanjang ± 400 meter, dari dan menuju ke Desa Hurtaraja.	Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan 330 Desa di Kabupaten Palas.	Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan/Pembuatan Jembatan Sungai Sosa yang menghubungkan Kecamatan Batang Lubu Sutam ke Desa Hutaraja Lama	Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga

		Pemb./perb. jalan menuju Kecamatan Batang Lubu Sutam, dari Kecamatan Sosa ke Kecamatan Batang Lubu Sutam.	Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan provinsi yang berada di Kabupaten Padang Lawas terutama di daerah Aek Nabara Barumon.	Kecamatan Sibuhuan Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembukaan akses jalan apung sampai ke madina sekitar 60 Km serta jalan yang berada di Kabupaten Padang Lawas agar ditingkatkan menjadi jalan Provinsi atau jalan Nasional.	Kecamatan Sibuhuan Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan Provinsi dari Gunung Tua sampai ke Padang Lawas .	Kecamatan Sibuhuan Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan dari Aek Godang sampai Sosopan.	Kecamatan Sibuhuan Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangun jalan tembus dari Sibuhuan Ibu Kota Padang Lawas menuju Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang terletak di Desa Hapung.	Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangun jalan lintas yang menghubungkan dari Kabupaten Padang Lawas ke Kabupaten Padang Lawas Utara serta ke Kabupaten Rokan Hulu (Sungai Kerang) Provinsi Riau.	Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga

		Pembangunan dan perawatan Jalan dan Jembatan Provinsi Lintas Sosopan, KM 150 Aek Godang – Sibuhuan, Khususnya dari Aek Bargot – Siraisan	Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Jembatan gantung desa Siundol Jae, ukr. 85x1,5 m, penghubung ke desa terisolir (Aek Hayuara/Martona) dan perkebunan masyarakat	Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan pertanian Desa Siundol, kebun hopong, Ukr. 3 Km x 2m.	Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Pertanian Desa Aek Bargot, Kebun Gariang Aek Bargot, Uk. 2 Km x 2 m.	Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan lanjutan jalan pertanian Aek Maga, Kebun Sibodak Aek Maga, Uk 2 Km x 2m.	Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.	APBD Kab/APBD Provsu (BKP)	Dinas Bina Marga
	Dapil VIII (Kab. Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli)	Kelompok Usaha Wanita Sangat Membutuhkan Keterampilan Untuk Mengolah Usaha Kecil Masyarakat	Kota Gunung Sitoli	APBD Prov	Pemberdayaan Perempuan, Anak, KB
		Pembangunan Rumah Ibadah Gereja Immanuel Desa Hiliwarokha Kec. Bowolato Kab. Nias	Kabupaten Nias	APBD Prov	BINSOS
		Desa Sirete Kec. Gido Masyarakat Merasakan Kurangnya Kepedulian Pemerintah Khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Organisasi-Organisasi Keagamaan	Kabupaten Nias	APBD Prov	BINSOS
		Desa Hiligeho Sogawu Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan Minimnya Sarana Pemerintahan	Kabupaten Nias Selatan	APBD Prov	BKD

		Untuk Mendukung Penyelenggaraan Tugas-Tugas Administrasi Pemerintahan Karena Kurangnya Tenaga Kerja/Pns Yang Ditempatkan Di Daerah Ini			
		Masalah Pns Yang Saat Ini Masih Mengalami Kekurangan Dan Ada Beberapa Pns Cenderung Mengajukan Pindah Sementara Di Daerah Hibala Mengalami Kekurangan.	Kabupaten Nias Selatan	APBD prov	BKD
		Desa Dahana Kec. Bowolato Kab. Nias Pembangunan Balai Pertemuan Desa Dahana Kec. Bowolato	Kabupaten Nias	APBD prov	PEMUM
		Pembangunan Mck Bagi Masyarakat Di Dusun Desa Dahana Kec. Bowolato	Kabupaten Nias	APBD prov	PEMUM
		Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Sarana Perkantoran Di Lingkungan Kecamatan Hili Serangkai ; Kantor Danramil Dan Polsek Hiliserangkai	Kabupaten Nias	APBD prov	PEMUM
		Desa Sirete Kec. Gido Masyarakat Masih Mengeluhkan Penyaluran Kartu Bpjs Yang Sampai Saat Ini Belum Ada Realisasinya.	Kabupaten Nias	APBD prov	PEMUM
		Mohon Perhatian Pemerintah Dalam Hal Kesejahteraan Kepala Desa Yang Masih Dibawah Standart.	Kota Gunung Sitoli	APBD prov	PEMUM
		Perlu Adanya Sosialisasi Bagi Masyarakat Mengenai Masalah Bpjs. Banyak Masyarakat Masih Belum Paham	Kota Gunung Sitoli	APBD prov	PEMUM
		Masyarakat Mengeluhkan Masih Banyaknya Warga Yang Belum Terdata Untuk Mendapatkan Kartu Bpjs, Kartu Sehat, Kartu Pintar, Dan Kartu	Kabupaten Nias Barat	APBD prov	PEMUM

		Keluarga Sejahtera Sehingga Diminta Untuk Data Ulang, Khususnya Bagi Warga Miskin.			
		Masyarakat Memohon Pembangunan Kantor Camat Tanah Masa Lokasi Di Baluta Sebagai Ibukota Kecamatan	Kabupaten Nias Selatan	APBD prov	PEMUM
		Mohon bantuan modal usaha bersama kepada ibu-ibu rumah tangga seperti jahit menjahit, pembuatan keripik, agar dapat membantu perekonomian keluarga dan dapat membina usaha kecil menengah	Kec. Idanogawo, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Bantuan sosial budidaya ikan/perikanan darat, kelompok tani sihura desa dahana	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Kelompok tani/ternak fahurusa desa dahana, memohon bantuan ternak babi	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Kelompok tani/ternak buasi mawar desa hiliwarokha, mohon bantuan ternak kambing	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (plts) di desa- desa se-kecamatan hiliserangkai	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertambangan dan Energi
		Pengembangan intensifikasi tanaman cabe di desa-desa kecamatan hiliserangkai	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Bibit unggul terbaru untuk tanaman karet dan coklat sangat dibutuhkan masyarakat.	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Bantuan peralatan teknis pengolahan umkm masyarakat desa	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Rehabilitasi pasar tradisional botombawo desa dahadano botombawo kec. hiliserangkai	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Perlu dilakukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah dalam mendongkrak harga	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian

		penghasilan petani.			
		Pemerintah melalui dinas-dinas terkait diharapkan dapat memberikan bantuan modal usaha bagi pkk sekaligus memberikan pelatihan keterampilan berupa salon dan menjahit.	Kec. Bowolato, Kab. Nias	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Kelompok usaha wanita sangat membutuhkan keterampilan untuk mengolah usaha kecil masyarakat	Kota Gunung Sitoli	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Usul dari organisasi wanita di kecamatan alasa adalah sumber daya manusia sebagai salah satu kunci yang menjadi motor penggerak pembangunan untuk itu sangat diperlukan penambahan personil pendidik, paramedis dan penyuluh pertanian begitu pula pelatihan home industri rumah tangga.	Kec. Alasa, Kab. Nias Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi dan UKM
		Pengadaan alat produksi pakan ikan di balai benih ikan alasa	Kec. Alasa, Kab. Nias Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengadaan hand trakctor			Dinas Pertanian
		pengadaan bibit penangkal benih padi sering sekali terlambat , mengakibatkan kadaluarsanya benih.	Kec. Alasa, Kab. Nias Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pengadaan ternak bibit sapi/kerbau sangat dibutuhkan masyarakat, potensi pakan ternak sapi /kerbau sangat melimpah, memungkinkan ternak sapi.	Kec. Alasa, Kab. Nias Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Jaringan listrik dari hiligoduhoya – sifaoroasi – hilina'a, kec. lahewa kab. nias utara.	Kec. Lahewa, Kab. Nias Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertambangan dan energi
		Jaringan listrik dari lauru fadoro – sifaoroasi,	Kec. Lahewa, Kab.	ABPN/APBD	Dinas Pertambangan

		lahewa, nias utara.	Nias Utara	Prov/APBD Kab.Kota	dan energi
		Jaringan listrik dari ibukota kec. lahewa timur – kec. alasa kab. nias utara.	Kec. Lahewa, Kab. Nias Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertambangan dan energi
		Permasalahan jaringan listrik tak luput dari keluhan masyarakat, untuk itu melalui reses anggota dprd provinsi sumatera utara masyarakat menyampaikan bahwa di kecamatan mandrehe barat dari desa lasara bagawu menuju desa orahili badalu sampai saat ini belum tersentuh jaringan listrik. diharapkan agar kedepannya jaringan listrik di desa tersebut dapat segera teratasi	Kec. Lahomi, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertambangan dan energi
		Peserta reses meminta agar pemprov dapat memprogramkan bantuan-bantuan untuk nelayan berupa perahu dan alat-alat tangkap termasuk pembangunan tambahan perahu di daerah kecamatan sirombu.	Kec. Lahomi, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas kelautan dan Perikanan
		Masyarakat desa sisarahili i kec. mandrehe, kab. nias barat meminta bantuan bibit kelapa sawit untuk perkebunan masyarakat.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Masyarakat desa sisarahili i kec. mandrehe, kab. nias barat meminta bantuan bibit karet okulasi untuk perkebunan masyarakat.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Masyarakat desa sisarahili i kec. mandrehe, kab. nias barat meminta bantuan bibit babi.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Masyarakat desa sisarahili i kec. mandrehe, kab. nias barat meminta bantuan bibit ayam petelur.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Masyarakat desa sisarahili i kec. mandrehe, kab. nias barat meminta bantuan bibit ikan lele jumbo.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Masyarakat desa doli-doli kec. mandrehe kab.	Kec. Mandrehe, Kab	ABPN/APBD	Dinas Perkebunan

		nias barat, meminta bantuan perluasan lahan karet seluas 30 hakter dengan bibit okulasi	Nias Barat	Prov/APBD Kab.Kota	
		Masyarakat desa doli-doli kec. mandrehe kab. nias barat, meminta bantuan peremajaan lahan karet seluas 20 hakter dengan bibit okulasi	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Masyarakat desa doli-doli kec. mandrehe kab. nias barat, meminta bantuan pengadaan bibit unggul ternak babi dan fasilitas kandang.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Masyarakat desa doli-doli kec. mandrehe kab. nias barat, meminta bantuan pengadaan bibit ternak ayam dan fasilitas kandang	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Masyarakat desa doli-doli kec. mandrehe kab. nias barat, meminta bantuan pengadaan bibit ternak kambing	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Masyarakat desa doli-doli kec. mandrehe kab. nias barat, meminta bantuan memohon pengadaan bibit palawija.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Masyarakat desa doli-doli kec. mandrehe kab. nias barat, meminta bantuan pengadaan mesin penggiling karet.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Masyarakat desa lakhene mengharapkan bantuan bibit ikan lele.	Kec. Mandrehe, Kab Nias Barat	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pembangunan jaringan listrik yang sampai saat ini belum masuk ke desa-desa.	Kec. Pulau –pulau Batu, Kab. Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertambangan dan energi
		Masyarakat meminta bantuan bibit tanaman yang biasa ditanam di daerah ini contohnya bibit padi unggulan, getah dan kopra yang cocok untuk daerah tersebut.	Kec. Pulau –pulau Batu, Kab. Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Memohon kepada pemerintah agar penyaluran	Kec. Pulau –pulau	ABPN/APBD	Dinas Pertanian

		pupuk bersubsidi agar lebih terarah pembagiannya kepada semua penduduk yang tidak mampu sekaligus pengawasan terhadap pupuk yang dipalsukan dipasaran.	Batu, Kab. Nias Selatan	Prov/APBD Kab.Kota	
		Pengadaan pln yang sampai saat ini belum masuk listrik ke desa-desa terpencil.	Kec. Tanah Masa, Kab Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Distamben
		Pembangunan tempat penangkapan ikan (tpi) belum ada sampai saat ini pengadaan motorisasi dan alat tangkap nelayan bagi masyarakat yang melaut di kecamatan tanah masa	Kec. Tanah Masa, Kab Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perikanan
		Pengadaan alat-alat pertanian bagi masyarakat petani yang ada di kecamatan tanah masa, guna meningkatkan hasil bumi yang ada, adapun tanaman yang bisa dihasilkan yaitu : cengkeh, pinang, kelapa dan tanaman hortikultura lainnya.	Kec. Tanah Masa, Kab Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Masyarakat membutuhkan bantuan berupa bibit unggul padi, jagung, kopi dan coklat serta bibit karet karena harga getah karet saat ini menurun.	Kec. Tanah Masa, Kab Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Para petani tetap mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi di setiap musim tanam dan walaupun ada saat ini dipasaran harganya sangatlah mahal untuk itu mohon bantuan pemerintah menyalurkan pupuk ke daerah ini lebih efektif.	Kec. Tanah Masa, Kab Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Sampai saat ini di kecamatan hibala listrik belum masuk hanya meteran yang dipasang namun listrik belum ada masyarakat hanya menggunakan genset darurat.	Kec. Hibala Masa, Kab Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Distamben
		Pencurian ikan dari daerah lain ke wilayah hibala	Kec. Hibala Masa,	ABPN/APBD	Dinas Perikanan

		sudah banyak contoh dari nelayan sibolga dan padang dengan menggunakan pukat cincin dan pukat harimau yang merusak ekosistem dan terumbu karang laut karena kurangnya pengawasan laut.	Kab Nias Selatan	Prov/APBD Kab.Kota	
		Pengawasan terumbu karang di kawasan laut hibala hampir punah/rusak karena tidak ada pengawasan laut yang seharusnya dibawah lanal hibala disinyalir ada pemboman ke dasar laut yang dilakukan para nelayan yang tidak bertanggung jawab akibat kurangnya pemahaman hukum laut dari pihak terkait yang kementerian kelautan dan perikanan serta lanal setempat, untuk masyarakat memohon dibangun pos lanal yang aktif.	Kec. Hibala Masa, Kab Nias Selatan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perikanan
		Pembangunan penyediaan Sarana Air Bersih	Desa Loawo Hilimbaruzo kec. Idanogawo kab. Nias	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan penyediaan Sarana Air Bersih	Desa Dahana kec. Bawolato kab. Nias	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan MCK	Desa Dahana kec. Bawolato kab. Nias	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan Drainase	Desa Sirete dan Desa Umu kec. Gido kab. Nias	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana air bersih	Desa Lasara kec. Gunungsitoli kota Gunungsitoli	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penyediaan Air Sumur Bor, Air PDAM	Desa Hiligehe	APBN/APBD Provsu	Dinas Penataan Ruang

			Sogawu kec. Pulau-pulau kab. Nias Selatan	(BKP)	dan Permukiman
		Pembangunan MCK dan penyediaan air bersih	Desa Eho Kec. Hibala Kab. Nias Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Desa Lolombali Kab. Nias Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan Penampungan Air	Desa Duria Kec. Lolofitu Moi Kab. Nias Barat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana air minum	Desa Sisobawino II , Desa Hilibadalu Kec. Lolofitu Moi Kab. Nias Barat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan rumah	Desa Wango Kec. Lolofitu Moi Kab. Nias Barat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kec. Idanogawo Kab. Nias	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan jaringan air minum dan pembangunan sumur bor	Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Lasara Tarakhaini Kec. Gunungsitoli Alo'oa, Desa Lasara Bahili Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman

		Pemb. Jalan simpang Mezawa Kec. Idanogawo menuju desa Siofa Banua Kec. Bawolato melalui Desa Loawo Hilimbaruzo Sep. 5 Km,	Pemb. Jalan	APBD Kab. Kota / BKP.	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan desa Loawo Hilimbaruzo Kec. Idanogawo.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembukaan badan jalan Maduma Desa Dahana menuju Desa Balela, Tabaa, sep. 9 Km.	Kecamatan Bowolato, Kab. Nias	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembukaan badan jalan Maduma Desa Dahana menuju Desa Dahana.	Kecamatan Bowolato, Kab. Nias	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Badan jalan Amkhai Desa Dahana menuju desa Silimaewali.	Kecamatan Bowolato, Kab. Nias	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembuatan bronjong pengamanan jembatan sungai Suani Desa Dahana.	Kecamatan Bowolato, Kab. Nias	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Semeniasi dari desa Eho Baluta menuju Ibukota Kecamatan, dari desa Hale Baluta menuju Desa Bawo Orudua, dari desa Hiligehe Sogawumenuju desa Eho Baluta dan dari Hiliomasio menuju desa Saeru melayu, sep. 30 Km.	Kecamatan Pulau-pulau Batu , Kab. Nias Selatan.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Pelabuhan dan jemb. Perahu/jetty desa Hale Baluta dan dan desa Eho Baluta (Baruyu) sebanyak 2 Pelabuhan.	Kecamatan Pulau-pulau Batu , Kab. Nias Selatan.	APBN	Dinas Perhubungan
		Pemb. Jalan, pengaspalan dan pembuatan parit menuju Kec. Hibala.	Kecamatan Hibala, Kab. Nias Selatan.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jemb. Menuju Kec. Hibala.	Kecamatan Hibala, Kab. Nias Selatan.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

		Pemb./diperbesar Pelabuhan Sigolong-golong.	Kecamatan Hibala, Kab. Nias Selatan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Peningkatan ruas jalan dari Gunung Sitoli ke Alasa.	Kec.Alasa.Kabupaten Nias Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Peningkatan status jalan menjadi jalan Provinsi yaitu ruas jalan dari Anaoma Kec. Alasa menuju Kec. Amatan Afulu + 20 km.	Kec.Alasa.Kabupaten Nias Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan baru ke Botolala	Kec.Alasa.Kabupaten Nias Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jln yang menghubungkan Kec. Dengan kota Kab. Pengaspalan perbatasan Desa Dahana Alasa sampai perbatasan Laowowaga kec. Lahewa Timur sep. 2.300 m.	Kecamatan Lahewa, Kab. Nias Utara	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan Provinsi ruas Miga – Lolowau – Teluk Dalam.	Kabupaten Nias Barat	APBD Provsu/BKP.	Dinas Bina Marga
		Jalan Povinsi ruas Lolowau – Sirombu	Kabupaten Nias Barat	APBD Provsu/BKP.	Dinas Bina Marga
		Jalan dan Jembatan Provinsi ruas Afulu Kab. Nias Utara – Sirombu, Kabupaten Nias Barat.	Kabupaten Nias Barat	APBD Provsu/BKP.	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan dari Kec. Mandrehe melalui desa Sisarahili desa Zuzundao dan desa Sitoluewali ke desa Hiliwaele menuju Kab. Nias Utara.	Kabupaten Nias Barat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan dari desa Sitoluewali Kec. Moro'o menuju desa Gunung Tua Kab. Nias Utara.	Kabupaten Nias Barat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan dari Kec. Mandrehe Barat melalui desa Hilisoromi – desa Onozalukhu – desa	Kabupaten Nias Barat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

		Siduahili – desa Dangagari menuju sungai Oyo Kab. Nias Utara.			
		Pengerasan jalan dari desa Siso Baoho menuju dusun Hiliadulo desa Onolimbura Kec. Mandrehe Barat.	Kabupaten Nias Barat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan dari desa Lasara Bagawu menuju desa Orahili Badalu Kec. Mandrehe Barat.	Kabupaten Nias Barat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan, pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan antara dusun iii Tugala desa Hilibadalu menuju desa Hilisangawola Kec. Moro’o Kab. Nias Barat.	Kabupaten Nias Barat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan Hiligara menuju desa Hiligodu Ombelata Kec. Gunung Sitoli Selatan.	Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan dari Tetelesi Ombelata menuju desa Gada Gunung Sitoli Barat.	Kecamatan Gunung Barat, Kota Gunung Sitoli	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
			.		
		Peningkatan jalan dari desa Orahili Tanoseo Alooa menuju desa Sisobahili Tanoseo Kec. Hilidiho.	Kecamatan Hilidiho , Kota Gunung Sitoli	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Dapil IX (Kab. Toba Samosir, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga)	Masyarakat Kecamatan Siborong-borong yaitu di Desa Hutabulu Dalam upaya peningkatan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat miskin Pemerintah diharap dapat mensosialisasikan BPJS	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan

		Masyarakat juga menghimbau adanya perbaikan Puskesmas, dan penambahan peralatan Puskesmas, serta penambahan tenaga Medis.	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Dokter Umum dan Dokter Spesialis, karena di Daerah ini belum ada Dokter Umum	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan
		Para Medis agar dapat memantau obat-obat yang sudah kadaluarsa dan palsu jangan sampai beredar yang berakibat fatal bagi masyarakat	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Penduduk Dusun IV Pokki Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong Kab.Tapanuli Utara meminta kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi agar membangun 1 unit Polindes di Desa mereka	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan
		Penduduk Desa Lumbantongatonga mengharapkan kepada pemerintah Provinsi agar membangun 1 unit POSKESDES di Desa mereka dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan
		penduduk Lobusonak Desa Pohan Tonga dan penduduk Sianjur Desa Pohan Julu dalam rangka layanan kesehatan, meminta agar Pemerintah Membangun/Rehab Total Polindes masing-masing 1 unit	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan
		Masyarakat di Desa Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluhkan dan mengharapkan kepada Pemkab Tapteng agar segera memperhatikan rumah sakit tersebut	Kab. Tapanuli Tengah	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Kesehatan

		karena Peralatan dan Perlengkapan di rumah sakit tersebut kurang memadai			
		Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Masyarakat sangat mengharapkan Pemerintah dapat membuka Sekolah baru untuk tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi karena pada umumnya warga Masyarakat masih banyak menyekolahkan anak-anak mereka ke luar daerah maupun ke luar Provinsi	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Permohonan penyediaan sarana dan Prasarana Sekolah yang masih kurang memadai dan belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti Laboratorium, Perpustakaan dan Komputer	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Di Desa ini memang sudah ada SMP 1 Atap namun Guru yang mengajar banyak yang masih tenaga honor, untuk itu masyarakat mengharapkan Guru yang profesional sesuai dengan bidang Study masing-masing dan setara kurikulum Nasional	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		para tenaga pengajar (Guru) masih sangat dibutuhkan, karena masih banyak Guru yang mengajar mata pelajaran yang bukan sesuai dengan jurusannya, dan masih banyak ditemui Guru Honor yang belum diangkat jadi PNS	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		penggunaan dana BOS juga menjadi perhatian Masyarakat dan diharapkan penggunaannya dapat tepat sasaran dan juga dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan

		Pengadaan PAUD di setiap Desa juga diharapkan mendapat perhatian yang serius	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Perbaikan dan Pengadaan Ruang Kelas Baru di setiap Sekolah SD, SMP, SMA dan sekolah lainnya berikut dengan pengadaan Laboratorium Bahasa Inggris	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> - Rehab Bangunan Sekolah SD NO. 173287 Hutabulu - Mobilair SD No. 173287 seperti Meja siswa 70 buah, kursi siswa 140 buah, Meja Guru 7 buah, Kursi Guru 7 buah, Lemari 6 buah, Rak Buku 3 buah, Lap Top 5 Unit, Komputer lengkap 5 Unit. - Gedung Laboratorium untuk SMP 1 Atap di Desa Hurabulu. - Gedung Perpustakaan untuk SMP 1 Atap di Desa Hutabulu. - Pemagaran Sekolah SD Hutabulu dan SD Huta Ginjang 	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		para orang tua masyarakat Dusun I, II, III, IV Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kab.Tapanuli Utara meminta kepada Pemerintah untuk membangun masing-masing 1 unit Gedung PAUD di desa mereka	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Masyarakat di Dusun V / VI Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara, meminta kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi agar segera membangun Gedung Sekolah Dasar Negeri di desa mereka	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Untuk mendapatkan pendidikan usia dini para orang tua masyarakat Dusun I Lobu Siregar I	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan

		Kecamatan Siborongborong Kab.Tapanuli Utara meminta kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi agar membangun 1 unit Gedung PAUD			
		Warga jemaat Gereja HKBP Lobu Siregar II beserta masyarakat sekitar mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten maupun Instansi terkait Pemerintah Provinsi lewat reses Anggota Dewan ini agar membangun PAUD di Lapangan Gereja	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Masyarakat Desa Sigumbang Kecamatan Siborongborong Kab.Tapanuli Utara lewat Reses Anggota Dewan ini meminta kepada Pemerintah Kabupaten ataupun Provinsi untuk segera membangun 1 unit Gedung Sekolah SMP Negeri di Desa mereka	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		masyarakat warga Nagasaribu Kec.Siborongborong Kab.Tapanuli Utara meminta kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi agar dapat merehab gedung SD 173289 Nagasaribu	Kabupaten Tapanuli Utara	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Sarana dan Prasarana Pendidikan di Pandan sangat kurang , sehingga masyarakat Pandan menyekolahkan anaknya keluar dan ini sangat membutuhkan biaya , diharapkan kepada Pemkab agar memperhatikan dan mengutamakan pembangunan sekolah di Pandan	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Anak-anak Masyarakat di Kecamatan Sigumpar banyak yang merantau dikarenakan menempuh jenjang sekolah yang lebih tinggi, hal ini	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan

		disebabkan jarak sekolah yang cukup jauh dari rumah mereka dan alasan lain karena mereka ingin mengecam pendidikan yang lebih baik.			
		Keadaan sekolah di Daerah ini masih banyak yang memprihatinkan, demikian juga para Guru masih sangat minim.	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Masyarakat sangat mengharapkan adanya perbaikan Sekolah dan penambahan Ruang Kelas Baru, penambahan fasilitas sekolah, mobilier sekolah.	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Sangat dibutuhkan tenaga Guru yang Profesional agar dengan demikian masyarakat tidak perlu sekolah jauh-jauh ke Kota ataupun merantau. Di Desa ini masih banyak Guru yang honor.	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Tenaga Guru Pendidikan dan pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) ORCHID memohon bantuan kepada perlengkapan pembelajaran PPAUD ORCHID, Perbaikan Alat Permainan sangat minim, untuk itu PPAUD ORCHID ini membutuhkan : - Perbaikan Alat Permainan. - Penambahan Perlengkapan Pembelajaran. - Penambahan Alat Permainan. - Alat Transportasi untuk mengantar dan menjemput anak murid yang sesuai. - Honor Guru PAUD untuk tiga (3) orang.	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Masyarakat di Huta Op. Raja Hutapea Desa Pardinggaran Kec. Lagu Boti Kabupaten Toba Samosir menyampaikan Kondisi Pendidikan di Kabupaten Toba Samosir bahwa pada saat ini Paket C sudah ditiadakan karena tidak ada lagi	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan

		dana dari Provinsi. Sebenarnya keinginan masyarakat Paket C tetap dilanjutkan karena selama ini pastinya terbantu kepada siswa yang mengikuti paket C. Untuk itu diharapkan ada kebijakan Pemerintah untuk melanjutkan Paket C dimaksud			
		Masyarakat Desa Pardinggaran meminta agar Paud dapat dibuka kembali oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Masyarakat Desa Pardinggaran memohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menambah ruangan kelas tentunya diperlukan pembangunan bertingkat. Kebutuhan untuk bangunan bertingkat dananya sangat besar.	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Masyarakat Desa Natolu Tali secara khusus meminta agar jalan ke sekolah Dasar Batu Gaja di Desa Natolu Tali diperbaiki dan dilakukan pengerasan. Jalan tersebut selama ini sering digunakan oleh pelajar mencapai sekolahnya, namun jika terjadi hujan, jalan tersebut sering tergenang banjir sehingga menghambat siswa untuk belajar di sekolahnya	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Masyarakat desa Hutnamora melalui Sekdes Hutnamora meminta agar semua jalan menuju SMA Hutnamora Kec. Silaen dan SD negeri yang saat ini sudah rusak perlu dilakukan perbaikan secepatnya, jalan tersebut sering banjir jika terjadi hujan sehingga menghambat kelancaran siswa ke sekolah, mereka berharap pemerintah secepatnya memperbaiki jalan tersebut.	Kabupaten Toba Samosir	APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas Pendidikan

		Masyarakat Desa di Kecamatan Kolang mengharapkan agar sarana dan prasarana olah raga yang selama ini seperti tidak pernah menjadi perhatian Pemerintah supaya kembali digalakkan. Hal ini selain untuk menyehatkan masyarakat, juga agar terjalin hubungan komunikasi yang baik antar sesama warga khususnya para pemuda. Begitu juga dengan adanya kegiatan olah raga maka diharapkan akan mengurangi tindak kejahatan yang selama ini sudah memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah	Kabupaten Tapanuli Tengah	APBD Kabupaten	Dispora
		Permohonan Bantuan, Rehab/Pembangunan Gedung Sekolah Minggu Gereja HKBP Tambunan, Desa Lumban Pea Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir	Kabupaten Toba Samosir	APBD Provinsi	Dinas Sosial
		Permohonan Bantuan Dana untuk pembangunan Gereja GKPI Resert khusus Tambuna. Karena keterbatasan dana dimohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar berkenan memberikan bantuan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).	Kabupaten Toba Samosir	APBD Provinsi	Dinas Sosial
		Mohon bantuan dana untuk pembangunan HKBP Dolok Nauli II di Dusun Parluasan desa Lumban Rau Utara Kec. Nassau Kabupaten Toba Samosir yang saat ini merencanakan renovasi Gereja dan Pembangunan satu unit Rumah dinas Pimpinan /Guru Jemaat HKBP Dolok Nauli II Resort JUDIKA dengan biaya sebesar Rp.344.500.000,-	Kabupaten Toba Samosir	APBD Provinsi	Dinas Sosial
		Permohonan bantuan, Pembangunan Gereja HKBP Estomihi Ressort Baruara, yang berada di	Kabupaten Toba Samosir	APBD Provinsi	Dinas Sosial

		Jln.Pagaraji, Desa Baruara Kec. Balige kabupaten Toba Samosir			
		Permohonan bantuan Pembangunan Gereja GKPI Sibuntuon Ressort Patane Desa Sibuntuon Kec. Uluan Kabupaten Toba Samosir	Kabupaten Toba Samosir	APBD Provinsi	Dinas Sosial
		Permohonan bantuan untuk pembangunan Gereja HKBP Paronan nagodang resort lagu Boti Desa pardinggaran Kec. Laguboti kabupaten Toba Samosir	Kabupaten Toba Samosir	APBD Provinsi	Dinas Sosial
		Masyarakat dan Jemaat HKI Dolok Saribu Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara sangat mengharapkan adanya bantuan sosial pembangunan Gereja HKI Dolok Saribu. Menurut informasi dari Pengurus Gereja bahwa pada tahun 2014 sudah dibuat proposal untuk bantuan pembangunan Gereja tersebut, namun terkendala karena adanya Pemilu	Kab. Tapanuli Utara	APBD Provinsi	Dinas Sosial
		Keberadaan PT. TPL sudah cukup lama, namun keberadaannya belum mempunyai arti apa-apa bagi masyarakat di Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara. Hal tersebut disebabkan karena bantuan CSR dari PT. TPL belum pernah dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat sangat mengharapkan agar PT. TPL pada tahun 2015 CSRnya diberikan ke desa mereka	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Masyarakat di Desa Golat Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara mengeluhkan pembagian Balsem dan raskin tidak tepat sasaran	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Masyarakat di Desa Sampean Kecamatan	Kab. Humbang	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial

		Doloksanggul Kabupaten Humbahas berharap agar pembangunan rumah ibadah dapat diteruskan, agar masyarakat semakin semangat dan rajin untuk datang beribadah. Jika masyarakat semangat dan rajin beribadah maka akan menambah dan menguatkan iman kepercayaan masyarakat	Hasundutan		
		Masyarakat Kecamatan Parmaksian khususnya Desa Lumban Sitorus menyampaikan aspirasinya bahwa tanah mereka yaitu kawasan Jior Sisadasa dan Silosung yang terletak di Silosung Sosor Ladang Desa Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian seluas 46 Ha telah dikuasaisecara sepihak oleh PT. TPL. Masyarakat meminta agar PT. TPL mengembalikan tanah ulayat tersebut dan turut memberikan surat-surat tuntutan dan dokumen tanah milik warga Lumban Sitorus kepada Sarma Hutajulu, S.H. untuk dapat diperjuangkan melalui Lembaga Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara.	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Biro Pemum
		Masyarakat meminta agar pemerintah membuat peta dan sertifikasi tanah untuk menghindari terjadinya konflik sesama masyarakat karena kaburnya tapal batas tanah sesama mereka.	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Biro Pemum
		Masyarakat Desa di Kecamatan Kolang mengharapkan agar sarana dan prasarana olah raga yang selama ini seperti tidak pernah menjadi perhatian Pemerintah supaya kembali digalakkan	Kab. Tapanuli Tengah	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dispora

		Permohonan Bantuan, Rehab/Pembangunan Gedung Sekolah Minggu Gereja HKBP Tambunan, Desa Lumban Pea Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir.	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos
		Permohonan Bantuan Dana untuk pembangunan Gereja GKPI Resert khusus Tambunan. Kondisi Gedung Gereja GKPI Resert khusus tambunan tidak lagi memadai untuk menampung Anggota Jemaat untuk melaksanakan Ibadah karena kondisi bangunan yang sempit dan konstruksi bangunan yang sudah lapuk dan bocor sehingga warga Jemaat merasa tidak nyaman pada saat melaksanakan Ibadah / Kebaktian	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos
		Mohon bantuan dana untuk pembangunan HKBP Dolok Nauli II di Dusun Parluasan desa Lumban Rau Utara Kec. Nassau Kabupaten Toba Samosir	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos
		Permohonan bantuan, Pembangunan Gereja HKBP Estomihi Ressort Baruara, yang berada di Jln.Pagaraji, Desa Baruara Kec. Balige kabupaten Toba Samosir.	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos
		Permohonan bantuan Pembangunan Gereja GKPI Sibuntuon Ressort Patane Desa Sibuntuon Kec. Uluan Kabupaten Toba Samosir.	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos
		Permohonan bantuan untuk pembangunan Gereja HKBP Paronan nagodang resort lagu Boti Desa pardinggaran Kec. Laguboti kabupaten Toba Samosir	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos
		Masyarakat dan Jemaat HKI Dolok Saribu Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara sangat mengharapkan adanya bantuan sosial pembangunan Gereja HKI Dolok Saribu.	Kab. Tapanuli Utara	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos

	Menyangkut Pembangunan rumah ibadah, masyarakat berharap agar pembangunan rumah ibadah ini dapat diteruskan,	Kab. Humbang Hasundutan	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinsos
	Traktor besar 5 Unit agar masyarakat dapat membuka lahan perkebunan juga untuk Desa Sigumpar Julu, Huta Nagodang dan Sigumpar Tengah.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Hand Traktor 15 Unit untuk Desa Sigumpar Julu dan Sigumpar Tengah.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Zetor 3 Unit untuk 3 Kelompok Tani di Desa Sigumpar Julu.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Bantuan pupuk bersubsidi bagi para kelompok Tani.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Bantuan bibit Unggul yang sesuai untuk iklim dan tekstur tanah di Kecamatan Sigumpar	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Bibit Jeruk, Jagung, Melon, Semangka, kacang@an dll.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
	Para penyuluh pertanian juga sangat diharapkan para petani.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Pembukaan Jalan Usaha Tani.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Pembangunan Irigasi Baru dan Tali Air.	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Pembuatan Check Dum dll	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
	Bantuan bibit Kerbau dan ternak	Kec. Sigumpar, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan
	Pengadaan bibit ternak	Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan

		Perlu dilakukan Pembenahan saluran air sehingga pengaturan air yang mengalir ke persawahan menjadi merata dan maksimal serta mengharapkan bantuan untuk Pembangunan terhadap Irigasi yang kurang perawatannya dan masih terdapat irigasi yang belum permanen. Untuk itu perlu penanganan yang serius terhadap penangan Irigasi, sebab masih ada sawah yang belum mendapatkan air secara merata bahkan terdapat lahan produktif menjadi lahan tidur akibat saluran air tidak dibangun secara permanen. Ada 2 aliran sungai yang dapat dialirkan airnya tetapi itu adalah kewenangan Provinsi Sumatera Utara sehingga masyarakat berharap ada tindakan dari Pemerintah Provinsi.	Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Bantuan bibit ternak	Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan
		Pengembangan pariwisata	Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pariwisata
		Penyuluh perlu dilibatkan agar masyarakat memahami keberuntungan dan kerugian akibat dampak dari pola tanam yang tidak teratur.	Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Bakorlu
		Masyarakat melalui Kepala Desa Lumban Binanga berharap agar Pemerintah Provinsi melakukan pengadaan bibit padi, mesin handtractor	Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Masyarakat melalui Kepala Desa Sintong Marnipi berharap agar dilakukan pengadaan bibit padi dan handtractor. Lebih spesifik, masyarakat meminta dibuat irigasi di 5 desa sekitar Sintong Marnipi. Masyarakat mengaku bahwa sumber air semakin berkurang karena pohon-pohon sebagai	Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian

		penyimpan air ditebangi oleh Perusahaan PT. TPL (Toba Pulp Lestari) yang dulu bernama PT, Inti Indorayon Utama.			
		Dari desa Pardinggaran, masyarakat meminta agar dilakukan pembukaan jalan ke Desa Sitoluama sebagai jalan ring road Danau Toba. Masyarakat juga meminta agar Dinas Perikanan Provinsi melakukan pembinaan kelompok perikanan untuk mengganti konsep keramba apung yang cenderung mencemari air Danau Toba.	Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perikanan
		Dari UPT Dinas Pertanian Tobasa meminta agar pemerintah melakukan pengendalian hama tanaman, karena saat ini penyakit tanaman jenis blas meningkat. Lebih spesifik masyarakat meminta agar pemerintah Provinsi mengkaji perlunya dibangun suatu laboratorium pertanian di Kec. Laguboti agar menghasilkan suatu produk untuk membasmi hama tanaman. Masyarakat juga meminta agar dilakukan pendampingan kelompok tani atau asosiasi kelompok tani untuk meningkatkan hasil pertanian,	Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Masyarakat sangat mengharapkan agar Pemerintah memberikan Pengadaan bibit-bibit tanaman yang unggul , bagus dan berkuwalitas seperti bibit Jagung, Padi, bawang dan lain-lain karena bibit ini sangat sulit untuk didapat.	Kec. Simanindo, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan
		Masalah penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Simanindo tidak lancar dan sangat sulit didapat.	Kec. Simanindo, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan / Pertanian

		Masyarakat Simanindo sangat mengharapkan bantuan traktor dari Pemerintah untuk Pengadaan alat-alat pertanian karena sangat mendukung bagi masyarakat, karena di Kecamatan simanindo ini terdiri dari dataran rendah dan tinggi. Maka dengan pengadaan Hand Traktor masyarakat dapat mengelola sawah untuk meningkatkan produktifitas	Kec. Simanindo, Kab. Toba Samosir	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Untuk itu masyarakat sangat mengharapkan perhatian dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk pengadaan traktor dan pengadaaan irigasi di daerah mereka agar dapat mengairi lahan persawahan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat desa Pansurbatu dapat lebih meningkat dan kehidupannyapun agar dapat semakin sejahtera.	Kec. Pagaran, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pada umumnya mata pencaharian masyarakat adalah petani, sehingga sangat menyulitkan bagi petani tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari belum lagi untuk keperluan sekolah anak-anaknya. Untuk itu masyarakat sangat mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan bantuan ternak kepada masyarakat agar masyarakat dapat meningkatkan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.	Kec. Pagaran, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pengadaan delapan (8) CHECK DUM di semua Dusun Desa Hutabulu dan Desaq Pohan Jae.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian

		Traktor besar 5 unit untuk Desa Hutabulu dan Desa Pohan Jae.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Hand Traktor 5 unit untuk Desa Hutabulu dan Desa Pohan Jae.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pengadaan Bibit Unggul yang sesuai dengan daerah dan iklim di Desa Hutabulu dan Desa Pohan Jae.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Bantuan Pupuk.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan / Pertanian
		Masyarakat juga menyampaikan masalah perikanan dan peternakan, untuk itu Pemerintah diharap dapat membantu Masyarakat berupa Bibit Ikan Nila bagi Kelompok Tani di dua Desa ini, bantuan bibit Kerbau, Bantuan bibit Babi, Bantuan bibit Itik dan Penyuluh Peternakan agar dapat sejalan dengan pembinaan para Peternak.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perikanan
		Petani Dusun I s.d IV Desa Pohan Julu Kec.Siborongborong Kab.Taput dalam rangka meningkatkan produksi tani dan perekonomian petani mohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan bantuan Pengadaan Bibit ternak Kerbau sebanyak 100 ekor.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Dalam rangka meningkatkan produksi tani dan meningkatkan perekonomian petani yang ada di Desa Paniaran Kec.Siborongborong Kab.Taput melalui Reses Anggota DPRD-SU ini meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian

		untuk dapat memberikan bantuan Bibit Cabe 5.000 batang, Bibit Wortel Unggul 5.000 batang.			
		Petani Desa Silaitlait Kec.Siborongborong Kab.Taput mohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan bantuan bibit kopi sebanyak 15.000 batang.	Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Petani Dusun I s.d III Desa Silaitlait dalam rangka meningkatkan produksi tani dan perekonomian petani mohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan bantuan Pengadaan Bibit Ikan Mas sebanyak 8.000 ekor.	Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Petani Dusun II Pohan Julu Kec.Siborongborong Kab.Taput dalam rangka meningkatkan produksi tani dan perekonomian petani mohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan bantuan Pengadaan Hand Tractor sebanyak 1 unit.	Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Petani Desa Sigumbang Kec.Siborongborong Kab.Taput dalam rangka meningkatkan produksi tani dan perekonomian petani mohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan bantuan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung 3 unit, dan Bibit Ternak Ikan Mas sebanyak 20.000 ekor.	Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Penduduk Dusun I s.d V Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbahas memohon melalui reses ini agar pemerintah membantu menyediakan rumah kompos dan pemerintah dapat mengendalikan harga hasil produk pertanian seperti cabe dan lain-lain.	Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Penduduk Siborongborong I dan Pohan Jae, dalam	Kec. Siborong-	ABPN/APBD	Dinas Perkebunan

		rangka pengendalian lahan kosong memohon kepada Pemerintah Provinsi melalui Kegiatan Reses Anggota DPRD-SU ini Bibit Pohon Suren/Mahoni sebanyak 50.000 batang.	borong, Kab. Tapanuli Utara	Prov/APBD Kab.Kota	
		Demikian juga Desa Sigumbang, Pohan Tonga, Lobu Siregar memohon kepada Pemerintah Provinsi melalui Kegiatan Reses Anggot DPRD-SU ini Bibit Pohon Pinus/Mahoni masing-masing 15.000 batang.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Dalam rangka menghutankan kembali dan pengendalian lahan yang kosong di Kecamatan Siborongborong Penduduk Dusun II, III dan IV Desa Silaitlait memohon kepada Pemerintah Provinsi melalui Kegiatan Reses Anggot DPRD-SU ini Bibit Pohon Pinus sebanyak 45.000 batang, Pohon Mahoni 10.000 batang, Pohon Suren 10.000 batang	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Penduduk Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kab.Tapanuli Utara sudah lama mendambakan penerangan listrik seperti desa lainnya yang sudah menikmati penerangan listrik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Oleh karenanya melalui Kegiatan Reses Anggota DPRD-SU ini meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat memberikan bantuan Pemasangan Jaringan Listrik sebanyak 36 tiang.	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Distamben
		Penduduk Desa Silaitlait Kec.Siborongborondg melalui Reses Anggota DPRD-SU ini meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat memberikan bantuan Pemasagan Jaringan Listrik	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Distamben

		di Dusun V dan VI Silaitlait sebanyak 12 tiang. Pengadaan Lampu Jalan di Dusun I s/d IV sebanyak 29 titik.			
		Melalui Reses Anggota DPRD-SU ini penduduk meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat memberikan bantuan Pemasagan lampu Jalan di Siampapaga Sitampurung 5 titik, Hutagurgur Sitampurung 3 titik, Sitampurung Toruan 6 titik, Silaban Dolok Sitampurung 2 titik, Sitonggitonggi Sitampurung 2 titik	Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Distamben
		Masalah penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di kecamatan Siatas Barita tidak lancar dan sangat sulit di dapat.	Kec. Siatas Barita, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian/Perkebunan
		Masyarakat mengharapkan agar Pemkab memperhatikan dan mengembangkan Usaha bertenen , para penenun sekarang ini kewalahan dalam pemasaran karena hasilnya tidak sesuai dengan pekerjaannya dan dirasakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari padahal ini merupakan mata pencaharian sehari-hari. Dimohon untuk diperhatikan.	Kec. Siatas Barita, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Koperasi / Disperindag
		Masyarakat mengeluhkan Sangat sulit dalam memperoleh pengurusan izin dalam membuka usaha di Kabupaten Tapanuli Utara.	Kec. Siatas Barita, Kab. Tapanuli Utara	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	BPPT
		Masyarakat Desa Hutajulu Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dahulu mempunyai kolam ikan Mas dan ikan Nila seluas 2 Ha. Mengingat tidak adanya perhatian atau	Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perikanan

		bantuan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga kondisi kolam tersebut saat ini sudah tidak terpelihara lagi dan ikan yang dipeliharapun sudah tidak ada lagi. Untuk itu masyarakat melalui Kelompok Reses sangat mengharapkan adanya bantuan pengadaan Benih Ikan Mas dan Ikan Nila serta bantuan untuk pengorekan kolam agar masyarakat dapat kembali memlihara ikan untuk penambahan penghasilannya			
		Masyarakat mengharap bantuan bibit tanaman keras dan Holtikultura termasuk kopi, jeruk manis, di Desa ini sangat bagus tanaman jeruk manis. Kemudian pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Sampean	Kec. Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Masyarakat Desa Sampean mengharapkan ada bantuan Pemerintah untuk memberikan ternak kepada masyarakat, karena dari kotoran ternak sangat banyak membantu masyarakat untuk membuat pupuk kompos untuk dibuat ke tanaman.	Kec. Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Peternakan
		Mengenai pelepasan SK 44, ada 6 Desa di Kecamatan Pasaribu Tobing termasuk SK 44 atau Kawasan Hutan Lindung. Masyarakat sangat mengharap bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah tentang kejelasan dan pelepasan SK 44, agar masyarakat tidak terganggu tidak takut dan tidak bimbang untuk mengerjakan dan mengelola	Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Kehutanan

		lahannya.			
		masyarakat sangat mengharapkan bantuan pemerintah untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani, Bantuan Pengadaan bibit tanaman karet, kopi, sawit, coklat dan bisa dapat memberikan pinjaman lunak kepada para petani sebelum hasil pertanian berproduksi.	Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian / Perkebunan
		Masyarakat mengeluhkan peredaran pupuk bersubsidi sangat langka di kecamatan pandan dan mengharapkan kepada pemerintah agar menyediakan Pupuk bersubsidi.	Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Pasar dipandan sampai saat ini belum ada perbaikan, pedagang berdagang dipinggir –pinggir jalan yang sering membuat kemacetan dan ini membuat kota pandan kelihatan kumuh dimana pasarnya tidak teratur Masyarakat memohon kepada pemkab agar segera mencari solusi dan membangun pasar dan memindahkan pasar yang lama ke pasar yang baru.	Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perindag
		Peredaran Pupuk yang bersubsidi agar sampai langsung ke kelompok-kelompok tani yang ada di pedesaan serta memperbanyak kios pupuk bersubsidi terus diteriakan oleh para petani sejak dahulu	Kec. Kolang, Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		masyarakat sangat mengharapkan kepada pemerintah, agar pola pertanian yang mereka lakukan selama ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan alat teknologi modern yaitu berupa traktor	Kec. Kolang, Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian

		Mengingat jenis penyakit tanaman pertanian terus bertambah dan berkembang, begitu juga perlunya system pola tanam yang dianjurkan, jadwal dan jenis pupuk yang digunakan, maka keberadaan PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) sangat diharapkan	Kec. Kolang, Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Pertanian
		Untuk itu melalui Kelompok Reses Daerah Pemilihan Sumut IX mengharapkan agar pemerintah dapat segera menstabilkan harga karet kembali, agar kehidupan petani penggalas karet dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.	Kec. Kolang, Kab. Tapanuli Tengah	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perkebunan
		Nelayan Sibolga Tapteng berharap agar Pemerintah memberikan perhatian terutama dalam alat penangkapan ikan	Kota Sibolga	ABPN/APBD Prov/APBD Kab.Kota	Dinas Perikanan
		Peningkatan sarana air minum	Desa Sigumpar Julu kec. Sigumpar Kab. Tobasa	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas drainase untuk pertanian	Desa Sibarani Sitangkola kec. Laguboti kab. Tobasa	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas drainase untuk pertanian	Desa Op. Raja Hutapea kec. Laguboti kab. Tobasa	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas drainase untuk pertanian	Desa Aruan kec. Laguboti kab. Tobasa	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas drainase untuk pertanian	Desa Sibarani nasampulu kec.	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman

			Laguboti kab. Tobasa		
		Peningkatan kualitas drainase untuk pertanian	Kec. Simanindo kab. Samosir	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas drainase untuk pertanian	Kec. Pagaran kab. Tapanuli Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas drainase untuk pertanian	Desa Hutabulu dan Desa Pohan Jae kec. Siborong borong kab. Tapanuli Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Pohan Julu Kec. Siborong borong kab. Tapanuli Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Sampean kec. Dolok Sanggul kab. Humbahas	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Kel. Kolang Nauli kec. Kolang kab. Tapanuli Tengah	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli Tengah	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Kec. Andian Koting Kab. Tapanuli Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sumur bor	Kec. Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Kec. Uluan, Kec.	APBN/APBD Provsu	Dinas Penataan Ruang

			Pintu Pohan, Kec. Balige Kab. Toba Samosir	(BKP)	dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Kec. Pangururan Kab. Samosir	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pengaspalan Jalan Provinsi dari Simpang Silimbat sampai ke Silaen.	Kecamatan Sigumpar, Kab. Toba Samosair	APBD Prov SU	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan Gompar Sidais ke Parmalim di Sigumpar Julu.	Kecamatan Sigumpar, Kab. Toba Samosair	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Negara.	Kecamatan Tampahan, Kab. Toba Samosir	APBN	Dinas Bina Marga
		Lanjutan Pemb. Jalan Lintas Balige- Lintongni Huta – Meat	Kecamatan Tampahan, Kab. Toba Samosir	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Dinas Bina Marga
		Lanjutan Pemb. Jalan Lintas Balige- Lintongni Huta – Meat	Kecamatan Tampahan, Kab. Toba Samosir	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Dinas Bina Marga
		Pemb./Pelebaran Jalan menuju Pantai Pangkodian.	Kecamatan Tampahan, Kab. Toba Samosir	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jembatan di Sigiringgiring.	Kecamatan Tampahan, Kab. Toba Samosir	APBD Kabupaten/Prov dan APBN atau BKP	Dinas Bina Marga

		Pemb. Jalan Negara Balige – Lagu Boti di Desa Aruan Kec. Lagu Boti.	Kecamatan Laguboti, Kab. Toba Samosir	APBN	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Pardinggaran-Huta Siarung arung.	Kecamatan Laguboti, Kab. Toba Samosir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb./Pengaspalan jalan siraja Deang Dolok-Op. Raja Hutapea + 300 m.	Kecamatan Laguboti, Kab. Toba Samosir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembukaan jalan ke Desa Sitoluama sebagai jalan ring road Danau Toba.	Kecamatan Laguboti, Kab. Toba Samosir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan di Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige	Kec. Balige, Kab. Toba Samosir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Lanj. Penahanan Tebing Sungai Jembatan Sigeokgeok Desa Lumban Gaol Kecamatan Balige.	Kec. Balige, Kab. Toba Samosir.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan desa Hutnamora, menuju SMA dan SD negeri Hutnamora Kec. Silaen.	Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb./pengaspalan jalan sepanjang 2,5 Km di Desa Lumban Dolok Kec. Silaen.	Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
			Kecamatan Simanindo.		
		Pemb. Jalan di JL Lingkar Tuk-tuk kec. Simanindo	Kec. Simanindo, Kab Toba Samosir	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Desa	Kecamatan Pagaran, Kabupaen Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
			.		
		Pemb. jalan di Desa Lobu Sunut Kecamatan	Kecamatan	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		Parmonangan.	Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara	Kab.Kota	
		Pembukaan Jalan Usaha Tani dari Kampung Sosor Lobu ke Kampung Pangkirpansepanjang ± 1.000 meter, Kec.Siborongborong.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perkerasan jalan di Dusun 3, Lokasi si Mataniari sep. ± 400 meter. Kec.Siborongborong.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Usaha Tani dari Kampung Si Tolu Bahal ke Kampung Siagiandi Dusun 1 Desa Pohan Julu 1, sep. 700 meter Kec.Siborong-borong.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb./pengaspalan jalan Dusun II Sianjur Desa Pohan Julu sepanjang 1,5 Km.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Pariksabungan sepanjang 2 Km.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaiki Drainase sepanjang 1 Km.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perkerasan Jalan Hasang Pariksabungan sepanjang 3 Km.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perkerasan Jalan Ledong Pariksabungan sepanjang 400 m.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan Jalan Sitabotabo Toruan Pariksabungan sepanjang 500 m.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan Jalan Ulunihuta Sigumbang 1 Km,	Kecamatan	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		Kec.Siborongborong.	Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	Kab.Kota	
		Perkerasan jalan Desa Lumban Tobing ke M.Tabu Lumban Tongatonga, sep.1.050 m Kec.Siborong-borong.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan Silaitlait Julu ke Dusun III Silaitlait sep. 1,5 Km.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalann jalan Sitonggitonggi Sitampurung sepanjang 400 M,	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Jl.Siampapaga Nauli Sitampurung sepanjang 200 m,	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Jl.GPP Siampapaga Sitampurung sepanjang 300 M,	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Jl.Sibagaol Sitampurung sepanjang 300 m, serta Jl.Peanauli Sitampurung 300 m.	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan Dusun Siaro Soborong-borong I sepanjang 1 Km, Pengaspalan Jl.Dusun IV Siaro sepanjang 1 Km, Pengaspalan Jl.Dusun II Siaro sepanjang 60 m, Pengaspalan Jl.dari Desa Siaro ke Desa Siborongborong II sepanjang 1 Km Koso	Kecamatan Siborong-borong, Kab Tapanuli Utara.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan dari Doloksanggul menuju Sidikalang Kabupaten Dairi	Kec Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jemb. Dusun II Lumban Tumpal Desa	Kec Dolok Sanggul	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		Sampean Kec. Doloksanggul.	Kabupaten Humbang Hasundutan	Kab.Kota	
		Pengaspalan Jalan di Dusun I dan II sepanjang 3000 m	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Peningkatan Mutu Jalan Rabat Beton di Dusun I dan III sepanjang 4500 m.	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembukaan Jalan Usaha Tani di Dusun I dan III sepanjang 4000 m.	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun I ke Dusun III sepanjang 2500 m	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perb. jalan Pasaribu Tobing sampai dengan Desa Sipakpahi,	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Titi Gantung sepanjang 61 m, Jalan Rabat Beton (Sigompul) di Dusun IV sepanjang 690 m.	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jembatan Raming / Gantung di Dusun I sepanjang 70 m x 2 m Desa Pasaribu Tobing.	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jembatan Raming menjadi Jembatan Permanen, Desa Aeknadua.	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jembatan untuk sarana transportasi penyeberangan.	Kec. Pasaribu Tobing, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

		Perbaiki jalan-jalan di Kecamatan Kolang.	Kec. Kolang, Kab.Tapanuli Tengah	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
	Dapil X (Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun)	Meminta perhatian pemerintah kepada pengangguran untuk diberikan keterampilan dn kursus-kursus gratis untuk pemuda-pemudi yang putus sekolah di desa kebun sayur kec. Sidamanik kab. Simalungun	Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun	APBD Pemko/Kab	Dispora
		Bantuan Raskin untuk masyarakat miskin supaya lebih dioptimalkan	Kab. Simalungun	APBN	Dinas Sosial
		Pelatihan buat anak-anak yang terkena narkoba, gangguan jiwa, da anak jalanan	Kab. Simalungun	APBD Prov/APBD Pemkab	Dinas Sosial
		SD Negeri yang ada di desa Sinaman Labah membutuhkan tambahan guru, karena guru yang ada hanya 2 orang PNS dan 2 orang Honorer Kec. Dolok Pardamean	Kab. Simalungun	APBD Prov	Dinas Pendidikan
		Meminta bantuan Mobiler, karena saat ini satu meja di gunakan untuk 3 orang di SD N yang ada di desa sinaman labah	Kab. Simalungun	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		SD Negeri yang ada di sigodang barat mengharapkan meubilair sebanyak 20 unit dan 7 buah lemari di kec. Panei Kab. Simalungun	Kab. Simalungun	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		belum ada para siswa SD mendapatkan Bana BOS dan juga kartu pintar di desa Nagori Sejahtera Kec. Siantar Kab. Simalungun	Kab. Simalungun	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		Belum ada bangunan Sekolah Dasar di desa Nagori Gorad Kec. Sidamanik Kab. Simalungun	Kab. Simalungun	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		bantuan bea siswa untuk anak-anak yang kurang	Kab. Simalungun	Bantuan Keuangan	Dinas Pendidikan

		mampu		Provinsi (BKP)	
		Perlu dibentuknya sekolah percontohan di kota pematang siantar	Kota Pematang Siantar	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		Guru honorer belum menerima bantuan keuangan dari pemprov su, dan meminta kejelasan	Kota Pematang Siantar	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		Mohon Pendidikan yang ada di Kota Pematang Siantar dibenahi sehingga nama besar kota pematang siantar sebagai kota pendidikan benar-benar terwujud	Kota Pematang Siantar	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		Bantuan pemerintah terhadap pengembangan gedung sekolah PAUD di kec. MARIHAT kota pematang siantar	Kota Pematang Siantar	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		Meminta pemerataan kartu pintar	Kota Pematang Siantar	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Dinas Pendidikan
		Dikecamatan Banda , tepatnya di kota perdagangan telah ada bangunan Rumah Sakit dengan kondisi yang memadai , namun peralatan dan mobile belum mendukung.	Kab. Simalungun	APBN	Dinas Kesehatan
		Bantuan peralatan pendukung belajar, meminta dukungan pemerintah Sumut untuk mengalokasikan bantuan pengadaan 1 unit kendaraan komersial roda 4 untuk AMIK Tunas Bangsa Pematang Siantar yang sering menerima kunjungan berbagai Perguruan Tinggi dalam Negeri maupun Luar Negeri	Kab. Simalungun	APBD Prov/APBD Kab	Dinas Kesehatan
		Pengurusan kartu BPJS Kesehatan yang dibuat pemerintah agar di umumkan secara transparan di setiap kantor kelurahan	Kab. Simalungun	APBD Prov/APBD Kab	Dinas Kesehatan

		Kurang maksimalnya pelayanan pihak rumah sakit yang melayani pasien BPJS kelas III di Kota Pematang Siantar	Kota Pematang Siantar	APBD Prov/APBD Kab	Dinas Kesehatan
		Mengusulkan pembangunan rumah sakit Rehabilitasi dan Rumah Sakit Pasca Rehabilitasi	Kota Pematang Siantar	APBD Prov/APBD Kab	Dinas Kesehatan
		Meminta perhatian pemerintah kepada pengangguran untuk diberikan keterampilan dan kursus-kursus gratis untuk pemuda-pemudi yang putus sekolah di desa kebun sayur kec. Sidamanik kab. Simalungun	Kab. Simalungun	APBD Pemko/Kab	Dinas Tenaga Kerja
		Pencairan Dana Desa di TA 2014 untuk terima IV bingkisan 20 % yang jumlahnya bervariasi antara Rp. 10.000.000 - Rp. 13.000.000 per desa, yang tidak cair, sementara pertanggung jawaban APBD T.A 2014 sudah berakhir.	Kab. Simalungun	APBD Prov	Dinas Sosial
		Pembangunan Balai GKPS	Kab. Simalungun	APBD Prov	Dinas Sosial
		Masyarakat Sigodang Barat juga mengharapkan agar masalah pembebasan lahan dapat diselesaikan.	Kab. Simalungun	APBD Prov	Dinas Sosial
		Masyarakat Sigodang Barat menghgharapkan masalah pembebasan lahan dapat diselesaikan	Kab. Simalungun	APBD Prov	Biro PEMUM
		Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya pengurusan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, KTP, BPJS dan Pengurusan Surat Keterangan Miskinpun masih dikenakan biaya, oleh karena itu dimohonkan agar menjadi perhatian pihak Pemerintah	Kab. Simalungun	APBD Prov	Biro PEMUM

		Masyarakat menyampaikan mahal biaya pernikahan dimohon agar pihak Pemerintah melalui pihak yang terkait mensosialisasikan PP No 48 tentang Nikah Grastis bagi masyarakat miskin. Dan memberikan keterangan tentang criteria masyarakat miskin	Kab. Simalungun	APBD Prov	Biro PEMUM
		Di Nagori Simpang Pane Kec. Panombean Pane Kabupaten Simalungun Pengurusan kartu BPJS Kesehatan yang dibuat pemerintah agar di umumkan secara transparan di setiap Kantor Kelurahan	Kab. Simalungun	APBD Prov	Biro PEMUM
		Di Nagori Simpang Pane Kec. Panombean Pane Kabupaten Simalungun Pelayanan bantuan Raskin untuk masyarakat miskin supaya lebih dioptimalkan	Kab. Simalungun	APBD Prov	Biro PEMUM
		Dalam pertemuan juga disampaikan agar Pemko Pematang Siantar menertibkan Warnet-warnet karena jam operasional tidak terbatas sehingga menjadi tempat berkumpulnya anak-anak sekolah. Kalau perlu pemerintah mengeluarkan Perda untuk masalah izin operasional warnet tersebut	Kota Pematang Siantar	APBD Prov	Biro PEMUM
		Masyarakat juga menyampaikan kurang maksimal pelayanan pihak rumah sakit yang melayani pasien BPJS kelas III	Kota Pematang Siantar	APBD Prov	Biro PEMUM
		Jl. Pangaribuan No. 10 Kecamatan. Siantar Selatan Kota pematangsiantar Harga-harga sembako yang ada mohon dipantau sehingga tidak memberatkan masyarakat	Kota Pematang Siantar	APBD Prov	Biro PEMUM

		Tokoh Masyarakat mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Simalungun segera membentuk Badan Narkotika Nasional Simalungun karena peredaran Narkoba di Kecamatan Pematang Bandar sudah sangat meresahkan	Kab. Simalungun	APBD Prov	KESBANGPOL
		Perlu diaktifkan kembali Pos Kambling di setiap desa guna memantau anak-anak yang masih usia sekolah agar tidak berkeliaran di atas jam 10 malam	Kab. Simalungun	APBD Prov	KESBANGPOL
		Diharapkan kepada pihak Kepolisian ataupun pihak yang terkait agar melakukan razia terhadap anak-anak sekolah yang berada di Warnet pada jam sekolah	Kab. Simalungun	APBD Prov	KESBANGPOL
		Desa Nagori Sejahtera Kec.Siantar Kabupaten Simalungun Masyarakat juga menyampaikan tentang kurangnya kenyamanan anak-anak muda di Desa Nagori Sejahtera ini, mohon kiranya kepada pemerintah setempat supaya mengaktifkan atau dalam bentuk kegiatan di Desa tersebut	Kab. Simalungun	APBD Prov	KESBANGPOL
		Jl. Farel Pasaribu No. 30 Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Mohon keamanan bagi masyarakat supaya di tingkatkan karena akhir-akhir ini banyak pencurian sepeda motor, perampokan di pagi hari	Kota Pematang Siantar	APBD Prov	KESBANGPOL
		Jl. Pangaribuan No. 10 Kecamatan. Siantar Selatan Kota pematangsiantar Pembangunan pusat pasar yang ada di kota pematangsiantar seperti pasar Horas dan pasar Dwi Kora supaya lebih di	Kota Pematang Siantar	APBD Prov	KESBANGPOL

		tingkatkan kebersihan dan keamanan sehingga masyarakat yang harus membeli kebutuhan bisa lebih nyaman			
		Kabupaten Simalungun merupakan daerah pertanian namun para petani masih mengeluhkan akan sulitnya mendapatkan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan pertanian, dan oleh karenanya perlu perhatian lebih serius lagi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui <i>SKPD terkait dapat mengakomodir kebutuhan para petani tersebut melalui pembiayaan APBD Provsu setiap tahunnya, dengan tetap melakukan koordinasi dengan unsure Pemerintah Kabupaten Simalungun guna terukur akan kebutuhan dan tepat sasaran pembentukannya.</i>	Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian / Perkebunan
		Pupuk di Kecamatan Dolok Pardamean sangat kurang, padahal usul RDKK sudah dikirim tetapi realisasi tidak ada, sehingga hasil pertanian di daerah ini sangat kurang.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Masyarakat Kecamatan Dolok Pardamean sangat mengharapkan dibangunnya jalan produksi pertanian yang menyambungkan desa ke desa dari dusun ke dusun agar mempermudah hubungan antar daerah.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Dolok Pardamean, masyarakat mengharapkan agar diberikan bantuan bibit jagung NK 99 dan B 29.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Selain mengharapkan bantuan pupuk kimia berupa Urea, Za, Kcl, NPK Ponscha masyarakat	Kec. Dolok Pardamean, Kab	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan

		Kecamatan Dolok Pardamean juga mengharapkan pupuk organik, agar tanaman pertanian mereka dapat lebih baik dan memperoleh hasil pertanian yang berkualitas.	Simalungun		
		Masyarakat Kecamatan Dolok Pardamean meminta kepada Pemerintah agar memperhatikan penyaluran bibit, karena bibit yang beredar pada saat ini adalah bibit palsu.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Masyarakat Kecamatan Dolok Pardamean mengharapkan agar diberikan ternak babi, karena ternak babi yang sesuai di daerah tersebut.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Peternakan
		Kelompok Tani "Wanita Tani Bertama" Desa Sinaman Labah yang berjumlah 20 orang mengharapkan agar diberikan bantuan pupuk kimia (Urea, Za, Kcl dan NPK Ponscha) masing-masing jenis pupuk 1 sak per orang.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Kelompok Tani "Wanita Tani Bertama" mengharapkan tambahan modal koperasi yang pada saat ini sedang berjalan.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian / Koperasi
		Kelompok Tani "Mekar" Desa Bangun Pane mengharapkan agar berikan bantuan bibit jahe.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Masyarakat Desa Silaba Jaya mengharapkan pembangunan jalan usaha tani, pengadaan handtraktor dan pembuatan sumur bor di perladangan, karena apabila musim kemarau air sangat minim sehingga masyarakat tidak dapat menyirami pertaniannya.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Di bidang peternakan, masyarakat Desa Silaba Jaya mengharapkan bibit babi.	Kec. Dolok Pardamean, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Peternakan

		Masyarakat mengharapkan agar diberikan bibit coklat dan kopi ateng untuk menambah kesejahteraan masyarakat Sigodang Barat.	Kec. Panei, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Masyarakat sekitar Kecamatan Panei mengharapkan bibit ternak babi.	Kec. Panei, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Peternakan
		Diharapkan kepada Pemerintah agar memperhatikan harga jagung dipasaran tetap stabil.	Kec. Panei, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Selain lahan irigasi masyarakat Sigodang Barat juga mengharapkan agar diberi bantuan bibit kopi ateng, jagung, coklat.	Kec. Panei, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
				APBD Prov/ SKPD Teknis	
		Masyarakat Sondi Raya mengharapkan bibit jagung, jeruk.	Kec. Sondi Raya, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Masyarakat Sondi Raya mengharapkan bantuan modal untuk usaha pertanian.	Kec. Sondi Raya, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Agar Pemerintah memberikan bantuan modal untuk Kelompok Tani dan Ternak yang ada di Kecamatan Pematang Bandar.	Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Masyarakat Nagori Kandangan yang pada umumnya adalah Petani sangat berharap agar Irigasi yang ada di Pematang Bandar dapat segera diperbaiki karena merupakan Saluran Irigasi Induk yang mengairi persawahan sekitar 3000 Ha dan sudah banyak yang rusak dan saat ini musim kemarau sehingga pengairan lahan pertanian tidak maksimal dan berharap agar Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pemerintah Provinsi	Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinasn Pertanian

		Sumatera Utara segera memperbaikinya			
		Masyarakat memohon agar Pemerintah dapat memberikan bantuan alat pertanian berupa zeter, hand traktor, dan traktor sehingga hasil panen dapat meningkat dan kiranya masalah kelangkaan pupuk bersubsidi dan bibit-bibit berkualitas serta obat-obatan tanaman dapat diatasi.	Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinasn Pertanian / Perkebunan
		Masyarakat berharap bantuan untuk kelompok tani yang ada di desa mereka.	Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Masyarakat setempat mengharapkan penyuluhan-penyuluhan dari PPL lebih ditingkatkan.	Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Program asuransi pertanian untuk petani sangat di harapkan untuk segera terealisasi.	Kec. Huta Bayu, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Mohon bantuan bibit padi, jagung, bagi para petani	Kec. Huta Bayu, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	
		Mohon perbaikan irigasi pertanian yang ada di Kecamatan Huta Bayu Rja karena sudah banyak saluran irigasi rusak yang mengakibatkan tanaman padi tidak dapat tumbuh subur sehingga ada beralih menanam ubi atau jagung.	Kec. Huta Bayu, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Pupuk organik sangat sulit di dapatkan oleh petani dan mohon bantuan dari pemerintah	Kec. Huta Bayu, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Seperti tomat, cabe dan lain sebagainya harga jualnya turun, maka masyarakat kesulitan dalam memanfaatkan hasil pertanian tesebut, untuk mengatasi hal seperti ini dibutuhkan home	Kec. Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan

		industry pengelolaan hasil pertanian seperti pengelolaan tomat yang akan dibuat saos			
		jalan Usaha Tani Anjuk menuju Sintat Raya sepanjang ± 2000 meter.	Kec. Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		jalan Usaha Tani Sinta Raya menuju Siboras sepanjang ±2000 meter	Kec. Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		jalan Usaha Tani Sinta Raya menuju Siboras sepanjang ±2000 meter	Kec. Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Untuk mengendalikan harga hasil – hasil pertanian, seperti buah – buahan ataupun sayur – sayuran, maka masyarakat membutuhkan Koperasi ataupun pasar sayur	Kec. Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Karena hidup masyarakat menggantungkan hidup dari bertani, maka masyarakat membutuhkan bantuan berupa 40 ribu bibit jeruk unggul.	Kec. Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Perkebunan
		Untuk mempermudah petani dalam mengelola lahan pertanian maka dibutuhkan bantuan berupa Traktor.	Kec. Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Untuk memfungsikan ataupun mengaktifkan kembali ±600 Ha lahan persawahan maka perlu perbaikan jalan pertanian dan jalur irigasi di Desa Bawang Kec. Dolok Silau	Kec Dolok Silau, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Untuk meningkatkan pengetahuan bagi para petani maka diperlukan para penyuluh pertanian.	Kec Dolok Silau, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Masyarakat / petani sangat membutuhkan berupa bibit – bibit pertanian serta bibit ikan.	Kec Dolok Silau, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Perlu pembangunan irigasi untuk lahan persawahan ±500Ha dimana areal persawahan ini sudah tidak digunakan akibat jalur irigasinya tidak ada	Kec Dolok Silau, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian

		Untuk pendistribusian hasil pertanian dapat cepat sampai kepasar maka perlu peningkatan / pembangunan jalan usaha tani maupun jalan lingkungan yang ada di desa Cingkes	Kec Dolok Silau, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Untuk mendapatkan hasil pertanian yang cukup signifikan dibutuhkan pupuk, tetapi pupuk yang dibutuhkan petani sangat sulit didapatkan mohon kepada pihak yang terkait untuk dapat membantu para petani untuk mendapatkannya,	Kec Dolok Silau, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		masyarakat mengharapkan perhatian dari pemerintah baik dari Kabupaten maupun Provinsi supaya dapat memperdayakan kaum ibu-ibu di Kecamatan Siantar khusus nya Desa Nagori Sejahtera ini kiranya dapat bantuan seperti : Mesin Goreng Ubi, Pencecah Ubi, Mesin Jahit.	Kec. Siantar, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Biro Perekonomian / Disperindag
		Dalam pertemuan tersebut warga juga menyampaikan supaya lancar pola tanaman, mohon bantuan seperti Jetor, Lahan Penjemur Padi dan Mesin Penggiling Gabah untuk setiap kelompok tani dan juga masyarakat menginginkan bagaimana tentang tata tertib pola tanam	Kec. Siantar, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Dalam pertemuan tersebut masyarakat menyampaikan kelangkaan ketersediaan Elpiji serta harga nya yang sangat tinggi, maka sangat perlu pemerintah bersama PT Pertamina melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi kelangkaan atau melunjak harga elpiji.	Kec. Hantonduan, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Biro Perekonomian / Disperindag
		Warga desa Nagori Rambung menginginkan	Kec. Damanik, Kab.	APBD Prov/ SKPD	Dinas Pertanian

		bantuan alat tani karena masyarakat mayoritas petani, maka dengan itu masyarakat sangat mengharap perhatian dari pemerintah supaya masyarakat tidak lagi kesulitan untuk membutuhkan pupuk dan traktor.	Simalungun	Teknis	
		Masyarakat juga menginginkan bantuan bibit ternak, yang bisa membuat masyarakat mempunyai aktifitas dan meningkatkan kehidupan mereka.	Kec. Damanik, Kab. Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Peternakan
		Kiranya Pemerintah memberikan bantuan pelatihan dan penyuluhan pertanian agar hasil yang diperoleh petani lebih baik.	Kec. Sidamanik, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Para pemuda bermohon kiranya Pemerintah juga memperhatikan masalah pengangguran agar diberikan keterampilan dan kursus-kursus gratis untuk pemuda pemudi yang putus sekolah sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.	Kec. Sidamanik, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Biro Perekonomian
		Masyarakat meminta kepada Pemerintah untuk memberikan bantuan bibit-bibit dan pupuk sehingga petani terbantu dalam mengelolah pertanian mereka.	Kec. Huta Bayu, Kab Simalungun	APBD Prov/ SKPD Teknis	Dinas Pertanian
		Masyarakat memohon bantuan berupa gas elpiji di sebabkan Kelangkaan gas elpiji 3 Kg bagi masyarakat Kota Pematangsiantar.	Kec. Siantar, Kota Pematang Siantar	APBD Prov/ SKPD Teknis	Biro Perekonomian/ Distamben
		Harga-harga sembako yang ada mohon dipantau sehingga tidak memberatkan masyarakat.	Kec. Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar	APBD Prov/ SKPD Teknis	Biro Perekonomian

		Peningkatan drainase	Kec. Tanah Jawa dan kec. Sidamanik kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Nagori Sinaman Labah kec. Dolok Pardamean kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Tigaras kec. Dolok Pardamean kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Pembuatan Drainase	Desa pasar Bawah kec. Pematang Bandar kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Bawang kec. Dolok Silau kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Pembuatan drainase	Desa Cingkes kec. Dolok Silau kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Nagori Buntu Bayu kec. Hantonduan Kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan jalan usaha tani	Kec. Tanah Jawa, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kec. Padang Sidamanik, Kec. Pane Kab.	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman

			Simalungun		
		Peningkatan drainase	Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kec. Sidamanik Kab. Simalungun	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Pentataan Ruang dan Permukiman
		Pemb. jalan di Kecamatan Siantar Martoba kota Pematangsiantar.	Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar	APBD Kab atau BKP	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan di Kecamatan Siantar Selatan kota Pematangsiantar.	Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar	APBD Kab atau BKP	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan di Kecamatan Siantar Marihat kota Pematangsiantar.	Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Peningkatkan jalan Provinsi antara Saran Padang hingga Gunung meriah sepanjang ±1,5 Km di Kab.Simalungun dan Kab. Deli Serdang.	Kab. Simalungun	APBDProvsu atau BKP	Dinas Bina Marga
		Peningkatan Jalan di Kec. Dolok Batu Nanggar, Kec. Gunung Malaka, Kec. Ujung Padang.	Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan produksi pertanian	Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

		Pemb. jembatan Desa Pematang Sinaman.	Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan Dolok Marimbun – Dusun Bah Bulawan – Nagori Bangun Pane.	Kecamatan Panei, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan aspal antara Bah Bulawan – Dolok Marimbun sepanjang 1,8 Km.	Kecamatan Panei, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan menuju Desa Dolok Marimbun.	Kecamatan Panei, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan usaha tani	Kecamatan Panei, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		-			
		Pemb. jembatan yang menghubungkan Nagori Sigodang Barat – Simattin Pane Dame.	Kecamatan Panei, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan Sondi Raya – Raya Kahean.	Kecamatan Sondi Raya, Kab. Simalungun.	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan dan drainase di sepanjang desa Pasar Bawah.	Kecamatan Pematang Bandar, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. / perbaikan jalan Serebalawan.	Kecamatan Dolok Batunanggar, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan infrastruktur jalan	Kecamatan Panombean Pane,	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

			Kab. Simalungun		
		Pemb. Jalan menuju Maligas Bayu, Kec.Huta Bayu Raja.	Kecamatan Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan Usaha Tani Anjuk menuju Sintat Raya sep. ± 2000 meter.	Kecamatan Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. jalan Usaha Tani Sinta Raya menuju Siboras sep. ±2000 meter	Kecamatan Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Usaha Tani Sinta Raya menuju Sigada – gada sepanjang ±2000 meter	Kecamatan Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb. Jalan Dusun Parimbunan sepanjang ±2Km.	Kecamatan Purba, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb./pengaspalan jalan provinsi antara jalan Saran Padang hingga Gunung Meriah sepanjang ±1,5 Km.	Kecamatan Dolok Silau, Kab. Simalungun	APBD Provsu	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan di Kecamatan Siantar	Kecamatan Siantar, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan di Kecamatan Hantonduan	Kecamatan Hantonduan, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan di Kecamatan Damanik	Kecamatan Damanik, Kab. Simalungun	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemb./perbk. jalan-jalan yang rusak parah di	Kecamatan	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		Kecamatan Sidamanik.	Sidamanik, Kab. Simalungun	Kab.Kota	
	Dapil XI : Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Dan Kabupaten Pakpak Bharat	Mohon bantuan air bersih untuk MCK dan air minum untuk Desa Munte Kec. Munte dan Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo.	Kabupaten Karo	APBD Provinsi	Dinas Kesehatan
		Permohonan untuk pengadaan Dokter Spesialis di RSUD Dairi untuk mempermudah masyarakat di Kabupaten Dairi yang berobat dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan	Kabupaten Dairi	APBD Provinsi	Dinas Kesehatan
		Permohonan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar memfasilitasi kemudahan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Dairi yang mengajukan permohonan untuk menuntut ilmu dokter spesialis di Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diberlakukan oleh USU untuk beberapa Provinsi seperti Aceh dan Sumatera Barat.	Kabupaten Dairi	APBD Provinsi	Dinas Kesehatan
		Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan khususnya di Dapem XI (Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat) diharapkan dilakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas-fasilitas pendukung serta tenaga pengajar dan tenaga medis yang profesional	Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat	APBD Provinsi	Dinas Kesehatan
		Permohonan bantuan Beasiswa Miskin bagi Masyarakat Jalan Pematang Siantar Desa Sinaman Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo	Kabupaten Karo	APBD Kab/Kota/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Permohonan kepada Pemerintah Sumut dan Kab. Dairi untuk pemerataan tenaga pendidik	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Provinsi	Dinas Pendidikan

		terkhusus guru Sekolah Dasar (SD) di desa - desa termasuk desa Paropo Kecamatan Sumbul			
		Agar dapat ditingkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Daerah, sehingga dapat mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, guna mendukung percepatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Dairi, Karo dan Pakpak Bharat	APBD Provinsi	Dinas Pendidikan
		Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan khususnya di Dapem XI (Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat) diharapkan dilakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas-fasilitas pendukung serta tenaga pengajar dan tenaga medis yang profesional	Kabupaten Dairi, Karo dan Pakpak Bharat	APBD Kab/Provinsi	Dinas Pendidikan
		Warga Kelurahan Sumber Mupakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo memohon agar Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan alat-alat olahraga seperti: bola voli, net, bola kaki dan gawang yang layak agar kami pemuda setempat dapat mempunyai kegiatan yang positif di sela-sela kesibukan kami sekolah	Kabupaten Karo	APBD Kab/Provinsi	DISPORA
		Permohonan bantuan rehab gereja oleh warga di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Masyarakat Desa Bandar Huta Usang Tiga Baru Kecamatan Pegagan Hilir Kab. Dairi memohon realisasi bantuan pembangunan Gereja Kristen Protestan Pakpak Bharat (GKPPD)	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Warga di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi memohon untuk bantuan rehab	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial

		gereja			
		Mohon realisasi bantuan pembangunan Gereja Kristen Protestan Pakpak Bharat (GKPPD) Tiga Baru Kec. Pegagan Hilir	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Mohon bantuan pembangunan Mesjid Al-Huda Dusun Kuta Raja Desa Bukit Tinggi Kec. Pegagan Hilir total biaya sebesar Rp. 304.475.000	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Warga di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo meminta kepada Pemerintah mengenai BLT yang tidak tepat sasaran perlu disikapi dengan baik, karena akan membuat ketidak harmonisan antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat miskin	Kabupaten Karo	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Warga di Desa Batang Teru Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi memohon untuk pembagian secara merata bantuan dari Pemerintah Kabupaten Dairi berupa Beras Miskin, Keluarga Harapan dan lain-lain sebagainya	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Provinsi	Dinas Sosial
		Masyarakat Kecamatan Parmaksian khususnya Desa Lumban Sitorus menyampaikan aspirasinya bahwa tanah mereka yaitu kawasan Jior Sisadasada dan Silosung yang terletak di Silosung Sosor Ladang Desa Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian seluas 46 Ha telah dikuasaisecara sepihak oleh PT. TPL. Masyarakat meminta agar PT. TPL mengembalikan tanah ulayat tersebut dan turut memberikan surat-surat tuntutan dan dokumen tanah milik warga Lumban Sitorus kepada Sarma Hutajulu, S.H. untuk dapat diperjuangkan melalui Lembaga Legislatif DPRD	Kab. Tobasa	APBD Kab/Kota/Provinsi	Ro. PEMUM

		Provinsi Sumatera Utara.			
		Masyarakat meminta kepada Dinas Catatan Sipil yang ada di kabupaten Dairi dapat memberikan keringanan biaya administrasi seperti pembuatan Akte kelahiran dan Perkawinan.	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Kota/Provinsi	Ro. PEMUM
		Mohon peninjauan kembali HGU PT. Tunggal Menara Jaya yang lahannya terletak di Kecamatan Si tellu Tali Urang Julu dan Kecamatan Siempat Rube dan tepatnya berbatasan dengan Desa Lae Langge.	Kaupaten Pakpak Bharat	APBD Kab/Kota/Provinsi	Ro. PEMUM
		Mohon bantuan pembangunan dan renovasi lanjutan rumah ibadah di Kecamatan Kabanjahe yang mana proposal telah kami sampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 dan 2013 tetapi hingga saat ini belum terealisasi. Mohon kepada Pemerintah agar segera membantu pembangunan dan renovasi lanjutan rumah ibadah di daerah kami.	Kabupaten Karo	APBD Kab/Kota/Prov	BINSOS
		Masyarakat memohon untuk bantuan rehab gereja.	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Kota/Prov	
		Mohon bantuan pembangunan Mesjid Al-Huda Dusun Kuta Raja Desa Bukit Tinggi Kec. Pegagan Hilir total biaya sebesar Rp. 304.475.000 (Tiga ratus empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan proposal terlampir.	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Kota/Prov	BINSOS
		Mohon realisasi bantuan pembangunan Gereja Kristen Protestan Pakpak Bharat (GKPPD) Tiga Baru Kec. Pegagan Hilir	Kabupaten Dairi	APBD Kab/Kota/Prov	BINSOS
		Mohon bantuan pupuk dan bantuan peternakan	Kec. Gunung	APBD Prov	Dinas Perkebunan /

		dengan harga yang terjangkau guna meningkatkan perekonomian	Sitember, Kab. Dairi	(SKPD)Teknis	Pertanian
		Mohon kelangkaan LPG 3 kg segera teratasi.	Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	Biro Perekonomian / Distamben
		Masyarakat memohon bantuan untuk kredit usaha.	kec. Sidikalang, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	Dinas Koperasi
		Sebagian besar masyarakat Kabupaten Dairi adalah petani kopi, dan kopi yang dihasilkan oleh para petani adalah kopi dengan kualitas tinggi tetapi harga kopi masih sangat rendah. Untuk itu warga mengharapkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap harga kopi yang masih rendah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimana sekarang ini harga kebutuhan pokok semakin tinggi karena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).	Kec. Sumbul, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	Dinas Pertanian
		Masyarakat Sumbul meminta agar Pemerintah Dairi memberikan perhatian terhadap warga agar kiranya dapat menyediakan bibit tanaman pertanian sekaligus badan penyuluhan pertanian dan pengadaan pupuk bersubsidi bagi masyarakat.	Kec. Sumbul, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	Dinas Perkebunan
		Masyarakat meminta kepada Pemerintah agar dapat segera dibangun tiang listrik sebagai sarana untuk penerangan jalan	Kec. Sumbul, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	Distamben
		Masyarakat Paropo meminta kepada Pemerintah Kabupaten Dairi agar jalan ke perladangan	Kec. Silalahi, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	Dinas pertanian

		menjadi jalan usaha tani yang berada di kecamatan Paropo I sepanjang 3 km, dikarenakan jalan perladangan ini berpotensi memberikan hasil pertanian bagi masyarakat.			
		Mohon bantuan jaringan PLN di Dusun Kuta Raja Desa Bukit Tinggi Kec. Pegagan Hilir yang mana desa ini termasuk desa terisolir dengan jalan yang belum memadai.	Kec. Pegagan Hilir, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	distamben
		Mohon bantuan alat pertanian (zetor) di 13 Desa sebanyak 13 Unit	Kec. Pegagan Hilir, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Mohon bantuan bibit pertanian yaitu Bibit jagung, bibit kopi, bibit jeruk dan bantuan ternak sapi.	Kec. Pegagan Hilir, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Mohon perbaikan irigasi persawahan untuk mencapai swasembada pangan di Kec. Pegagan hilir kab. Dairi.	Kec. Pegagan Hilir, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Masyarakat meminta bantuan berupa bibit kopi, kakao dan karet.	Kec. Siempat Numpu Hilir, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Masyarakat juga memohon bantuan ternak babi dan lembu.	Kec. Siempat Numpu Hilir, Kab. Dairi		dinas peternakan
		Pemerintah Kabupaten Dairi saat ini sangat kekurangan pupuk untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan bantuan pupuk bersubsidi.	Kec. Siempat Numpu Hilir, Kab. Dairi	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Mohon bantuan bibit unggul untuk kelompok-kelompok tani dengan harga yang terjangkau.	Kec. Munte, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Mohon perbaikan irigasi persawahan.	Kec. Munte, Kab.	APBD Prov	dinas pertanian

			Karo	(SKPD)Teknis	
		Mohon bantuan peternakan seperti kambing, sapi, bibit ikan mas.	Kec. Munte, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Mohon ketersediaan LPG 3 kg segera teratasi.	Kec. Munte, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Mohon bantuan bibit unggul seperti jagung dengan harga terjangkau	Kec. Kabanjahe, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Mohon bantuan peternakan seperti sapi, kambing	Kec. Kabanjahe, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Mohon kelangkaan LPG 3 kg segera teratasi	Kec. Kabanjahe, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Kelompok koperasi perempuan dan kelompok penjahit di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Sumber Mupakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo banyak mengalami kekurangan modal untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam maupun permodalan untuk kelangsungan koperasi kami. Melalui Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kami memohon bantuan untuk memfasilitasi permodalan koperasi kami.	Kec. Kabanjahe, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Kami masyarakat Jalan Jamin Ginting Kelurahan Sumber Mupakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo memiliki pengelolaan pupuk kompos tetapi masih sangat konvensional (tradisional). Melalui Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara agar dapat mengusulkan kepada Pemerintah untuk memfasilitasi hal-hal yang sangat kami butuhkan antara lain: Alat pencacah, Gudang tempat penyimpanan pupuk kompos, dan pemasaran pupuk kompos tersebut ke luar	Kec. Kabanjahe, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan

		daerah.			
		Di Jalan Singga Kutambelin Kelurahan Kutambelin Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo masyarakat masih banyak memiliki sawah yang belum ada saluran irigasi untuk mengalirkan air ke sawah-sawah mereka sehingga masyarakat hanya mengharapkan air ketika hujan turun akibatnya produksi padi berkurang. Masyarakat hanya mampu panen 1 tahun sekali sedangkan jika ada saluran irigasi masyarakat bisa mampu panen 3 bulan sekali. Untuk itu kami mengharapkan bantuan kepada Pemerintah sesuai dengan program Bapak Presiden Jokowi mengenai Ketahanan Pangan, agar dilakukan pembuatan saluran irigasi untuk mengalirkan air ke sawah-sawah kami sehingga produksi padi kami meningkat dan masyarakat di desa kami menjadi sejahtera.	Kec. Tiga Panah, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Kami masyarakat di Jalan Singga Kutambelin Kelurahan Kutambelin Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo membutuhkan bantuan berupa hewan ternak lembu, kambing, dan babi. Pada kesempatan ini kami memohon kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara agar dapat memfasilitasi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok ternak kami agar bisa mendapatkan bantuan hewan ternak lembu, kambing, dan babi dari Pemerintah.	Kec. Tiga Panah, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Masyarakat di desa kami banyak yang bercocok tanam jeruk dan kentang. Untuk itu kami	Kec. Tiga Panah, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan

		meminta kepada Pemerintah untuk dapat menyediakan bibit unggul pertanian seperti bibit jeruk, dan bibit kentang guna meningkatkan hasil pertanian kami masyarakat di Jalan Singga Kutambelin Kelurahan Kutambelin Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo.			
		Masyarakat meminta agar pupuk bersubsidi dihapus, akan tetapi harga dari hasil pertanian dapat ditingkatkan dengan menetapkan harga standarisasi harga komoditi pertanian.	Kec. Merek, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Masyarakat meminta agar Pemerintah Kabupaten Karo memberikan bantuan berupa tiang listrik untuk sarana penerangan lampu jalan yang ada di Desa Nanggalingga.	Kec. Merek, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	distamben
		Masyarakat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Karo agar dapat menyediakan bibit unggul pertanian, berupa bibit kentang guna meningkatkan hasil pertanian bagi warga sekitar.	Kec. Merek, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Masyarakat mengharapkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Karo tentang masalah hutan lindung yang ada di Kecamatan Merek di sebelah Selatan dikarenakan Hutan Lindung tersebut berdampingan dan berdekatan dengan pemukiman penduduk agar dapat menjadi perhatian khusus.	Kec. Merek, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas kehutanan
		Kelompok tani yang ada di Desa merek mengharapkan kepada Pemerintah memohon adanya hand tractor untuk mekanisme tanah untuk membantu masyarakat.	Kec. Merek, Kab. Karo	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian

		Bantuan pengadaan alat-alat pertanian, obat-obatan dan alat penyemprot hama.	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Bantuan traktor lima cangkul satu unit.	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Bantuan pupuk organik, dolomit dan pupuk bersubsidi.	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Bantuan pengadaan bibit jeruk.	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Bantuan ternak kerbau dan unggas.	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan pengadaan jaringan PLN di Dusun IV Genting Desa Tanjung Meriah Kecamatan Siturje yang jumlah penduduk sebanyak 110 KK yang jarak tempuh dari Simpang jalan Aceh Selatan ± 3 Km sampai ke Dusun tersebut.	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	distamben
		Bantuan mesin jahit sebanyak 50 paket untuk kelompok terampil perempuan di Desa Tanjung Meriah.	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Bantuan pupuk bersubsidi 10 ton/ tahun	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Bantuan alat-alat pertanian dan bibit utuk pertanian berupa mesin babat, alat semprot hama, obat-obat pertanian, bibit jeruk 1200 batang	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Bantuan ternak unggas	Kec. Siturju, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan ternak Kerbau 100 ekor @Rp. 8.500.000 = Rp 850.000.000	Kec. Pergetteng-getteng, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan

		Pengadaan mesin pengolah tapioka (pabrik tepung) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja.	Kec. Pergetteng-getteng, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Pembukaan jalan usaha tani ± 6 Km sebesar Rp.1.200.000.000	Kec. Pergetteng-getteng, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Bantuan ternak kepada kelompok tani yang terdiri dari 6 kelompok/ desa	Kec. Siempat Rube, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Sangat mengharapkan bantuan pembangunan pembukaan jalan-jalan tani yang sangat prioritas yaitu Jalan Tani Desa Lau Sereme Kecamatan Tigalingga.	Kec. Tigalingga, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Alat-alat pertanian seperti : Zetor, mesin babat, bibit jeruk dan pupuk organik dan bersubsidi Desa Mahala	Kec. Tinada, Kab. Phakpak Bharat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Pembangunan drainase	Kec. Gunung Sitember Kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penataan lingkungan	Kec. Gunung Sitember Kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Desa Munte kec. Munte kab. karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penataan lingkungan	Desa Munte kec. Munte kab. karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan MCK	Desa Munte kec.	APBN/APBD Provsu	Dinas Penataan Ruang

			Munte kab. karo	(BKP)	dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Desa Samura kec. Kabanjahe kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penataan lingkungan	Desa Samura kec. Kabanjahe kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan MCK dan kamar mandi umum serta sumur bor	Desa Samura kec. Kabanjahe kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan sarana air minum	Desa Samura kec. Kabanjahe kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi kawasan Perkotaan Kabanjahe	Desa Samura kec. Kabanjahe kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan kualitas pelayanan air PDAM Tirtanadi	Kel. Kutambelin kec. Tiga Panah kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sumur bor	Kel. Kutambelin kec. Tiga Panah kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Perlindungan kawasan hutan lindung	Desa Merek kec. Merek kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penangan air limbah	Desa Merek kec. Merek kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penyediaan air bersih	Desa Merek kec. Merek kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan pembangunan infrastruktur	Kec. Sumbul kab. Dairi	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pengadaan saran dan prasarana MCK	Desa Lau Sereme	APBN/APBD Provsu	Dinas Penataan Ruang

			kec. Tigalingga kab. Dairi	(BKP)	dan Permukiman
		Peningkatan Jalan Usaha Tani	Desa Rumah Kabanjahe Kec. Kabanjahe, Kec. Tiganderket Kab. Karo	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan Jalan Usaha Tani	Desa Lau Sereme Kec. Tigalingga Kab. Dairi Kab. Pakpak Bharat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana air bersih	Desa Lau Sereme Dusun Rambah Sere Kec. Tigalingga Kab. Dairi	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Siempat Rube I Kab. Pakpak Bharat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Perbaikan infrastruktur jalan yang ada di desa Negeri Tongging yang bertepatan di jalan Sirtu dapat di aspal ± 1500 meter.	Kab. Karo	APBD Kab/ BKP	Dinas Bina Marga
		Mohon perbaikan dan pelebaran jalan yang sudah rusak berat.	Kab. Karo	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Masyarakat memohon bantuan perbaikan jalan desa.	Kab. Dairi	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		perbaikan/mengatasi curamnya Jalan Nasional dari Desa Tanjung Beringin ke Sumbul.	Kab. Dairi	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Kab. Dairi	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		Kabupaten Dairi.		Kab.Kota	
		Perbaikan/pengaspalan infrastruktur jalan yang ada di jalan Huta uruk kec. Paropo sepanjang ± 2,5 km.	Kab. Dairi	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Peningkatan jalan perladangan menjadi jalan usaha tani di Kec. Paropo sep. 3 km	Kab. Dairi	APBD Kab.	Dinas Bina Marga
		perbaikan jalan Sitio sampai dengan jalan Silalahi sebagai jalur tempat jalan Pariwisata serta pengusulan jalan dari Desa Tongging sampai ke Silalahi tembus ke Sitinjo dan juga jalan Medan Lae Pandom Dairi	Kab. Dairi	APBD Kab.	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jalan Provinsi dari Tiga Baru – Sumbul yang hampir putus akibat terjangan air paret dari hulu.	Kab. Dairi	APBD Prov	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jalan lingkaran luar dari Sindeka - Lae Langge - Namuseng tembus Parbuluan - Tele.	Kab Pakpak Bharat	APBDN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan menghubungkan Siempat Rube 2 jalan lingkaran menuju Sitelu Tali Urang Julu sepanjang 6 Km	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan/ pengaspalan jalan Jambu Rea – Mungkur sepanjang 3 Km	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan dari Desa Kuta Jungak – Parbuluan Kabupaten Dairi yang belum selesai/ pembangunan lanjutan sepanjang ± 8 Km.	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengerasan/pengaspalan jalan dari Dusun Mungkur – Kuta Jungak sepanjang 950 M x 3 M.	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembukaan jalan dari Dusun I Mungkur ke Simp. II resdes sepanjang 400 M x 7 M.	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan dari Kantor Camat ke Kuta Jungak sepanjang 1 Km.	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

		Pembangunan pembukaan jalan-jalan tani yang sangat prioritas yaitu Jalan Tani Desa Lau Sereme Kecamatan Tigalingga.	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan/ pengaspalan jalan penjaratan menuju Kerajaan (Sukarame) sepanjang ± 6 Km	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov. SU /APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan nasional batas Kabupaten Dairi - Kabupaten Pakpak Bharat dari Nantampak Mas menuju Sukarame Uruk (sepanjang jalan sekitar Delleng Lumut ± 16 Km).	Kab Pakpak Bharat	APBN	Dinas Bina Marga
		1Pembangunan / Pengaspalan Jalan Provinsi yang menghubungkan 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Pakpak Bharat ke Kabupaten Dairi dari Desa Kuta Jungak Kecamatan Jambu Rea Kab. Pakpak Bharat ke Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi yang belum selesai/ pembangunan lanjutan sepanjang ± 8 Km.	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov	Dinas Bina Marga
		Pelebaran Jalan Provinsi yang menghubungkan Kabupaten Karo dengan Dairi di KM 104-114 yang sangat rawan longsor	Kab Pakpak Bharat	APBD Prov	Dinas Bina Marga
	Dapil XII (Kab. Langkat dan Kota Binjai)	Mohon agar pembanguna sosial seperti pembanguna mushollah di Desa Cempa Dusun VII untuk diberikan bantuan dan realisasinya untuk pembangunan mushollah tersebut.	Kec. Hinai, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Permohonan Bantuan sarana dan prasarana beserta peralatan untuk rumah ibadah di Kec. Hinai Kab. Langkat	Kec. Hinai, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Rehab lantai Musholla uk. 8 m x 10 m dan Pembuatan Pagar Musholla uk. 1 m x 8 m dan Pembuata Pagar Musholla uk. 1m x 8 m lokasi Dsn II H Malaka dan Dsn III Sibongkok Desa Perk.	Kec. Kuala, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos

		Bekiun			
		Pembuatan Tempat Wudhu dan Sumur Musholla lokasi Dsn Petak II Desa Sido Makmur	Kec. Kuala, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Rehab Mushola 1 Unit lokasi Dsn Lau Mentar Desa Besadi	Kec. Kuala, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Pembuatan Pagar Mesjid sepanjang 25 m lokasi Dsn II Bangun Rakyat Desa Blankahan	Kec. Kuala, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Renovasi Madrasah Al-Ihsan lokasi Kel. Bela Rakyat	Kec. Kuala, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Pembuatan Pagar Mesjid Sepanjang 54 m lokasi Dsn III Sidorukun Desa Blankahan	Kec. Kuala, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Diharapkan kepada Pemerrintah Provinsi Sumatera Utara agar kiranya dapat membantu rumah rumah ibadah yang ada di Desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang, karena banyak rumah rumah ibadah seperti Mesjid dan Mushollah yang sudah tidak layak lagi.	Kec. Padang Tualang, Kab Langkat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Memohon kepada Pemerintah kiranya dapat membantu para guru-guru ngaji yang mengajar mengaji, wirid yasin (bagi remaja dan ibu-ibu perwiridan) yang dalam pemberian honorariumnya masih berdasarkan bantuan keiklasan dari warga dan masih dibawah ketentuan umum.	Kecamatan Binjai Kota	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Masyarakat Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai mengharapkan agar Benteng/bronjong di wilayah Lembah yang posisinya di dekat Musholla Ikhlas dan mesjid	Kecamatan Binjai Utara	APBD Pemkab/Kota	Binsos

		Taqwa, agar dapat diperbaiki secepatnya karena dapat mengakibatkan rumah-rumah dipinggir sungai runtuh.			
		Pembangunan/perbaikan Musholla Al Muhajirin di lingkungan Kel. Bergam.		APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Dari hasil pertemuan reses dengan warga masyarakat di Desa Jati Mulyo, Warga sangat berharap adanya bantuan bagi Rumah Ibadah (Mesjid Nurul Iman) yang berada di lingkungan Pujidadi.	Kecamatan Binjai Selatan	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Masyarakat mohon kepada Pemerintah (melalui pengajuan proposal) untuk dapat membantu renovasi Masjid Al-Qhodar, Al-Hidayah, penambahan teras Musholah Nurul Iman, dan pembangunan Madrasah yang saat ini belum ada untuk proses belajar dan mengajar mengaji Al-Quran.	Kecamatan Binjai Barat	APBD Pemkab/Kota	Binsos
		Masyarakat di daerah ini sangat resah, karena peredaran narkoba yang semakin meraja lela. Untuk itu diharapkan kepada jajaran kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan razia sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan diharapkan juga bagi masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.	Kec. Stabat, Kab. Langkat	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial
		Masyarakat di daerah ini sangat resah, karena	Kecamatan Wampu,	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial

		peredaran narkoba yang semakin merajalela. Untuk itu diharapkan kepada jajaran kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan razia sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan diharapkan juga bagi masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.	Kab. Langkat		
		Pengadaan Alat – alat Nasyid / Marhaban lokasi Dsn II Kp Baru Desa Raja Tengah			
		Semakin maraknya perjudian di Desa Empus. Dimohon kepada aparat Kepolisian dan penegak hukum untuk dapat melakukan pemberantasan perjudian yang telah merajalela di Pedesaan.	Kecamatan Bahorok, Kab. Langkat	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial
		Masyarakat memohon kepada Pemerintah dan pihak kepolisian untuk menindak lanjuti masalah Narkoba yang saat ini sangat meresahkan masyarakat dan merusak generasi-generasi muda.	Kecamatan Selesai, Kab. Langkat	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial
		Masyarakat memohon penerbitan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan jangan dipersulit, dan Akte Nikah Penduduk hampir seluruhnya hanyut terkena banjir.	Kecamatan Besitang , Kab. Langkat	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial
		Masyarakat di daerah ini sangat resah, karena peredaran narkoba yang semakin merajalela. Untuk itu diharapkan kepada jajaran kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan razia sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan diharapkan	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial

		juga bagi masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.			
		Masyarakat di daerah ini sangat resah, karena peredaran narkoba yang semakin meraja lela. Untuk itu diharapkan kepada jajaran kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan razia sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan diharapkan juga bagi masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial
		Masyarakat Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Kota menyampaikan bahwa banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan Kartu KIS dan KIP, namun tidak mendapatkan kartu tersebut. Hal ini sama halnya dengan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Masyarakat mengharapkan agar Pemerintah dapat memberikan Kartu KIS dan KIP bagi masyarakat yang benar-benar miskin, sehingga tepat sasaran. Diharapkan juga agar data-data orang miskin di Kota Binjai khususnya Kecamatan Binjai Kota dapat didata ulang kembali.	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial
		Masalah narkoba dan judi yang semakin hari semakin marak keberadaannya, sedang aparat sudah berupaya membasminya namun hasilnya belum optimal dan narkoba masih beredar dikalangan remaja/anak-anak.	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Pemko/Kab	Dinas Sosial

		Permohonan agar merealisasikan bedah rumah yang telah diprogramkan Pemkab. Langkat untuk masyarakat khususnya di Desa Cempa yang selama ini belum secara merata pelaksanaannya.	Kec.Hinai, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Pelatihan Ketrampilan Bordir Menjahit lokasi Desa Parit Bindu	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 57 Unit lokasi Desa Besadi	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Bantuan Pengadaan Pakaian Remaja dan Perwiritan Kaum Ibu Masing – masing 25 Set lokasi Dsn Bekiung lama Desa Bekiung	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Pengadaan Pakaian untuk Remaja Mesjid sebanyak 100 set lokasi Desa Balai Kasih	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 60 Rumah se kelurahan Bela rakyat lokasi Kel. Bela Rakyat	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Bantuan Alat Musik Marhaban sebanyak 1 unit lokasi Dsn Mandailing Desa Sido Makmur	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 18 unit Kel. Pekan Kuala lokasi Kel. Pekan Kuala	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Masyarakat mengharapkan agar dapat dilakukan program Bedah rumah di Lingkungan Andalan Kelurahan Berngam, karena masih ada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni.	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Pemka/Kota	BPMD
		Kiranya kepada seluruh bilal mayit yang ada saat ini dapat diberikan honor setiap bulannya mengingat bilal mayit yang ada saat ini tidak ada	Kec Binjai Barat, Kota Binjai	APBD Pemka/Kota	BPMD

		diberi honor, dan berdasarkan swadaya masyarakat.			
		1) Permohonan Bantuan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan khususnya masyarakat yang berada di Desa pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat.	Kec. Stabat, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	Dinas Kesehatan
		Dimohon kepada Pemerintah untuk pendataan BPJS agar pendataan tersebut di ambil dari Kepala Lingkungan, agar masyarakat dapat menggunakan BPJS tersebut.	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	Dinas Kesehatan
		Masih banyak warga masyarakat yang tidak mendapatkan formulir serta informasi mengenai Kartu Sehat, Kartu Pintar, Bantuan Langsung Masyarakat dan BPJS. Khusus mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT), agar pihak Badan Pusat Statistik dapat mendata ulang lagi masyarakat miskin, karena pembagian BLT selama ini dirasakan masih tidak tepat sasaran.	Kecamatan Bahorok, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	Dinas Kesehatan
		Keluhan Masyarakat Kecamatan Sei Lapan mengenai pengurusan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sangat memberatkan masyarakat, contohnya seluruh keluarga harus mendaftar sebagai Anggota BPJS, apabila ada 1 (satu) orang saja anggota keluarga yang tidak diurus, maka pengurusan BPJS akan ditolak pihak BPJS, sedangkan kondisi perekonomian masyarakat sangat	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	Dinas Kesehatan

		memprihatinkan, sehingga tidak mampu untuk mendaftarkan seluruh keluarganya ke BPJS. Masyarakat mengharapkan agar Pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam pengurusan BPJS tersebut.			
		Para Kader Posyandu yang ada di Desa Kebun Kelapa juga mengeluhkan kalau selama ini mereka belum juga mendapat tunjangan/honor sebagai kader posyandu. Hal ini dirasa perlu untuk meningkatkan semangat kerja mereka dan mengingat banyak kader yang harus memikirkan pendapatan sementara tugas sebagai kader jadi terbengkalai.	Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat	APBD Pemka/Kota	Dinas Kesehatan
		Sama juga halnya dengan masyarakat Kabupaten Langkat, Masyarakat miskin Kota Binjai juga mengeluhkan susahny mengurus untuk mendapatkan Kartu BPJS, dikarenakan harus semua anggota keluarga yang masuk BPJS.	Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai	APBD Pemka/Kota	Dinas Kesehatan
		Keluhan masyarakat di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai hampir sama mengenai pengurusan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sangat memberatkan masyarakat, seperti diwajibkan untuk satu keluarga harus mendaftar sebagai Anggota BPJS, dan apabila ada satu orang saja anggota keluarga yang tidak diurus menjadi Anggota BPJS, maka pengurusan BPJS akan ditolak pihak BPJS. Masyarakat mengharapkan agar Pemerintah dapat memberikan kemudahan	Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai	APBD Pemka/Kota	Dinas Kesehatan

		dalam pengurusan BPJS tersebut.			
		Masih minimnya fasilitas pendidikan yang ada di daerah ini, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan masih rendah. Hal ini disebabkan karena jumlah sekolah yang ada sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah anak usia sekolah. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat menambah ruang kelas baru atau membangun sekolah-sekolah baru khususnya di Kec. Stabat	Kecamatan Stabat, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Para Guru-Guru di daerah ini sangat mengharapkan bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar kiranya dapat memberikan Beasiswa bagi guru-guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, serta tunjangan bagi para guru-guru, mereka pernah mendapatkan tunjangan, akan tetapi saat ini sudah tidak ada lagi, para guru guru sangat mengharapkan agar bantuan tersebut dilanjutkan.	Kecamatan Stabat, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap penyaluran dana BOS yang selama ini penyalurannya dirasakan masih tersendat-sendat.	Kecamatan Stabat, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Guru guru di Desa Jaring Halus sangat mengharapkan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar kiranya dapat memberikan bantuan berupa transportasi bot, agar para guru guru tidak tergantung kepada bot sewa yang sudah ditentukan jadwalnya.	Kecamatan Stabat, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan

		Sedangkan jadwal rapat dan kegiatan sekolah lainnya terlalu padat, sedangkan guru guru tidak dapat berangkat karena jadwal transportasi bot tidak ada pada jam tersebut.			
		Masyarakat meminta kepada Pemerintah agar meningkatkan mutu pendidikan dengan membenahi dan memberikan fasilitas PAUD, karena di Kecamatan tersebut masih minim fasilitas PAUD.	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Bantuan Kesejahteraan Guru Ngaji dan Bantuan Kesejahteraan Guru Mingguan lokasi Desa Namo Mbelin	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Pembuatan pagar SD 056594 Menjahong lokasi Dsn VI Menjahong B Desa Raja Tengah	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Penambahan Guru SD lokasi Desa Suka Damai	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Rehab Madhrasah Diniyah uk. 6 m x 18 m lokasi Dsn I Sukaranda Desa Perk. Bekiun	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 057739 sebanyak 4 Unit lokasi Pondok Batu Desa Parit Bindu	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Rehab Berat WC/Kamar mandi SD Negeri 053962 lokasi Dsn Buluh Duri Desa Bekiung	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Rehab Lantai PAUD lokasi Dsn Besadi Desa Besadi	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Pengadaan Guru SD 056595 sebanyak 3 orang lokasi Dusun II Mejuah – Juah Desa Garunggang	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Pembangunan PAUD sebanyak 11 unit lokasi Desa Namo Mbelin	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan
		Pembuatan Kantor Kepala Sekolah SD 050606	Kecamatan Kuala,	APBD Pemkab/Kota	Dinas Pendidikan

		lokasi Desa Parit Bindu	Kab. Langkat		
		Mohon Bantuan Perehapan Bangunan / Rehap Berat SD 054912 Desa Kwala Besilam, Kecamatan Padang Tualang, sebanyak 3 kelas ruang belajar dan 1 ruang guru. Masyarakat sangat mengharapkan kiranya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat membantu perehapan ruang kelas tersebut.	Kecamatan Padang Tualang, Kab. Langkat	APBD Prov	Dinas Pendidikan
		SD Negeri Pasar Rodi saat ini bila hujan turun sering tergenang air (banjir). Hal ini diakibatkan adanya pembuatan gorong-gorong di Jalan Provinsi. Masyarakat telah melaporkan hal tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum, namun sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya. Untuk ini mohon perhatian pemerintah terhadap hal tersebut.	Kecamatan Bahorok, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		Mengenai uang sertifikasi Guru-guru yang berdomisili di Kecamatan Sei Lapan agar dapat diberikan tepat waktu, yang selama ini terjadi pemberian uang sertifikasi selalu terlambat sampai 6 bulan. Diharapkan kepada Pemerintah agar untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang agar uang sertifikasi guru-guru diberikan tepat waktu.	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		Usulan – usulan Rehab Sekolah di Kecamatan Selapian sebagai berikut :	Kecamatan Selapian, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		Ø SD Negeri 050631 Tanjung Keliling	Kecamatan Kuala,	APBN	Dinas Pendidikan

			Kab. Langkat		
		- Perehapan 1 Ruang Kelas		APBN	Dinas Pendidikan
		- Pembangunan 1 Ruang Perpustakaan		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 050632 Tanjung Keliling	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Perehapan Ruang Kelas 6 Lokal Tambah 1 Kantor		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 058342 Uruk Gambir	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Penambahan Pembangunan 3 Ruang Kelas		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 054893 Ringin Sari	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Perehapan Ruang Kelas 3 Lokal Tambah 1 Kantor		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 057189 Batu Guru Naman Jahe	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Pembangunan 1 Ruang Perpustakaan		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 053959 Pondok 8	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Perehapan Ruang Belajar 3 Lokal Tambah 1 Kantor		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 054894 Lau Tepu	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Pembangunan Ruang Perpustakaan		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 056427 Adin Tengah	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Perehapan Ruang Belajar 3 Lokal		APBN	Dinas Pendidikan
		∅ SD Negeri 053961 Perk. Tambunan	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan

		- Pembangunan Ruang Perpustakaan		APBN	Dinas Pendidikan
		Ø SD Negeri 056590 Ujung Bandar	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Penambahan Ruang Kelas 1 Lokal		APBN	Dinas Pendidikan
		Ø SD Negeri 050630 Tanjung Langkat	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Pembangunan Perpustakaan		APBN	Dinas Pendidikan
		Ø SD Negeri 050628 Tanjung Langkat	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		- Rehab 3 Ruang Kelas		APBN	Dinas Pendidikan
		Usulan dari Guru-guru honor di Dusun II Pondok Besar yang sudah lama mengajar baik di tingkat PAUD,SD, SMP dan SMA, memohon melalui kegiatan Reses tentang kejelasan nasib mereka.	Kecamatan Sei Binge, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		Warga Masyarakat dengan Kegiatan Reses ini mengadukan adanya lahan yang sudah di hibahkan akan di ambil kembali oleh pihak PTPN II, yang mana lahan tersebut selama ini sudah menjadi lahan pengembangan SMAN I Padang Tualang. Yang beralamat di Dusun Sido Dadi Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.	Kecamatan Batang Serangan, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		Melalui kegiatan Reses ini Guru-guru honor yang mengajar PAUD di Kecamatan Batang Serangan ini belum menerima honor tahun 2014, yang biasanya dibayarkan / Desember setiap tahunnya, dan mereka juga mempertanyakan tentang kejelasan status dan nasib mereka.	Kecamatan Batang Serangan, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan

		Warga kampung lama juga mengeluhkan bahwa dalam hal penerimaan murid baru, Sekolah Negeri selalu memaksakan menerima siswa melebihi kapasitas kelas hal ini berhubungan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah , sehingga di pertengahan jalan banyak siswa yang di berhentikan dengan berbagai alasan sehingga berpindah ke sekolah swasta, hal ini menjadi gambaran yang buruk bagi kebanyakan orang bahwa sekolah swasta adalah sekolah buangan dari negeri. Untuk itu diharapkan agar sekolah negeri khususnya yang ada di kecamatan Besitang , dapat diberi batasan yang jelas mengenai kuota penerimaan murid baru disetiap tahun ajaran.	Kecamatan Besitang , Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		Dalam Hal Pendidikan Masyarakat Tanjung Ibus kecamatan Secanggang megharapkan agar di tempat mereka didirikan sekolah menengah Kejuruan (SMK) mengingat sampai hari ini belum ada SMK di desa Mereka, sehingga sangat menyulitkan bagi anak-anak mereka yang ingin bersekolah di SMK.	Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat	APBN	Dinas Pendidikan
		Para Guru-Guru Swasta di daerah ini sangat mengharapkan bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar kiranya dapat memberikan bantuan tunjangan bagi para guru-guru, mereka pernah mendapatkan tunjangan, akan tetapi saat ini sudah tidak ada lagi, para guru guru sangat mengharapkan agar bantuan tersebut	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBN	Dinas Pendidikan

		dilanjutkan dan jangan dihentikan.			
		Memohon kepada Pemerintah agar dapat membantu pembangunan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang saat ini masih kekurangan lokal (kelas) jika dibandingkan dengan keadaan jumlah murid yang ada saat ini masih belum memadai. Dan dalam hal keamanan bagi anak-anak PAUD kiranya dapat juga diberi bantuan untuk pembangunan pagar sekolah yang lokasinya tepat berada dipinggir jalan umum.	Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai	APBN	Dinas Pendidikan
		Memohon kepada Pemerintah kiranya kepada guru-guru PAUD diberikan bantuan Insentif.	Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai	APBN	Dinas Pendidikan
		Memohon kepada Pemerintah untuk dapat memberikan bantuan kesejahteraan kepada guru-guru PAUD yang saat ini honorariumnya hasil dari swadaya PAUD dan dibawah UMK bagi tenaga guru.	Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai	APBN	Dinas Pendidikan
		Masyarakat juga menyampaikan saran mengenai penyelenggaraan Biaya Operasional Sekolah (BOS) agar dalam penyaluran dan penggunaannya sesuai dengan program yang ditentukan oleh Pemerintah.	Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai	APBN	Dinas Pendidikan
		Memohon kepada Pemerintah Pusat agar kiranya dapat menambah lapangan pekerjaan bagi anak-anak kami yang sudah tidak dapat melanjutkan pendidikan lagi dan butuh lapangan pekerjaan bagi mereka.	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Pemkot	Disnaker

		Mohon kepada Pemerintah untuk dapat membantu mengadakan/ menciptakan sarana olah raga khususnya Lapangan Bola Kaki dan pengadaan alat musik gamelan untuk mengiringi kegiatan seni bela diri (pencak silat) yang saat ini masih dilestarikan dan dimainkan oleh anak-anak remaja, keadaanya masih belum memadai.	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Pemkot	Dispora
		Masyarakat di daerah Kecamatan Stabat sangat resah, karena peredaran narkoba yang semakin meraja lela. Untuk itu diharapkan kepada jajaran kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan razia sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan diharapkan juga bagi masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.	Kab. Langkat	APBD Kab/Kota	Kesbangpol
		Masyarakat di daerah Kecamatan Wampu sangat resah, karena peredaran narkoba yang semakin meraja lela. Untuk itu diharapkan kepada jajaran kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan razia sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan diharapkan juga bagi masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.	Kab. Langkat	APBD Kab/Kota	Kesbangpol
		Semakin maraknya perjudian di Desa Empus. Dimohon kepada aparat Kepolisian dan penegak hukum untuk dapat melakukan pemberantasan perjudian yang telah merajalela di Pedesaan.	Kab. Langkat	APBD Kab/Kota	Kesbangpol
		Masyarakat di Kecamatan Selesai memohon	Kab. Langkat	APBD Kab/Kota	Kesbangpol

		kepada Pemerintah dan pihak kepolisian untuk menindak lanjuti masalah Narkoba yang saat ini sangat meresahkan masyarakat dan merusak generasi-generasi muda.			
		Masyarakat di daerah Kecamatan Kota Binjai sangat resah, karena peredaran narkoba yang semakin merajalela. Untuk itu diharapkan kepada jajaran kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan razia sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan diharapkan juga bagi masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.	Kota Binjai	APBD Kab/Kota	Kesbangpol
		Masalah narkoba dan judi yang semakin hari semakin marak keberadaannya, sedang aparat sudah berupaya membasminya namun hasilnya belum optimal dan narkoba masih beredar dikalangan remaja/anak-anak.	Kota Binjai	APBD Kab/Kota	Kesbangpol
		Warga Masyarakat dengan Kegiatan Reses ini mengadukan adanya lahan yang sudah di hibahkan akan di ambil kembali oleh pihak PTPN II, yang mana lahan tersebut selama ini sudah menjadi lahan pengembangan SMAN I Padang Tualang. Yang beralamat di Dusun Sido Dadi Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat	Kab. Langkat	APBN	Ro. PEMUM
		Masyarakat Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang memohon agar dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang terletak di desa Sikundur menurut mereka adalah tanah leluhur mereka yang luasnya + 3000 Ha, yang	Kab. Langkat	APBN	Ro. PEMUM

		selama ini di akui oleh PNGL sebagai tanah milik mereka. Hal ini di anggap penting karena mereka adalah petani dan butuh lahan untuk pertanian dan tempat tinggal mereka.			
		Warga Kecamatan Besitang mempertanyakan masalah pemekaran Teluk Aru yang sampai saat ini belum ada kejelasannya, mereka meminta agar dapat membantu pemekaran Teluk Aru bisa terwujud.	Kab. Langkat	APBN	Ro. PEMUM
		Masyarakat memohon penerbitan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan jangan dipersulit, dan Akte Nikah Penduduk hampir seluruhnya hanyut terkena banjir.	Kab. Langkat	APBD PEMKAB/KOTA	Ro. PEMUM
		Mohon bantuan Kredit untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) bagi masyarakat Desa Paya Perupuk dalam rangka pengembangan Usaha pembuatan dodol.	Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan modal usaha (UKM) kepada para ibu-ibu agar dapat menambah penghasilan keluarga dan dapat meringankan beban keluarga.	Kec. Stabat, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Permohonan bantuan kepada kelompok-kelompok Tani yang berda di Desa Pantai Gemi dalam rangka budidaya ikan air tawar.	Kec. Stabat, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Permohonan Pupuk Bersubsidi bagi kelompok tani yang berda di Kec. Hinai Kab. Langkat.	Kec. Hinai, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian

		Mohon Bantuan kepada masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) Khususnya yang berada di Kec. Hinai Kab. Langkat	Kec. Hinai, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan modal usaha (UKM) kepada para ibu-ibu agar dapat menambah penghasilan keluarga dan dapat meringankan beban keluarga.	Kec. Wampu, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Menurunnya harga pertanian, seperti kelapa sawit dan juga harga karet yang semakin menurun, sementara Bahan Bakar Minyak harganya naik, hal ini sungguh tidak adil bagi petani. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar kiranya dapat menyelesaikan masalah ini.	Kec. Wampu, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian / perkebunan
		Untuk menambah penghasilan masyarakat, mereka sangat membutuhkan bantuan hewan ternak seperti : kambing dan sapi dari pemerintah, dengan harapan kiranya bantuan hewan ternak tersebut nantinya dapat lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat.	Kec. Wampu, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Pengadaan Hand Tractor Mini untuk Kelompok Tani sebanyak 4 unit lokasi Desa Parit Bindu	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Bantuan Pengadaan Bibit Kako sebanyak 2000 Batang lokasi Dsn Buluh Duri Desa Bekiung	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Pengadaan Hand Tractor sebanyak 6 unit lokasi Dsn I,III,IV Desa Baja Tengah	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Pengadaan Bibit Sawit sebanyak 5000 batang	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov	dinas perkebunan

		lokasi Dsn II Mejuah-juah Desa Garunggang	Langkat	(SKPD)Teknis	
		Bantuan Ternak Itik sebanyak 500 ekor lokasi Lingk V Bela Rakyat Kel. Bela Rakyat	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan Ternak Sapi untuk 12 Kelompok lokasi Desa Namu Mbelin	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan Ternak Lembu sebanyak 1 Unit lokasi Desa Blankahan	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan Ternak Lembu, Kambing sebanyak 60 ekor lokasi Dsn I Sukaraja Desa Sei Penjara	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan Ternak Kerbau sebanyak 10 ekor, Lembu sebanyak 25 ekor, kambing sebanyak 90 ekor lokasi Desa Beruam	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Pengadaan Hand Traktor sebanyak 1 unit lokasi Desa Besadi	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Bantuan Ternak Lembu sebanyak 50 ekor lokasi Dsn Bangun Rejo Desa Dalam Naman	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan Mesin Jahit untuk ibu – ibu PKK lokasi Desa Balai Kasih	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Pengadaan Bibit Ternak Sapi sebanyak 30 Ekor Lokasi Dsni s/d VI Desa Perk. Bekiun	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Pengadaan Ternak Lembu sebanyak 15ekor lokasi Lingk III Sei Tembo Kel. Pekan Kuala	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan Pengadaan Hand Tracktor 2 unit untuk kelompok tani lokasi Dsn Pembangunan Desa Bekiung	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Pengadaan Ternak Lembu bagi Kelompok peternakan sebanyak 6 ekor lokasi Desa Parit Bindu	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan Ikan Lele Jumbo, ikan Nila, Ikan Gurame untuk 12 Kelompok Lokasi Desa Namu Mbelin	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan

		Pengadaan Bibit Karet sebanyak 10.000 Batang lokais Desa Garunggang	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan
		Bantuan Bibit Ikan Lele sebanyak 200 ekor, ikan Nila sebanyak 20.000 ekor, Gurami sebanyak 20.000 ekor lokasi Desa Beruam	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan
		Bantuan Simpan Pinjam ibu – ibu PKK lokasi Dsn Petak II Desa Sido Makmur	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Bantuan Bibit Ternak Kambing sebanyak 30 ekor lokasi Dsn I s/d Dsn IV Desa Perk. Bekiun	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Bantuan Simpan Pinjam untuk ibu – ibu PKK lokasi Desa Balai Kasih	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Bantuan Bibit ikan Nila 20.000 ekor lokasi Dsn III Raja Tengah Hilir Desa Raja Tengah	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan
		Bantuan Modal Usaha Simpan Pinjam berjumlah 50 org lokasi Dsn II Lau Kersik Desa Dalan Naman	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Bantuan Pengadaan Mesin Perontok Gabah sebanyak 2 unit untuk Kelompok Tani lokasi Dsn Pembangunan Desa Bekiung	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Pengadaan Bibit Ikan Lele sebanyak 10.000 ekor lokasi Lingk III Sei Tembo Kel. Pekan Kuala	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan
		Bantuan Modal Usaha (UKM) untuk 30 kelompok lokasi Dsn I s/d IV Desa Perk. Bekiun	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Pengadaan Mesin Pengolahan Makanan Ternak sebanyak 2 unit lokasi Dsn I Sukaraja Desa Sei Penjara	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Pelatihan Ketrampilan Bordir Menjahit lokasi Desa Parit Bindu	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Bantuan Bibit Ikan sebanyak 50.000 ekor lokasi Dsn I Dalan Naman Desa Dalan Naman	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan
		Bantuan Modal Simpan Pinjam sebanyak 100 org lokasi Desa Beruam	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi

		Bantuan Ternak Lembu sebanyak 50 ekor lokasi Dsn IV S.Rejo Desa Suka Damai	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Pelatihan Ketrampilan Bordir Menjahit lokasi Desa Balai Kasih	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Bantuan Pengadaan Bibit Ikan Lele sebanyak 20.000 ekor lokasi Desa Garunggang	Kec. Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan
		Untuk menambah penghasilan masyarakat, mereka sangat membutuhkan bantuan hewan ternak seperti : kambing dan sapi, dari pemerintah, dengan harapan kiranya bantuan hewan ternak tersebut nantinya dapat lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat.	Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Masyarakat/warga di Desa Empus kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi (langka) dan harus membeli pupuk dengan harga yang terbilang cukup mahal. Untuk hal ini masyarakat/warga memohon pengadaan pupuk bersubsidi diperbanyak karena pupuk tersebut sangat dibutuhkan warga yang sebahagian besar merupakan petani karet dan sawit.	Kec. Bahorok, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian / perkebunan
		Masyarakat mengharapkan kalau sudah tidak bisa lagi membudidayakan kepiting Soka, maka Pemerintah harus dapat mencari solusi untuk menggantikan budidaya kepiting Soka tersebut, salah satunya seperti memberikan bantuan bibit undang panani.	Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan
		Di Kecamatan Sei Lapan sudah banyak hutan mangrove yang diganti dengan Pohon Sawit dan	Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan/perikanan

		limbah Sawit pun di buang ke laut, sehingga tambak-tambak ikan pun rusak dan ikannya banyak yang mati dan merugikan masyarakat. Masyarakat mengharapkan agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti.			
		Melalui kegiatan Reses ini warga Dusun II Pondok Besar yang mayoritas sebagai Petani juga mengharapkan adanya bantuan penyuluhan-penyuluhan/Pembinaan terhadap para Pertanian, juga bantuan-bantuan pupuk, bibit-bibit unggul dan alat-alat Pertanian yang memungkinkan dapat meningkatkan hasil panen, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup bagi para Petani.	Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Melalui Kegiatan Reses ini warga Dusun II Pondok Besar juga berharap adanya pengawasan Pemerintah tentang pupuk yang bersubsidi yang beralih ke perkebunan-perkebunan.	Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Warga Masyarakat juga berharap agar cepat teratasi tentang kelangkaan gas elpiji 3 kg.		APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Melalui kegiatan Reses ini, Kelompok Tani sangat membutuhkan adanya bantuan penyuluhan-penyuluhan/pembinaan terhadap para petani, juga bantuan-bantuan pupuk, bibit-bibit unggul dan alat-alat pertanian yang memungkinkan dapat meningkatkan hasil panen, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup petani.	Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan / pertanian
		Dan dari sektor Peternakan, kelompok-kelompok tani ternak sangat mengharapkan	Kec. Batang Serangan, Kab.	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan/kelautan

		perhatian/dukungan juga bantuan berupa bibit-bibit sapi, kambing unggulan dan bibit – bibit ikan.	Langkat		
		Dimohon kepada Pemerintah agar harga karet tidak dihargai rendah Karena pupuk subsidi yang diharapkan masyarakat hilang dari peredaran. Selain itu harga pupuk non subsidi sangat tinggi. Jadi petani karet dan petani lainnya mengharapkan agar pupuk subsidi sampai di desa mereka.	Kec. Selesai, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian
		Warga Kampung lama yang berusaha di bidang peternakan memohon agar dapat dibantu dalam hal bibit lembu atau domba untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian mereka.	Kec. Besitang, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan
		Selain Bertani sebahagian warga Desa Kebun Kelapa adalah Nelayan yang berjumlah ± 60 orang, masing-masing memiliki kapal/sampan untuk menangkap ikan, tetapi sebagian diantaranya sudah tidak dapat melakukan aktivitasnya karena sampan/kapal mereka sudah rusak dan tidak layak pakai. Melalui Reses ini mereka memohon dapat menampung keluhan mereka agar dapat di bantu untuk memperoleh bantuan pengadaan kapal serta alat penangkap ikan demi kelangsungan kehidupan perekonomian mereka.	Kec. Secanggang, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan
		Warga Desa Kebun Kelapa yang beternak ikan dalam keramba menempatkan kerambanya dalam irigasi yang ada di desa mereka, tetapi	Kec. Secanggang, Kab. Langkat	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perikanan

		mereka selalu kesulitan dalam pengadaan bibit ikan, untuk itu mereka mohon agar dibantu dalam pengadaan bibit ikan lele ataupun ikan nila.			
		Memohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pusat untuk dapat memantau penyaluran gas elpiji yang saat keberadaannya sudah sangat menguatirkan, apabila pada saat mobil layanan operasional elpiji menyalurkan melalui distributor yang ada di salah satu distributor di lain Kelurahan, apabila warga Kelurahan lain akan membeli, dinyatakan bahwa elpiji sudah habis. Jadi memohon kepada Pemerintah agar dapat memantau penyaluran elpiji yang 3 Kg.	Kec. Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Masyarakat Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota mengharapkan kepada Pemerintah Kota Binjai maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan gas 3 Kg, yang akhir-akhir ini sangat susah untuk mendapatkannya.	Kec. Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Di lingkungan Andalan Kelurahan Berngam ini belum ada Koperasi, masyarakat mengharapkan agar di Lingkungan Andalan ini didirikan Koperasi, sehingga masyarakat yang selama ini masih meminjam uang dari rentenir dapat beralih ke Koperasi.	Kec. Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Warga Cengkeh Turi terutama petani memohon agar dapat diberi bantuan mesin penanam padi,	Kec. Binjai Utara, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas pertanian

		hal ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan mereka bertanam padi mengingat areal pertanian di tempat mereka sangat luas. Mereka juga memohon agar dimudahkan dalam memperoleh bibit padi dan pupuk.			
		Masyarakat Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota mengharapkan kepada Pemerintah Kota Binjai maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan gas 3 Kg, yang akhir-akhir ini sangat susah untuk mendapatkannya.	Kec. Binjai Utara, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Di lingkungan Andalan Kelurahan Bergam ini belum ada Koperasi, masyarakat mengharapkan agar di Lingkungan Andalan ini didirikan Koperasi, sehingga masyarakat yang selama ini masih meminjam uang dari rentenir dapat beralih ke Koperasi.	Kec. Binjai Utara, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Permohonan Bantuan Dana Kredit UKM untuk pengembangan Wira Usaha bagi masyarakat kurang mampu untuk menunjang tarap perekonomian yang lebih baik.	Kec. Binjai Utara, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi
		Dari pertemuan dengan masyarakat/warga Desa Puji Dadi, para Kelompok Tani di desa tersebut kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi (langka) dan harus membeli pupuk dengan harga yang terbilang cukup mahal, jadi masyarakat/warga memohon pengadaan pupuk bersubsidi di perbanyak.	Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perkebunan/ pertanian
		Melalui Reses ini warga Desa Puji Dadi, para Kelompok Ternak memohon kepada pemerintah	Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas peternakan

		untuk pengadaan bantuan bibit – bibit ternak dikarenakan di desa tersebut susah untuk mendapatkan bibit – bibit ternak yang murah dan bagus (berkualitas).			
		Melalui Pertemuan Reses ini warga masyarakat Desa Karang Gading, Khususnya ibu-ibu memohon agar ada solusi tentang kelangkaan gas 3 kg dan berharap agar di tambah kuotanya.	Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Masyarakat Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Kota khususnya, umumnya Kota Binjai akhir-akhir ini susah sekali (Langka) mendapatkan Gas LPG 3 Kg, masyarakat mengharapkan kepada Pemerintah Kota Binjai dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat mencari solusi-solusi sehingga gas 3 Kg di Kota Binjai tidak langka, dan masyarakat tidak susah mencari Gas 3 Kg tersebut.	Kec. Binjai Timur, Kota Binjai		biro perekonomian / distamben
		Memohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pusat untuk dapat memantau penyaluran gas elpiji yang saat keberadaannya sudah sangat menguatirkan, apabila pada saat mobil layanan operasional elpiji menyalurkan melalui distributor yang ada di salah satu distributor di lain Kelurahan, apabila warga Kelurahan lain akan membeli, dinyatakan bahwa elpiji sudah habis. Jadi memohon kepada Pemerintah agar dapat memantau penyaluran elpiji yang 3 Kg.	Kec. Binjai Timur, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	biro perekonomian / distamben
		Mohon kiranya dapat dipermudah untuk mendapatkan pinjaman modal usaha (UKM) bagi	Kec. Binjai Timur, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas koperasi

		masyarakat yang memiliki usaha home industry (pedagang bakso dan pembuatan brose baju berbantuk suvenir-suvenir).			
		Masyarakat perlu bantuan dana tambahan untuk menghidupkan perekonomian rakyat terutama bagi usaha yang dikelola perorangan (home industri).	Kec. Binjai Barat, Kota Binjai	APBD Prov (SKPD)Teknis	dinas perindag / biro perekonomian
		Pembangunan sarana air bersih	Desa Kwala Besilam kec. Padang Taulang	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Penyediaan tempat sampah	Kec. Bahorok Kab. Langkat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Revitalisasi hutan Mangrove	Kec. Sei Lapan Kab. Langkat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Desa Suka Jaya kec. Sei Lapan kab. Langkat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Desa Mekar Maksur kec. Sei Lapan kab. Langkat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan sarana air bersih	Desa Kampung Lama Kec. Besitang kab. Langkat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembangunan drainase	Kec. Binjai Kota	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		a) Pembangunan drainase berupa parit b) Penyediaan air bersih	Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara		Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Pembuatan leaning drainase parit beton	Kec. Binjai Kab.	APBN/APBD Provsu	Dinas Penataan Ruang

		sepanjang jalan T. Amir Hamzah	Langkat	(BKP)	dan Permukiman
		Peningkatan drainase dari Pangkalan ke Tangkahan	Kec. Batang Serangan Kab. Langkat	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan drainase jalan S.M. Raja	Kec. Binjai Utara Kota Binjai	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Peningkatan drainase	Kec. Binjai Barat Kota Binjai	APBN/APBD Provsu (BKP)	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
		Permohonan Bantuan pembuatan untuk titi jalan terusan Desa lalang sepanjang 4 m x 50 m di Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.	Kecamatan Tanjung Pura, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan Jembatan dan Pengaspalan jembatan penghubung yang berada di jalan Medan-Tanjung yang terletak berada di kota Tanjung Pura.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	
		Perbaikan Infrastruktur dari Kecamatan Batang Serangan menuju kota, sangat jelek dan rusak sehingga sudah sangat sulit untuk dilalui.	Kecamatan Tanjung Pura, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan sepanjang 7 Km dari simpang ladang sampai dengan Desa Muka Paya Kec. Hinai.	Kecamatan Hinai, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan-jalan desa menuju ke kota kabupaten untuk aktifitas masyarakat	Kecamatan Wampu, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan infrastruktur jalan yang rusak serta perbaikan dan pengaspalan di Kec. Kuala Kel. Bela Rakyat.	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Usulan pengaspalan jalan tanah Kecamatan Kuala	Kecamatan Kuala,	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		sepanjang 500 m x 3 m	Kab. Langkat	Kab.Kota	
		Lanjutan Pengaspalan dengan Hotmix dari Simp. Lima menuju Simp. Inpres 1500 m x 4 m lokasi di Lingk III Tumakninah dan Lingk V Inpres Kel. Bela Rakyat	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Lanjutan Pengaspalan dengan Lapen dari Dsn III menuju Dsn IV Sep 2500 m x 3 m lokasi di Dsn III s/d Dsn IV Desa parit Bindu	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Lanjutan Pengaspalan Jalan sep 2000 m x 3 m lokasi di Lingk I Sidodadi Kel. Pekan Kuala	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan dengan Lapen sep 1000 m x 4 m lokasi Dsn VII Siberaya Menuju Dsn VI Bunga Rinte Desa Garunggang	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBN	
		Rehab Berat Pengaspalan Jalan sep 1000 m x 4 m lokasi Dsn I Besadi menuju Dsn IV Lau Mentar Desa Besadi	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan Jalan Pamah sep 500 m x 3 m lokasi Desa Raja Tengah	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Lanjutan Pengaspalan dengan Hotmix sep 1000 m x 3 m lokasi Dsn II Mekar Jaya Desa Suka Damai	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan Lapen sep 400 m x 3 m gang cahaya lokasi Desa balai kasih	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Lanjutan Pengaspalan dengan Hotmix sep 1600 m x 4 m lokasi Sp Buluh Duri menuju Dsn Tanjung Balai Desa Beruam	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan Jalan dengan lapen 1500 m x 3 m lokasi Dsn Handayani Desa Sido Makmur	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov dan APBD Kota Medan	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan dengan Hotmix Lingkaran Bundaran Tugu Pijer Podi dan jalan menuju Titi Panjang sep 300 m x 3 m lokasi Desa Dalam Naman	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan dengan Hotmix sep 1500 m lokasi	Kecamatan Kuala,	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		Dsn Inpres Desa Sido Makmur	Kab. Langkat	Kab.Kota	
		Pengaspalan Jalan dengan Lapen Jalan Lingk IV Rel sep 1200m x 3 m lokasi Lingk IV Rel Kel Bela Rakyat	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan dengan Hotmix sep 1500 m x 4 m lokasi Dsn II Sipirak menuju Dsn I Besadi Desa Besadi	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan dengan Hotmix Simpang SMU I Negeri Kuala sampai Pasar Lori uk 1000 m x 4 m lokasi Kelurahan Pekan Kuala	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembuatan Jembatan Sungai Menjahong sep 15 m x 3 m lokasi Dsn I Nangka Lima ke Dsn Menjahong Desa Raja Tengah	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangnan Jembatan sungai Begumit yang menghubungkan Dsn Dalam Naman dengan Lingk I Sidodadi Kel. Pecan Kuala dan Desa Sei Penjara dan Desa Blankahan sep 75 m lokasi Desa Dalam Naman	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan dengan Hotmix sep 500 m x 4 m lokasi Dsn I Besadi menuju Dsn V Duren Mulo Desa Besadi	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan sep 3000 m x 3,5 m sampai Desa Balai Kasih lokasi Dsn I Dalam Naman Desa Dalam Naman	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Rehab Jembatan sep 15 m x 3m lokasi Dsn I Nangka Lima ke Dsn Menjahong Desa Raja Tengah	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembuatan Jembatan uk 5m x 4 m sebanyak 1 unit lokasi Lingk I Sidodadi Kel. Pekan Kuala	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengerasan Jalan Dsn II s/d Dsn VIII sep 8000 m x 3 m lokasi Dsn II s/d Dsn VIII Desa Parit Bindu	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan Jalan Bakti ABRI sep 350 m x 3 m	Kecamatan Kuala,	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		lokasi Perbatasan Dsn I Nangka Lima dgn Dsn II Kp. Baru Desa Raja Tengah	Kab. Langkat	Kab.Kota	
		Pembuatan Jembatan uk 15 m x 5 m lokasi Dsn III Cinta Rakyat Desa Garunggang	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Titi Gantung sep 75 m lokasi Dsn I Dalam Naman Desa Dalam Naman	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaiki total Jembatan Penghubung Menuju Desa Bekiung sep 6 m x 4m lokasi Lingk VI Rel Kel. Bela Rakyat	Kecamatan Kuala, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
					Dinas Bina Marga
		Perbaiki jalan Provinsi di Kecamatan Padang Tualang yang kondisinya saat ini sangat rusak parah.	Kecamatan Padang Tualang, Kab. Langkat	APBD Prov. SU	Dinas Bina Marga
					Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jalan Bulang Bakat sepanjang ± 16 Km dan lebar ± 8 m. Jalan ini melalui 4 (empat) Desa yang ada di Kecamatan Bahorok dan pembukaan destinasi wisata baru Bulang Bakat (Bukit Lawang – Batu Katak).	Kecamatan Bahorok, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaiki infrastuktur jalan menuju Bahorok saat ini sudah rusak berat	Kecamatan Bahorok, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaiki Jalan yang menghubungkan beberapa desa saat ini sudah rusak, antara lain jalan Desa Empus – Desa Batugajah sepanjang 3 Km.	Kecamatan Bahorok, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pelebaran Jalan Pekan Bahorok menuju Bukit Lawang	Kecamatan Bahorok, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jalan alternatif / tembus dari Kecamatan Pematang Jaya Kecamatan Sei Lapan sampai ke Perbatasan Provinsi Aceh	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan/perbaiki Jalan sepanjang 450	Kecamatan Sei	APBD Prov. SU/APBD	Dinas Bina Marga

		Meter di Lingkungan Pangkalan Berandan Timur Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan.	Lapan, Kab. Langkat	Kab.Kota	
		Perbaikan/Pengaspalan Jalan lintas Medan-Banda Aceh di perbatasan Kecamatan Berandan Barat dengan Kecamatan Besitang di depan Kantor Koramil Besitang	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan Jalan Lintas Pangkalan Susu sepanjang 8 Km dari Kota Berandan Barat ke Pangkalan Susu.	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan/perbaikan Jalan di Lingkungan Pangkalan Berandan Timur Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Jembatan Dusun II Wonorejo Desa Lama Baru Bronjong Sungai Dusun IV.	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pemeliharaan jalan wisata menuju Bahorok yang saat ini kondisinya sudah parah sepanjang 15 km yang merupakan jalan provinsi yang terletak di Kuala, Selapian dan menuju Bahorok.	Kecamatan Sei Lapan, Kab. Langkat	APBD Provinsi	Dinas Bina Marga
		Pembuatan/penimbunan jalan lama Desa yang rusak akibat longsor sebagai jalan penghubung Masyarakat dari kampung tempel ke Dusun II (jalan usaha tani L 2M X 1000M) dan pembuatan turap sepanjang 15M	Kecamatan Sei Bingei, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan/pengaspalan jalan penghubung antar dusun yaitu Dusun Kloneng I s/d Dusun tahun XI sepanjang ± 1 km.	Kecamatan Batang Serangan , Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan baru jembatan yang menghubungkan Desa Selayang dengan Desa Perhiasan .	Kecamatan Selesai , Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

		Perbaikan jalan dari Desa Kuala Air Hitam ke Pardanauli sepanjang ± 6 km, lebar 3 m.		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pembangunan Rabat Beton dan pembuatan Titi jalan Pelabuhan di lingkungan V Simpang Tiga sepanjang ± 175 m dan pengaspalan jalan Datok Johan Pahlawan menuju Lk.II Bukit Mas Pasar sepanjang 150 m.	Kecamatan Besitang , Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan jalan utama desa yang merupakan poros jalan di mulai dari desa kampung dua menuju desa sei ular sepanjang ± 2600 m	Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Pengaspalan/perbaikan Jalan Payaloba menuju Binjai	Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai	APBD Provinsi	Dinas Bina Marga
		Perbaikan jalan dari Simpang sampai ke Jalan Andalan 13 di Kelurahan Bergam		APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Perbaikan dan pengaspalan jalan perbatasan antara Kelurahan Jati Utomo dengan Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai.	Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga
		Percepatan pembangunan Jalan TOL Medan-Binjai.	Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai	APBN	Dinas Bina Marga
		Pelebaran jalan yang ada di Kec. Binjai Barat	Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai	APBD Prov. SU/APBD Kab.Kota	Dinas Bina Marga

*) Rekapitulasi Hasil Reses DPRD tahun 2014)

2.3. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.83.
Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas
Provinsi Sumatera Utara

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf	>	1. Realisasi peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan (guru, siswa, prasarana, sistem) yang menjabarkan UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang masih terbatas. 3. Kapasitas lembaga pendidikan kejuruan/pelatihan keterampilan yang relatif rendah	1. Penguatan dan pengawasan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi dan berbasis lokal 2. Penerapan pendidikan berbasis karakter bagi pendidik dan peserta didik 3. Keberadaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai serta terjangkau sesuai kebutuhan di tiap jenjang pendidikan 4. Alokasi dana pendidikan yang terus meningkat untuk membiayai program dan kegiatan prioritas bidang pendidikan
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	>		
1.3.	Pendidikan dasar 9 tahun	>		
1.4.	Angka partisipasi sekolah	>		
1.5.	Angka partisipasi kasar	>		
1.6.	Angka partisipasi murni	>		
1.7.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	=		
1.8.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	=		
1.9.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	>		
1.10.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	<		
1.11.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	<		
1.12.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<		
1.13.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	<		
1.14.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	<		
1.15.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	<		
1.16.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	<		
1.17.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	<		
1.18.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	<		
1.19.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	<		
1.20.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	<		
1.21.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	>	1. Derajat Kesehatan masih rendah yang ditunjukkan dengan masih tingginya Angka Kematian Bayi, Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang dan Angka Kematian Ibu melahirkan. 2. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di seluruh bidang pelayanan 2. Universal coverage pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesda dan Jampersal 3. Kesejahteraan tenaga pelayan kesehatan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan terluar
2.2.	Angka usia harapan hidup	<		
2.3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	>		
2.4.	Persentase balita gizi buruk	<		
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	<	1. Kerusakan sarana dan prasarana transportasi, kapasitas bandara dan pelabuhan, 2. saluran irigasi/rawa, jaringan pengairan lainnya, air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai 3. Ketersediaan pasokan energi terbarukan dan penggalan sumber energi baru 4. Pemantapan dan efektifitas jalan raya (jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota). 5. Realisasi pembangunan	- Peningkatan alokasi anggaran - Peningkatan SDM dan kelembagaan - Peningkatan peralatan - Meningkatkan fungsi jaringan irigasi pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi - Meningkatkan fungsi jaringan Rawa pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ normalisasi /rehabilitasi jaringan Rawa - Penanganan banjir akibat sudah berkurangnya hutan di daerah hulu sungai - Penyediaan sarana air baku sebagai kebutuhan dasar masyarakat seiring dengan peningkatan penduduk dan
3.2.	Rasio jaringan irigasi	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
3.3.	jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum		<p>jalan lingkar luar (<i>Outer Ring Road</i>) Danau Toba.</p> <p>6. Realisasi pembangunan jalan Tanjung Morawa-Saribudok-Tongging (Rawasaring).</p> <p>7. Realisasi pembangunan kawasan Mebidang-Ro</p>	terjadinya krisis air		
3.4.	persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	<				
3.5.	Panjang jalan dilalui Roda 4	<				
3.6.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	<				
3.7.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	<				
3.8.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	<				
4.	Perumahan/Permukiman					
4.1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	=				
5.	Perencanaan Pembangunan					
5.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	=				
5.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	=				
5.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	=				
5.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	=				

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Perhubungan			
6.1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	<	<ol style="list-style-type: none"> Status Pelabuhan Laut Pengumpan Regional belum sepenuhnya diserahkan oleh Kemenhub (Kepmenhub No.KM.313/2013) Kelengkapan dokumen pendukung (Kepmenhun No.1 /2006) Pengembangan Terminal Angkutan Jalan yang belum sesuai dengan arahan RTRW (batal dilaksanakan) Pembangunan fasilitas terminal VIP Bandara Kualanamu 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Pemerintah Pusat - Kelengkapan dokumen perencanaan (FS/DED) oleh Pemda - Keseuaian usulan pembangunan dengan Dokumen RTRW - Pembebasan lahan
7.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak			
7.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	< 5,44	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya peran aktif perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta Minimnya Perlindungan hak perempuan dan anak di seluruh sektor 	<ol style="list-style-type: none"> Berjalanya fungsi kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di lembaga pemerintahan dan swasta Kerjasama yang terintegrasi aparat penegak hukum dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak
7.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	< 17 %		
7.3.	Rasio KDRT	< 20		
7.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	=		
7.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	56,10 %		
7.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	= 356		
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	= 3,0	<ol style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat tanpa terkendali Minimnya minat pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta aktif KB 	<ol style="list-style-type: none"> Slogan “Dua Anak Lebih Baik” menjadi keinginan setiap pasangan rumah tangga Dasar pemahaman yang kuat akan pentingnya ber-KB
12.2.	Rasio akseptor KB	= 51,7 %		
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	= 64,36 %		
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	= 34,14 %		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Sosial			
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	= 20	1. Keberadaan prasarana dan sarana panti pemerintah dan swasta yang memperhatikan 2. Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial yang minim	1. Rehabilitasi rutin dan berkala panti pemerintah dan swasta 2. Penyandang masalah kesejahteraan sosial memperoleh pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan social	= 26		
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	= 26		
14	Ketenagakerjaan			
14.1.	Rasio penduduk yang bekerja	=	1. Rendahnya serapan angkatan kerja 2. Rendahnya kualitas tenaga kerja	1. Berjalannya fungsi BLK dalam menghasilkan tenaga kerja siap pakai berkualitas 2. Kerjasama yang sinergi dan terintegrasi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Lembaga Penyedia Tenaga Kerja
14.2.	rasio ketergantungan	=		
14.3.	Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)	<		
14.4.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	>		
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
15.1.	Persentase koperasi aktif	<	Produktifitas koperasi yang masih rendah serta sumber daya manusia belum mampu untuk aplikasi sistem informasi teknologi khususnya pasar	Pelatihan dan pembinaan Koperasi serta pemberian aksesibilitas permodalan yang murah antara lain dengan skim kredit bunga murah seperti dengan pendirian Badan layanan Umum Daerah (BLUD) dengan konsep Gramming Bank
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM	<		
15.3.	Jumlah BPR/LKM	<		
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	<		
16	Penanaman Modal			
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	- Penerbitan izin usaha yang masih terpusat di Pusat, selain itu juga daya saing infrastruktur yang rendah - Promosi investasi yang masih rendah, serta permasalahan lokasi investasi yang belum jelas	- Perlu ada desentralisasi penerbitan izin investasi di daerah serta perbaikan fasilitas infrastruktur khususnya jalan dan energi - Promosi investasi harus terus ditingkatkan baik skala internasional
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	>		
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	<		
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)			
16.5.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<		
16.6.	Angka kriminalitas			
16.7.	Jumlah demo	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.8.	Lama proses perijinan	<	(status lahan yang bermasalah)	maupun nasional, serta komitmen Pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan UU tentang Pertanahan yang baru
16.9.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	<		
17.	Kebudayaan			
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	<	Pagelaran/pertunjukan seni budaya masih terbatas	Fasilitas pendukung gedung pertunjukan belum memadai
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	<		
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	<		
18.	Kepemudaan dan Olahraga			
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	<	1. Minimnya Data dan informasi organisasi pemuda dan olahraga 2. Minimnya prestasi olahraga disebabkan prasarana dan sarana olahraga yang tidak mendukung	1. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi dan keberadaan organisasi pemuda dan olahraga serta prasarana dan sarana olahraga 2. Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang memadai guna memacu prestasi olahraga
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	<		
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	<		
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	<		
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	<		
18.6.	Lapangan olahraga	<		
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	<	1. Minimnya jumlah aparat keamanan swadaya masyarakat dan prasarana pendukung	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan tempat tinggal
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	<		
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	<	2. Minimnya jumlah aparat keamanan swadaya masyarakat dan prasarana	2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan tempat tinggal
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	<		
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.4.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	<	pendukung	tinggal
22	Ketahanan Pangan			
22.1.	Regulasi ketahanan pangan	=	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih berlanjutnya alih fungsi lahan sawah 2. Menurunnya kualitas kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan 3. Terbatasnya penyediaan air bagi budidaya beberapa komoditas pangan pokok dan strategis 4. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi (terutama pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat) yang belum tepat 5. Terbatasnya fasilitas permodalan di pedesaan dan meningkatnya suku bunga Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang berdampak kepada terbatasnya penerapan teknologi 6. Belum optimalnya penangganan panen dan pasca panen yang berpotensi mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemanfaatan irigasi yang ada serta perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru dan penghentian alih fungsi lahan melalui penetapan aturan-aturan yang dilandasi hukum 2. Pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan agar potensi lahan yang ada dapat dipertahankan terutama di wilayah usaha berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan dengan menerapkan teknologi konservasi dan rehabilitasi 3. Peningkatan dan penanganan teknologi pasca panen untuk memperoleh efisiensi dan kualitas produksi pertanian 4. Penyediaan sarana produksi dan permodalan secara tepat sehingga bermanfaat untuk petani bagi meningkatkan produktivitas hasil 5. Penguatan kelembagaan dan system penyuluhan bagi para petani sehingga terjadi penerapan paket teknologi untuk meningkatkan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			7. Cukup tingginya jumlah penduduk miskin yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya keterampilan, akses permodalan dan lapangan kerja	<p>produktivitas hasil</p> <p>6. Mengurangi rasio ketergantungan terhadap impor dan pemasukan bahan pangan dari provinsi lain guna kebutuhan masyarakat</p> <p>7. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat yang menghadapi masalah pangan</p>
22.1.	Ketersediaan pangan utama	=		
24	Statistik			
24.1.	Buku "Provinsi Dalam Angka"	=		
24.2.	Buku "PDRB kabupaten"	<		
25	Kearsipan		1. Minimnya keberadaan arsip daerah 2. Minimnya kemampuan SDM arsiparis	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya arsip daerah 2. Tata kelola arsip yang tertib dan teratur
25.1.	Pengelolaan arsip secara baku	=		
25.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	=		
26	Komunikasi dan Informatika		1. Prasarana dan sarana media informasi baik cetak maupun elektronik belum menjangkau seluruh lokasi di daerah	1. Informasi tersampaikan ke seluruh daerah melalui media cetak dan media elektronik
26.1.	Jumlah jaringan komunikasi	=		
26.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	=		
26.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	=		
26.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	=		
26.5.	Web site milik pemerintah daerah	=		
26.6.	Pameran/expo	=		
27.	Perpustakaan		1. Jumlah perpustakaan dan koleksi buku yang ada belum memenuhi kebutuhan masyarakat	1. Tersedianya perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai dengan kerjasama TP PKK melalui desa binaan
27.1.	Jumlah perpustakaan	<		
27.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	<		
27.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	<		
B.	URUSAN PILIHAN			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertanian			
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		1. Peningkatan produktivitas tidak dibarengi dengan peningkatan luas panen (untuk padi dan kedele) 2. Terjadinya konversi lahan pertanian produktif 3. Anomali iklim yang mempengaruhi pola tanam 4. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi (terutama pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat) yang belum tepat	1. Revitalisasi pertanian mendukung peningkatan produksi dalam menjaga stabilitas pangan dan mensukseskan swasembada pangan 2. Peningkatan mekanisasi pertanian 3. Pengadaan bibit/benih unggul 4. Peningkatan sarana dan prasarana (Pembangunan jalan produksi, irigasi)
	1.1.1. Padi (Ton)	>		
	1.1.2. Jagung (Ton)	>		
	1.1.3. Kedele (Ton)	<		
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	>		
1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	>		
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	>		
1.5.	Nilai tukar petani	>		
2.	Kehutanan			
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis			
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan			
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	<		
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral			
3.1.	Pertambangan tanpa ijin	<	Penerapan prinsip eco environmental telah menjadi rujukan untuk perijinan tambang	Pembuatan Perda Larangan bagi para PETI untuk beroperasi serta adanya zonasi bagi operasional Legal yang diperbolehkan dan dimasukkan dalam RTRWP/RTRWK
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	<		
4.	Pariwisata			
4.1.	Kunjungan wisata	<	1. Infrastruktur belum memadai menuju destinasi 2. Destinasi wisata masih monoton	Pembangunan/perbaikan jalan menuju objek wisata ditingkatkan
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	>		
5.	Kelautan dan Perikanan			
5.1.	Produksi perikanan (ton)	<	1. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum sepenuhnya	1. Pengembangan produksi perikanan budidaya untuk konsumsi dalam
5.2.	Konsumsi ikan/kapita/thn	<		
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	Tidak ada data		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Tidak ada data	<p>dikelola secara efisien dengan penerapan teknologi maju dengan budaya bisnis.</p> <p>2. Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang belum merata di seluruh Sumatera Utara, khususnya perikanan tangkap.</p> <p>3. Terjadinya cara-cara pemanfaatan sumberdaya perikanan yang tidak bertanggungjawab.</p> <p>4. Terjadinya pencemaran perairan umum dan perairan pantai akibat limbah industri dan rumah tangga.</p> <p>5. dukungan prasarana terhadap pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ikan dibandingkan dengan potensi perikanan yang tersedia</p> <p>6. Jumlah induk unggul untuk kegiatan pembenihan masih sangat terbatas</p> <p>7. Mutu hasil perikanan pada tahap pra panen belum sepenuhnya dapat dikendalikan sesuai dengan standar negara tujuan ekspor</p>	<p>negeri dan ekspor di kawasan budidaya air tawar,air payau/tambak dan air laut</p> <p>2. Pengadaan kapal dan alat penangkap ikan</p> <p>3. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana budidaya melalui pengadaan calon induk unggul dan pengadaan mesin pellet</p> <p>4. Identifikasi potensi dan pemetaan pulau di Sumatera Utara</p> <p>5. Pengembangan kluster industri pengolahan hasil perikanan</p>

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Perdagangan			
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	>		
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	>		
7.	Perindustrian			
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	<	1. Krisis energi listrik yang menghambat produksi industri rumah tangga 2. Bahan baku masih diimpor dari luar	1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dibidang energi listrik
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	<		
7.3.	Pertumbuhan Industri.	<		

BAB - III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi daerah

Kondisi geoekonomi global tetap akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia pada tahun 2015 dan 2016. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah:

Pertama, proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat. Hal ini karena proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang berlangsung secara bertahap dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa yang diperkirakan akan tetap lemah dan rentan akibat masih tingginya tingkat utang dan fragmentasi keuangan yang menahan laju permintaan domestik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan akan cenderung moderat, dan Jepang akan menghadapi risiko fiskal jangka menengah disebabkan oleh besarnya obligasi pemerintah dan belum adanya rencana penyesuaian ekonomi jangka menengah.

Kedua, pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan mengakibatkan negara berkembang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia.

Ketiga, tren perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang, tetapi juga oleh perdagangan jasa yang diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan global. Perkembangan jaringan produksi regional dan global yang mendorong peningkatan *intra-industry trade* antar negara pemasok akan menjadi alasan utama terjadinya peningkatan perdagangan jasa antar negara. Hal ini tentunya karena salah satu peranan jasa adalah sebagai faktor pendukung dan penunjang proses produksi, seperti: jasa logistik dan distribusi, jasa transportasi, dan jasa keuangan.

Keempat, harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga produk manufaktur dalam tren meningkat. Bank Dunia memperkirakan indeks harga komoditas energi akan turun dari 123,2 pada tahun 2015 menjadi 121,9 pada tahun 2019. Di sisi lain, indeks harga komoditas non-energi diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan yang relatif konstan. Di sisi lain, indeks harga produk manufaktur akan meningkat dari 109 pada tahun 2015 menjadi 115,4 pada tahun 2019 (Sumber: Bank Dunia, *Commodity Price Forecast*). Hal ini tentunya menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspornya, dari berbasis komoditas menjadi berbasis manufaktur.

Kelima, semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspor. Hal ini merupakan salah satu akibat dari krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu yang memicu kecenderungan masing-masing negara untuk mengamankan pasar domestiknya melalui upaya penerapan hambatan perdagangan yang berupa *non tariff measures* (NTMs) dan *non tariff barriers* (NTBs). Dalam 12 bulan ke belakang, jumlah NTMs di

dunia meningkat dengan sangat pesat, seperti berupa *Sanitary-and-Phytosanitary measures* dan *export taxes/restriction*. Dilihat dari sebaran geografisnya, NTMs banyak diterapkan oleh Uni Eropa, India, Rusia dan Amerika Latin.

Keenam, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan dimulai tanggal 31 Desember 2015. Dengan MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Indonesia secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan Indonesia perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia akan menjadi aset berharga bagi Indonesia untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan nasional.

Ketujuh, pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok. Hal ini bermula dari kesadaran bahwa kerjasama *plurilateral* dapat mengurangi kerumitan yang terjadi (*noodle bowl syndrome*) akibat banyaknya kesepakatan bila-teral. Pergeseran paradigma arsitektur kerjasama ekonomi global tidak berhenti pada tingkat plurilateral, karena saat ini telah berkembang keinginan negara-negara untuk membangun konstelasi kerjasama ekonomi yang lebih luas. Tiga kesepakatan kerjasama ekonomi yang sedang dalam proses perundingan diperkirakan akan menjadi tiga Mega Blok Perdagangan (*Mega Trading Block*), yaitu: TPP (*Trans Pacific Partnership*) yang saat ini beranggotakan 13 negara Asia dan Pasifik, TTIP (*Trans Atlantic Trade and Investment Partnership*) yang terdiri dari Amerika dan EU (*European Union*), dan RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) yang terdiri dari 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra ASEAN. Ketiga mega blok perdagangan ini diperkirakan akan menjadi penentu arsitektur perdagangan dan investasi global.

Dari berbagai tantangan perekonomian nasional, maka di tataran Daerah Sumatera Utara terdapat beberapa permasalahan juga yang menjadi tantangan kedepan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, seperti :

Pertama, ketersediaan energi yang masih menjadi kendala pembangunan daerah, seperti pasokan energy listrik, ketersediaan energy gas serta kelangkaan juga dipasokan LPG bagi masyarakat luas.

Kedua, Berimbang dari kondisi global dan nasional, harga komoditas pangan juga menjadi salah satu kendala meningkatkan ekspor Sumatera Utara, yang sebagian besar masih mengandalkan pada penjualan komoditi bahan baku seperti CPO dan karet dan berbagai bahan baku lainnya.

Ketiga, Infrastruktur yang menjadi sarana pendistribusian barang dan jasa masih terbatas kapasitas dan kualitasnya, sehingga hal ini berpengaruh pada capaian indeks harga konsumen sebagai representatif dari pergerakan harga komoditi pada tingkatan konsumen.

Dengan berdasarkan masalah tersebut diatas, berikut akan disajikan kebijakan ekonomi makro nasional dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebagai berikut :

Pada tataran Pemerintah Nasional maka kebijakan pokoknya adalah :

- 1). **Memantapkan perekonomian nasional**
Perhatian akan ditujukan pada peningkatan investasi, industry pengolahan non migas, daya saing ekspor, peningkatan efektifitas penerimaan Negara, penguatan penyerapan belanja Negara dan pemantapan ketahanan pangan dan energy
- 2). **Menjaga stabilitas Ekonomi**
Dorongan akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga komoditi baik migas maupun non migas serta upaya pengendalian arus modal.
- 3). **Mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan**
Upaya akan ditujukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta dapat mengangkat masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan dengan program program yang tepat dan terpadu,

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas dan dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen, sementara tahun 2016 sebesar 6,6 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, Sasaran Kuantitatif tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015, dan sebesar 5,2-5,5 persen serta jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015 serta sebesar 9,00-10,00.

Sementara untuk Provinsi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi juga akan relative lebih rendah dari capaian tahun 2013 yang tumbuh sebesar 6,01%, pertumbuhan ekonomi diprediksi akan berkisar di 5,85-6,00 persen sasaran kuantitatif tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar 6,0-6,25 persen dan tahun 2016 sebesar 5,50-5,75 persen.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Capaian Tahun 2015

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 merupakan rencana kerja pemerintah tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2015–2019 dan disusun pada akhir periode pelaksanaan RPJMN tahun 2010–2014. Kerangka ekonomi makro tahun 2015 berisi gambaran perkembangan ekonomi makro selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, perkiraan ekonomi makro tahun 2014, serta sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2015.

Berbeda halnya dengan Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, sementara tahun 2016 adalah pelaksanaan tahun ketiga RPJMD.

Kondisi ekonomi daerah Sumatera Utara berkaitan langsung dengan kinerja perekonomian global dan nasional, hal ini seharusnya menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati, sebab fluktuasi ini akan mempengaruhi kinerja perekonomian Sumatera Utara.

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kondisi perekonomian dunia diliputi ketidakpastian. Krisis keuangan Eropa yang masih berlanjut dengan tidak adanya kepastian penyelesaian utang, pemulihan ekonomi AS yang masih lambat, serta mulai

menurunnya kemampuan negara-negara Asia untuk menjadi penopang perekonomian dunia telah meningkatkan resiko ekonomi dunia. Pada tahun 2013, kondisi perekonomian dunia secara perlahan membaik yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian negara-negara maju. Namun, ketidakpastian kondisi ekonomi dunia diprediksikan akan masih tetap tinggi hingga tahun 2014 yang berdampak pada pelemahan perdagangan dunia sehingga mendorong penurunan harga komoditi dunia, termasuk harga minyak mentah dunia.

Pada tahun 2010-2012, kondisi perekonomian dunia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010, perekonomian dunia sedikit pulih setelah terimbas dampak krisis *subprime mortgage* di tahun 2008. Kebijakan menyelamatkan perusahaan melalui pemberian *bailout* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberi ekspektasi positif terhadap perekonomian dunia. Pada tahun 2011 hingga tahun 2012, perekonomian dunia kembali tertekan dengan permasalahan fiskal yang terjadi di kawasan Eropa, terutama Yunani. Defisit fiskal yang lebar disertai hutang pemerintah per PDB yang besar, membatasi ruang gerak pemerintah Yunani dalam upaya mengatasi resesi ekonomi. Keterkaitan sistem keuangan yang erat terutama pada kawasan Eropa mendorong krisis fiskal Yunani melebar ke negara-negara lain di Kawasan Eropa, sehingga terjadi krisis keuangan Eropa. Pada tahun 2012, pertumbuhan perekonomian dunia masih mengalami perlambatan yang terutama disebabkan oleh: (i) lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (ii) berlanjutnya krisis keuangan Eropa; dan (iii) melemahnya perdagangan dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara Asia sebagai penopang perekonomian dunia.

Perekonomian Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,9 persen pada tahun 2013, menurun signifikan dibandingkan pada periode sebelumnya tahun 2012 yang tumbuh sebesar 2,8 persen. Namun demikian, investasi meningkat sebesar 5,5 persen. Tumbuhnya investasi di Amerika Serikat kemungkinan akibat adanya isu bank sentral (*The Fed*) yang akan melakukan pengurangan stimulus moneter (*tapering off*) pada pertengahan tahun 2014, sehingga dana-dana yang tadinya berada di luar negeri ditarik dan dimasukkan kembali ke Amerika Serikat. Sedangkan belanja pemerintah pada tahun 2013 turun sebesar 2,3 persen. Hal ini sejalan dengan keputusan Kongres yang berencana menyetujui anggaran belanja pemerintah Amerika Serikat akibat defisit yang terus menerus terjadi.

Sementara itu, perekonomian negara-negara di kawasan Euro (EA17, yaitu kawasan yang negaranya memakai Euro sebagai mata uang) mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen. Tingkat hutang sebagian negara di kawasan Euro juga menurun, setelah sebelumnya selalu meningkat. Pada Triwulan III tahun 2013, di kawasan Euro tingkat hutang mencapai sebesar 92,8 persen dari GDP, menurun dari triwulan sebelumnya yang besarnya 92,7 persen. Kawasan Euro mengalami surplus transaksi berjalan sebesar EUR 66,8 miliar, meningkat signifikan apabila dibandingkan pada tahun 2012, yaitu mengalami defisit sebesar EUR 37,8 miliar.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara regional Asia terkendala oleh masih lambatnya perekonomian Cina dan India. Selama tahun 2013, PDB Cina tumbuh 7,6 persen, terendah sejak tahun 1999. Perlambatan ini merupakan dampak dari reformasi struktural yang dijalankan pemerintah Cina. Cina saat ini sedang memprioritaskan kestabilan ekonomi dibandingkan pertumbuhan yang cepat. Cina akan mengurangi ketergantungan pertumbuhan pada kinerja ekspor dan investasi dan lebih fokus pada target belanja konsumen dalam negeri dan jasa. Di sisi lain, inflasi yang tinggi di India, pertumbuhan ekonomi yang masih lemah, kenaikan defisit fiskal, ketidakseimbangan dalam neraca transaksi berjalan, dan kondisi politik yang tidak stabil, menjadikan tahun 2013 menjadi tahun terberat bagi India. Pertumbuhan ekonomi India pada tahun 2013

hanya sebesar 5,3 persen. Sektor manufaktur terus menjadi hambatan pada pertumbuhan PDB India secara keseluruhan akibat hasil manufaktur hanya naik sebesar 1,0 persen

Perubahan iklim global yang tidak menentu serta ketegangan politik Timur Tengah dan Iran mendorong indeks harga seluruh komoditi dunia menuju ke titik tertingginya pada tahun 2011. Indeks harga komoditi energi pada tahun 2011 sebesar 188,2 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 209,9. Namun, adanya perlambatan ekonomi di hampir seluruh negara di dunia mengakibatkan indeks harga komoditi dunia menurun drastis. Pada tahun 2013 secara rata-rata komoditi dunia menurun sebesar 87,1 poin. Indeks harga komoditi energi pada tahun 2013 sebesar 127,4 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 101,7.

Secara keseluruhan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 3,0 persen. Pada tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bertahap, upaya penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan ekonomi Cina yang membaik. Dengan demikian, perekonomian dunia pada tahun 2014 diperkirakan IMF tumbuh sebesar 3,6 persen.

Sementara untuk nasional Kondisi perekonomian Indonesia hingga awal tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut. *Pertama*, upaya keras pemerintah dengan berbagai kebijakan dan reformasi struktural ekonomi paska Krisis Asia tahun 1997/98 telah membawa perekonomian nasional pada kondisi: (i) terus menguat yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir mencapai hampir 6 persen; (ii) secara fundamental mampu dan kokoh menghadapi tekanan krisis ekonomi global, yang dimulai dengan Krisis Keuangan Lehman Brothers (tahun 2009 ekonomi masih tumbuh tinggi sebesar 4,6 persen) dan krisis utang pemerintah di Kawasan Eropa (tahun 2013 ekonomi masih tumbuh tinggi sebesar 5,8 persen).

Kedua, tercapainya pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen membutuhkan dorongan impor barang modal dan jasa yang cukup besar. Sementara itu melambatnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh: (i) melemahnya permintaan dunia yang ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia; dan (ii) melemahnya harga komoditi internasional, dimana komposisi ekspor nasional masih didominasi oleh barang komoditi. Kondisi ini mendorong terjadinya ketidakseimbangan eksternal, yang ditunjukkan oleh defisit neraca transaksi berjalan yang melemah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari surplus sebesar 0,3 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2011 hingga mencapai defisit sebesar 3,9 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2013.

Ketiga, melemahnya neraca transaksi berjalan diiringi dengan meningkatnya ketidakpastian aliran modal internasional, terutama disebabkan oleh isu *tapering off* sejak pertengahan tahun 2013 dan rencana akan berakhirnya kebijakan *Quantitative Easing* (QE) yang telah diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska Krisis Global Lehman Brothers. Isu *tapering off* tersebut menyebabkan neraca arus modal secara total turun menjadi USD22,721 miliar pada tahun 2013 dibandingkan dengan USD 24,9 miliar pada tahun 2012

Ditengah memburuknya (i) perekonomian global sebagai lanjutan krisis utang pemerintah di kawasan Eropa yang dimulai sejak akhir 2011; (ii) isu *tapering off* di Amerika Serikat sejak pertengahan 2013; (iii) tekanan terhadap rupiah yang disebabkan ketidakseimbangan eksternal (iv) inflasi yang tinggi paska kenaikan BBM bersubsidi; (v) serta kebijakan moneter yang relatif ketat yang diikuti oleh berkurangnya kredit

perbankan; ekonomi Indonesia masih tumbuh tinggi pada tahun 2013 mencapai 5,8 persen (turun dibanding pertumbuhan ekonomi 2012 yang besarnya 6,3 persen).

Melambatnya pertumbuhan ekonomi 2013 ini utamanya disebabkan oleh: (i) turunnya pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto) menjadi 4,7 persen dibanding 9,8 persen pada tahun 2012, yang disebabkan, antara lain oleh turunnya investasi non bangunan yang mempengaruhi hasrat melakukan investasi dikarenakan turunnya harga komoditi internasional; (ii) pertumbuhan ekspor barang dan jasa masih tetap rendah, yaitu 5,3 persen, lebih baik dibanding tahun 2012, yaitu 2,0 persen, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2011 (13,6 persen), yang antara lain disebabkan oleh, belum pulihnya perekonomian global dan semakin turunnya harga komoditi internasional.

Masih tetap tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 didorong oleh konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Meskipun terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013, konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu sebesar 5,3 persen (sama dengan pertumbuhan 2012), yang disebabkan oleh: (i) upaya pemerintah dengan program BLSM yang tetap menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mengkompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi; serta (ii) kerjasama yang kuat antara Pemerintah dan BI dalam rangka menstabilkan harga hingga inflasi kembali ke harga normal sampai dengan akhir tahun 2013. Pertumbuhan konsumsi secara total juga didorong oleh pengeluaran pemerintah yang tumbuh sebesar 4,9 persen dibanding tahun 2012 (1,2 persen). Selanjutnya, sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor tumbuh hanya sebesar 1,2 persen di tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang besarnya 6,6 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi 2013 didorong oleh: (i) sektor pertanian yang tumbuh sebesar 3,5 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor perikanan; (ii) sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 5,6 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor alat angkut, mesin & peralatannya; (iii) sektor tersier tumbuh 7,0 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh 10,2 persen.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, PDB per kapita tahun 2013 mengalami penurunan menjadi USD 3.499,9 (Rp 36,5 juta) dibanding tahun 2012, yaitu USD 3.583,2 (Rp 33,5 juta). Tahun 2014 diperkirakan PDB perkapita akan meningkat, dengan asumsi: (i) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 yang berlangsung dengan aman dan tertib; (ii) terjaganya kelangsungan pembangunan dan stabilitas moneter; (iii) terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (iv) membaiknya perekonomian dunia; (v) dengan asumsi beberapa variabel makro, yaitu nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada nilai keseimbangannya; laju inflasi 6 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,7 persen.

Sejak Tahun 2014, perhitungan PDRB Sumatera Utara dan juga Nasional akan mengalami perubahan dari metode lama ke metode baru yang mengikuti Standar System Of National Account (SNA) tahun 2008, melalui kerangka supplay and Use Tables (SUT), hal ini diperlukan untuk menjaga konsistensi antara dua pendekatan PDB/PDRB dan memperkecil perbedaan antara PDB Nasional dan PDRB, selain itu untuk memberikan gambaran perekonomian nasional terkini mulaid ari pergeseran struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, selain itu dalam upaya meningkatkan kualitas data PDB/PDRB yang dihasilkan serta menjadikan data PDB/PDRB agar dapat diperbandingkan secara internasional.

Berikut ini secara aplikatif dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016, akan disajikan informasi mengenai perkembangan PDRB secara dua metode yakni metode lama dan metode baru.

Bagi tataran daerah kondisi perekonomian Sumatera Utara masih mengalami tren yang membaik dari sisi agregasi PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000, pada tahun 2013 PDRB Sumatera Utara berdasarkan atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 403,93 triliun, dan atas dasar harga konstan tahun dasar 2013 sebesar Rp. 351,09 triliun, dengan laju pertumbuhan yang tetap positif disemua sektor, sebagaimana yang tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha/Sektor
Tahun 2011-2013 (persen)

Lapangan Usaha/Sektor	Tahun 2011	Tahun 2012 ^{*)}	Tahun 2013 ^{**)}	Sumber Pertumbuhan	
				2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	4,82	4,72	4,00	1,10	0,92
2. Pertambangan dan Penggalian	6,73	2,04	5,48	0,02	0,06
3. Industri Pengolahan	2,05	3,63	4,01	0,76	0,82
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	8,21	2,99	3,95	0,02	0,03
5. Bangunan	8,54	6,78	7,17	0,47	0,50
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,09	7,23	7,78	1,35	1,47
7. Pengangkutan dan Komunikasi	10,02	8,27	7,60	0,84	0,78
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	13,61	11,20	8,31	0,88	0,69
9. Jasa-jasa	8,30	7,54	7,13	0,77	0,74
PDRB	6,63	6,22	6,01	6,22	6,01

*Keterangan : *) Angka sementara
**) Angka sangat*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2013 sumber pertumbuhan tertinggi bagi peningkatan PDRB bersumber dari sector perdagangan, hotel dan restaurant dengan sumbangan pertumbuhannya mencapai 1,47 persen, disusul oleh sector pengangkutan dan komunikasi yang memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 0,78 persen. Adapun sektor yang memberikan sumber pertumbuhan terendah adalah sector listrik, gas dan air bersih yang memberikan sumbangan sebesar 0,03 persen, disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan sumbangan 0,06 persen.

Sementara jika melihat dari sisi besaran PDRB dan kontribusinya pada tahun 2013, dapat disajikan pada table di bawah ini :

Tabel 3.2
PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Sektor
Tahun 2012-2013 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Sektor	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan ²⁰⁰⁰	
	Tahun 2012 ^{*)}	Tahun 2013 ^{**)}	Tahun 2012 ^{*)}	Tahun 2013 ^{**)}
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1. Pertanian	76 838,11	86 118,60	30 778,67	32 010,15
2. Pertambangan dan Penggalian	4 635,32	5 252,87	1 525,32	1 608,89
3. Industri Pengolahan	77 484,96	87 170,66	27 513,10	28 615,62
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	3 150,34	3 430,43	971,99	1 010,40
5. Bangunan	23 595,94	27 934,64	9 348,16	10 018,50
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	67 027,28	77 918,68	25 406,77	27 384,48
7. Pengangkutan dan Komunikasi	32 855,01	38 574,73	13 858,26	14 911,54
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	26 442,21	31 030,23	11 111,51	12 034,81
9. Jasa-jasa	39 061,18	46 502,22	13 947,74	14 942,74
PDRB	351 090,36	403 933,05	134 461,51	142 537,12

Keterangan : ^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat

Dari tabel diatas, diperoleh hasil bahwa PDRB Sumatera Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp. 403,93 triliun dan dengan harga konstan mencapai Rp. 142,54 triliun, jika menilik dari pertumbuhannya maka berdasarkan harga berlaku terjadi peningkatan besaran nominal PDRB sebesar 15,05 persen, sementara atas dasar harga konstan mencapai 6,01 persen.

Adapun terkait dengan struktur PDRB atas dasar harga berlaku, disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Struktur PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha/Sektor Tahun 2011-2013
(persen)

Lapangan Usaha/Sektor	Struktur		
	Tahun 2011	Tahun 2012 ⁾	Tahun 2013 ^{**)}
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Pertanian	22,48	21,88	21,32
2. Pertambangan dan Penggalian	1,38	1,32	1,30
3. Industri Pengolahan	22,48	22,07	21,58
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,94	0,90	0,85
5. Bangunan	6,42	6,72	6,92
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	19,21	19,09	19,29
7. Pengangkutan dan Komunikasi	9,21	9,36	9,55
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,96	7,53	7,68
9. Jasa-jasa	10,92	11,13	11,51
PDRB	100,00	100,00	100,00

Keterangan : ⁾ Angka sementara

*^{**)} Angka sangat sementara*

Dari data diatas diperoleh hasil bahwa sector industry masih merupakan peringkat pertama dalam hal pemberi kontribusi terhadap PDRB dimana tahun 2013 memberikan sumbangan sebesar 21,58 persen, disusul oleh sector pertanian sebesar 21,32 persen dan sector perdagangan, hotel dan restaurant sebesar 19,29 persen.

Sementara jika merujuk pada capaian Sumatera Utara disbanding dengan 10 Provinsi terbesar yang memberikan sumbangan bagi PDB Indonesia, akan disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 3.4
Provinsi Penyumbang PDB Terbesar di Indonesia (2013-2014)
(persen)

NO	PROVINSI	KONTRIBUSI PDRB TERHADAP PDB		SHIFT
		2013	2014*)	
1	DKI Jakarta	16.72	16.71	-0.01
2	Jawa Timur	14.87	15.12	0.25
3	Jawa Barat	14.17	14.38	0.21
4	Jawa Tengah	7.96	8.25	0.29
5	Riau	6.96	6.71	-0.25
6	Sumatera Utara	5.35	5.24	-0.11
7	Kalimantan Timur	5.42	5.09	-0.33
8	Banten	3.22	3.22	0.00
9	Sumatera Selatan	3.06	3.07	0.01
10	Sulawesi Selatan	2.39	2.58	0.19
<i>Trw III</i>				

Dari data diatas, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 (triwulan III) naik peringkat dari sebelumnya di tahun 2013 peringkat 7 menjadi peringkat 6 dengan nilai kontribusi terhadap PDB sebesar 5,24 persen, menurun dibanding tahun 2013 sebesar 5,35 persen, akan tetapi penurunan Provinsi Kalimantan Timur lebih besar yakni dari 5,42 persen menurun menjadi 5,09 persen.

Akan tetapi pada tahun 2014 (triwulan IV), posisi Sumatera Utara kembali ke urutan 7 sebab dengan metode baru perhitungan PDRB, maka Kalimantan Timur kembali ke posisi 6 mengalahkan Sumatera Utara, sebagaimana tergambar pada table di bawah ini :

Tabel 3.5
Provinsi Penyumbang PDB Terbesar di Indonesia (2013-2014)
(persen)

NO	PROVINSI	KONTRIBUSI PDRB TERHADAP PDB		SHIFT
		2013	2014*)	
1	DKI Jakarta	16.72	17.05	0.33
2	Jawa Timur	14.87	14.16	-0.71
3	Jawa Barat	14.17	12.93	-1.24
4	Jawa Tengah	7.96	8.47	0.51
5	Riau	6.96	5.95	-1.01
6	Kalimantan Timur	5.42	5.26	-0.16
7	Sumatera Utara	5.35	4.97	-0.38
8	Banten	3.22	4.17	0.95
9	Sumatera Selatan	3.06	2.86	-0.20
10	Sulawesi Selatan	2.39	2.82	0.43
<i>Trw IV</i>				

Bercermin dari pernyataan sebelumnya diatas bahwa akan disampaikan kondisi perekonomian Sumatera Utara dengan metode lama dan metode baru, maka berikut ini akan disajikan kondisi perekonomian Sumatera Utara dengan metode perhitungan baru dengan memakai SNA dan Tahun dasar baru yakni tahun dasar 2010.

Kondisi perekonomian Sumatera Utara secara umum lima tahun terakhir masih dalam kondisi baik, rata-rata masih tumbuh 6 persen dan lebih baik dari capaian nasional, sebagaimana tercermin pada table dibawah ini :

Tabel 3.6
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara
dengan Metode Baru (SNA2008) dan Tahun dasar 2010
(persen)

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)			(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	5,88	5,3	4,7	4,4
2	B	Pertambangan dan Penggalian	-	10,72	11,9	26,0	5,3
3	C	Industri Pengolahan	-	3,22	5,6	4,8	3,0
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	-	13,87	-3,0	-3,9	3,7
5	E	Pengadaan Air	-	6,30	5,1	5,7	6,0
6	F	Konstruksi	-	8,46	6,7	7,7	6,8
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	7,13	7,9	5,6	6,9
8	H	Transportasi dan Pergudangan	-	10,24	8,2	7,4	5,7
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	8,52	6,8	7,8	6,5
10	J	Informasi dan Komunikasi	-	9,96	8,8	7,8	7,2
11	K	Jasa Keuangan	-	8,71	10,1	10,0	2,8
12	L	Real Estate	-	9,66	7,0	6,9	6,6
13	M,N	Jasa Perusahaan	-	10,68	6,0	6,7	6,8
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	8,93	2,5	3,3	6,9
15	P	Jasa Pendidikan	-	4,79	4,9	8,3	6,4
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	16,00	10,6	10,8	7,0
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	-	9,00	7,8	7,5	7,0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			-	6,66	6,45	6,08	5,23

Sumber :BPS Provsu Tahun 2015

Dari data diatas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan metode lama (2011-2013), dengan perbandingan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Tahun 2011-2013
Dengan Metode lama (Tahun dasar 2000) dan Metode Baru (SNA2008)
dengan Tahun dasar 2010
(persen)

TAHUN	METODE LAMA	METODE BARU
2011	6,63	6,66
2012	6,22	6,45
2013	6,01	6,08

Sumber :BPS Provinsi Sumatera Utara

Sementara itu jika melihat besaran nominal agregasi PDRB Sumatera Utara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 atas dasar harga berlaku disajikan dalam table dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.8
PDRB Sumatera Utara Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014
Dengan Metode Baru (SNA2008)
dengan Tahun dasar 2010
(Rp. juta)

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	85,561,143.96	95,856,863.79	103,933,114.9	115,194,745.9	121,435,442.7
2	B	Pertambangan dan Penggalian	3,336,340.26	4,048,821.63	4,848,020.0	6,581,443.7	6,944,808.7
3	C	Industri Pengolahan	70,540,953.80	79,947,917.24	86,171,929.7	93,241,472.5	104,224,003.8
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	501,178.84	643,052.37	641,934.1	586,207.1	514,666.3
5	E	Pengadaan Air	316,551.82	355,925.07	399,026.0	441,816.0	501,060.0
6	F	Konstruksi	38,650,891.30	44,527,253.68	51,426,266.0	60,997,621.4	71,225,774.0
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	56,555,799.54	64,308,761.08	70,891,922.7	78,324,823.4	89,596,998.2
8	H	Transportasi dan Pergudangan	14,101,567.03	16,580,077.93	19,066,202.1	22,990,245.2	25,923,438.0
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,936,756.77	7,874,972.12	9,100,935.8	10,598,775.3	12,283,315.7
10	J	Informasi dan Komunikasi	7,465,664.08	8,103,346.98	8,957,698.9	9,594,390.2	10,287,350.9
11	K	Jasa Keuangan	9,676,981.62	11,195,195.18	13,479,426.2	15,738,019.0	17,155,250.9
12	L	Real Estate	12,814,477.23	15,290,923.39	16,358,719.3	20,078,791.2	22,786,418.7
13	M,N	Jasa Perusahaan	2,711,690.37	3,181,125.34	3,646,330.4	4,224,044.0	4,836,417.7
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,212,993.02	12,990,356.75	14,786,938.0	16,427,959.7	18,832,080.3
15	P	Jasa Pendidikan	6,690,893.89	7,318,570.99	7,938,014.6	8,848,513.7	9,930,056.9
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,500,421.51	3,044,544.66	3,519,331.3	4,020,161.9	4,604,434.0
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	1,510,932.41	1,769,392.83	1,964,638.7	2,332,953.3	2,690,048.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			331,085,237.47	377,037,101.03	417,120,438.7	470,221,983.6	523,771,565.6

Dari table di atas, diperoleh bahwa berdasarkan atas harga berlaku, PDRB Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 58,20 persen dari tahun 2010 yakni dari Rp. 331,09 triliun meningkat menjadi Rp. 523,77 triliun, atau terdapat peningkatan PDRB sebesar Rp. 192,67 triliun.

Adapun kontribusi per kategori dengan memakai metode baru perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Struktur PDRB Sumatera Utara Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014
Dengan Metode Baru (SNA2008) dengan Tahun dasar 2010
(%)

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.79	25.42	24.9	24.5	23.2
2	B	Pertambangan dan Penggalian	1.06	1.07	1.2	1.4	1.3
3	C	Industri Pengolahan	21.3	21.2	20.7	19.8	19.9
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
5	E	Pengadaan Air	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6	F	Konstruksi	11.7	11.8	12.3	13.0	13.6
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.1	17.1	17.0	16.7	17.1
8	H	Transportasi dan Pergudangan	4.3	4.4	4.6	4.9	4.9
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3
10	J	Informasi dan Komunikasi	2.3	2.1	2.1	2.0	2.0
11	K	Jasa Keuangan	2.9	3.0	3.2	3.3	3.3
12	L	Real Estate	3.9	4.1	3.9	4.3	4.4
13	M,N	Jasa Perusahaan	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6
15	P	Jasa Pendidikan	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Dari data diatas terlihat bahwa selama lima tahun terakhir kategori pertanian merupakan penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB Sumatera Utara, walaupun

kontribusinya semakin menurun, dimana pada tahun 2010 kontribusinya mencapai 25,79 persen, dan terus menurun menjadi hanya sebesar 23,20 persen pada tahun 2014. Adapun kategori penyumbang kedua terbesar bagi PDRB Sumatera Utara adalah Industri pengolahan dimana sama dengan kaegori pertanian sumbangannya juga semakin menurun dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 21,30 persen dan hanya sebesar 19,90 persen pada tahun 2014, sementara kategori ketiga penyumbang PDRB adalah Perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dna sepeda motor yang sumbangannya relative stabil, hal ini terlihat dari sumbangannya paa tahun 2010 sebesar 17,1 persen dan pada tahun 2014 juga memberikan sumbangannya sebesar 17,10 persen juga.

Sementara jika melihat kondisi perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2014, berdasarkan data terakhir triwulan IV 2014, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,23 persen. Perekonomian Sumatera Utara tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.523.771,57 milyar dan PDRB perkapita mencapai Rp.38,05 juta atau US\$3.205,8.

Informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,23 persen, diikuti oleh jasa lainnya sebesar 7,04 persen dan jasa kesehatan sebesar 7,00 persen. Struktur perekonomian Sumatera Utara menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (23,18%); industri pengolahan (19,90%); serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (17,11%).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2014, perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,20 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,10 persen; dan konstruksi sebesar 0,82.

Struktur perekonomian Sumatera Utara pada triwulan IV-2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (21,71 persen); industri pengolahan (20,41 persen) dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (17,14 persen).

Sumber utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara Triwulan IV-2014 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,26 persen, diikuti konstruksi sebesar 1,05 persen: dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 0,95 persen.

Adapun untuk Triwulan I 2015 perekonomian Sumatera Utara yang diukur berdasarkan kenaikan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 tumbuh sebesar 4,78 persen bila dibandingkan dengan triwulan I 2014 (YoY), hal ini melambat bila dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2014 yang capaiannya sebesar 5,24 persen. Berdasarkan pendekatan produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 12,25 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) yang tumbuh sebesar 4,91 persen.

Bila dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2014 (q-to-q) ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I 2015 meningkat 1,61 persen. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 8,38 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan

jasa netto sebesar 1,47 persen (ekspor barang dan jasa sebesar 15,89 persen dan impor barang dan jasa sebesar 14,42 persen).

Berdasarkan pendekatan produksi, tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB pada triwulan I 2015 yaitu : pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,26 persen, industry pengolahan sebesar 19,37 persen serta perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,58 persen. Dari sisi pengeluaran, diperoleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 54,17 persen, komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 30,99 persen serta komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 6,38 persen.

Secara nominal, PDRB Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 138.019,78 milyar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 108.221,57 milyar.

Sementara untuk sisi investasi, dapat disampaikan bahwa realisasi Investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri terus mengalami kondisi berfluktuasi sebagaimana yang disajikan dalam table sebagai berikut ini :

Tabel 3.10
Kondisi Realisasi Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2014

TAHUN	PMA		PMDN		Jumlah Investasi (Rp. Juta)
	Jumlah Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Jumlah Proyek	Investasi (Rp. Juta)	
2012	101	6,194,880.00	55.00	2,970,186.19	9,165,066.19
2013	165	8,519,539.20	90.00	5,068,881.40	13,588,420.60
2014	201	6,389,687.16	86.00	5,231,905.85	11,621,593.01

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Investasi Daerah

Dari table di atas diketahui bahwa Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2012 jumlah proyek PMA yang direalisasi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 101 Proyek dengan nilai Investasi sebesar Rp. 6,19 triliun mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 165 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 8,52 triliun, akan tetapi pada tahun 2014 walaupun jumlah proyek semakin meningkat menjadi 201 proyek akan tetapi secara Nilai investasi mengalami penurunan dari tahun 2013 menjadi Rp. 6,39 triliun. Sementara berbeda dengan kondisi investasi PMA, jumlah nilai investasi PMDN di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 nilai investasi yang direalisasikan di Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 2,97 triliun, terus meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp. 5,07 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp. 5,23 triliun pada tahun 2014, akan tetapi memang secara besaran jumlah proyek di PMDN mengalami fluktuasi dari kondisi tahun 2012 sebanyak 55 proyek meningkat menjadi 90 proyek, akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi hanya 86 proyek saja.

3.1.2 Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

Untuk tahun 2015 dan 2016 berdasarkan PDRB lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama akan didukung oleh sektor industri pengolahan, Sektor Pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Sementara dari sisi investasi, prospek investasi juga akan cerah, hal ini didorong oleh berbagai faktor antara lain stabilitas makroekonomi yang diperkirakan tetap akan terjaga serta potensi pasar di Indonesia begitu pula dengan Sumatera Utara karena besarnya jumlah populasi dibanding daerah Provinsi lainnya di luar pulau Jawa, sementara hal yang menggembirakan adalah akan beroperasinya secara resmi KEK Sei Mangkei pada Pebruari 2015, diawali dengan telah dilakukannya commissioning PT. Unilever Oleochemical Indonesia (PT.UOI) pada tanggal 27 Januari 2015, serta dicanangkannya pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara yang juga telah diakomodir dalam RPJMN Tahun 2015-2019 oleh Bapak Presiden RI, tentunya hal ini akan sangat menggerakkan perekonomian daerah ditopang lagi dengan telah selesainya beberapa pembangkit listrik yang telah di canangkan dua tiga tahun yang lalu seperti PLTU Pangkalan Susu I dan II.

Dari sisi PDRB dari sisi sektoral diharapkan pada tahun 2015 dan 2016 pertumbuhan akan tetap terjadi walaupun tidak sepenuhnya dapat optimal sebagaimana yang diproyeksikan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, berikut akan disajikan estimasi besaran PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 dan 2016 dengan metode perhitungan baru :

Tabel 3.11
Proyeksi Besaran PDRB Sumatera Utara ADHB
Tahun 2015 dan 2016 dengan Motode Baru SNA 2010 dan Tahun Dasar 2010
(Rp. milyar)

No	Kategori	Uraian	2015	2016
			Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	133,794,982.59	147,415,311.81
2	B	Pertambangan dan Penggalian	8,374,928.11	10,238,349.61
3	C	Industri Pengolahan	115,976,077.30	131,342,907.54
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	523,993.31	533,477.59
5	E	Pengadaan Air	562,039.69	630,439.92
6	F	Konstruksi	83,704,088.33	98,369,044.60
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	101,428,669.11	113,914,538.28
8	H	Transportasi dan Pergudangan	30,713,656.38	36,626,035.23
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,170,184.42	16,457,252.19
10	J	Informasi dan Komunikasi	11,146,731.92	12,152,167.14
11	K	Jasa Keuangan	19,808,035.55	23,026,841.33
12	L	Real Estate	26,348,744.69	30,638,320.33
13	M,N	Jasa Perusahaan	5,589,405.27	6,570,345.89
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,440,942.42	24,410,512.95
15	P	Jasa Pendidikan	10,961,244.98	12,299,612.99
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,411,594.91	6,485,796.49
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	3,108,313.69	3,569,898.27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			593,063,632.67	674,680,852.18

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2015 diestimasikan bahwa PDRB ADHB akan mencapai Rp. 593,06 triliun dan terus meningkat menjadi Rp. 674,68 triliun, atau jika dihitung pertumbuhannya akan bertumbuh sekitar 13,76 persen dibanding tahun 2015.

Tabel 3.12
 Proyeksi Besaran PDRB Sumatera Utara ADHK
 Tahun 2015 dan 2016 dengan Motode Baru SNA 2010 dan Tahun Dasar 2010
 (Rp. milyar)

No	Kategori	Uraian	2015	2016
			Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	109,462,240.31	114,059,654.40
2	B	Pertambangan dan Penggalian	5,815,991.44	6,146,921.35
3	C	Industri Pengolahan	83,672,941.19	86,392,311.78
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	569,580.10	586,952.29
5	E	Pengadaan Air	425,011.13	455,654.43
6	F	Konstruksi	55,652,798.38	59,798,931.86
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	79,317,056.14	85,146,859.76
8	H	Transportasi dan Pergudangan	20,654,732.62	22,329,831.43
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,832,456.37	10,496,147.17
10	J	Informasi dan Komunikasi	11,379,223.98	12,539,904.83
11	K	Jasa Keuangan	13,380,696.60	13,725,918.57
12	L	Real Estate	18,374,307.19	19,697,257.30
13	M,N	Jasa Perusahaan	3,861,029.68	4,179,564.62
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,789,296.88	15,713,627.94
15	P	Jasa Pendidikan	9,036,130.17	9,673,177.35
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,079,005.64	4,366,575.54
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	2,187,573.90	2,337,422.71
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			442,490,071.71	467,646,713.36

demikian juga dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 PDRB Sumatera Utara juga akan meningkat dari estimasi tahun 2015 sebesar Rp. 442,49 triliun menjadi Rp. 467,65 triliun, dengan laju pertumbuhan PDRB secara agregat sebesar 5,69 persen.

Adapun dari estimasi pertumbuhan dan kontribusi sektoral PDRB Sumatera Utara Tahun 2015 dan 2016 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13
 Proyeksi Laju Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Sumatera Utara
 Tahun 2015 dan 2016 Atas Dasar Harga Berlaku
 Maupun Atas dasar Harga Konstan 2010
 (Rp. milyar)

No	Kategori	Uraian	Laju Pertumbuhan		Kontribusi	
			2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)				
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.98	4.20	22.56	21.85
2	B	Pertambangan dan Penggalian	5.95	5.69	1.41	1.52
3	C	Industri Pengolahan	3.75	3.25	19.56	19.47
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	3.25	3.05	0.09	0.08
5	E	Pengadaan Air	7.21	7.21	0.09	0.09
6	F	Konstruksi	8.25	7.45	14.11	14.58
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.45	7.35	17.10	16.88
8	H	Transportasi dan Pergudangan	8.1	8.11	5.18	5.43
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.58	6.75	2.39	2.44
10	J	Informasi dan Komunikasi	10.25	10.20	1.88	1.80
11	K	Jasa Keuangan	2.14	2.58	3.34	3.41
12	L	Real Estate	7.25	7.20	4.44	4.54
13	M,N	Jasa Perusahaan	6.52	8.25	0.94	0.97
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.89	6.25	3.62	3.62
15	P	Jasa Pendidikan	6.58	7.05	1.85	1.82
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.25	7.05	0.91	0.96
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	7.58	6.85	0.52	0.53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			5.44	5.69	100.00	100.00

Dari tabel di atas, diestimasikan bahwa pada tahun 2015 ini ekonomi Sumatera Utara akan tumbuh 5,44 persen, sementara pada tahun 2016 tumbuh lebih tinggi di kisaran 5,69 persen, adapun secara umum hampir seluruh kategori akan tumbuh positif pada tahun 2015 maupun 2016, dengan ringkasan bahwa pada tahun 2015 sektor yang tumbuh tertinggi adalah informasi dan komunikasi yang tumbuh 10,25 persen, disusul 2 kategori tertinggi lainnya yakni kategori konstruksi dengan tumbuh sebesar 8,25 persen serta kategori transportasi dan pergudangan sebesar 8,10 persen, adapun yang diproyeksikan pertumbuhannya menurun adalah kategori jasa keuangan yang hanya tumbuh sebesar 2,14 persen dan kategori pengadaan listrik dan gas yang hanya tumbuh sebesar 3,25 persen. Sementara untuk tahun 2016 kategori yang memberikan pertumbuhan tertinggi adalah kategori informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 10,20, disusul berturut turut kategori jasa perusahaan sebesar 8,25 persen dan kategori transportasi dan perdagangan yang juga tumbuh sebesar 8,11 persen, sementara kategori yang laju pertumbuhannya sedikit melambat adalah kategori jasa lainnya 6,85 persen dibanding tahun 2015 yang tumbuh 7,58 persen, disusul kategori konstruksi yang tumbuh sebesar 7,45 persen sementara di estimasikan di tahun 2015 kategori ini tumbuh sebesar 8,25 persen.

Sementara jika ditilik dari kontribusi kategorial terhadap PDRB berdasarkan atas dasar harga berlaku kategori pertanian, perikanan dan kehutanan masih merupakan penyumbang pertama yakni sebesar 22,56 persen pada tahun 2015 dan menurun menjadi 21,85 persen pada tahun 2016, adapun kategori lainnya yang menduduki tiga besar adalah kategori Industri pengolahan dimana tahun 2015 diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 19,56 persen menurun menjadi 19,47 persen pada tahun 2016, sementara kategori ketiga terbesar yang memberikan kontribusi adalah kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang diharapkan memberikan sumbangan pada tahun 2015 sebesar 17,10 persen, dan diestimasikan semakin menurun pada angka 16,80 persen pada tahun 2016.

Adapun jika dilihat dari sisi sudut penggunaan PDRB, di estimasikan bahwa konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi sumber PDRB yang utama di Provinsi Sumatera Utara pada tahun estimasi 2015 dan tahun 2016, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
 Proyeksi Nilai PDRB Sumatera Utara
 Tahun 2015 dan 2016 Menurut Sudut Penggunaan
 Atas Dasar Harga Berlaku Maupun Atas dasar Harga Konstan 2010
 (Rp. milyar)

Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB		PDRB ADHK 2010	
	2015	2016	2015	2016
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	325,818,240.42	369,314,975.52	226,333,671.68	239,154,529.21
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,549,382.24	6,009,426.03	4,734,643.77	5,377,937.20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	46,681,997.71	52,984,067.40	32,523,020.27	34,418,798.10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	186,658,930.62	210,831,262.13	131,109,808.25	140,761,660.72
5. Perubahan Inventori	5,892,901.92	6,041,403.05	3,982,410.65	4,676,467.13
6. Ekspor Luar Negeri	199,658,549.08	219,064,393.96	194,695,631.55	206,232,200.59
7. Impor Luar Negeri	177,196,369.33	189,564,675.91	150,889,114.45	162,974,879.61
P D R B	593,063,632.66	674,680,852.18	442,490,071.71	467,646,713.36

Pada tahun 2016 nilai PDRB ADHK 2010 Sumatera Utara diestimasikan akan mencapai Rp. 467,65 triliun dan berdasarkan atas dasar harga berlaku akan mencapai nilai Rp.

674,68 triliun, tentunya hal ini akan sangat tergantung pada kebijakan pembangunan pemerintahan atasan dimana telah ditetapkan RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019.

Tabel 3.15
 Proyeksi Laju pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Sumatera Utara
 Tahun 2015 dan 2016 Menurut Sudut Penggunaan
 Atas Dasar Harga Berlaku Maupun Atas dasar Harga Konstan 2010
 (Rp. milyar)

Komponen Pengeluaran (1)	Laju Pertumbuhan		Kontribusi	
	2015	2016	2015	2016
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.96	5.66	51.15	51.14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.43	13.59	1.07	1.15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.74	5.83	7.35	7.36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.67	7.36	29.63	30.1
5. Perubahan Inventori	(7.17)	17.43	0.9	1
6. Ekspor Luar Negeri	5.20	5.93	44	44.1
7. Impor Luar Negeri	4.27	8.01	34.1	34.85
P D R B	5.44	5.69	100.00	100.00

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa pada tahun 2016 PDRB Sumatera Utara akan tumbuh sebesar 5,69% dengan laju pertumbuhan tertinggi ada pada perubahan inventori dan pengeluaran konsumsi lembaga non profit masing masing memberikan laju pertumbuhan sebesar 17,43 persen dan 13,59 persen, sementara itu dari sisi kontribusi konsumsi Rumah Tangga masih mendominasi PDRB Sumatera Utara dengan estimasi raihan pada tahun 2014 mencapai 51,14 persen, disusul oleh ekspor luar negeri sebesar 44,10 persen dan Impor Luar Negeri sebesar 34,85 persen. Adapun untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto akan menjadi semakin berpengaruh terhadap PDRB dimana terjadi kenaikan kontribusi yang destimasi di tahun 2016 sebesar 30,10 persen meningkat bila dibandingkan dengan estimasi 2015 sebesar 29,63 persen.

Dari sisi volume perdagangan luar negeri, Sumatera Utara diharapkan akan dapat lebih meningkatkan daya saing produk ekspor, hal ini sejalan juga dengan sasaran Pemerintah untuk meningkatkan ekspor non migas :

- 1) Pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 11,6 persen per tahun;
- 2) Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun;
- 3) Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen.

Adapun arahan kebijakan untuk peningkatan ekspor yang juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain diwujudkan dengan meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa melalui peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional, serta optimalisasi upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun strategi pembangunan untuk mendorong pengembangan perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi dan berdaya saing di pasar global termasuk yang melalui titik lintas batas di daerah perbatasan, agar dapat memberikan efek pengganda yang lebih besar terhadap perekonomian

nasional dan mengurangi tingkat kerentanan ekspor Indonesia terhadap gejolak harga komoditas dunia. Untuk itu, pengembangan ekspor bernilai tambah tinggi akan dititikberatkan pada: produk manufaktur yang berbasis sumber daya alam, produk olahan hasil tambang, serta produk olahan hasil pertanian/perikanan.

- 2) Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional melalui peningkatan kualitas produk ekspor, peningkatan pencitraan, penetapan harga produk yang lebih bersaing, serta pengembangan layanan berstandar internasional
- 3) Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur yang dapat mendorong proses alih teknologi, meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha lokal serta meningkatkan daya saing produk nasional;
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas melalui upaya: (i) peningkatan koordinasi dengan instansi terkait yang antara lain melalui pengembangan dan implementasi *roadmap* sektor jasa; (ii) peningkatan pemanfaatan jasa prioritas yang dihasilkan pelaku usaha domestik sehingga mampu memberikan insentif bagi perkembangan industri jasa nasional dan mengurangi impor; (iii) pemanfaatan jaringan produksi global bidang jasa dalam meningkatkan daya saing sektor jasa; (iv) peningkatan pemanfaatan hasil perundingan jasa; (v) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terkait perdagangan jasa sehingga memberikan nilai tambah bagi ekspor jasa; serta (vi) peningkatan kualitas statistik perdagangan jasa dalam menyediakan data dan informasi yang akurat. Dalam hal ini sektor jasa prioritas meliputi: (a) jasa pendorong ekspor nonmigas, yaitu: jasa transportasi, jasa pariwisata, dan jasa konstruksi; serta (b) jasa yang mendukung fasilitasi perdagangan dan produktivitas ekonomi, yaitu: jasa logistik, jasa distribusi, dan jasa keuangan. Rincian strategi sektor jasa tersebut di atas akan dibahas lebih lanjut pada subbidang yang terkait sektor masing-masing
- 5) Mengembangkan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif, terutama guna mempercepat proses perizinan dan memperlancar aktivitas ekspor dan impor melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan skema pembiayaan ekspor, skema harmonisasi regulasi terkait ekspor dan impor
- 6) Mengembangkan keragaman aktivitas dan mekanisme promosi ekspor yang lebih efektif untuk meningkatkan citra produk Indonesia di pasar global, yang antara lain melalui: (i) penyelarasan kegiatan promosi *Tourism, Trade, and Investment (TTI)*; (ii) pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu; serta (iii) peningkatan peran kantor perwakilan dagang di luar negeri agar mampu menangkap potensi pasar dan produk yang dibutuhkan di suatu negara
- 7) Meningkatkan pengelolaan impor yang efektif untuk: (i) meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas. Hal ini dilakukan melalui upaya memperlancar impor barang modal dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk ekspor nonmigas, akan tetapi kebutuhannya belum dapat dipenuhi dari dalam negeri, serta melakukan upaya harmonisasi kebijakan impor; (ii) meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik; serta (iii) mengatasi impor ilegal, termasuk di daerah perbatasan yang telah menjadi kawasan pabean
- 8) Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas *safe guards* dan pengamanan perdagangan lainnya untuk melindungi produk dan pasar dalam negeri dari praktek-praktek perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*)

- 9) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Free Trade Agreements* (FTA) yang sudah dilakukan, termasuk pemanfaatan fasilitas *safe guard* untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan dan daya saing produk nasional. Strategi ini secara rinci dijabarkan dalam bagian tentang Meminimalisasi Dampak Globalisasi Ekonomi

Dengan prospek perekonomian tersebut diatas, maka diharapkan sasaran-sasaran makro ekonomi Sumatera Utara akan tetap dapat tercapai untuk peningkatan pembangunan Sumatera Utara, akan tetapi berbagai tantangan dalam mewujudkan sasaran-sasaran makro ekonomi harus diantisipasi, adapun beberapa tantangan tersebut antara lain :

- 1). Mulai diberlakukannya *The ASEAN Community* pada tahun 2015 (Desember tanggal 31). Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi.
- 2). Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia, (b) perekonomian Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor mau-pun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal jangka panjang maupun jangka pendek; dan
- 3). Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati untuk masa lima tahun mendatang, yaitu: (a) krisis di kawasan Eropa beberapa tahun terakhir yang kondisinya masih belum pulih atau masih dalam posisi *mild recovery* dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, sehingga akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (b) harga komoditas dunia masih menunjukkan tren penurunan ataupun *flat* dan adanya indikasi berakhirnya era *supercycle* juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; (c) proses normalisasi kebijakan moneter AS di tahun 2014 dan rencana kenaikan suku bunga acuan *The Fed* di tahun-tahun berikutnya.

Untuk tahun 2015 dan 2016 diharapkan pertumbuhan ekspor Sumatera Utara akan meningkat, dengan peningkatan utamanya diharapkan dari ekspor non migas, sebagaimana yang disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16
 Nilai Ekspor dan Impor Sumatera Utara Tahun 2013 dan 2014
 Serta Proyeksi Tahun 2015 dan 2016
 (US \$.000)

TAHUN	NILAI		
	EKSPOR	IMPOR	NERACA
2013	9,597,907.00	5,108,737.00	4,489,170.00
2014*)	8,681,165.00	4,623,645.00	4,057,520.00
2015**)	10,750,120.00	5,550,000.00	5,200,120.00
2016	10,100,000.00	5,400,000.00	4,700,000.00
<i>Catatan : *) Data Agregat s/d Nopember 2014</i>			
<i>***) Proyeksi RKPD Provsu Tahun 2015</i>			

Dari tabel di atas, diestimasikan bahwa pada tahun berjalan ini nilai ekspor Sumatera Utara yang sebesar US\$ 10,75 milyar tidak dapat tercapai, sebab capaian untuk tahun

2014 saja sampai bulan Nopember 2014 hanya sebesar US\$ 8,68 milyar, dan jika diakumulasikan sampai dengan tahun 2014 Desember paling tinggi US\$ 9,45 milyar, bahkan capaiannya akan lebih rendah dari tahun 2013. Hal yang berbeda diestimasikan akan terjadi peningkatan nilai ekspor tahun 2016 yang diproyeksikan akan kembali mencapai double digit di kisaran US\$ 10,10 milyar, hal ini imbas dari telah beroperasinya secara resmi PT. Unilever Oleochemical Indonesia serta akan bertambahnya produksi dari PT. Inalum serta permintaan komoditas ekspor dunia yang akan semakin baik di tengah terpuruknya harga minyak dunia.

Selain itu juga estimasi ini sejalan dengan sasaran kinerja perdagangan luar negeri nasional, yang di sampaikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Perkiraan Neraca Pembayaran
(US \$.000)

Indikator	Perkiraan 2014	Proyeksi	
		2015	2016
Ekspor			
Migas	32.9	32.3	32.6
Non Migas	145.2	156.7	172.2
(Pertumbuhan, %)	-1.0	8.0	9.9
Impor			
Migas	-46.1	-48.9	-51.7
Non Migas	-131.6	139.6	149.5
(Pertumbuhan, %)	-1.0	6.1	7.1

Sumber : Bappenas RI, 2015

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran seperti :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**, hal ini merupakan persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan akuntabilitas anggaran juga menjadi instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
2. **Disiplin Anggaran**, program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan
3. **Keadilan Anggaran Pendapatan**, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan
4. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**, dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah, yang disajikan sebagai berikut :

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

1. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah

1). Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan PAD pada RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2016 diproyeksikan akan mengalami penurunan dari APBD provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2016 diproyeksikan tidaklah sebaik capaian tahun 2011-2013 yang rata-rata di atas, 6,27 persen, sementara untuk tahun 2016 hanya diestimasikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,15 persen.
- b. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 3 tahun terakhir (Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,14 persen tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun sebesar 85,35%;
- c. Pajak cukai rokok akan menjadi komponen pajak daerah yang semakin membesar seiring dengan peningkatan besaran cukai yang ditetapkan Pemerintah dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar 5,00 persen per tahun.
- d. Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun Anggaran 2014, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru, serta adanya operasi penertiban terhadap pelanggaran pembayaran pajak .

2). Dana Perimbangan

Penerimaan dari dana perimbangan pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 diproyeksikan menurun sebesar 13,33 persen, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan dana perimbangan selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2012-2014) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,79 persen;
- b. Realisasi rata-rata target terhadap realisasi tahun 2012-2014 hanya sebesar 93,17 persen;
- c. Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014

3). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 diproyeksikan rata-rata sebesar 2,03% per tahun

- b. Berkurangnya pos dana annual fee mulai tahun 2014 dari sumbangan PT. Inalum yang sejak tahun 2014 telah resmi menjadi BUMN, sehingga MOA yang mengatur tentang annual fee secara otomatis akan tidak berlaku lagi.

Adapun untuk secara garis besarnya berikut disampaikan realisasi dan perkiraan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam tabel :

Tabel 3.18
Tabel Proyeksi/Target Pendapatan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 dan 2016

NOMOR	URAIAN	APBD TA. 2015	APBD TA. 2016	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
I.	PENDAPATAN DAERAH				
1. 1	Pendapatan Asli Daerah	5.257.668.172,609	5.187.378.800,764	(70.289.371,845)	(1,34)
1. 1. 1	Pajak Daerah	4.743.736.523,709	4.627.439.750,761	(116.296.772,445)	(2,45)
	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.272.087.466,862	1.420.774.554,822	148.687.087,960	6,14
	Pajak Kendararaan di Air (PKA)	80.000.000,000	80.000.000,000	0	(0,00)
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	1.803.328.502,435	1.307.583.158,341	(495.745.344,094)	(9,68)
	Bea Balik Nama Kendaraan di Air (BBN KA)	0	0	0	# DIV/0!
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)	810.310.000,000	823.000.000,000	12.690.000,000	(1,58)
	Pajak rokok	877.042.814,700	882.000.000,000	4.957.185,300	(1,74)
	Pajak Air Bawah Tanah & Air Permukaan				
	- ABT		67.000.000,000	67.000.000,000	# DIV/0!
	- APJ		0	0	# DIV/0!
1. 1. 2	Retribusi Daerah	83.319,774,100	74.819,350,000	(8.500,424,100)	(10,42)
	Retribusi Jasa Umum	70.937.000,000	68.606.000,000	(2.331.000,000)	(5,82)
	Retribusi Jasa Usaha	12.232,765,100	7.603,150,000	(4.629,615,100)	(36,73)
	Retribusi perizinan tertentu	250.000,000	210.000,000	(40.000,000)	(16,00)
	Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa			0	# DIV/0!
	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah			0	# DIV/0!
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	382.309,000,000	289.300,000,000	(93.009,000,000)	2,48%
	Perusahaan daerah :				
	PDAM TRITAHADI		22.280,000,000	22.280,000,000	# DIV/0!
	PD PERKEBUMIHAN	20.000,000,000	20.000,000,000	0	-
	PD PERMUTILAN	380,000,000	180,000,000	(200,000,000)	(50,00)
	PD AU	80,000,000	0	(80,000,000)	(100,00)
	PT KAM	259.729,000,000	143.573,000,000	(116.156,000,000)	(44,74)
1. 1. 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	148.102,875,300	195.819,500,000	47.716,624,700	32,22
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.200,000,000	38.010,000,000	35.810,000,000	1.655,00
	Jasa Giga	37.500,000,000	77.330,000,000	39.830,000,000	117,24
	Pendapatan Bunga	0	0	0	# DIV/0!
	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0	0	0	# DIV/0!
	Komis, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	0	0	0	# DIV/0!
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	75.999,363,000	81.868,500,000	5.869,137,000	20,09
	Pendapatan Denda Retribusi	0	0	0	# DIV/0!
	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	0	0	# DIV/0!
	Pendapatan dari Pengembalian	0	0	0	# DIV/0!
	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	28.410,792,500	27.171,800,000	(1.238,992,500)	169,73
	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5.732,530,000	5.000,000,000	(732,530,000)	(12,78)
	Pendapatan dari Amortisasi/Cicilan Penjualan	0	0	0	# DIV/0!
1. 2	Dana Perimbangan	1.838.572.481,691	2.319.482.694,651	480.910,212,960	38,66
1. 2. 1	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	489.440,205,691	981.837,191,051	492.396,985,360	100,60
	Bagi Hasil Pajak	460.776,294,432	492.372,352,000	31.596,057,568	7,70
	WPPD/DP (PPH pasal 25 dan pasal 29) digabung dengan PPH pasal 21				
	PPH pasal 21				
	Akkresi Biaya Pemungutan PBB				# DIV/0!
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	28.663,911,259	489.464,839,051	460.800,927,792	1.594,03
	1. Iuran Hasil Pengusahaan Nelayan				# DIV/0!
	2. Pajak SDA				# DIV/0!
	3. Dana Reboisasi				# DIV/0!
	4. Iuran Tetap (Land Rent)				
	5. Iuran Eksploitasi & eksploitatif (Royalty)				
	6. Pungutan Pengusahaan Perikanan				
	7. Pungutan Hasil Perikanan				
	8. Pertambangan Minyak Bumi				
	9. Pertambangan Gas Bumi				
	10. Pertambangan Panas Bumi				
1. 2. 2	Dana Alokasi Umum	1.319.132,276,000	1.481.045,503,600	161.913,227,600	10,00
1. 2. 3	Dana Alokasi Khusus	0	83.500,000,000	83.500,000,000	# DIV/0!
	1. Dana alokasi khusus infrastruktur jalan	0	0	0	
	2. Dana alokasi khusus infrastruktur energi	0	0	0	
	3. Dana alokasi khusus kesehatan/kegiatan rujukan	0	0	0	
1. 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.578.596,630,800	1.779.200,163,800	190.603,533,000	12,71
1. 3. 1	Hibah	38.083,696,800	80.200,163,800	42.116,467,000	134,22
	01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah				# DIV/0!
	Penerimaan Penanaman/Pembelian bagi PND				
	Dana insentif daerah (DID)				# DIV/0!
	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)				# DIV/0!
	02. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya				
	03. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Daerah Negeri				
	04. Pendapatan Hibah dari Kelompok masyarakat/perorangan				
	Sumbangan Pihak Ketiga				
	05. Pendapatan Hibah dari Luar Negeri				# DIV/0!
1. 3. 2	Dana Darurat	0	0	0	# DIV/0!
1. 3. 3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	0	0	0	0
1. 3. 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.540.512,940,000	1.690.000,000,000	149.487,060,000	10,00
	Dana Insentif Daerah				
	Dana Akkresi Bantuan Operasional Sekolah				
1. 3. 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	8.674.837.291,100	9.515.961.659,215	841.124.368,115	8,84%

Ketahanan fiskal Daerah akan terus ditingkatkan. Perkiraan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2015 termasuk Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 8.674.837.291.100,-

yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5.257.668.172.609,-. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.838.572.481.691,- serta Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.1.578.596.636.800,-.

Sedangkan pada tahun 2016 estimasi penerimaan sektor Pendapatan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 7.987.254.097.764,- Dana Perimbangan diperkirakan akan menurun menjadi Rp. 1.593.847.269.500,-, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan akan meningkat sebesar 1,19%% menjadi Rp. 1.710.349.808.500,- penerimaan ini belum termasuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2014.

Dari komponen penerimaan PAD diharapkan di tahun 2016 adanya penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, antara lain dari obyek pungutan pajak daerah sebesar Rp. 4.331.136.448.764,-, Retribusi Daerah sebesar Rp. 74.819.550.000,-, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 165.853.000.000,- sedangkan penerimaan lainnya diharapkan bersumber dari deposito yang pelaksanaan dan besarnya masih belum dapat diprediksi, demikian juga bagi hasil perkebunan (pengusulan bagi hasilnya terus akan menjadi prioritas daerah) dan bagi hasil dari laba yang dikelola sebagai hasil operasional BUMN seperti PT. Angkasa Pura II dan PT. Pelindo sampai saat ini masih dalam proses pembahasan oleh Pemerintah.

Selain itu, penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari tahun 2015 yang sebesar Rp.1.349.132.276.000,- atau diperkirakan menurun sebesar 10,55% menjadi Rp. 1.139.261.371.000,-, hal kontraksi akan berbeda dengan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak yang akan diestimasikan menurun, sebagai akibat realisasinya di tahun sebelumnya tidak tercapai, diperkirakan akan menurun sekitar -10,24% menjadi Rp. 365.186.386.000,-, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga diperkirakan sebesar Rp. 65.109.382.500,-. Sama seperti rencana tahun anggaran 2014. Dengan demikian kapasitas sumber penerimaan untuk anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan pada tahun 2016 akan mencapai Rp. 7,9 triliun.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan RKPD Tahun 2016, Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1). Belanja Pegawai

- a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2016 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- b. biaya pemungutan sebagai bentuk pemberian insentif sejalan dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan yang besarnya 3% dari target penerimaan pajak daerah; Penganggaran penghasilan dan

penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta biaya penunjang operasional mempedomani ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2016 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional.
- d. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- e. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

2). Belanja Hibah

Belanja Hibah; pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi vertikal seperti BPS, KODAM, POLDA, KPUD dan Bawaslu), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; penentuan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; dalam pelaksanaan belanja hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Anggaran setelah tahun anggaran berakhir; selanjutnya bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

3). Belanja Bantuan sosial

Bantuan Sosial; dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala

tertentu, Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

4). Belanja Bagi hasil

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2016, sedangkan pelampauan target TA. 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam APBD Perubahan TA. 2015, pada tahun 2016 juga akan dibayarkan hutang bagi hasil Kab/Kota yang masih tertunda.

5). Belanja Bantuan Keuangan

Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan partai politik

Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan untuk :

- a. Infrastruktur;
- b. Revitalisasi pasar tradisional;
- c. Sarana dan prasarana pendidikan;
- d. Prasarana dan sarana kesehatan;
- e. Pembangunan desa/lingkungan terpadu pada kantong kemiskinan;
- f. Sarana dan Prasarana Pertanian;

6). Belanja Tidak Terduga

Pengalokasian anggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan mempertimbangkan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016; sedangkan penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

Sementara untuk kebijakan Belanja Langsung pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 memperhatikan hal-hal khusus, dimana Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan pembangunan akan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun 2016 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kewenangan pada tingkat pemerintahan;
- 2) Tugas pokok dan fungsi SKPD;
- 3) Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya;
- 4) Capaian target *Visi dan Misi RPJMD Provsu Tahun 2013-2018*, dan *MDG's*;
- 5) Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani;
- 6) Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusat-daerah.
- 7) Belanja hibah barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan kebijakan umum dalam mengalokasikan Belanja Langsung antara lain meliputi :

1. Penganggaran belanja langsung untuk setiap kegiatan, terlebih dahulu dilakukan analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk menghindari adanya pemborosan;
2. Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
3. Belanja Pegawai; penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan; sedangkan penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah.
4. Belanja Barang dan Jasa; penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultansi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan

pada belanja barang dan jasa; Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan; Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel; Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya dibatasi; Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

5. Belanja Modal; dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 akan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2016. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 25 (dua puluh lima) urusan yang untuk Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 meliputi urusan sebagai berikut:

Urusan Wajib

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Penataan ruang;
- 5) Perencanaan pembangunan;
- 6). Perhubungan;
- 7). Lingkungan Hidup;
- 8). Sosial
- 9). Tenaga Kerja
10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 11). Penanaman modal;
- 10) Kebudayaan;
- 10) Pemuda dan Olahraga;

- 11) Keselamatan Bangsa dan Politik dalam negeri;
- 12) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- 13) Ketahanan Pangan;
- 14) Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 15). Komunikasi dan Informatika;
- 16). Perpustakaan

Urusan Pilihan

- 1) Pertanian;
- 2) Kehutanan;
- 3) Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 4) Kelautan dan Perikanan;
- 5). Industri

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel 3.19.
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2015 s.d tahun 2016

NOMOR	URAIAN	APBD TA. 2015	APBD TA. 2016	
		(Rp.)	(Rp.)	
2	BELANJA DAERAH			
2.	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,619,854,577,818	5,164,776,104,869
2.	1	1 Belanja Pegawai	1,174,303,458,135	1,268,247,734,786
		Gaji		
		Tunjangan PNS :		
		TPP		
		Biaya Pemungutan		
		BPO Pimpinan & Anggota DPRD		
		BPO KDH/WKDH		
2.	1	2 Belanja Bunga	0	-
2.	1	3 Belanja Subsidi	0	-
2.	1	4 Belanja Hibah	1,588,169,654,000	1,691,500,000,000
		Pendidikan	0	1,700,512,940,000
		Kesehatan	0	2,500,000,000
		UMKM	0	-
		Lainnya (keagamaan dan sosial)	0	-
		KPU dan PANWASLU+POLRI		
		BOS	0	-
2.	1	5 Belanja Bantuan Sosial	1,700,000,000	1,700,000,000
		Pendidikan	0	-
		Kesehatan	0	-
		UMKM	0	-
		Lainnya (keagamaan dan sosial)	0	-
2.	1	6 Belanja Bagi Hasil Kepada Kab./Kot	2,330,828,370,083	1,845,828,370,083
		PKB	0	-
		PKA	0	-
		BBN-KB	0	-
		BBN-KA	0	-
		PBB-KB	0	-
		ABT	0	-
		APU	0	-
		Tera Ulang	0	-
		Retribusi Grosris dan Pertokoan	0	-
2.	1	7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada	517,353,095,600	350,000,000,000
		Infrastruktur	0	245,000,000,000
		Pendidikan (kesra guru + beasiswa)	0	100,000,000,000
		Kesehatan (obat-obatan)	0	5,000,000,000
		Pertanian (agropolitan & agromari)	0	-
		Pasar tradisional & pusat2 perrtum	0	-
		Partai Politik	0	-
2	1	8 Belanja Tidak Terduga	7,500,000,000	7,500,000,000
2	2	BELANJA LANGSUNG	3,060,087,716,282	4,349,394,535,081
2	2	1 Belanja Pegawai	188,229,201,850	128,000,000,000
2	2	2 Belanja Barang dan Jasa	1,477,047,247,934	1,866,318,427,468
2	2	3 Belanja Modal	1,394,811,266,498	2,355,076,107,613
		JUMLAH BELANJA	8,679,942,294,100	9,514,170,639,950
		Surplus/(Defisit)	(5,105,003,000)	1,791,019,265

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran Pembiayaan dibedakan atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Komponen Penerimaan Pembiayaan terdiri dari atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
- b. Pencairan dana cadangan.

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Penerimaan pinjaman daerah.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- f. Penerimaan piutang daerah.

Sedangkan komponen Pengeluaran Pembiayaan mencakup :

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- c. Pembayaran pokok utang; dan
- d. Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah penganggaran belanja yang melebihi pendapatan. Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBD telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada paragraf III tentang Pembiayaan khususnya pasal 300 sampai dengan pasal 305.

Berdasarkan Pasal 305 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup :

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan dana cadangan; dan/atau
- d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari :

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. pinjaman Daerah; dan
- e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2016 diperkirakan penerimaan pembiayaan akan diperoleh dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2015, yang diperkirakan akan berjumlah lebih kurang Rp.,-

Penggunaan dari pembiayaan antara lain diprioritaskan untuk menutup defisit anggaran sementara untuk penyertaan modal diperhitungkan tidak ada penyertaan modal, selama perda belum ditetapkan.

Adapun secara rinci kondisi dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7.
 Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 s.d tahun 2016

NOMOR	URAIAN	APBD TA. 2015	APBD TA. 2016
		(Rp.)	(Rp.)
3	PEMBIAYAAN DAERAH		
3 1	Penerimaan Pembiayaan		
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	5,105,003,000.00	-
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5,105,003,000	-
3 2	Pengeluaran Pembiayaan		
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan		
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-
	<i>PDAM TIRTANADI</i>	0	0
	<i>PT. KIM</i>	-	-
	<i>PT. PERKEBUNAN</i>	0	0
	<i>PT. SARANA PRASARANA</i>	-	-
	<i>PT. BANK SUMUT</i>	0	
	<i>PD AIJ</i>		
	<i>PD Perhotelan</i>		
	<i>Lainnya</i>	0	-
3 2 3	Pembayaran Utang Pokok	-	-
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-
	Pembiayaan Netto	5,105,003,000	-
3 3 1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-

BAB - IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. SASARAN POKOK ARAH KEBIJAKAN RPJPD PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara, dan mempertimbangkan keberagaman budaya yang hidup dalam masyarakat, isu-isu strategis baik dalam konteks Global, Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dengan merujuk kepada :

- a. Permendagri 54/2010 pada Bab-X, tentang penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD dan daerah otonom baru, dimana pada Pasal 287 Ayat (1) dinyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD provinsi, dan mengacu pada RPJMN untuk keselaran program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional, dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- b. Pasal 5 ayat 3 UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan tersebut maka Prioritas dan Sasaran RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ini disusun berlandaskan kepada :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, dengan mempedomani Sasaran Pokok/Arah Kebijakan RPJPD Tahap III (2013-2018)
- b. RPJM Nasional 2015-2019, dengan mempedomani Sasaran Pokok/Arah Kebijakan RPJMN di Tahun 2016.
- c. Sinkronisasi dengan RKP Tahun 2016, dengan mencermati Isu Strategis, Prioritas , Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016.

Adapun tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 ialah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing ekonomi dan sosial, berkeadilan dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang demokratis, bersih dan jujur, dengan sasaran ditujukan kepada :

- (1) Meningkatkan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya yang membawa masyarakat Sumatera Utara semakin sejahtera,
- (2) Terwujudnya Sumut yang demokratis berlandaskan hukum
- (3) Terwujudnya rasa aman dan damai serta terlindunginya semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat
- (4) Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
- (5) Terwujudnya Sumut yang asri dan lestari
- (6) Terwujudnya masyarakat Sumut yang bermoral, beretika, beriman dan berbudaya

Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara adalah :

- 1) Mewujudkan rasa aman dan damai bagi masyarakat dan perlindungan terhadap semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat
- 2) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermoral, beretika dan berbudaya
- 3) Mewujudkan Sumatera Utara yang demokratis dan berdasarkan hukum
- 4) Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
- 5) Menumbuhkan daya saing Sumatera Utara dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat
- 6) Mewujudkan Sumatera Utara yang asri dan lestari di seluruh wilayah termasuk dipedesaan

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D Tahap ke-3 ditujukan kepada ***pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.***

Sejalan dengan tercipta dan terpeliharanya rasa aman, damai dan tumbuhnya demokratisme masyarakat yang ditandai dari semakin mantapnya pertumbuhan nilai-nilai demokrasi ditengah-tengah masyarakat serta tumbuhnya sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai produk dari RPJP-D ke-1 dan RPJP-D ke-2, maka Sumatera Utara akan sudah berada pada posisi yang cukup baik untuk menumbuhkan dan memacu daya saing melalui transformasi daya saing komparatif berbasis sumberdaya alam menjadi daya saing kompetitif berbasis sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

Untuk itu, pemantapan struktur ekonomi dan keseimbangan persebaran pertumbuhan sektor-sektor melalui peningkatan keterpaduan sektor industri manufaktur (sektor sekunder) dengan sektor pertanian, kelautan dan sumberdaya alam lainnya (sektor primer) dan sektor jasa-jasa yaitu keuangan, perdagangan, dan transportasi (sektor tertier) yang didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam yang berkelanjutan akan menciptakan daya saing yang tangguh bagi Sumatera Utara. Ketersediaan infrastruktur yang mantap sesuai dengan rencana tata ruang yang meliputi mantapnya jaringan jalan terutama kearah kantong-kantong produksi dan daerah pemasaran, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal (tersedia sepanjang hari) dan efisien (tarif yang realistik) baik untuk kebutuhan industri /sektor bisnis maupun rumah tangga, tersedia pasokan air baik air minum/bersih maupun air irigasi merupakan kondisi penting lainnya yang harus dijamin pemenuhannya melalui pembangunan tahap ketiga ini.

Pembudayaan penggunaan teknologi informasi baik dalam pemerintahan maupun di dunia pendidikan, organisasi bisnis dan lain-lain diharapkan telah tumbuh dengan baik. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah perlu memotivasi dan memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga yang membangun infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kemampuan aksesnya terhadap informasi.

Selain itu dalam penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015, juga dengan melihat dan mencermati :

- a. RTRW Provsu 2013-2032 dan revisinya
- b. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang didalamnya memuat Isu Strategis Global, Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- d. Hasil evaluasi pembangunan tahun 2013-2014, dan tahun berjalan 2015, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2016 yang merupakan tahun ketiga dari RPJMD 2013-2018, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016 mengacu kepada Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahap-III Tahun 2013-2018, yakni **"Pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan kepada daya saing daerah yang dilandaskan kepada SDM dan SDA, melalui pemanfaatan teknologi"**

4.2. PRINSIP DASAR PENYUSUNAN RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016

5 prinsip yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Business Not As Usual

Sesuai dengan arah pengembangan Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dilakukan dengan pendekatan terobosan (*breakthrough*) yang didasari oleh semangat "Business Not As Usual" (Bisnis yang tidak biasa-biasa), melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama

antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (*debottlenecking*) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

2) Memiliki Daya Saing

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara diarahkan kepada peningkatan daya saing pada semua aspek pembangunan, baik dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, sosial budaya, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, perdagangan dan industri, keuangan dan investasi dan sebagainya, yang kesemuanya diarahkan kepada tercapainya sasaran utama yakni penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Efisien dan Efektif

Pembangunan yang dilaksanakan dengan secara efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal, dan efektif yakni kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. Mengingat keterbatasan dalam pendanaan pembangunan, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

4) Pelayanan Publik yang Prima

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat / daerah, BUMN / BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menpan No. 81/1993). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk pelayanan prima.

Pelayanan prima (*excellent service*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan (yang dalam hal ini adalah masyarakat secara luas). Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat.

Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kualitas pelayanan meliputi (1) Kecepatan dan ketepatan waktu (2) Kesederhanaan dalam proses, (3) Kepastian dalam aspek regulasi/hukum, (4) Fasilitas pelayanan (5) Ketulusan dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5) Partisipasi Stakeholder Pembangunan (*Academic, Business, Community and Government / ABCG,*)

Pembangunan merupakan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, pelaku bisnis maupun masyarakat secara luas, yang bersama membangun sinergitas untuk mewujudkan tujuan bersama untuk kemakmuran masyarakat.

4.3. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dapat dicermati beberapa hal penting sebagai berikut :

- a. RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional, memuat (1) Prioritas pembangunan nasional, (2) Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta (3) program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)
- b. Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2016 adalah :
“MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS”
- Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam Tema RKP Tahun 2016 tersebut adalah :
- 1) Pemenuhan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan.
 - 2) Pembangunan berkualitas, yaitu :
 - a. Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.
 - b. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
 - 3) Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap).
 - 4) RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan iptek.
- c. Sasaran Utama :
- 1) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen
 - 2) Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0-6,0 persen
 - 3) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,0 - 10 persen
 - 4) Laju inflasi 4,0 persen
- d. Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019, terdiri dari 9 (sembilan) disusun sebagai penjabaran dari Nawa Cita, yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
 2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
 8. Melakukan revolusi karakter bangsa
 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2014, serta perumusan permasalahan dan tantangan tahun 2016, yang telah disajikan pada Bab-II, maka ditetapkan isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera

Utara sebagai berikut :

4.3.1. Isu Strategis Global

Berbagai Isu Global yang berhubungan dan mempengaruhi kondisi regional, nasional maupun lokal (Provinsi Sumatera Utara) berkaitan dengan ekonomi dan sosial antara lain adalah :

a. Perekonomian :

- 1) Krisis yang berkepanjangan dan lambannya proses pemulihan ekonomi negara maju telah menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Kebijakan akomodatif oleh otoritas negara maju sebagai respon ekonomi yang melambat dinilai belum mampu menyentuh akar permasalahan krisis dan hanya memberi sentimen positif jangka pendek. Oleh karena itu, imbas nyata kebijakan akomodatif baru dirasakan di pasar keuangan, sementara indikator makro seperti angka pengangguran, investasi, konsumsi, dan sentimen bisnis masih dalam kecenderungan melemah.
- 2) Adanya sistem perdagangan bebas dunia dengan kebijakan nol tariff, sementara daya saing produk pertanian lokal umumnya masih rendah, sehingga pasar saat ini kebanjiran barang impor produk luar yang lebih murah dengan kualitas lebih baik.
- 3) Adanya kenaikan permintaan dunia akan produk berkualitas yang dihasilkan dari pertanian ramah lingkungan (pertanian organik) dan sistem pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) dan adanya kecenderungan pertumbuhan ekonomi kedepan lebih mengedepankan pertumbuhan yang selaras dengan lingkungan (ekonomi hijau).
- 4) Terjadinya perubahan iklim dunia (*Climate Change*) akibat pemanasan global mempengaruhi pola tanam yang dapat mengancam ketahanan pangan khususnya di sejumlah daerah yang masih dalam kategori rawan pangan.
- 5) Adanya konflik kepentingan komoditi pertanian sebagai bahan pangan dan juga sebagai sumber energi pengganti bahan baku fosil (energi alternatif), mengancam ketersediaan pangan dunia
- 6) Terbentuknya ASEAN *Economic Community* (AEC) dengan pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) di tahun 2015 akan menghadapkan kita pada situasi di mana lalu lintas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja terampil akan menjadi jauh lebih bebas. Ini akan menjadi ancaman jika Sumatera Utara tidak siap menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena kesamaan komoditi ekspor yang dipasarkan. Tidak ada pilihan bagi kita selain meningkatkan daya saing setinggi mungkin dan daya saing perekonomian kita akan lebih ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Sosial :

- 1) Tujuan Pembangunan Millenium (*The Millenium Development Goals*) yang dimulai dari tahun 1990 dengan target tahun 2015, belum semuanya dapat dicapai, terutama di bidang kesehatan yang ditunjukkan dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), masih cukup tingginya prevalensi balita kekurangan gizi dan prevalensi balita bertubuh pendek.
- 2) Saat ini kita hidup satu kampung global (global village) dimana lalu lintas orang, barang, uang dan penyakit tidak tersekat-sekat lagi, sehingga dibutuhkan kerjasama antar Negara dalam menangani penyakit pandemic yang menyebar keseluruh dunia seperti penyakit flu burung, flu babi, mad cow serta HIV/AIDS, penyalahgunaan narkotika dan zat aditif berbahaya.
- 3) Pertumbuhan penduduk dunia dan adanya peperangan menjadi pemicu kelaparan dan pemiskinan di sejumlah negara yang belum berkembang. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan. Bagaimana mengurangi jumlah penduduk miskin ini dan menjamin ketersediaan makanan untuk semua.
- 4) Perkembangan politik regional seperti yang terjadi di Myanmar, Korea Utara akan

memicu instabilitas di kawasan ini akan berakibat langsung bagi pembangunan Indonesia (imigrasi).

- 5) Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, isu terorisme turut mempengaruhi Indonesia. Perlu dilakukan langkah-langkah global dan regional untuk menghindari dampak negative yang ditimbulkan perang terhadap terorisme tersebut.
- 6) Masih tingginya jumlah penduduk miskin di berbagai belahan dunia mengindikasikan bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan di berbagai negara tersebut masih kurang, kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia (World Bank) menunjukkan bahwa modal sosial memberi andil yang cukup besar bagi keberhasilan pembangunan.

4.3.2. Isu Strategis Nasional

Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai berkelanjutan dari RPJMD-3

Tabel 4.1. Isu Strategis Nasional

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan;
 - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.
 - b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:
 - Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
 - Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
 - Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

- Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.
- c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.
- Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:
- Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
 - Wilayah pinggiran;
 - Luar Jawa;
 - Kawasan Timur.
3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:
- a. Kepastian dan penegakan hukum;
 - b. Keamanan dan ketertiban;
 - c. Politik dan demokrasi; dan
 - d. Tetakelola dan reformasi birokrasi.
4. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

4.3.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Isu strategis Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan berdasarkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Isu Strategis Provinsi

PRIORITAS	ISU STRATEGIS
Prioritas 1 : Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kehidupan beragama dan harmonisasi antar umat beragama 2. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah, serta layanan publik yang prima 3. Peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat 4. Peningkatan iklim perpolitikan yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum 5. Peningkatan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN 6. Peningkatan persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan hukum 7. Perwujudan iklim berusaha yang baik yang mendukung daya saing daerah 8. Peningkatan partisipasi dunia usaha, BUMN, BUMD dan

PRIORITAS	ISU STRATEGIS
	<p>perbankan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan</p> <p>9. Pemantapan pelaksanaan otonomi dan kerjasama daerah</p> <p>10. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan</p> <p>11. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan</p> <p>12. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan</p> <p>13. Peningkatan seni budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional</p>
<p>Prioritas 2 : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum maksimal 2. Jumlah anak tidak bersekolah masih relatif banyak dan belum terdata dengan baik dan akurat di Kabupaten dan Kota 3. Masih terjadi kesenjangan akses pendidikan menurut kategori perkotaan & pedesaan; serta mampu dan tidak mampu secara ekonomis. 4. Angka kesenjangan cenderung naik di tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi 5. Penduduk ≥ 15 tahun yang buta aksara masih relatif banyak dan belum terdata dengan baik dan akurat di Kabupaten dan Kota 6. Peringkat mutu pendidikan Sumatera Utara secara Nasional masih relatif rendah terkait dengan tingkat relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan 7. Pengendalian dan koordinasi antar pemerintah (Provinsi dan Kabupaten & Kota) yang belum berjalan optimal karena kurang ditunjang oleh data dan sinkronisasi kegiatan (sistem informasi manajemen) yang terbangun dengan baik 8. Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
<p>Prioritas 3 : Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesehatan ibu, bayi dan balita ; 2. Perbaikan status gizi masyarakat; 3. Pengendalian, penyakit menular, tidak menular dan penyehatan lingkungan; 4. Pemenuhan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan; 5. Pemenuhan, pengembangan sistem Jamkesmas; 6. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan; 7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. 9. Tingginya angka BOR (Bed Occupancy Rate) yaitu perbandingan antara kapasitas rawat inap dengan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Daerah Sumatera Utara yang masih di atas 100% (104%) 10. Tingginya Angka LOS (Lenght Of Stay) atau lamanya masa rawatan rata-rata perpasien di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Daerah Sumatera Utara. 11. Kurangnya Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia), terutama dokter spesialis jiwa, perawat khusus jiwa, dan tenaga ahli di beberapa bidang tertentu dan sarana/prasarana rumah sakit

PRIORITAS	ISU STRATEGIS
	jiwa
<p>Prioritas 4 : Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Mendukung Daya Saing Perekonomian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi serta peningkatan kesejahteraan 2. Optimalisasi infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan), perhubungan, sumber daya air, energi dan fasilitas lainnya khususnya pada daerah kabupaten yang berada didaerah yang sulit dijangkau 3. Peningkatan struktur jalan menuju kawasan strategis nasional dan jalan strategis provinsi disetiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 4. Pembangunan dan peningkatan struktur jalan lingkar pulau Nias 5. Pembangunan dan peningkatan struktur jalan mendukung kawasan agropolitan dan mebidangro 6. Peningkatan infrastruktur pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar 7. Pengembangan infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan 8. Peningkatan konektivitas untuk mendukung pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah 9. Pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah dan pusat-pusat kegiatan lokal yang terkoneksi dalam sistem wilayah 10. Peningkatan koordinasi dan pembinaan penataan ruang provinsi dan kabupaten/kota 11. Peningkatan kapasitas mitigasi bencana 12. Pengendalian kualitas lingkungan 13. Pengembangan kota baru 14. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau 15. Peningkatan kualitas hunian masyarakat 16. Penyediaan air baku bagi kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri dengan prioritas pertama untuk pemenuhan kebutuhan pokok msyarakat secara tepat waktu, kualitas dan kuantitasnya; 17. Optimalisasi fungsi layanan irigasi dan rawa 18. Pengendalian daya rusak air/pengednalian banjir dan pengamanan pantai 19. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi secara Partisipatif (PPSIP) 20. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air 21. Perencanaan koordinasi dan pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu 22. Peningkatan konservasi Sumber Daya Air melalui pengelolaan DAS secara terpadu
<p>Prioritas 5 : Peningkatan produksi, produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ketahanan pangan (food security) dan penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi untuk terwujudnya swasembada pangan (kedele, daging dan ikan) dan swasembada berkelanjutan (beras, jagung) 2. Diversifikasi pangan untuk penguatan Pola Pangan Harapan (PPH) 3. Peningkatan infrastruktur Pertanian meliputi irigasi, jalan usahatani dan jalan produksi

PRIORITAS	ISU STRATEGIS
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peremajaan Tanaman Tidak Menghasilkan di Perkebunan 5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan 6. Peningkatan kelembagaan petani dan nelayan 7. Peningkatan dan pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan/kelautan dan kehutanan 8. Penyediaan dan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan 9. Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, pekebun dan nelayan 10. Pengendalian inflasi komoditi pertanian 11. Pengendalian dan pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan 12. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan pengembangan perhutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
<p>Prioritas 6 : Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan IPTEK dalam rangka mendukung percepatan, perluasan dan daya saing ekonomi daerah 2. Pengembangan riset dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Teknologi Unggulan Daerah 3. Pengembangan riset dan penerapan teknologi untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis 4. Penciptaan inovasi dan kreativitas daerah
<p>Prioritas 7 : Peningkatan Ekonomi Kerakyatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah dan peran serta koperasi terhadap perekonomian daerah 2. Peningkatan dan pemberdayaan lembaga ekonomi nonformal 3. Peningkatan daya saing serta produktifitas koperasi dan industri kecil menengah 4. Peningkatan investasi (PMA dan PMDN) 5. Peningkatan sumber-sumber PAD 6. Peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata serta kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
<p>Prioritas 8 : Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi rumah produktifitas daerah 2. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif berbasis keluarga 3. Peningkatan produktivitas usaha mikro 4. Pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal dan daerah perbatasan 5. Mendorong penciptaan wirausahawan pemula (job creation) 6. Perluasan kesempatan kerja
<p>Prioritas 9 : Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kebijakan nasional di provinsi dan mendorong pelaksanaannya di kabupaten/kota antara lain : MP3KI, MP3EI, RAD MDGs, RAD-PG, RAD - PK dan RAD - GRK 2. Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan 3. Mendorong percepatan pembangunan KSN dan Pusat Kegiatan Wilayah di Sumatera Utara 4. Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pembangunan

4.4. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Sumatera Utara dapat dikemukakan sebagai berikut :

4.4.1. Urusan Wajib

Tabel 4.3. Identifikasi Permasalahan

Bidang/Urusan	Permasalahan
1.1.1.1. Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1) Kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru sekolah negeri dan swasta masih relatif rendah, dari jumlah kurang lebih 194.405 guru di Provinsi Sumatera Utara, lebih dari 50% belum memiliki kualifikasi sarjana (S1).2) Kemampuan teknis Guru yang ada di daerah pedesaan umumnya masih relatif rendah, baik dalam penguasaan bahan ajar hingga penguasaan metode pembelajaran.3) Penyebaran guru-guru sesuai bidang/kompetensinya belum merata di Kabupaten dan Kota. Umumnya guru-guru yang berkompentensi masih terkonsentrasi di Kecamatan yang menjadi ibukota Kabupaten/Kota.4) Belum tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran secara online (e-Education), antara lain belum tersedianya akses internet dan ketersediaan web site masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota5) Alokasi anggaran masih minim dan belum memenuhi amanah Undang-undang sebesar 20% APBN & APBD untuk kegiatan pembangunan pendidikan pada masing-masing dinas pendidikan Kabupaen/Kota6) Kebutuhan akan kompetensi sekolah kejuruan (SMK dan Politeknik)
1.1.1.2. Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1) Masih terbatasnya SDM kesehatan2) Belum memadainya dana APBD untuk kesehatan (baru 2-4 %).3) Pembangunan fisik yang diutamakan sehingga alokasi untuk pembangunan non fisik terabaikan (seperti diklat)4) Masih ditemukan alokasi peralatan medis tidak sesuai dengan kebutuhan.5) Masih ada kabupaten/Kota yang belum mempunyai SPM yang baku.6) RSUD baru sebahagian yang terakreditasi, puskesmas juga masih terbatas jumlahnya yang telah mendapat ISO7) Masih terbatasnya keterlibatan stakeholders dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan8) Dukungan Kabupaten/kota yang terbatas untuk mencapai sasaran Universal Coverage
1.1.1.3. Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none">1) Terbatasnya pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi, perhubungan, pengairan dan fasilitas lainnya2) Kelas jalan yang dibangun sudah tidak mampu menahan beban muatan yang melebihi kapasitas sehingga rentan terhadap kerusakan3) Kondisi sebagian besar jalan-jalan diwilayah Sumatera Utara baik yang berstatus nasional, provinsi maupun kabupaten berada dalam keadaan kurang baik khususnya di Pantai Barat4) Kondisi geografis yang sulit di Kawasan Pantai Barat

Bidang/Urusan	Permasalahan
	menimbulkan biaya yang lebih mahal dalam proses pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
1.1.1.4. Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum adanya regulasi daerah tentang RTRW Provinsi dan sebagian RTRW Kabupaten/Kota yang mengacu pada kebijakan penataan ruang (UU No. 26 Tahun 2007) sehingga menjadi kendala dalam percepatan dan investasi pembangunan daerah 2) Belum tersedianya secara lengkap regulasi tata ruang daerah hingga tingkat operasionalisasi tata ruang melalui ketersediaan dokumen rencana detail tata ruang kabupaten/kota 3) Belum memadainya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan 4) Belum selesainya upaya penetapan alokasi luasan kawasan hutan sebagai kawasan budidaya maupun kawasan lindung serta penataan batas kawasan hutan 5) Belum tuntasnya permasalahan penetapan tata batas wilayah administratif antara provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi berbatasan (Aceh, Riau, dan Sumatera Barat) serta antar kabupaten/kota 6) Belum optimalnya upaya mitigasi bencana dalam mengurangi resiko bencana yang berpotensi terjadi akibat berkurangnya daya dukung alam dan perubahan iklim
1.1.1.5. Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya konsistensi dan komitmen kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan implementasi dalam pelaksanaannya (perencanaan dan penganggaran) 2) Masih kurangnya SDM perencana dengan spesifikasi keahlian dari berbagai bidang dan aspek pembangunan 3) Sinkronisasi berbagai kebijakan nasional pada rencana pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
1.1.1.6. Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keterbatasan sarana dan prasana perhubungan khususnya pada daerah kabupaten yang berada didaerah yang sulit untuk dijangkau
1.1.1.7. Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya upaya pelestarian lingkungan 2) Meningkatnya kecenderungan kerusakan mangrove, terumbu karang dan pencemaran perairan laut 3) Meningkatnya kecenderungan kerusakan lingkungan hutan TNGL dan wilayah sekitar DAS 4) Meningkatnya kecenderungan pencemaran dan kerusakan lingkungan Sungai Deli dan Sungai Belawan 5) Meningkatnya kecenderungan pencemaran udara dan limbah B3 6) Meningkatnya kecenderungan pencemaran dan kerusakan ekosistem Danau Toba 7) Belum optimalnya pengendalian dan penurunan emisi gas rumah kaca
1.1.1.8. Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1) Banyaknya masyarakat penyandang masalah sosial 2) Jumlah PMKS yang dapat menerima pelayanan sosial relatif sangat kecil
1.1.1.9. Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kompetensi SDM tenaga kerja masih terbatas dan

Bidang/Urusan	Permasalahan
	<p>kurang memiliki daya saing</p> <p>2) Jumlah angkatan kerja yang memasuki pasar kerja jauh lebih tinggi dari lapangan pekerjaan yang ada</p>
<p>1.1.1.10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</p>	<p>1) Belum kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi dan UMKM terutama prosedur dan biaya perizinan usaha yang masih dirasakan cukup memberatkan disebabkan belum optimalnya pelayanan satu pintu dan lemahnya koordinasi antar instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM.</p> <p>2) Masih lemahnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya terutama potensi sumber daya lokal yang tersedia serta permodalan disebabkan Koperasi dan UMKM belum memiliki jaminan (bankable).</p> <p>3) Produksi, daya saing dan akses pasar yang dimiliki Koperasi dan UMKM sangat terbatas disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, penguasaan teknologi, jaringan informasi, jaringan pemasaran dan sarana yang dimiliki Koperasi dan UMKM disamping komitmen stakeholders belum optimal.</p> <p>4) Rendahnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan semangat dan perilaku kewirausahaan, yang disebabkan kemampuan dan kualitas manajemen Koperasi dan UMKM relatif rendah.</p> <p>5) Inventarisasi Koperasi dan UMKM belum terlaksana secara optimal sehingga data yang akurat terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM sulit diperoleh</p>
<p>1.1.1.11. Penanaman Modal</p>	<p>1) Kerusakan sarana dan prasarana transportasi, kapasitas bandara dan pelabuhan. Begitu juga dengan ketersediaan pasokan energi terbarukan dan penggalan sumber energi baru terutama energi listrik dan gas.</p> <p>2) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Daerah yang bermasalah serta tidak kondusif bagi pengembangan iklim investasi bahkan cenderung dapat menghambat investasi.</p> <p>3) Rendahnya daya tarik investasi terutama berkaitan dengan birokrasi, pungutan liar, korupsi, efisiensi, dan good governance.</p>
<p>1.1.1.12. Kebudayaan</p>	<p>1) Pembangunan hukum dalam aspek budaya (kultur hukum) masyarakat agar mendukung pembangunan daerah di Sumatera Utara.</p> <p>2) Belum dijadikannya budaya (etnis) menjadi modal dalam pembangunan daerah</p>
<p>1.1.1.13. Pemuda dan Olahraga</p>	<p>1) Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam memasuki dunia usaha dengan adanya perubahan paradigma pemuda dari politic category ke social category</p> <p>2) Merosotnya rasa nasionalisme dan kebangsaan dikalangan pemuda</p> <p>3) Semakin maraknya peredaran NAPZA, trafficking anak dan perempuan, pornografi dan pornoaksi, meningkatnya penyakit menular seksual HIV/AIDS dan destruktif yang dapat mengakibatkan lost generation</p> <p>4) Belum maksimalnya sistem manajemen olahraga, dan masih rendahnya SDM olahraga yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>5) Belum berkembangnya klub-klub olahraga di</p>

Bidang/Urusan	Permasalahan
	kabupaten/kota 6) Minimnya perhatian dan partisipasi pengusaha, BUMN dan BUMD terhadap pembangunan pemuda dan olahraga 7) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga (belum berimbang) dibanding jumlah penduduk
1.1.1.14. Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	1. Masih kurangnya pemahaman tentang etika dan analisa politik sehingga tercipta situasi kehidupan yang kondusif di Sumut 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum legislatif dan presiden 3. Diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam Pemahaman Penanganan Pembangunan Sumut
1.1.1.15. Penanggulangan Bencana Daerah	1) Diperlukan ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang kebencanaan di Sumut 2) Tersedianya peta rawan bencana tingkat Kab/Kota 3) Tersedianya logistik dan prasarana logistik penanggulangan bencana
1.1.1.16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1) Ketersediaan kualitas sumber daya manusia sebagai penyelenggara pelayanan publik maupun tingkat intelektualitas masyarakat sebagai penikmat pelayanan. 2) Mutu penyelenggaraan pelayanan publik masih lemah, banyak terjadi praktek pungli, tidak ada kepastian, dan prosedur berbelit-belit. Dampaknya pada bidang usaha ekonomi mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, menghambat investasi, memperlambat arus barang ekspor-impor, kesan bagi masyarakat kurang memuaskan dan citranya buruk. 3) Fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan pelayanan publik. 5) Prinsip-prinsip good governance belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. 6) Tersendatnya realisasi otonomi yang diamanatkan oleh UU No. 23 tahun 2014, disebabkan oleh kemampuan profesional dan etos kerja aparatur di daerah 7) Prinsip-prinsip good governance belum berjalan sebagaimana yang diharapkan
1.1.1.17. Sekretariat Daerah	1) Belum optimalnya perbaikan kinerja dari para aparatur terutama pada birokrasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara,
1.1.1.18. Sekretariat DPRD	1) Optimalisasi kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah
1.1.1.19. Litbang	1) Belum terkoordinasinya dengan baik pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi/lembaga Litbang lainnya di Sumatera Utara 2) Belum adanya payung hukum seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang sistem dan prosedur pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Sumatera Utara 3) Proses pengambilan kebijakan dalam program Pembangunan Daerah masih belum merupakan hasil Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh

Bidang/Urusan	Permasalahan
	BPP Provsu, hal ini berkaitan dengan kualitas hasil penelitian yang belum dapat memenuhi kebutuhan Pemprovsu 4) Belum optimalnya inovasi dan kreatifitas daerah 5) Masih belum optimalnya fungsi Badan Riset Daerah
1.1.1.20. Inspektorat Daerah	1) Belum optimalnya fungsi inspektorat dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan
1.1.1.21. Kantor Perwakilan Jakarta	1) Terbatasnya pengembangan kapasitas ruang penginapan 2) Belum optimalnya kapasitas sdm dan sarana prasarana dalam mendukung kinerja layanan publik
1.1.1.22. Pendidikan dan Pelatihan	1) Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dan latihan 2) Terbatasnya ketersediaan dan kualitas tenaga pengajar dan widyaiswara
1.1.1.23. Kepegawaian Daerah	1) Mutu penyelenggaraan pelayanan publik masih lemah, banyak terjadi praktek pungli, tidak ada kepastian, dan prosedur berbelit-belit. Dampaknya pada bidang usaha ekonomi mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, menghambat investasi, memperlambat arus barang ekspor-impor, kesan bagi masyarakat kurang memuaskan dan citranya buruk. 2) Kualitas produk layanan birokrasi masih dirasakan tidak dapat memenuhi harapan masyarakat pengguna jasa
1.1.1.24. Sekretariat KORPRI	1) Peningkatan peran dan fungsi sekretariat Korpri dalam pembinaan anggota
1.1.1.25. Ketahanan Pangan	1) Belum tercapainya swasembada untuk semua komoditi , khususnya kacang kedele, daging sapi 2) Masih rawannya ketahanan pangan 3) Belum meratanya distribusi pangan 4) Belum menurunnya konsumsi beras
1.1.1.26. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1) Kapasitas SDM penyuluh perlu ditingkatkan 2) Belum optimalnya pemanfaatan tenaga penyuluh di Provinsi dan Kabupaten/kota 3) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluh di lapangan 4) Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluhpenyuluh
1.1.1.27. Pemberdayaan Masyarakat & Desa	1) Terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, sejak beberapa tahun terakhir tetapi jumlahnya masih cukup tinggi. 2) Beberapa daerah mempunyai perentase penduduk miskin yang sangat besar seperti Gunung Sitoli sebesar 33,7%. 3) Kemiskinan yang terjadi umumnya kemiskinan struktural yang berupa di daerah kumuh, desa terpencil, dan nelayan. 4) Lambatnya pembangunan daerah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi
1.1.1.28. Komunikasi dan	1) Perlunya dilakukan sosialisasi komunikasi dan

Bidang/Urusan	Permasalahan
Informatika	<p>diseminasi Informasi Pra Pemilu Legislatif dan Presiden di Kabupaten/Kota</p> <p>2) Perlunya dilakukan Pertemuan Komunikasi dan Informasi antara Muspida Plus se-Sumatera Utara dalam Rangka Pra Pemilu Legislatif dan Presiden</p> <p>3) Implementasi pelaksanaan E- Government dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara</p>
1.1.1.29. Perpustakaan dan Arsip	<p>1) Belum semua Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007</p> <p>2) Rendahnya minat baca masyarakat karena belum tertanamnya budaya gemar membaca</p> <p>3) Minimnya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan</p> <p>4) Minimnya SDM Pustakawan dan Arsiparis</p> <p>5) Belum adanya peraturan tentang wajib baca dan wajib simpan arsip</p> <p>6) Layanan perpustakaan belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah</p> <p>7) Belum terpenuhinya permintaan komponen masyarakat mendirikan perpustakaan</p> <p>8) Rendahnya keinginan untuk menulis buku terutama muatan lokal</p> <p>9) Sulitnya menemukan arsip-arsip tempo dulu dan naskah kuno /manuskrip</p>

4.4.2. Urusan Pilihan

Bidang/Urusan	Permasalahan
1.1.1.30. Pertanian	<p>1) Status kepemilikan dan luas lahan petani sangat minim yang mengakibatkan pendapatan tidak mencukupi kebutuhan untuk hidup sejahtera (nilai tukar petani masih rendah)</p> <p>2) Petani umumnya berpendidikan rendah (setingkat SD/ sederajat), sehingga mengalami kesulitan dalam menyerap pengetahuan dan penerapan teknologi.</p> <p>3) Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pertanian (irigasi, Jalan Usaha Tani, pusat pemasaran produk pertanian) mengakibatkan banyaknya terjadi alih fungsi lahan dari tanaman pangan menjadi lahan perkebunan atau untuk peruntukan lainnya</p> <p>4) Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global</p> <p>5) Belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan</p> <p>6) Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan tingginya suku bunga usaha tani</p> <p>7) Teknologi yang tersedia belum teraplikasi secara maksimal</p> <p>8) Masih luasnya Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) di perkebunan</p> <p>9) Mutu hasil produk perkebunan masih rendah, kurang didukung oleh Unit Pengolahan yang efisien dan terbatas pada produk primer, sehingga peluang untuk</p>

	<p>memperoleh nilai tambah belum maksimal</p> <p>10) Masih besarnya sumbangan sektor pertanian dalam memacu inflasi</p> <p>11) Ancaman kerusakan Sumber Daya Alam akibat pengelolaan yang tidak tepat</p> <p>12) Jaminan harga produk pertanian di tingkat petani</p>
1.1.1.31. Kehutanan	<p>1) Pelestarian dan pengendalian hutan</p> <p>2) Masih terjadinya perambahan hutan dan illegal logging</p> <p>3) Terjadinya kebakaran hutan</p>
1.1.1.32. Energi dan Sumberdaya Mineral	<p>1) Bauran energi (energy mix) belum optimal.</p> <p>2) Pasokan energi masih terbatas (jumlah, kualitas, dan keandalan), terutama listrik dan gas.</p> <p>3) Teknologi dan pendanaan didominasi asing.</p> <p>4) Regulasi masih perlu disempurnakan diikuti dengan konsistensi kebijakan.</p> <p>5) Kebijakan harga (pricing policy) masih belum tepat.</p> <p>6) Efisiensi dan konservasi energi masih belum berjalan dengan baik.</p> <p>7) Parsitipasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi kurang.</p> <p>8) Rendahnya pengetahuan teknologi ramah lingkungan;</p> <p>9) Perlunya regulasi baru tentang pengelolaan tambang batuan non logam;</p> <p>10) Rendahnya kesadaran masyarakat dan perusahaan tambang</p> <p>11) Data dan informasi tentang potensi sumberdaya mineral belum rinci dan kualitas cadangan .</p> <p>12) Belum terjaminnya kepastian hukum berusaha di bidang pertambangan.</p> <p>13) Tumpang tindih lokasi prospek pertambangan dengan kawasan hutan lindung.</p> <p>14) Padat modal dan resiko tinggi berusaha di bidang pertambangan.</p> <p>15) Persepsi sebagian masyarakat bahwa kegiatan pertambangan merusak lingkungan.</p> <p>16) Kurang intensifnya promosi di bidang pertambangan</p>
1.1.1.33. Pariwisata	<p>1) Komitmen dari berbagai pihak terkait dengan pariwisata belum seluruhnya terlaksana.</p> <p>2) Pengelolaan pariwisata yang ada di kabupaten / Kota belum dilaksanakan secara optimal.</p> <p>3) Prasarana dan sarana penunjang pariwisata masih relatif belum lengkap dan tidak tersebar secara merata.</p> <p>4) Aksesibilitas menuju beberapa daerah objek tujuan wisata masih kurang mendukung.</p> <p>5) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung pembangunan pariwisata di Kabupaten / Kota masih relatif rendah.</p> <p>6) Apresiasi masyarakat terhadap pariwisata masih rendah.</p> <p>7) Peran serta dari masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata masih rendah.</p> <p>8) Keterbatasan dana pengembangan pariwisata di Kabupaten / Kota.</p> <p>9) Aspek-aspek dalam pengembangan pariwisata belum memiliki kepastian hukum yang kuat.</p> <p>10) Minat investor pada sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Utara masih rendah.</p> <p>11) Sistem promosi dan pemasaran pariwisata tidak dilakukan secara terpadu dan tidak terfokus pada</p>

	<p>pangsa pasar tertentu.</p> <p>12) Masyarakat di DTW belum memiliki perilaku sadar wisata</p> <p>13) Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap objek-objek wisata dan budaya yang berada didalam kawasan strategis provinsi</p> <p>14) Belum optimalnya sektor pariwisata sebagai pendorong ekonomi wilayah</p>
1.1.1.34. Kelautan dan Perikanan	<p>1) Pencurian ikan (illegal fishing) masih menjadi kendala program pembangunan perikanan disebabkan lemahnya pengawasan serta pengendalian terhadap sumber daya kelautan dan perikanan.</p> <p>2) Terjadinya praktik-praktik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara tidak bertanggung jawab, serta melanggar peraturan sehingga terjadi kehilangan sumber daya yang cukup besar setiap tahunnya.</p> <p>3) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat terlarang seperti bom, racun, trawl (Kepres No. 39 Tahun 1980).</p> <p>4) Masih terbatasnya ketersediaan bibit/benih unggul pada perikanan budidaya</p> <p>5) Belum optimalnya peran UPT dalam menghasilkan bibit unggul untuk memenuhi kebutuhan bibit</p> <p>6) Masih rendahnya kualitas SDM Nelayan dan Pembudidaya</p> <p>7) Keterbatasan akses nelayan terhadap permodalan</p>
1.1.1.35. Industri	<p>1) Belum optimalnya pengawasan barang yang beredar dalam rangka pengamanan dan perlindungan konsumen</p> <p>2) Informasi tentang produk-produk dalam negeri belum optimal</p> <p>3) Masih banyak alat-alat UTTP yang belum standar di Kabupaten/Kota, disebabkan masih minimnya pengawasan dalam hal ini karena kekurangan tenaga pemeriksa</p> <p>4) Daya saing hasil produksi IKM Masih Lemah</p> <p>5) Rendahnya kualitas barang-barang produk IKM dan kurangnya pemanfaatan teknologi untuk memberikan nilai tambah terhadap produk IKM</p> <p>6) Masih rendahnya kemampuan SDM di bidang teknologi maupun manajemen</p> <p>7) Belum optimalnya pengawasan distribusi barang dan harga 9 (sembilan) bahan pokok serta barang beredar</p> <p>8) Masih banyak produk-produk komoditi unggulan Sumatera Utara yang belum dikenal di Indonesia</p> <p>9) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan penguasaan teknologi masih rendah dan terbatas</p> <p>10) Masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Instansi serumpun) dalam merencanakan kegiatan.</p> <p>11) Belum Optimalnya data industri dan perdagangan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan masa yang akan datang</p> <p>12) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri</p> <p>13) Kurangnya informasi bagi investor/pelaku usaha untuk mengenal komoditi andalan Sumatera Utara.</p> <p>14) Adanya barang-barang impor ilegal</p>

15) Masih rendahnya skill dan pengetahuan SDM UKM di bidang Ekspor-Impor
--

4.5. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Berpedoman dari kondisi objektif atas pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2014 serta perkiraan pada tahun 2015 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, kemudian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016.

a. Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Menilik kepada Visi Pembangunan Jangka Panjang Tahap III Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 yakni : “Pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan kepada daya saing daerah yang dilandaskan kepada SDM dan SDA, melalui pemanfaatan teknologi”, dan Tema RKP Tahun 2016, maka ditentukan tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 adalah :

“KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)”.

Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016, yakni :

1. Pemantapan Perekonomian Daerah

- Peningkatan Daya Saing
- Peningkatan dan pemanfaatan teknologi
- Peningkatan Ketahanan Ekonomi
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif

2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

- Peningkatan SDM
- Optimalisasi Pemanfaatan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung dan pelestarian lingkungan
- Pengurangan Resiko Bencana
- Penurunan Kemiskinan dan pengangguran
- Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

- Perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi
- Memantapkan penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Sasaran Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Dengan mendasarkan kepada sasaran utama pembangunan nasional, maka sasaran utama pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

- a. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,15 persen
- b. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,41 persen
- c. Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,00 – 9,31 persen
- d. Laju inflasi 4,5- 4,00 persen

Berdasarkan analisis capaian indikator makro ekonomi Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2011-2014 dan target tahun 2015-2016, maka diproyeksikan sasaran makro ekonomi Provinsi Sumatera Utara dalam tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2013-2014 dan Estimasi Tahun 2015-2016

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI EKONOMI TAHUN 2012 – 2014 ¹⁾		PRAKIRAAN TARGET ²⁾	
			2013	2014 ¹⁾	2015	2016
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Triliun Rp	403,93	454,03	501,47	554,03
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000	Triliun Rp	142,54	151,37	160,87	171,11
3	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rp	29,92	33,32	36,35	40,96
4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000	Juta Rp	10,73	11,40	11,65	
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,01	6,19	6,28	6,48
6	Nilai Tukar Petani (NTP)		99,71	102,17	102,58	102,99
7	Struktur Perekonomian					
-	Pertanian	Persen	21,32	21,95	20,25	20,20
-	Penggalian	Persen	1,13	1,32	1,35	1,36
-	Industri	Persen	21,58	22,55	22,64	22,76
-	Listrik, gas dan Air Minum	Persen	0,85	1,05	1,25	1,24
-	Bangunan	Persen	6,92	6,59	6,69	6,67
-	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Persen	19,29	19,32	20,02	20,12
-	Pengangkutan dan Komunikasi	Persen	9,55	9,20	9,28	9,25
-	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	Persen	7,68	7,17	7,57	7,55
-	Jasa-jasa	Persen	11,51	10,85	10,95	10,85
7	Volume Ekspor	Juta Ton	9,28	10,02	10,45	
8	Nilai Ekspor	Milyar US\$	9,597	10,20	10,75	
9	Volume Impor	Juta ton	6,92	6,07	6,02	
10	Nilai Impor	Milyar US\$	5,11	5,55	6,02	
11	Tingkat Inflasi	Persen	10,18	6,25	4,25	4,00

Sumber : 1) BPS Provinsi Sumatera Utara

2) Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Tahun 2015 adalah ESTIMASI

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 diarahkan kepada :

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah;
5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian;
6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin;
8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah.

Sektor-sektor prioritas ini bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tentunya implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas ini tetap

memperhatikan kemampuan keuangan (*fiscal capacity*) daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronisasikan berdasarkan hasil masukan menurut hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkatan terendah yakni Desa, kemudian Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, pengalokasian anggaran Provinsi dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016, tetap akan difokuskan bagi Kabupaten/Kota yang memberikan perhatian dan didukung dengan pendanaan dari masing-masing Kabupaten/Kota, melalui berbagai kerjasama pendanaan untuk berbagai kegiatan menurut sektor-sektor pembangunan yang berpedoman kepada fokus pembangunan dalam mewujudkan tercapainya target-target pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Disamping itu tetap diupayakan penggalian dan pengalokasian sumber-sumber pembiayaan baru yang mendukung pembangunan Sumatera Utara, seperti melalui kerjasama Pemerintah dan swasta, sektor dana Corporate Social Responsibility (CSR), Program Komitmen Bina Lingkungan dan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah serta dana Pinjaman Luar Negeri (LOAN)

4.6. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, bahwa RKPD tahun 2016 harus disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan tahunan daerah yang menjadi landasan penyusunan berbagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sampai dengan tahun 2014, pemerintah telah menetapkan 15 (lima belas) SPM bidang urusan pemerintahan. Kelima belas bidang SPM tersebut wajib diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan 9 (sembilan) diantaranya wajib diterapkan oleh provinsi dalam pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dalam hal ini Bappeda berfungsi dalam mengkoordinasikan pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD). Sedangkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM dikoordinasikan oleh Biro Otonomi dan Kerjasama Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut ditembuskan ke Bappeda sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan daerah.

Kesembilan SPM bidang urusan pemerintahan provinsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pendidikan, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemetaan sekolah terkait lokasi, kondisi ruang kelas, dan persebaran penduduk;

- 2) Pemetaan kondisi dan pemenuhan kebutuhan ruangan, laboratorium, alat peraga dan berbagai fasilitas sekolah lainnya;
- 3) Pemetaan jumlah dan kompetensi guru dan kepala sekolah serta identifikasi berbagai aktifitas yang mendukung pembinaan, pelatihan dan sertifikasi;
- 4) Pendataan dan penyediaan kebutuhan buku bagi peserta didik dan guru;
- 5) Pemantapan kurikulum 2013 melalui berbagai kegiatan pelatihan, pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi; dan
- 6) Penerapan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui pemetaan kemampuan satuan pendidikan, diklat peningkatan kompetensi dan penjaminan mutu substansi MBS.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang pendidikan yang perlu diselaraskan adalah :

- 1) Dukungan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI), diantaranya BOP PAUD, satu desa satu PAUD, dan bantuan rintisan lembaga PAUD baru;
- 2) Dukungan pelaksanaan program pendidikan dasar, diantaranya melalui bantuan siswa miskin SD, SMP, BOS SD dan SMP, pembangunan unit sekolah baru SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sedang SMP, pembangunan SD-SMP satu atap, insentif guru bantu;
- 3) Dukungan pelaksanaan program pendidikan menengah, diantaranya melalui bantuan siswa miskin SMA dan SMK, BOS SMA dan SMK, RKB SMA dan SMK, USB SMA dan SMK, serta peralatan laboratorium;
- 4) Peningkatan kompetensi bahasa dan apresiasi sastra guru dan siswa; dan
- 5) Dukungan kepada Pendidikan menengah Universal (PMU) melalui penyediaan fasilitas dalam menghadapi hambatan dari segi kultur, ekonomi, geografi, seleksi, informasi, dan keterbatasan waktu bagi warga negara yang akan mengikuti pendidikan menengah.

2. Bidang Kesehatan

Peningkatan akses masyarakat kepada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang kesehatan, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peran posyandu dalam melakukan *screening* untuk meningkatkan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak keluarga miskin usia 6-24 bulan;
- 2) Peran posyandu dalam melakukan *screening* gizi keluarga miskin untuk meningkatkan cakupan perawatan atas balita gizi buruk;
- 3) Kunjungan Puskesmas ke SD dan setingkat untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan siswa;
- 4) Ppromosi keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) mandiri untuk meningkatkan cakupan peserta KB aktif;
- 5) Penemuan kasus penyakit secara aktif pada masyarakat untuk meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit;
- 6) Pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin;

- 7) Pelayanan kesehatan rujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
- 8) Peninjauan pada instalasi gawat darurat untuk meningkatkan cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di Kabupaten/Kota;
- 9) Pembinaan terhadap puskesmas dalam penanganan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk meningkatkan cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam; dan
- 10) Pembinaan desa siaga aktif untuk meningkatkan cakupan desa siaga aktif.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang kesehatan yang perlu diselaraskan adalah;

- 1) Dukungan pelaksanaan program sanitasi terpadu berbasis masyarakat, antara lain :
 - a) Akses masyarakat terhadap jamban sehat.
 - b) Akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih.
- 2) Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam setiap upaya kesehatan; dan
- 3) Meningkatkan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi
 - a) Bidang Sumber Daya Air yaitu tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
 - b) Bidang Bina Marga
 - (1) Tersedianya jalan yang menjamin aksesibilitas, konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, dan keselamatan pengguna;
 - (2) Ketersediaan alat pengukur Naasra/Romdas/Roughometer beserta SDM yang dapat melakukan survei kondisi jalan; dan
 - (3) Pemeliharaan rutin dan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan “baik” dan “sedang” berdasarkan nilai Internasional Roughness Index (IRI).
 - c) Bidang Badan Pembinaan Konstruksi
 - (1) Tersedianya data-data terkait 3 jenis layanan informasi jasa konstruksi dari instansi-instansi terkait;
 - (2) Tersedianya SDM yang dapat menggunakan aplikasi SIPJAKI.

- d) Penataan Ruang yaitu ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) dan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang;

2) Pemerintah Kabupaten/Kota

a) Bidang Sumber Daya Air

- (1) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok mineral sehari-hari.
- (2) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

b) Bidang Bina Marga

- (1) Adanya pembangunan/penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi;
- (2) Percepatan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi;
- (3) Ketersediaan alat pengukur Naasra/Romdas/Roughometer beserta SDM yang dapat melakukan survei kondisi jalan; dan
- (4) Pemeliharaan rutin dan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan “baik” dan “sedang” berdasarkan nilai Internasional Roughness Index (IRI).

c) Bidang Cipta Karya

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

Selain itu, beberapa kegiatan prioritas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang perlu diselenggarakan adalah :

- 1) Mendukung ketahanan pangan nasional, melalui Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
- 2) Mendukung ketahanan air melalui kegiatan pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya dan penyedia dan pengelolaan air baku; dan
- 3) Mengendalikan daya rusak air dalam rangka mengurangi kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, serta abrasi pantai, melalui pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai.

4. Bidang Perumahan Rakyat

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), telah ditetapkan **Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota** dan **Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota**.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang perumahan rakyat, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah Provinsi:

- a) Sosialisasi dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan

bimbingan teknis dan pendampingan untuk ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau;

- b) Pemutakhiran data secara berkala dari Kabupaten/Kota terkait bangunan rumah, harga rumah, penghasilan rumah tangga dan kondisi PSU lingkungan perumahan; dan
- c) Pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada Menteri, untuk substansi ketersediaan rumah layak huni, potensi keterjangkauan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menghuni rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung PSU.

2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

- a) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau, skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung PSU;
- b) Melakukan pemutakhiran data secara berkala, terkait bangunan rumah layak huni, harga rumah, penghasilan rumah tangga, kondisi prasarana, sarana utilitas lingkungan perumahan;
- c) Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU;
- d) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan pusat statistik kabupaten/kota, koperasi, pengembang, dan perbankan;
- e) Melakukan pelatihan kepada para staf dinas perumahan atau dinas yang menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat;
- f) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk kategori berpenghasilan rendah);
- g) Memberikan fasilitas rumah layak huni dan terjangkau kepada MBR untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundang-undangan, berupa penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni, pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan rumah layak huni, pembiayaan pembangunan rumah layak huni dan pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni;
- h) Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
- i) Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
- j) Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 (dua) kali laporan dalam satu tahun anggaran;
- k) Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan tentang ketersediaan rumah layak huni, potensi keterjangkauan MBR menghuni rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung PSU.

5. Bidang Perhubungan

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, telah ditetapkan **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang transportasi, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi
 - a) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi).
 - b) Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - c) Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 Gross Tonnage (GT) dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - d) Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelalaian kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
 - b) Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang perhubungan yang perlu diselaraskan adalah;

- 1) Membangun konektivitas nasional dengan cara:
 - a) Melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan sarana/prasarana transportasi;
 - b) Melanjutkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia transportasi;
 - c) Melanjutkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan; dan
 - d) Melanjutkan penguatan konektivitas nasional yang bersinergi dengan konektivitas ASEAN.
- 2) Membangun industri jasa transportasi nasional dengan cara:
 - a) Mendorong peran pemerintah provinsi Kabupaten/Kota, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi;
 - b) Meningkatkan kepastian hukum; dan
 - c) Melanjutkan reformasi regulasi/deregulasi.

6. Bidang Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang lingkungan hidup, yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Rencana Pembayaan Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang lingkungan hidup, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup berupa:
 - a) Pelayanan informasi status mutu air;
 - b) Pelayanan informasi status mutu udara ambien;
 - c) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - d) Tersedianya sarana pendukung (laboratorium dan pos pengaduan) di provinsi;
 - e) Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup;
 - f) Terlatihnya sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup;
 - g) Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; dan
 - h) Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM khususnya pembangunan dan/atau pemanfaatan laboratorium lingkungan.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup berupa:
 - a) Pelayanan pencegahan pencemaran air;
 - b) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
 - c) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
 - d) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang lingkungan hidup yang perlu diselenggarakan adalah;

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah;
- 2) Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sumber domestik dan usaha skala kecil;
- 3) Pengelolaan kualitas lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan danau dalam rangka penurunan laju kerusakan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- 4) Inventarisasi dan pemetaan lokasi area terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (prioritas area industri kecil dan menengah contoh: *recycle battery/aki*, kerajinan emas tembaga dan perak);
- 5) Pengelolaan kualitas lingkungan pantai, kawasan karst, dan perlindungan mata air di hulu sungai; dan
- 6) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan lahan di daerah melalui program Menuju Indonesia Hijau (MIH), Produk Rekayasa Genetik (PRG), dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan agar mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan, telah ditetapkan **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi
 - a) Penyediaan cakupan bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mencapai target SPM 100%;
 - b) Penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan provinsi yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kab/Kota;
 - c) Penyediaan sarana pendukung (dari 5 layanan SPM) di Provinsi;
 - d) Pembinaan penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan daerah kab/kota diwilayahnya;
 - e) Pelatihan sumberdaya manusia penyedia layanan SPM;
 - f) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - g) Pembangunan sistem data SPM di daerah;
 - h) Penyusunan laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi;
 - i) Membangun kerjasama antar daerah dan stakeholder dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - j) Monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten/kota.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - a) Penyediaan cakupan bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mencapai target SPM 100%;
 - b) Penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan kabupaten/kota yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM Bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Provinsi;
 - c) Penyediaan sarana pendukung (dari 5 layanan SPM) di kabupaten/kota;
 - d) Pelatihan sumberdaya manusia penyedia layanan SPM;
 - e) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - f) Penyusunan data dan informasi untuk mendukung penerapan SPM;
 - g) Peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan dan anak di daerah;
 - h) Penyusunan laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan

- i) Membangun kerjasama antar daerah dan *stakeholder* dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan
- j) Membangun kerjasama antar daerah dan *stakeholder* dalam penerapan dan pencapaian SPM.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang harus diselaraskan adalah;

- 1) Penggunaan parameter kesetaraan gender dalam penyusunan dan perancangan kebijakan;
- 2) Pemberian akte kelahiran gratis;
- 3) Patisipasi anak yang merujuk pada konvensi hak anak dan peraturan perundangan yang terkait dengan tumbuh kembang anak;
- 4) Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang politik, kesehatan dan lingkungan hidup;
- 5) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- 6) Perlindungan hak perempuan, terutama perempuan korban kekerasan dan *trafficking*;
- 7) Peningkatan kualitas hidup anak terutama dalam pemenuhan hak-hak anak, seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 8) Pengembangan data gender dan anak; dan
- 9) Pengembangan kabupaten/kota layak anak.

8. Bidang Keluarga Berencana

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera meliputi jenis pelayanan dasar yang mencakup pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS), penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dan penyediaan informasi data mikro, telah ditetapkan **Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang keluarga berencana, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui perencanaan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan, kependudukan dan analisa dampak kependudukan;
- 2) pengembangan peta Pasangan Usia Subur (PUS) dan pendataan keluarga di desa;
- 3) penyediaan dukungan operasional lini lapangan bagi Kelompok kegiatan (POKTAN), Petugas Pembantu Lapangan Keluarga Berencana (PPLB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) minimal 12 kali dalam setahun;
- 4) Rapat koordinasi program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ditingkat desa dan kecamatan; dan
- 5) Penyediaan dukungan operasional dan sumber daya manusia untuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) ditingkat kecamatan.

9. Bidang Sosial

Dalam rangka menjamin akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial dari pemerintah daerah, telah ditetapkan **Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial daerah Provinsi, Kabupaten/kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/ 2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang sosial, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial, pusat rehabilitasi, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial;
- 3) Kesejahteraan sosial bagi korban bencana melalui pelayanan sosial dasar yang meliputi pendidikan masyarakat di daerah bencana dengan taruna siaga bencana, penyiapan kampung siaga bencana, dan alokasi bantuan sosial bagi korban bencana; dan
- 4) Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berat, mental, lanjut usia terlantar, fakir miskin, keluarga miskin rumah tangga sangat miskin yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial yang responsif gender.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang sosial yang perlu diselaraskan adalah;

- 1) Pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak berhadapan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- 2) Program keluarga harapan;
- 3) Asistensi Sosial Dengan Kecacatan Berat (ASODKB);
- 4) Asistensi sosial lanjut usia terlantar; dan
- 5) Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial yang terdiri dari gelandangan dan pengemis, wanita tuna sosial, eks napi, kelompok minoritas (waria, gay, lesbian, orang dengan HIV-AIDS).

10. Bidang Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target **SPM bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang ketenagakerjaan, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelatihan keterampilan kerja yang merupakan pekerjaan nasional bersifat lintas sektoral, pusat dan daerah, dan antar daerah melalui kegiatan reorientasi, revitalisasi dan pemenuhan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebijakan nasional;
- 2) Peningkatan efektifitas informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja khusus serta memperluas kesempatan kerja melalui model padat karya dan inkubasi bisnis;

- 3) Peningkatan efektifitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui evaluasi peraturan-peraturan daerah yang teridentifikasi menimbulkan kemelut dan peningkatan profesionalisme serikat pekerja/buruh;
- 4) Peningkatan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan melalui pemberian fasilitas bagi usaha ekonomi informal agar menjadi formal serta pembinaan tentang perlindungan tenaga kerja dan syarat-syarat kerja kepada pengusaha-pengusaha ekonomi informal; dan
- 5) Pengawasan ketenagakerjaan dengan indikator besaran pemeriksaan perusahaan dan besaran pengujian peralatan di perusahaan.

11. Bidang Penanaman Modal

Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang penanaman modal yang ditetapkan dalam **Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang penanaman modal, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal;
- 2) Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang penanaman modal yang harus diselenggarakan adalah :

- 1) Penyelesaian penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- 2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 3) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 4) Penyelenggaraan Marketing Investasi Indonesia (MII) dalam rangka mempromosikan peluang investasi daerah; dan
- 5) Implementasi sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

12. Bidang Kesenian

Peningkatan kualitas pelayanan kesenian dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesenian yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/ MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang kesenian, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kajian kesenian berupa seminar, diskusi, bengkel seni dan kegiatan serupa lainnya;
- 2) Melakukan fasilitasi kesenian di daerah berupa pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, penerbitan dan pendokumentasian dan kritik seni; dan

- 3) Mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerah berupa pertunjukan, pameran, festival atau lomba.

Selain itu, beberapa kegiatan dalam bidang kesenian dan budaya yang harus diselenggarakan adalah :

- 1) Registrasi budaya untuk melindungi dan mengembangkan warisan budaya;
- 2) pengembangan sejarah dan nilai budaya;
- 3) Pelestarian dan pengelolaan peninggalan prasejarah;
- 4) Pelestarian sejarah dan nilai tradisional;
- 5) Rumah budaya dan diplomasi budaya berfungsi untuk menghadirkan Indonesia di mancanegara; dan
- 6) World Culture Forum untuk menjadikan kekuatan budaya dalam pembangunan berkelanjutan.

13. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Dalam rangka pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri, telah ditetapkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Lingkup Kementerian Dalam Negeri.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang pemerintahan dalam negeri, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melanjutkan peningkatan pelayanan dokumen kependudukan, melalui:
 - a. Sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - b. Sosialisasi dan bimbingan teknis oleh penyelenggaraan pelayanan penerbitan KTP Elektronik;
 - c. menyebarluaskan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran; dan
 - d. Menyebarluaskan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kematian.
2. Meningkatkan pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, melalui:
 - a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota melalui tindakan pre-emptive, preventif non yustisial, maupun penindakan yustisial;
 - b. Peningkatan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya kepala desa/lurah dan kepala RW.
3. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran, melalui:
 - a. Menyusun data profil kebakaran pada wilayah permukiman, gedung layanan publik, pabrik/industri, hutan, lahan dan bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
 - c. Melakukan kerjasama antara kabupaten dan kota untuk pengurangan resiko kebakaran dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini BPBD Provinsi, serta nota kerjasama dengan pelaku usaha untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta kesatuan masyarakat adat;

- d. Menyusun kriteria kondisi mendesak kejadian kebakaran pada Peraturan Daerah tentang APBD yang dapat memenuhi kriteria belanja tidak terduga dan penggunaan dana lain yang tersedia dalam APBD; dan
- e. Penataan kelembagaan dan fungsi pemadam kebakaran, Peningkatan dan pengembangan kapasitas Institusi Pemadam kebakaran untuk mendukung desentralisasi dan Otonomi Daerah.

14. Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika telah ditetapkan **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang komunikasi dan informatika, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- 2) Penyusunan Peraturan Gubernur/Bupati mengenai SOP untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- 3) Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi; dan
- 4) Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten/Kota.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang komunikasi dan informasi yang harus diselenggarakan adalah :

- 1) Sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan di bidang pos dan informatika;
- 2) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi di daerah dan Pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID) sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Pelatihan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 4) Pembentukan dan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
- 5) Pengembangan kemitraan media dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, bimtek, penyediaan bahan informasi dan format evaluasi.

15. Bidang Ketahanan Pangan

Peningkatan kualitas pelayanan ketahanan pangan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang ketahanan pangan yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/ OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang ketahanan pangan, maka perumusan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menjamin Ketersediaan Pangan dan penanganan Kerawanan Pangan terkait dengan Penyediaan lumbung pangan;
- 2) penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; dan
- 3) Menjaga stabilitasi harga, distribusi dan keamanan pangan.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang ketahanan pangan yang harus diselenggarakan adalah :

- 1) Penyusunan kebijakan terkait tindak lanjut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang konversi lahan pertanian ke non pertanian termasuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum termasuk fragmentasi lahan karena proses pewarisan, serta mencantumkan Luas Lahan dan Lokasi Lahan Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Khusus lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan (Konversi sawah menjadi lahan non pertanian), perlu pemberian insentif perlindungan lahan pertanian produktif;
- 2) Pengembangan usaha penangkaran benih/bibit serta klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan secara luas sesuai dengan Kebutuhan Benih Lokal daerah, sehingga benih/bibit dapat terjangkau petani, dan mencegah beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat sangat merugikan petani. Disamping itu, pemda juga harus memberikan insentif bagi petugas pembenihan/perbibitan;
- 3) Fasilitasi pemanfaatan skim kredit program yang sudah ada (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi/KKP-E, Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan/KPEN-RP, Kredit Usaha Pembibitan Sapi/KUPS dan Kredit Usaha Rakyat/KUR) melalui sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi di tingkat lapangan;
- 4) Memperkuat peran penting Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui peningkatan jumlah petugas lapangan dan mendorong munculnya penyuluh swadaya; dan
- 5) Inventarisasi kelompok tani/gabungan kelompok tani, serta mengembangkan industri perdesaan yang melibatkan kelompok tani/gabungan kelompok tani.

B. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, perumusan program/kegiatan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam RKPD Tahun 2016 antara lain meliputi:

- a. Pengawasan pelaksanaan perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. Pelaksanaan Strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi
- c. Pengawasan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

C. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di seluruh tanah air, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur wajib mengkoordinasikan semua potensi yang ada di daerah, seperti Kapolda, Danrem dan unsur lain di masyarakat untuk mencegah dan menangani konflik, sehingga situasi keamanan dalam negeri dapat tetap terjaga.

Perumusan program/kegiatan penanganan gangguan keamanan dalam negeri dalam RKPD Tahun 2016 antara lain meliputi :

- a. Penuntasan penanganan gangguan keamanan akibat konflik sosial dan terorisme yang terjadi di beberapa daerah;
- b. perbaikan sistem penanganan gangguan keamanan agar lebih responsif dan dapat diandalkan;

- c. Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan; dan
- d. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

D. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk meningkatkan nasionalisme dan kebangsaan serta menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap warga negara Indonesia, diperlukan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah agar merumuskan program/kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara rutin kepada :
 - 1) Unsur-unsur organisasi politik
 - 2) Organisasi kemasyarakatan
 - 3) Lembaga nirlaba lainnya
 - 4) Lembaga pendidikan
- c. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas anggota dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadah dan Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

E. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dibidang urusan administrasi kependudukan maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2015 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kebijakan tentang perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain mencakup masa berlaku KTP elektronik yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data, pengurusan dan penerbitan dokumen untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK, KTP-el, akta kelahiran, akta pengangkatan anak), dan hal-hal lain yang ditujukan untuk kemudahan dan kelancaran pengurusan administrasi kependudukan bagi setiap warga masyarakat;
- b. Penyesuaian Peraturan Daerah yang terkait dengan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. Pencetakan, Penerbitan dan Pendistribusian dokumen kependudukan; dan
- d. Penyusunan profil perkembangan kependudukan dengan memanfaatkan database kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Peraturan menteri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

F. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah melaksanakan Pemilukada pada tahun 2013 akan melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD periode berikutnya (2013-2018);
- b. *Updating* data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya;
- c. Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan konsultasi dan koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota serta berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran.
- d. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2016) dan rencana satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD, Renja SKPD 2016 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- e. Gubernur melaporkan penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah provinsi dan dokumen rencana SKPD provinsi serta dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten/kota dan dokumen rencana SKPD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- f. Bupati/Walikota melaporkan penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten/kota dan dokumen rencana SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Gubernur;
- g. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf e disusun kedalam format Rekapitulasi Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD Se-Provinsi yang tercantum pada Format I.A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014.
- h. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun ke dalam format Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang tercantum pada format I.B. dan format Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana SKPD Kabupaten/Kota yang tercantum pada format I.C. Peraturan Menteri ini;
- i. Penyampaian laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e paling lambat pada bulan Oktober 2015;
- j. Penyampaian laporan Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf f paling lambat pada bulan September 2016;
- k. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan

- I. Menyelesaikan penyusunan dan/atau menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

G. Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka menjamin dan memastikan serta menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil RKPD Tahun 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) beserta perubahannya. Pengawasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

APFP Provinsi mencakup RKPD, Renja SKPD, dan DPA SKPD lingkup provinsi dan kabupaten/kota beserta perubahannya. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh APFP kabupaten/kota mencakup RKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD lingkup kabupaten/kota beserta perubahannya.

Laporan hasil pengawasan APFP provinsi menjadi bahan masukan untuk peningkatan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

Laporan hasil pengawasan APFP kabupaten/kota menjadi bahan masukan untuk peningkatan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup kabupaten/kota serta pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

H. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa, perumusan program/ kegiatan dalam RKPD Tahun 2016 supaya memprioritaskan kebijakan untuk:

- a. Peningkatan kemampuan aparat pemerintahan kabupaten/kota untuk membina aparat pemerintahan desa untuk mengantisipasi pemberlakuan undang-undang tentang desa yang efektif paling lambat tahun 2016;
- b. Peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa;
- c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya hak asal usul dan hak tradisional, kelestarian adat istiadat, semangat gotong royong, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa;
- d. Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- e. Merumuskan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan;
- f. Dukungan dana urusan bersama untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);
- g. Penyelesaian penyusunan profil desa dan kelurahan, serta penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan;
- h. Pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat desa; dan
- i. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa.

I. Pengembangan Wilayah

Dalam rangka pengembangan wilayah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2016 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pengembangan potensi sumberdaya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut;
- b. Mendorong keterpaduan dan konsistensi kesepakatan perjanjian kerjasama antar daerah/wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil;
- c. Pengembangan sektor/komoditas unggulan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategi Cepat Tumbuh (KSCT) di Daerah;
- d. Pengembangan Wilayah Terpadu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
- e. Peningkatan kemampuan/kapasitas aparatur dalam pengelolaan pengembangan wilayah, wilayah perbatasan, KSCT, wilayah tertinggal dan kelautan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan KSCT di Daerah;
- f. Pengelolaan dan perlindungan wilayah konservasi di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil pada area segitiga terumbu karang (*Coral Triangle Initiative*) dan pembangunan kelautan dalam menghadapi dampak perubahan iklim sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/290/III/Bangda tentang Tindaklanjut Hasil *World Ocean Conference* (WOC) dan *Coral Triangle Initiative* (CTI);
- g. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penanggulangan kekurangan gizi mikro pada ibu dan anak, termasuk Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKI) secara cepat dan terpadu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah;
- h. Dukungan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, dan Tindaklanjut Pengelolaan Penyu dan Habitatnya; dan
- i. Penyusunan perencanaan pengelolaan sumberdaya di wilayah laut yaitu Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi.

J. Pengembangan Ekonomi Daerah

Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2016, dilakukan upaya pengembangan ekonomi daerah sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- b. pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah;
- c. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah;
- d. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- e. peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah;
- f. Pengembangan kelembagaan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED);
- g. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012;
- h. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), antara lain melalui Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD); dan

- i. Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan.

K. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan urusan bersama pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara terpadu sehingga dinyatakan bahwa perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam skala provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam skala kabupaten/ kota.

Penerapan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup, membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang, pemerintah daerah agar mengutamakan kebijakan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif antara lain melalui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, pencegahan kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati untuk mewujudkan keseimbangan ekosistem dalam kelestarian lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup;
- b. Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW, optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, serta kegiatan sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. Pengembangan potensi ekowisata daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Daerah;
- d. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) dalam Penyusunan atau Evaluasi Perencanaan pembangunan Daerah;
- e. Pengembangan dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 522.53-958 Tahun 2010 tentang Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah Provinsi;
- f. Pengembangan dan perlindungan hutan mangrove sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional (SNPEM);
- g. Penertiban izin lokasi baru pada kawasan hutan alam primer, dan lahan gambut sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan Pendamping Tenaga Masyarakat (PTM), penguatan fungsi komisi irigasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi;
- i. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan sumberdaya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- j. Penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Rumah Kaca, serta terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gerakan Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca.

L. Penataan Perkotaan

Belum tertatanya pembangunan kawasan perkotaan sesuai dengan standar pelayanan perkotaan, menimbulkan permasalahan perkotaan seperti masih luasnya kawasan kumuh perkotaan, sanitasi perkotaan yang belum optimal, dan sering timbulnya banjir di perkotaan. Selain itu, tingginya angka urbanisasi yang tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja telah menyebabkan meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah perkotaan, yang bila tidak ditata juga akan menambah kesemrawutan kota.

Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Bagi Provinsi, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan melalui fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota di wilayahnya, fasilitasi kerjasama penataan PKL, antar kabupaten/kota di wilayahnya, dan pembinaan Bupati/Walikota di wilayahnya, sedangkan bagi kabupaten/kota penataan dan pemberdayaan PKL dilakukan melalui penataan dan pemberdayaan PKL dengan cara pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL, dan penghapusan lokasi PKL, serta peremajaan lokasi PKL;
- b. Pengelolaan sampah dari TPS/TPST/TPS 3R ke TPA dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- c. Penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara optimal di kawasan perkotaan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 650/4371/SJ tentang Cara Perhitungan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan;
- d. Pembangunan perkotaan dengan standar pelayanan perkotaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
- e. Penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
- f. Percepatan pembangunan sanitasi permukiman sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah;
- g. Peningkatan dan pengawasan dalam penerbitan ijin Mendirikan Bangunan; dan
- h. Pengembangan kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga dan kerjasama jaringan lintas perkotaan (*sister city dan city sharing*) sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan dan mengakomodasi program/kegiatan kerjasama pembangunan perkotaan dalam dokumen perencanaan daerah.

M. Peningkatan Kualitas Pengelolaan keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2016 agar memperhatikan antara lain :

- a. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKPD sesuai dengan pedoman Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar menjadikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan RPJMD;

- b. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melanggar ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
- d. Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian target yang ditetapkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah serta pemberian insentif untuk memungut pajak dan retribusi daerah tersebut;
- e. Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya-upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK;
- f. Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memperhatikan petunjuk teknis kementerian/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan perlu dipertimbangkan terkait dana pendamping yang dipersyaratkan agar sudah diperhitungkan dalam pagu indikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
- g. Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kebijakan investasi pemerintah daerah permanen dan non permanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan investasi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; dan
- h. Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan ke pusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012.

N. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Dalam upaya peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan kegiatan kelitbang yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan RKPDP Tahun 2016, langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penyusunan road map SIDa dan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa;
- b. peningkatan jumlah dan kompetensi peneliti pada Badan Litbang provinsi dan kabupaten/kota melalui sosialisasi jabatan fungsional peneliti dan pengikutsertaan

calon peneliti pada pendidikan dan pelatihan sertifikasi serta pemberian beasiswa bagi peneliti untuk melanjutkan pendidikan; dan

- c. Penelitian pengkajian terhadap implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

O. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang berbasis kompetensi secara terarah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2016 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan.
- c. Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) Provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah.
- d. Meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi.
- e. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

Selain itu, sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri dan Badan Diklat Provinsi melaksanakan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

P. Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2016 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Evaluasi mandiri terhadap LPPD Kabupaten/Kota sebelum Tim Nasional melakukan validasi;
- b. Pembinaan kepada Kabupaten/Kota terkait dengan pelaporan (memerankan fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah);
- c. Pemeliharaan dokumen pendukung/dokumen capaian kinerja SKPD;
- d. Pemetaan kapasitas daerah dalam segi kebijakan, kelembagaan sumberdaya manusia dan penyusunan rencana tindak hasil pemetaannya;

- e. Penyusunan rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM kementerian/lembaga yang telah ditetapkan dan rencana capaian SPM untuk 5 (lima) tahun mendatang;
- f. Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melakukan pembinaan penerapan SPM terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun serta menyampaikan laporan umum dan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Teknis terkait;
- h. Penyusunan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah dan rencana pencapaian SPM diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- i. Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- j. Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan Menteri dan Pimpinan LPNK dan menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan daerah.

Q. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif terdiri dari 15 bidang kegiatan meliputi: (1) Periklanan, Desain Art dan Seni Grafis; (2) Arsitektur; (3) Pasar Seni dan Barang Antik; (4) Kerajinan; (5) Desain; (6) Fashion (mode); (7) Film, video dan fotografi; (8) Permainan interaktif; (9) Musik; (10) Seni Pertunjukan; (11) Penerbitan dan Percetakan; (12) Layanan Komputer dan Piranti lunak; (13). Radio dan televisi; (14) Riset dan Pengembangan; dan (15) Kuliner.

Untuk mendukung pengembangan kreativitas pada kelimabelas bidang kegiatan sebagaimana tersebut di atas, pada RKPD Tahun 2016 diarahkan untuk:

- a. Menciptakan payung kebijakan daerah dengan mengangkat identitas kelokalan dan perlindungan melalui system Hak kekayaan Intelektual (HKI) dengan memberikan fasilitasi bagi pekerja kreatif dalam hal kemudahan, pemodalan usaha, aksesibilitas pasar, keluar masuk karya kreatif di pelabuhan laut dan udara serta perijinan usaha bidang ekonomi kreatif;
- b. penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan perlindungan melalui sistem HKI;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) bagi insan/pekerja/pelaku kreatif; dan
- d. Penyediaan fasilitasi tempat/ruang/zona untuk promosi/pameran karya-karya kreatif.

R. Penanganan Bencana

Dalam rangka antisipasi pra bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2016 antara lain :

- a. Antisipasi prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, terdiri dari kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan bencana, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- b. Penanggulangan bencana dalam tahapan saat tanggap darurat, mencakup kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan

dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan

- c. Penanggulangan pascabencana mencakup :
- 1) Rehabilitasi, terdiri dari kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
 - 2) Rekonstruksi, terdiri dari kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancangan bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

S. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2016 supaya memperhatikan antara lain :

- a. Pengembangan kerjasama antar daerah dan pengembangan kerjasama daerah dengan pihak ketiga (BUMN, BUMD, Swasta, Kementerian/Lembaga dan Lembaga Badan Hukum) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Juknis Tatacara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
- b. Penguatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi;
- c. Penegakan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah sesuai Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; dan
- f. Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam kebakaran di Daerah.

T. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara

Dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang aman, maju dan tertib sebagai halaman terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditetapkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Sehubungan dengan hal tersebut maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2016 agar memperhatikan antara lain :

a. Pemerintah Daerah Provinsi

- 1) Dukungan pembangunan lokasi prioritas perbatasan;
- 2) Percepatan penyusunan rencana tata ruang kawasan perbatasan;
- 3) Penyusunan kebijakan pemerintahan fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi, termasuk dukungan sarpras bagi produksi dan pengolahan komoditas akses pasar ke negara tetangga, peningkatan kualitas SM, penguatan KISS lintas sektor, kebijakan dan regulasi yang mendorong investasi, perlindungan hak warga negara, serta kebijakan dan strategi khusus bagi penguatan sosial budaya perbatasan Negara;
- 4) Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, agar dapat bersinergi untuk kepentingan bersama; dan
- 5) Kerjasama pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam rangka dukungan permodalan pembangunan akses transportasi, telekomunikasi, dan energi.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Dukungan pembangunan lokasi prioritas perbatasan;
- 2) Percepatan penyusunan rencana tata ruang kawasan perbatasan;
- 3) Menjaga dan memelihara tanda batas; dan
- 4) Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, agar dapat bersinergi untuk kepentingan bersama.

U. Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Dalam rangka percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan mempedomani Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/II/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/43794/SJ dan Nomor 21/MPP.PA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahunan daerah agar mempertimbangkan :

- a. Pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG's terkait kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria;
- b. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery) berdasarkan pencapaian SPM;
- c. Analisis gender melalui analisis kesenjangan gender dalam output kegiatan dengan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) atau analisis lainnya; dan
- d. Penyusunan Gender Budgeted Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG).

V. Pembangunan Gedung Negara

Pembangunan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

4.7. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja pembangunan daerah diperlukan sinkronisasi antara arahan kebijakan pembangunan dengan arahan fungsi peruntukan ruang. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan antara kebutuhan ekonomi maupun sosial dengan alokasi peruntukan ruang yang tersedia. Kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan didalam rencana kerja pembangunan daerah dengan jangka waktu tahunan, diimplementasikan dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan penataan ruang dan pengembangan kewilayahan. Dengan keterpaduan ruang, maka interaksi antar wilayah atau kawasan di Sumatera Utara, baik berupa aktifitas ekonomi maupun sosial masyarakat, dapat semakin ditingkatkan dan saling memberikan dampak positif bagi daerah khususnya peningkatan daya saing daerah dalam berkompetisi dengan daerah lain, secara nasional maupun internasional.

Seiring dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi dan sosial kehidupan berbangsa dan bernegara di Sumatera Utara tersebut, dibutuhkan pengembangan konsep pembangunan melalui pendekatan kajian pengembangan kewilayahan yang bertumpu pada peningkatan daya saing daerah. Pengembangan kajian pengembangan kewilayahan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan, terutama terhadap substansi pembangunan yang bersifat strategis, antara lain mendukung ketahanan pangan, kemandirian energi, pembangunan infrastruktur transportasi dan sumber daya air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mitigasi bencana.

Pengembangan kajian pada tahun 2016 ini, difokuskan terhadap pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang terdapat di Sumatera Utara maupun rencana pengembangan kawasan baru yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan nilai strategis ekonomi, sosial, ataupun lingkungan. Nilai strategis wilayah tersebut dapat dipengaruhi oleh dinamika perubahan yang berasal dari luar wilayah, seperti globalisasi, pasar bebas dan regionalisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika spasial, sosial, dan ekonomi antarnegara, antardaerah (kota/kabupaten), kecamatan hingga perdesaan. Untuk itu, konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari adanya kebutuhan daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika perubahan yang berubah dengan cepat sangat mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Bila daerah lamban dalam merespon perubahan tersebut, maka pembangunan di daerah itu akan semakin tertinggal dan tidak mampu berkompetisi di tingkat regional, nasional maupun internasional. Untuk menjawab hal tersebut, maka konsep perencanaan penataan ruang dan pengembangan wilayah yang berdaya saing, merupakan bagian penting dari pembangunan suatu daerah terutama di kawasan perkotaan yang cepat berkembang maupun di kawasan perdesaan yang sangat rentan menghadapi gejala perubahan karena keterbatasan sumber daya. Perubahan ini, jika tidak didukung suatu perencanaan wilayah yang baik dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan pertumbuhan ekonomi akan berakibat pada semakin bertambahnya kawasan kumuh perkotaan dan desa-desa tertinggal di Sumatera Utara.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai dinamika perubahan pembangunan yang terjadi dan meningkatkan kemampuan berkompetisi daerah, maka pengembangan penataan ruang daerah dalam meningkatkan daya saing pengembangan kewilayahan difokuskan antara lain pada:

- Penguatan peran kota-kota yang ditetapkan sebagai pusat-pusat kegiatan wilayah dan pusat-pusat kegiatan lokal yang terkoneksi dalam satu kesatuan sistem wilayah
- Pengembangan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dengan memperhatikan hubungan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan
- Pengembangan implementasi pembangunan berbasis kewilayahan dengan memperhatikan karakteristik geografis dan budaya masyarakat
- Pengembangan konsep tata ruang di kawasan-kawasan strategis provinsi, yang memiliki nilai strategis ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup, antara lain di kawasan Mebidangro, kawasan agropolitan dan agromarinepolitan.
- Pengembangan kualitas layanan dasar permukiman baik perkotaan maupun di perdesaan yang terdapat di wilayah pesisir dan dataran tinggi, yaitu sistem pengelolaan air minum dan pembangunan sanitasi, meliputi air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan ruang terbuka hijau
- Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya dalam meningkatkan kualitas hunian yang lebih layak bagi masyarakat dan penyediaan rumah tinggal yang sehat, baik pembangunan secara horizontal di kawasan-kawasan yang fungsi peruntukan permukiman maupun pembangunan vertikal melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (rusunami) terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan buruh/pekerja industri.
- Pengembangan konsep kota baru sebagai kawasan permukiman yang terintegrasi dengan interaksi multi fungsi sektoral didalam kawasan.
- Pengembangan konsep integrasi pembangunan infrastruktur pendukung kawasan yang bernilai strategis ekonomi, KEK Sei Mangkei, dan koridor pengembangan Simalungun-Batubara-Asahan.
- Pengembangan konsep ruang interaksi jaringan sumberdaya air dan pertanian/perkebunan dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing kawasan.
- Pengembangan konsep tata ruang berwawasan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan konservasi lingkungan dan konservasi energi, antara lain difokuskan di kawasan Danau Toba, DAS Asahan dan sekitarnya.

BAB - V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1. SASARAN DAN TARGET KINERJA PEMBANGUNAN

Sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016, ditetapkan sasaran dan target kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Kehidupan Beragama, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2016
1. Meningkatnya kehidupan beragama dan keharmonisan antar umat beragama	1) Terselenggaranya kegiatan keagamaan khususnya aparat, pemuda/pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam rangka peningkatan kerukunan umat beragama, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 2) Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan agama, lembaga pemuda, lembaga organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya, 1000 lembaga 3) Terlaksananya perbaikan kualitas rumah ibadah, 1000 unit
2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat	4) Terselenggaranya kegiatan pendidikan, penyuluhan untuk peningkatan wawasan kebangsaan.
3. Meningkatnya iklim perpolitikan yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum	5) terselesaikannya tata batas antar kabupaten/kota (7 Kab/Kota) dalam wilayah Provinsi dan dengan provinsi yang berbatasan dengan Sumatera Utara (Riau, Sumatera Barat) 6) Terselenggaranya kegiatan pendidikan, penyuluhan hukum dan politik, kegiatan.
4. Meningkatnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	7) Terwujudnya perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan akuntabilitas kinerja keuangan daerah 8) Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 9) Terlaksananya Penilaian dan penghargaan kepada SKPD Provinsi dan Kab/Kota atas prestasi di bidang

Sasaran Utama	Target Kinerja 2016
	pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, jenis penghargaan (akumulasi total kegiatan SKPD Provinsi Sumatera Utara) 10) Terwujudnya Program Legislasi Daerah (Prolegda), Perda
5. Terciptanya persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan hukum	11) Terlaksananya pembinaan hukum dan pendampingan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan hukum 4 kegiatan
6. Terwujudnya iklim berusaha yang baik yang mendukung daya saing daerah	12) Ditetapkannya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mendukung peningkatan pelayanan perijinan satu atap, perda
7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan	13) Meningkatnya keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif
8. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	14) Terwujudnya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	15) Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan	16) Terselaraskannya program perencanaan dan penganggaran minimal 90 % 17) Tersedianya hasil kajian perencanaan dan pengendalian pembangunan, 8 dokumen perencanaan 18) Terwujudnya peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian bidang pembangunan ekonomi, sosial budaya, sarana/prasarana dan penataan ruang/lingkungan hidup, kegiatan
11. Terwujudnya Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi	19) Terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPPD) secara elektronik (e-Planning) untuk mendukung e-Government, 1 Sistem Informasi
12. Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah	20) Terlaksananya koordinasi antar Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan
13. Meningkatnya kerjasama antar daerah, kerjasama luar negeri dan dengan swasta	21) Terselenggaranya pertemuan dan forum kerjasama antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota, luar negeri dan swasta (<i>public private partnership</i>)

2. Prioritas 2 : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, dengan mengacu kepada PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2016
1) Tercapainya Indeks Pendidikan 2) Meningkatnya Partisipasi Sekolah	1) Angka Melek Huruf penduduk usia >15 tahun 98,8 % 2) Rata-Rata Lama Usia Sekolah 10,5 Tahun 1) Angka Putus Sekolah 2) IPM menjadi 77,36
	3) APK PAUD 49,43 %
	4) APK SD/MI 107,10 %
	5) APM SD/MI 94,80 %
	6) APK SMP/MTs 93,01 %
	7) APM SMP/MTs 78,60 %
	8) APK SLTA /MA/SMK 87,6 %
	9) APM SLTA /MA/SMK 72 %
	10) APK Perguruan Tinggi 33,36 %
3) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan Pasca Sarjana	11) S1/D-IV 60,45 %
	12) Pasca Sarjana (S2/S3) 20 %
4) Peningkatan Sertifikasi Guru	13) Guru bersertifikasi 10.000 Guru (sudah tersertifikasi 235.855 guru dan sisa belum tersertifikasi 27.145 guru)
5) Peningkatan Kesejahteraan Guru	14) Insentif Guru : Rp 900.000/thn/org

3. Prioritas 3 : Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan

Sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2016
1) Tercapainya Indeks Kesehatan	1) Rata-Rata Usia Harapan Hidup 71,9 tahun 2) Angka Kematian Bayi (AKI)/1000 KH : 20 3) Angka Kematian Ibu Melahirkan menjadi 250/100.000 KH 4) Prevalensi balita kekurangan gizi menjadi 21%
2) Layanan Kesehatan Dasar	5) Meningkatnya Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan menjadi 90 % 6) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan kunjungan bayi menjadi 95 % 7) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menjadi 100% 8) Desa/kelurahan Universal Child Immunization menjadi 80 % 9) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD menjadi 100 % 10) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA menjadi 100% 11) Cakupan kunjungan bayi menjadi 95 % 12) Persentase Case Detection Rate (CDR) TB, 85 % dan persentase keberhasilan pengobatan 95 % 13) Cakupan Puskesmas menjadi

	<p>Puskesmas ISO, Puskesmas Model Pelayanan Prima, dan Puskesmas Perkotaan menjadi 30 Unit</p> <p>14) Cakupan atau ratio puskesmas/jumlah penduduk : 1 : 23.000</p> <p>15) Cakupan atau ratio puskesmas pembantu (Pustu)/jumlah penduduk menjadi = 1 : 6.700</p>
3) Pelayanan Kesehatan Rujukan	<p>16) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 %</p> <p>17) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 %</p>
4) Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa	18) Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam menjadi 100 %
5) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	19) Cakupan desa siaga aktif menjadi 35 %
6) Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	20) Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi 59 %
7) Upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin	<p>21) Subsidi Jamkesmas 33 Kab/Kota</p> <p>22) Subsidi Jampersal 33 Kab/Kota</p>
8) Meningkatkan upaya lingkungan sehat di perumahan dan permukiman perbaikan sarana sanitasi dasar untuk pemukiman kumuh dan keluarga miskin perkotaan	23) Perbaikan sarana sanitasi dasar permukiman bagi keluarga miskin perkotaan 20 rumah
9) Upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui revitalisasi Pos Yandu	<p>24) Penyuluhan dan pelatihan bagi kader pelayanan kesehatan di pos yandu 2 kali</p> <p>25) Penyebarluasan informasi melalui TV 12 kali, Radio 100 Kali, dan leaflet, sticker, poster, 33 Kab/Kota.</p>

4. Prioritas 4 : Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah mendukung daya saing perekonomian adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2016
1) Meningkatkan daya dukung kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan terutama pada Kawasan Andalan, Daerah Tujuan Wisata, Daerah yang cepat berkembang serta jalan Lintas Timur, Tengah, Barat dan Diagonal	<p>1) Pembangunan/peningkatan jalan mantap provinsi sepanjang 338,50 Km</p> <p>2) Pemeliharaan berkala ruas jalan provinsi sepanjang 69 Km</p> <p>3) Pemeliharaan rutin jalan provinsi sepanjang 2.838,64 Km</p> <p>4) Pembangunan/ rehab jembatan 440,50 m</p> <p>5) Pemeliharaan rutin jembatan 12115,00 m</p> <p>6) Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap 89,08%</p> <p>7) Mendorong pembangunan infrastruktur dengan skema KPS/<i>Public Private Partnership</i></p>

Sasaran Utama	Target Kinerja 2016
2) Meningkatnya aksesibilitas wilayah pedesaan dan sentra produksi, wilayah perbatasan, terpencil maupun kepulauan serta wilayah perkotaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan prasarana jalan	8) Pembangunan Jalan Produksi 25 km (lebar 3 m) 9) Pembangunan Jalan Usaha Tani 50 km (lebar 3m)
3) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	10) Rasio jaringan irigasi rawa kondisi baik 78,00% 11) Berfungsinya jaringan irigasi seluas 86.999 Ha dan jaringan Rawa seluas 64.339 Ha yang menjadi kewenangan Provinsi 74,93%
4) Penyediaan dan pengelolaan air baku	12) Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana air baku di 50 embung/waduk
5) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	13) Meningkatnya kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air pada sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air dan pengurangan luas genangan banjir 83,67%
6) Pembangunan dan pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan pantai	14) Normalisasi/Pelurusan alur sungai/Perbaikan/Pembuatan Tanggul 433.562m
7) Terbinanya perencanaan pengembangan sumber daya air	15) Inventarisasi daerah irigasi, rawa, kewenangan provinsi serta SID untuk perencanaan dan perbaikan sumber daya air
8) Penguatan KPI dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	16) 8 Kabupaten/Kota
9) Rumah tangga pengguna air bersih	17) Peningkatan akses air minum perpipaan 4,0%
10) Rumah layak huni	18) Terehabilitasinya rumah tidak layak huni 1500

5. Prioritas 5 : Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas **Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan** diarahkan kepada sasaran utama yakni :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2016
1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	a. Sub-sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan target peningkatan produksi diarahkan kepada : 1). Produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 3.935.668 ton 2). Produktivitas Padi sebesar 50,5Kw/ha 3). Produksi jagung mencapai

Sasaran Utama	Target Kinerja 2016
	<p>1.697.315 ton</p> <p>4). Produktifitas jagung mencapai 58,2Kw/ha</p> <p>5) Produksi kedelai mencapai 15.578 ton</p> <p>6). Produktifitas kedelai mencapai 11,90Kw/Ha</p> <p>7). Meningkatnya Produksi Hortikultura utama lokal lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sayuran sebesar 14,35 ton/ha - Buah-buahan sebesar 49,75 ton/ha - Tanaman Obat(Biofarma) sebesar 16.958 ton - Tanaman Hias Bunga Potong 17.824.231 potong - Tanaman Hias satuan produksi 154.122 pohon - Melat 28.270 kg <p>8). Perbanyak Benih Tanaman Pangan 1,6 %</p> <p>9). Perbanyak Benih Hortikultura 1,6 %</p> <p>10). Kontribusi sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB 6,82 %</p> <p>11). Cakupan Bina Kelompok Petani 8,0 %</p> <p>b. Sub-sektor Perkebunan, dengan target peningkatan ekspor sebesar 2,57%, diarahkan kepada tercapainya :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Luas areal perkebunan rakyat di Sumatera Utara mencapai 1.102.461,67 hektar. 2) Produksi perkebunan Sumatera Utara mencapai 6.739.181,22 ton. 3) Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan sebesar 2.57 % 4) Peremajaan areal tanaman tidak produktif (TTM) khususnya pada areal tanaman rakyat seluas 1.500 Ha. <p>c. Sub-sektor Peternakan, dengan</p>

Sasaran Utama	Target Kinerja 2016
	<p>target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produksi daging 153.239,65 Ton 2) Produksi Susu 983,42 Ton/Tahun 3) Produksi telur 151.161,63 Ton/Tahun 4) Jumlah Akseptor IB 67.441 ekor 5) Jumlah Kelahiran IB 48.558 ekor 6) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan (ASUH) 7) Terkendalinya dan terbebasnya penyakit hewan menular strategis (Rabies, Brucellosis, Anthrax, Hog Cholera, Avian Influenza) dan penyakit lainnya <p>d. Sub-sektor Perikanan dan Kelautan, diarahkan kepada terpenuhinya target :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produksi Perikanan Tangkap sebesar 477.293,8ton 2) Produksi Perikanan Budidaya sebesar 210.020ton 3) Konsumsi ikan per kapita sebesar 42,0 kg/kapita/tahun 4) Cakupan Bina Kelompok Nelayan 11,91(%) 5) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan 228,16 ton 6) Ekspor hasil perikanan sebesar 61.662,7 ton
<p>2) Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan</p>	<p>A. Ketersediaan Pangan Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan energi per kapita minimal 3.880 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 77,38 gram/hari; 2) Ketersediaan Cadangan Pangan sebesar 186 ton 3) Lumbung Pangan Masyarakat sebanyak 369 lumbung pangan 4) Kelompok Lumbung Pangan sebanyak 99 Gapoktan <p>B. Distribusi Akses Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem distribusi Harga tercapai 100 %

Sasaran Utama	Target Kinerja 2016
	<p>2) Akses Pangan Masyarakat 101 kelompok</p> <p>C. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan</p> <p>1) Penganekaragaman konsumsi Pangan dan Penurunan konsumsi beras perkapita 1,5 % menjadi 124,82 Kg/Kapita/Tahun untuk memenuhi target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2016 sebesar 85,8</p> <p>2) Konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan energy , karbohidrat sebesar 2.200 Kilokalori/hari dan protein sebesar 57,0 gr/kapita/hari</p> <p>3) System penanganan keamanan pangan segar 80 %</p> <p>4) Sertifikasi buah dan sayuran segar kelompok produsen di kab/kota sebanyak 20 kelompok sayuran/buah</p> <p>D. Penanganan Kerawanan Pangan</p> <p>1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan rawan pangan minimal 8,91 % pada tahun 2016</p> <p>2) Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan pada 75 desa</p> <p>E. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Ketahanan Pangan</p> <p>Efektivitas koordinasi Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan</p>
3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor	1) Peningkatan ekspor komoditi perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh), komoditi hortikultura (kentang, kubis, jeruk, pisang, nenas) rata-rata sebesar 5%
4) Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peternak, Pekebun dan Nelayan	<p>1) Nilai Tukar Petani 102,99</p> <p>2) NTP peternakan 108,30</p> <p>3) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB sebesar 20,20 %</p>
4) Terpeliharanya hutan dan penanganan lahan kritis	<p>1) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 15.000 hektar</p> <p>2) Berkurangnya Kerusakan Kawasan Hutan seluas 5.000 hektar menjadi 66.500 hektar</p>

6. Prioritas 6 : Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2016
1) Alokasi dana APBD untuk pengembangan penelitian terapan	1) Jumlah pelaksanaan sosialisasi / diseminasi TTG 3 kali 2) Jumlah pelaksanaan kajian TTG 9 kajian
2) Riset dan pengembangan teknologi spesifik mendukung pengembangan Kawasan Strategis, Kawasan Andalan dan Kawasan Ekonomi Khusus	3) Jumlah kajian teknologi spesifik 7 kajian 4) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Dalam/Luar Negeri dan Lembaga Riset lainnya

7. Prioritas 7: Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2016
3) Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1) 2.290.764 unit
2) Pertambahan jumlah KUKM yang mengakses sumber daya produktif	2) 266 KUKM
3) Pertambahan jumlah UMKM yang memanfaatkan sertifikasi HaKI, IRT atau Halal	3) 75 UKM
4) Pertumbuhan jumlah koperasi	4) 12.529 unit
5) Pertambahan jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	5) 150 unit
6) Pertambahan jumlah penyerapan tenaga kerja oleh koperasi	6) 680 orang
7) Pertambahan jumlah Volume Usaha Koperasi	8) Rp. 365.741.381.462
8) Peningkatan pengelolaan destinasi pemasaran dan SDM pariwisata	9) 3 Destinasi wisata utama (Danau Toba, Nias dan Berastagi) 10) 100 orang tenaga terlatih pariwisata
9) Peningkatan kunjungan wisatawan	11) Peningkatan jumlah kunjungan minimal 10%
10) Kontribusi sub sektor pariwisata	12) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 2,31 %
11) Meningkatnya ratio elektrifikasi	13) 92,72 %
12) Jumlah daya listrik	14) 3.300 MW

8. Prioritas 8 : Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2016
1) Penurunan Angka Pengangguran Terbuka	1) Persentase Pengangguran Terbuka menjadi 5,41%
2) Penurunan Persentase Penduduk Miskin	2) Persentase penduduk miskin menjadi 9,31%
3) Penciptaan kesempatan kerja baru	3) Optimalisasi rumah produktifitas daerah bagi sarjana yang belum bekerja untuk 100 sarjana belum bekerja
	4) Mendorong penciptaan pengusaha pemula 12.000 pengusaha.

9. **Prioritas 9 : Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah, yakni :**
Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2016
1) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Masterplan Percepatan Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)	1) Penurunan tingkat kemiskinan koridor sumatera yang menjadi quick wins pada lokasi yang akan di tentukan
2) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)	2) Mendorong Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif 3) Mendorong Terfasilitasinya pembangunan di KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun dan sekitarnya.
3) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Millenium (RAD-MDGs)	
a. Tujuan (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan	4) Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari menjadi 8,75 pada tahun 2016 dan menurunkan Indeks kedalaman kemiskinan 5) Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda, Rasio kesempatan

	<p>kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 80.18%</p> <p>6) Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015, untuk pencapaian target 2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi 14.05% • Prevalensi balita gizi buruk 21% • Prevalensi balita gizi kurang 11,90% <p>Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.400 kkal/kapita/hari 8.50 % • 2.000 kkal/kapita/hari 35.32%
<p>b. Tujuan (2) mewujudkan pendidikan dasar</p>	<p>7) Target 2A : Menjamin pada 2016 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar, dengan target 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/Paket A sebesar 100% • Proporsi murid kelas 1 yang berhasil mencapai kelas akhir (kelas 6) SD/ MI sebesar 100% • Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun sebesar 98,8%
<p>c. Tujuan (3) meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan</p>	<p>8) Target 3 A : menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi sebesar 100% - Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI/Paket A sebesar

	<p>100%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP sebesar 100% - Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA sebesar 100% - Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan Tinggi sebesar 100% - Rasio Melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun sebesar 100% - Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian sebesar 57% - Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD minimal sebesar 25%
d. Tujuan (4) Penurunan angka kematian anak	<p>9) Target 4 (a) Menurunnya dua pertiga angka kematian anak dibawah lima tahun pada tahun 2016.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kematian anak di bawah lima tahun • Tingkat kematian bayi • Proporsi anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi
e. Tujuan (5) Meningkatkan kesehatan ibu	<p>10)Menurunnya dua pertiga ratio kematian ibu pada tahun 2016.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratio kematian ibu • Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
f. Tujuan (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya	<p>11)Pada tahun 2016 turun separuhnya dan mulai menghentikan penyebaran HIV/AIDS.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi HIV di kalangan wanita hamil umur 15-24 tahun. • Tingkat prevalensi kontrasepsi • Jumlah anak yatim piatu korban HIV/AIDS

	<p>12) Tahun 2016 tidak ada lagi kejadian malaria dan penyakit lainnya.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat malaria • Proporsi penduduk di wilayah berisiko malaria yang menggunakan pencegahan malaria secara efektif serta melakukan langkah pengobatan. • Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat TBC • Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dan yang menjalankan pengobatan.
<p>g. Tujuan (7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup</p>	<p>Target 7A: memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang.</p> <p>Target 7B : menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2016</p> <p>Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2016, dengan target :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan • Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan <p>Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.</p>
<p>h. Tujuan (8) Rasio luas</p>	<p>Target 7C : menurunkan hingga</p>

<p>kawasan tertutup pepohonan erdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah emisi karbon dioksida (CO₂)e • Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) • Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman 	<p>setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2016, dengan target :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan • Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perKotaan dan perdesaan <p>Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.</p>
<p>4) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terpenuhinya kebutuhan energi minimal 2.200 Kkal/kap/hari 2) Terwujudnya penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang balita menjadi 18 % 3) Terwujudnya penurunan prevalensi ukuran tubuh pendek balita menjadi 34% 4) Terwujudnya penurunan daerah dengan kondisi rawan pangan menjadi 35 % 5) Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal 6) Terwujudnya peningkatan keragaman konsumsi pangan masyarakat 7) Terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat 8) Terwujudnya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 9) Terciptanya Kelembagaan Pangan dan Gizi yang kuat
<p>5) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)</p>	<p>10) Terlaksananya kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca,</p>
<p>6) Dukungan pencapaian tujuan</p>	<p>11) Terwujudnya penyempurnaan/</p>

<p>dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)</p>	<p>Perbaiki Sistem Pelayanan Publik</p> <p>12) Terwujudnya perbaikan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>13) Terwujudnya penataan/ Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan</p> <p>14) Terwujudnya penetapan dan pembinaan Program dan Wilayah Bebas Korupsi</p>
<p>7) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD - PUG)</p>	<p>15) Terbentuknya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG</p>
<p>8) Mendukung sasaran pembangunan lainnya</p>	<p>16) Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan</p> <p>17) Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pembangunan</p> <p>18) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</p>

5.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rumusan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang direncanakan untuk mendukung Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran-2.

5.3. PAGU INDIKATIF UNTUK TIAP SKPD

Dengan berpedoman kepada Arah Kebijakan Pendapatan Daerah dan Arah Kebijakan Belanja Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab-III bahwa total dana Pagu Indikatif untuk Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 9.536.707.039.506,-. Maka dengan mengacu kepada anggaran tahun berjalan (APBD TA.2015), dengan memperhatikan sasaran/target prioritas dan program/kegiatan pada tahun anggaran 2016, maka dapat diuraikan Pagu Indikatif untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Pagu Indikatif Menurut Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2016

NO.	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG	9.528.129.673.119	3.988.322.000.000	5.539.807.673.119
	URUSAN WAJIB			
1	Pendidikan	260.587.638.220	209.000.000.000	51.587.638.220
1	Dinas Pendidikan	260.587.638.220	209.000.000.000	51.587.638.220
2	Kesehatan	639.167.240.120	511.068.000.000	128.099.240.120
1	Dinas Kesehatan	497.832.536.800	395.215.000.000	102.617.536.800
2	Rumah Sakit Jiwa Daerah	48.933.703.320	23.452.000.000	25.481.703.320
3	Rumah Sakit Haji Medan	92.401.000.000	92.401.000.000	-
3	Pekerjaan Umum	1.934.790.629.010	1.798.615.000.000	136.175.629.010
1	Dinas Bina Marga	1.586.997.969.340	1.524.785.000.000	62.212.969.340
2	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	347.792.659.670	273.830.000.000	73.962.659.670
5	Penataan Ruang	238.311.002.250	200.000.000.000	38.311.002.250
1	Dinas Penataan Ruang & Permukiman	238.311.002.250	200.000.000.000	38.311.002.250
6	Perencanaan Pembangunan	62.087.958.670	49.794.000.000	12.293.958.670
1	Bappeda	62.087.958.670	49.794.000.000	12.293.958.670
7	Perhubungan	135.297.644.020	66.589.000.000	68.708.644.020
1	Dinas Perhubungan	135.297.644.020	66.589.000.000	68.708.644.020
8	Lingkungan Hidup	40.109.304.760	25.945.000.000	14.164.304.760
1	Badan Lingkungan Hidup	40.109.304.760	25.945.000.000	14.164.304.760
13	Sosial	99.274.254.940	49.516.000.000	49.758.254.940
1	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	99.274.254.940	49.516.000.000	49.758.254.940
14	Tenaga Kerja	50.511.219.270	24.786.000.000	25.725.219.270
1	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	50.511.219.270	24.786.000.000	25.725.219.270
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	60.064.392.670	49.326.000.000	10.738.392.670
1	Dinas Koperasi dan UKM	60.064.392.670	49.326.000.000	10.738.392.670
16	Penanaman Modal	45.017.275.490	33.127.000.000	11.890.275.490
1	Badan Penanaman Modal dan Promosi	22.925.940.790	17.320.000.000	5.605.940.790
2	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	22.091.334.700	15.807.000.000	6.284.334.700
17	Kebudayaan	62.257.843.390	43.006.000.000	19.251.843.390
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	62.257.843.390	43.006.000.000	19.251.843.390

NO.	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	2	3	4	5
18	Pemuda dan Olah Raga	46.743.754.730	36.979.000.000	9.764.754.730
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	46.743.754.730	36.979.000.000	9.764.754.730
19	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	79.753.456.370	58.328.000.000	21.425.456.370
1	Badan Kesbang Linmas	27.585.633.310	19.099.000.000	8.486.633.310
2	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	21.767.639.020	14.500.000.000	7.267.639.020
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.400.184.040	24.729.000.000	5.671.184.040
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	5.535.186.351.489	647.952.000.000	4.887.234.351.489
1	DPRD	37.603.135.000	-	37.603.135.000
2	KDH & WKDH	8.795.165.100	-	8.795.165.100
3	Sekretariat Daerah	4.716.311.356.320	170.297.000.000	4.546.014.356.320
	<i>Biro Umum</i>	41.814.000.000	41.814.000.000	-
	<i>Biro Perlengkapan</i>	40.626.000.000	40.626.000.000	-
	<i>Biro Pemerintahan</i>	25.289.000.000	25.289.000.000	-
	<i>Biro Keuangan</i>	24.370.000.000	24.370.000.000	-
	<i>Biro Perekonomian</i>	4.803.000.000	4.803.000.000	-
	<i>Biro Binsos</i>	11.012.000.000	11.012.000.000	-
	<i>Biro Ortala</i>	4.360.000.000	4.360.000.000	-
	<i>Biro Otda</i>	4.922.000.000	4.922.000.000	-
	<i>Biro Pemberdayaan Perempuan</i>	4.764.000.000	4.764.000.000	-
	<i>Biro Pembangunan</i>	4.272.000.000	4.272.000.000	-
	<i>Biro Hukum</i>	4.066.000.000	4.066.000.000	-
	<i>PPKD</i>	4.459.541.310.083	-	4.459.541.310.083
4	Sekretariat DPRD	119.412.393.270	107.353.000.000	12.059.393.270
5	Badan Litbang	17.830.134.280	11.989.000.000	5.841.134.280
6	Inspektorat Daerah	37.137.037.410	21.760.000.000	15.377.037.410
7	Kantor Perwakilan Jakarta	20.843.344.020	15.147.000.000	5.696.344.020
8	Dinas Pendapatan	512.339.725.229	278.674.000.000	233.665.725.229
9	Badan Pendidikan dan Pelatihan	29.888.306.060	19.050.000.000	10.838.306.060
10	Badan Kepegawaian Daerah	27.613.066.960	18.733.000.000	8.880.066.960
11	Sekretariat KORPRI	7.412.687.840	4.949.000.000	2.463.687.840
12	Badan Penanggulangan Narkotika Provsu	-	-	-
21	Ketahanan Pangan	79.185.875.400	60.619.000.000	18.566.875.400
1	Badan Ketahanan Pangan	37.659.336.750	27.566.000.000	10.093.336.750
2	Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian	41.526.538.650	33.053.000.000	8.473.538.650
22	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	43.298.948.660	35.098.000.000	8.200.948.660
1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	43.298.948.660	35.098.000.000	8.200.948.660

NO.	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	2	3	4	5
25	Komunikasi dan Informatika	56.918.549.900	40.288.000.000	16.630.549.900
1	Dinas Informasi dan Komunikasi	43.719.458.390	29.449.000.000	14.270.458.390
3	Komisi Penyiaran & Informasi Daerah	13.199.091.510	10.839.000.000	2.360.091.510
26	Perpustakaan	63.566.333.760	52.286.000.000	11.280.333.760
1	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	63.566.333.760	52.286.000.000	11.280.333.760
	URUSAN PILIHAN	549.053.371.750	361.072.000.000	187.981.371.750
1	Pertanian	286.209.060.980	194.598.000.000	91.611.060.980
1	Dinas Pertanian	175.633.365.640	109.686.000.000	65.947.365.640
2	Dinas Perkebunan	58.659.720.890	43.128.000.000	15.531.720.890
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	51.915.974.450	41.784.000.000	10.131.974.450
2	Kehutanan	61.334.538.150	20.881.000.000	40.453.538.150
1	Dinas Kehutanan	61.334.538.150	20.881.000.000	40.453.538.150
3	Energi dan Sumberdaya Mineral	52.764.580.860	42.849.000.000	9.915.580.860
1	Dinas Pertambangan dan Energi	52.764.580.860	42.849.000.000	9.915.580.860
5	Kelautan dan Perikanan	97.085.558.340	81.190.000.000	15.895.558.340
1	Dinas Perikanan dan Kelautan	97.085.558.340	81.190.000.000	15.895.558.340
7	Industri	51.659.633.420	21.554.000.000	30.105.633.420
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	51.659.633.420	21.554.000.000	30.105.633.420

Rumusan Program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pencapaian target kinerja pada masing-masing program Prioritas Pembangunan berdasarkan fungsi dapat dilihat pada tabel Lampiran 3.

5.4. KAJIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). RKPD Tahun 2016 merupakan acuan bagi SKPD, dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Utara 2016 sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Tahun 2016 menjadi acuan dan pedoman bagi SKPD, dan Lembaga Pemerintah Daerah Non-Struktural dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.
3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing SKPD perlu menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan pagu sementara Tahun 2016 sebagai berikut:
 - a) Uraian penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tertuang dalam Bab-III, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Perda;
 - b) Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2016, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, maupun tugas yang berkaitan dengan pencapaian prioritas/program/kegiatan pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
4. Bagi Pemerintah Kabupaten/kota, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2016 sebagai berikut:
 - a) Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2016, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati/Walikota ;
 - b) Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2016, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

- c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat;
 - d) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Rancangan RKPD Tahun 2016, untuk memastikan keselarasan pembangunan di Kabupaten/Kota dengan prioritas, sasaran, target dan program/kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Provisi Sumatera Utara, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, dengan mendapatkan masukan dari SKPD Provinsi Sumatera Utara, dalam merumuskan matriks rencana program/kegiatan pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana program/kegiatan menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2016;
5. Pelaksanaan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender.
 6. Alokasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Kepada Kabupaten/Kota diperuntukkan untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan wajib menyesuaikan dengan Prioritas Pembangunan dan Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang pada Bab-IV dan Bab-V RKPD Tahun 2016.
 7. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;

7. Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
8. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 bulan (triwulan) kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB - VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016, akan sangat menentukan jalannya Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya dukungan dan komitmen dari seluruh stakeholder dan pemerintah kabupaten/kota. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional umumnya dan daerah khususnya, untuk itu diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat mempedomani target-target dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan pada lampiran dari RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ini.

Dengan semangat dan memohon ridho dan kekuatan dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita wujudkan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka **"KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)"**.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

H. GATOT PUJO NUGROHO, ST, M.Si